



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS
LINGKUNGAN STUDI KASUS : MASYARAKAT PESISIR
DI TANJUNG GUNDAP, KOTA BATAM**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

**CHAIRINA HANUM
0706305936**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
JAKARTA
JANUARI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

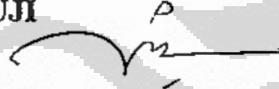
Nama : Chairina Hanum
NPM : 0706305936
Tanda Tangan : 
Tanggal : 7 Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

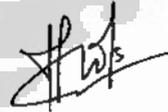
Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Chairina Hanum
NPM : 0706305936
Program Studi : Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan. Studi Kasus: Masyarakat Pesisir Di Tanjung Gundap, Kota Batam.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Vivi Yulaswati ()

Penguji : Darlis Rabai, S.E., M.A ()

Penguji : Dr. Andi Fahmi Lubis ()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Januari 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi di Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

- (1) DR. Vivi Yulaswati, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini;
- (2) PT. Medco Power Indonesia, yang telah memberikan dana beasiswa untuk menempuh studi di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan juga dana penelitian di Tanjung Gundap Kota Batam;
- (3) Yuhanis Moekawi, M. Nur Siregar, DR. Chairil N. Siregar M.si dan Riana, M.M, Among, Atok, Papa dan Mama yang senantiasa memberikan dukungan moral dan semangat dalam penulisan Tesis ini;
- (4) Mbak Ditta Triwidianti (Corporate Communication, PT. Medco Power Indonesia), Bapak Wahidin (Safety, Health and Environment Coordinator, PT. Mitra Energy Batam), Bapak Freddy Manurung (HRD-GS Head, PT. Mitra Energy Batam), yang telah banyak memberikan bantuan dan memfasilitasi saya selama melakukan penelitian di Tanjung Gundap;
- (5) Ibu Didit B. Sulistyowati, M.A., Bapak Mandala Manurung S.E.,M.E., Bapak Khoirunnurofik, selaku dosen yang telah memberikan banyak masukan dalam pengerjaan tesis ini;

- (6) Drs. Tukijan, selaku Kepala Lurah Tembesi Kota Batam yang telah memberikan banyak bantuan, masukan dan fasilitas dari awal penelitian hingga selesai;
- (7) Bapak Saniman (Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Batam), Bapak Desman Wardi (Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kelautan BAPPEDA Kota Batam), Bapak Alexander (Kepala Bidang Program Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam), Bapak M. Sahir (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Batam), Bapak Dedy Suryadi (Dinas PMP-KUKM Kota Batam), selaku expert untuk kuesioner AHP. Terima kasih juga untuk informasi dan saran yang telah diberikan;
- (8) Masyarakat Tanjung Gundap, Kota Batam selaku objek penelitian. Khususnya Pak Rusli, Mak, dan Ibu Peri untuk kebersamaan, bantuan informasi dan data mengenai Tanjung Gundap yang telah diberikan selama penelitian dilakukan;
- (9) Pihak Tata Usaha MPKP-FEUI, Mas deddy, Mas Harris Mas Triman, Mbak siti, dkk.
- (10) Uda Syamsul Siregar, Inang Uda dan pihak Swiss-Belhotel Batam yang telah memberikan banyak pertolongan selama melakukan penelitian di Kota Batam;
- (11) Among dan Ajong Jend (Purn), Suhardjo & Kel, Incik Yusnalaini Y. Moekawi M.sc, Ina Yunita Elida Tanwir S.H, Oom Prof. DR., Drg Achmad Syawqie Moekawi, yang telah memberikan dukungan moral selama pengerjaan Tesis;
- (12) Mas Anto dan Mas Ryan, selaku tukang ojeg andalan yang telah berbaik hati mengantarkan ke Tanjung Gundap dan daerah lain selama berminggu – minggu;
- (13) Rekan – Rekan di PT. Kompas Gramedia Majalah Divisi Majalah Wanita, khususnya Desk Fashion Majalah Kawanku, Mas Alvin Dwipayana, Angel Sinaga, Aulissa Sabrina dan Farhan Alkhaff yang telah

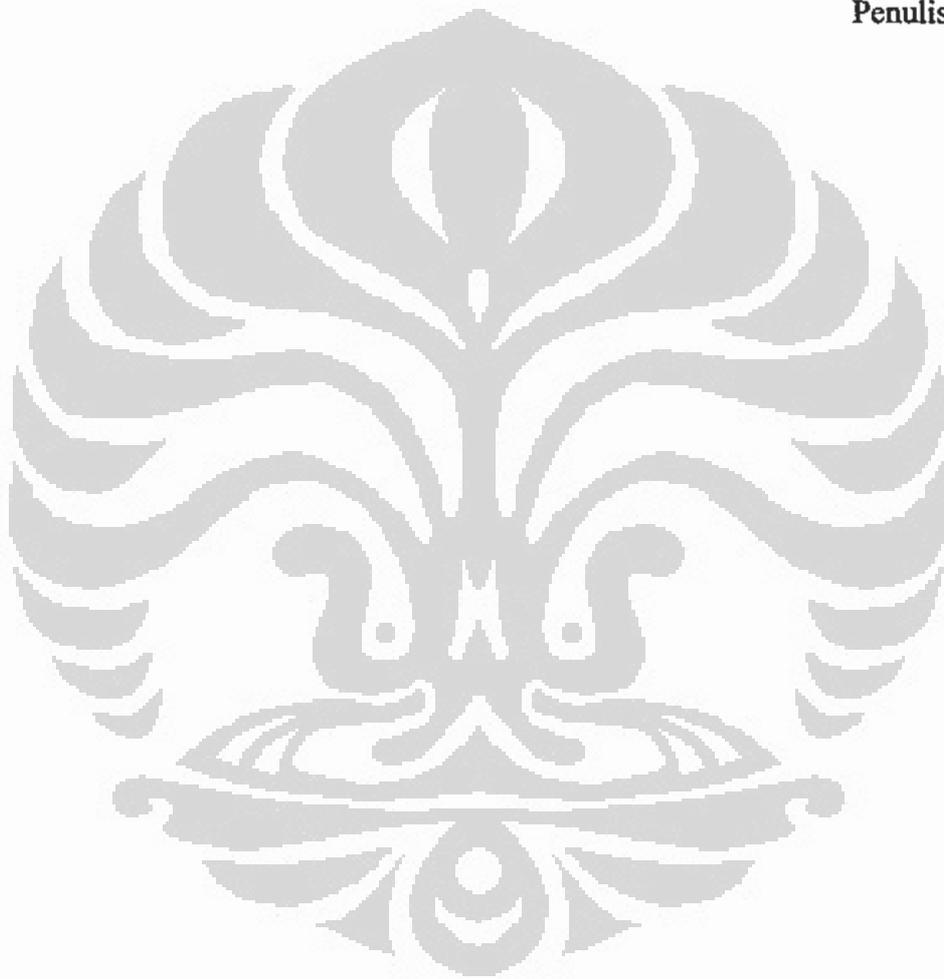
banyak memberikan semangat dan kegembiraan selama masa – masa terakhir pengerjaan tesis. Senang bisa bergabung;

- (14) Rekan – rekan DEMISKINERS XVIII khususnya Pak Ginanjar Syamsuar, Pak Hendratno Tuhiman, Pak Rama Chandra, Restu Untari, Lidy Nafatilona, Kak Lydia Sitanggang, Mbak Ika Permanasari, Afrizal Hutasuhut yang telah banyak memberikan dukungan moral, data, literatur dan diskusi – diskusi menarik selama perkuliahan dan pengerjaan Tesis;
- (15) Rekan – Rekan MPKP XVIII Sore yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi teman dan sahabat selama ini;
- (16) Romy Febriansyah yang telah membantu membuat gambar visual yang dibutuhkan untuk Tesis, Dian Safitri Irawan untuk satu kalimat mendadaknyanya dan Arya Krishna yang telah menjadi teman untuk *brainstorming* ide;
- (17) Maman geng yang selalu membuat ceria. *The ladies* untuk kebersamaan dan kebahagiaan yang selalu diberikan. FE UNPAR 2003, untuk ke-hura-hura-an yang dibuat. Tim *Heydown*, Jamaah Plurkadiah, *Everybody Loves Irene Family* yang selalu memberikan semangat keceriaan dan ke-hedon-an. Terima Kasih *Guys!*;
- (18) Bapak Ir. H Tri Suprijanto S.H., M.si, Ibu Dra. Ninuk Lustyantie, Msc Nindy Swaratama S.T., Dipta Yustitama, Sendi Rafitama, yang telah banyak memberikan dukungan moral selama kuliah dan pengerjaan Tesis;
- (19) Aulia Naratama S.Kom.,M.M, Untuk kebersamaan, dukungan, inspirasi, dan kebahagiaan yang telah diberikan, *that's why I call you "Partner in everything", Big Hug!*;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 7 Januari 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairina Hanum
NPM : 0706305936
Kekhususan : Manajemen Sektor Publik Penanggulangan Kemiskinan
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan. Studi Kasus: Masyarakat Pesisir di Tanjung Gundap, Kota Batam. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 7 Januari 2010

Yang Menyatakan



(Chairina Hanum)

ABSTRAK

Nama : Chairina Hanum
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan. Studi Kasus Masyarakat Pesisir Tanjung Gundap, Kota Batam

Tesis ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kasus kemiskinan masyarakat pesisir di Tanjung Gundap, Kota Batam. Terdapat beberapa permasalahan utama yang menyebabkan kemiskinan di daerah ini antara lain, turunnya kualitas wilayah perairan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat akibat pencemaran dari pabrik galangan kapal dan limbah rumah tangga, kurangnya modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat seperti kurangnya rasa percaya antar anggota masyarakat, dan beberapa perilaku dan pola pikir masyarakat yang sudah membudaya, tidak adanya mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat, dan kurangnya sarana dan prasarana umum seperti listrik dan jalan.

Tujuan dari Tesis ini tidak hanya mengkaji permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh Tanjung Gundap tetapi juga merumuskan rencana aksi pemberdayaan masyarakat pesisir yang akan digunakan sebagai rekomendasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari PT. Medco Power Indonesia. Tesis ini menggunakan metode kualitatif berupa *Participatory Rural Appraisal (PRA)* yang melibatkan masyarakat dan metode kuantitatif berupa *Analytical Hierarchy Process (AHP)* yang melibatkan 7 (Tujuh) orang *Expert* yang merupakan perwakilan dari *Stakeholders*.

Berdasarkan analisa secara kualitatif dan kuantitatif, dirumuskan bahwa program pemberdayaan yang direkomendasikan antara lain pembangunan sarana dan prasarana berupa listrik, alat pengolahan air, jalan umum dan pemberian modal usaha produktif berupa modal uang bagi wirausaha yang bergerak di bidang lingkungan, bimbingan dan pelatihan wirausaha, pendirian koperasi jual beli dan simpan pinjam dan membuka jalur distribusi dan pemasaran bagi produk – produk yang dihasilkan oleh masyarakat.

Kata Kunci:

Kemiskinan, Masyarakat Pesisir, Kerusakan Lingkungan, Modal Sosial, Pemberdayaan masyarakat,

ABSTRACT

Name : Chairina Hanum
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : Coastal Community Empowerment Based on Environment Case Study: Coastal Community in Tanjung Gundap, Batam City.

The background of this Thesis was coastal community poverty which happened in Tanjung Gundap, Batam City. There are several main problems which cause the poverty in this region such as, quality degradation on water area (which become the main work field for them) because of pollution from shipyard and households near the area, lack of community's social capital such as, lack of trust between the community, community's behavior and way of thinking that has become a culture, no alternative job for the community and lack of public facilities such as electricity and public road.

The purpose of this Thesis is not only to analyze the problems and resources potency in Tanjung Gundap but also formulating action plan for coastal community empowerment which will be use as recommendation for Corporate Social Responsibility (CSR) Program from PT. Medco Power Indonesia. This Thesis using qualitative method, Participatory Rural Appraisal (PRA) which involved the community dan quantitative method, Analytical Hierarchy Process (AHP), which involved 7 (seven) Expert whom are representative from stakeholders.

Based on qualitative and quantitative analysis, recommended empowerment program that could be given are build the public facilities such as electricity, water treatment machine, public roads and productive entrepreneur capital such as cash money for environmental entrepreneur, entrepreneurship training, establish a sell - buy corporation and save - loan corporation, open distribution part for community's product

Key Words:

Poverty, Coastal Community, Environmental Degradation, Social Capital, Community Empowerment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	8
1.5. Hipotesa	8
1.6. Kerangka Pemikiran	8
1.7. Sistematika Penulisan	9
2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Definisi Kemiskinan	11
2.2. Lingkungan dan Degradasi Lingkungan	19
2.3. Kemiskinan dan Degradasi Lingkungan	27
2.4. Kemiskinan Masyarakat Pesisir	35
2.5. Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan	42
2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi	51
2.7. Penelitian Sebelumnya	62
1. Penelitian Hossain dan Shamsuddoha	62
2. Penelitian Aluko	63
3. Penelitian Nasree, Hossain, Kundu	65
4. Penelitian Wiber, Charles, Kearry dan Berkes	66

3. GAMBARAN UMUM DAN METODOLOGI PENELITIAN	68
3.1. Gambaran Umum.....	68
3.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah	68
3.1.2. Kondisi Demografi Tanjung Gundap	70
3.1.3. Mata Pencaharian Masyarakat Tanjung Gundap	71
3.1.4. Sarana dan Prasarana	72
3.2. Metode Penelitian	76
3.2.1. <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i>	78
3.2.1.1. Metode Kelompok	90
A. Focus Discussion Group (FGD)	91
B. Brainstorming	92
3.2.1.2. Metode Survey dan Wawancara	94
A. Wawancara Semi Terstruktur	94
B. Survey Rumah Tangga	96
3.2.1.3. Matriks	97
3.2.1.4. Visualisasi dan Diagram Hubungan	98
A. Pohon Masalah	98
B. Diagram Venn	98
3.2.1.5. Metode Tempo	100
A. Kalender Musim	100
B. Aktivitas Harian	102
3.2.1.6. Metode Ruang	102
A. Pemetaan Partisipatif	102
B. Transek	104
3.3. <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	106
3.3.1. <i>Forward dan Backward Process</i>	108
3.3.2. Aksioma AHP	112
3.3.3. Tahapan Pembentukan Model AHP	113
3.3.4. Kelebihan dan Kelemahan Metode AHP	118
A. Kelebihan Metode AHP	118
B. Kelemahan Metode AHP	119
3.3.5. Definisi Masalah	120
3.3.6. Penyusunan Elemen Hirarki	123
3.3.7. Penjelasan Definisi Elemen dan Hirarki	125

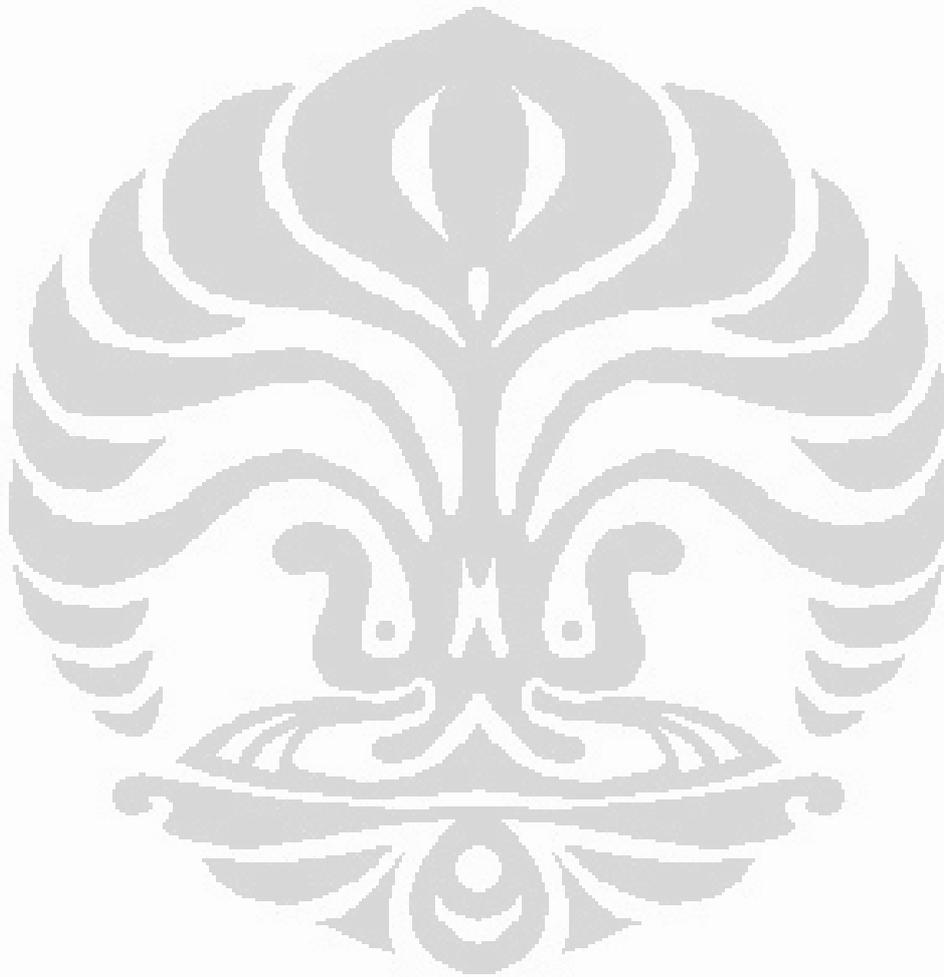
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	131
4.1. Analisa Kualitatif	131
4.1.1. Dinamika Kehidupan Sehari – hari	131
Status Desa	131
Struktur Pemerintahan	132
Status Kepemilikan Tanah	133
Pengelolaan Sumber Daya Alam	134
Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam	137
Perekonomian Keluarga dan Peranan Perempuan di Dalamnya	140
Sarana dan Prasarana	140
Sarana Pendidikan	143
Sarana Peribadatan	146
Sarana Kesehatan	146
Sosial Politik	148
Budaya dan Agama	152
Dampak Modernisasi	154
4.1.2. Sejarah Desa	155
4.1.3. Diagram Alur Masyarakat	157
4.1.4. Diagram Venn Kelembagaan	158
4.1.5. Kalender Musim	161
4.2. Analisa SWOT	162
4.2.1. Akar Masalah	164
4.2.2. Analisa SWOT	164
Strength	165
Weakness	167
Opportunity	169
Threat	170
4.2.3. Kondisi Eksisting dan Potensi Masalah Kedepan	172
4.2.4. Penentuan Prioritas Masalah dan Alternatif Solusi Atas Masalah	174
4.3. Analisa Kuantitatif	181
4.3.1. Hasil dan Analisis Akhir Analisis Hirarki Proses	182
4.3.2. Analisis AHP Perlevel Menurut Responden	190
5. SKENARIO ACTION PLAN.....	195
5.1. Bentuk Kegiatan Skenario Action Plan.....	197
A. Pembangunan Sarana dan Prasarana	198
B. Pemberian Modal Usaha Produktif	202
5.2. Tahapan Pelaksanaan Program.....	204
5.3. Pengelolaan Program.....	210
5.4. Tindak Lanjut Program	211

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Rumusan Masalah	6
Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran	9
Gambar 2.1. Hubungan Antara Kemiskinan Dengan Kerusakan Lingkunga ...	24
Gambar 2.2. Hubungan Antara Kemiskinan dan Lingkungan	28
Gambar 2.3. Kemiskinan dan Degradasi Lingkungan	33
Gambar 3.1. Peta Tanjung Gundap	70
Gambar 3.2. Sistematika Penggunaan <i>PRA</i> dan <i>AHP</i> dan Hubungannya Terhadap Tujuan	79
Gambar 3.3. Daur Program <i>PRA</i>	83
Gambar 3.4. <i>Forward Process</i>	109
Gambar 3.5. <i>Backward Process</i>	110
Gambar 3.6. Hubungan Antara <i>Backward</i> dan <i>Forwad Process</i>	111
Gambar 3.7. Alur Tahapan <i>AHP</i>	118
Gambar 3.8. Hirarki Analisa Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan Di Tanjung Gundap .	124
Gambar 4.1. Hasil Perhitungan Persepsi Responden Dengan Analisa <i>AHP</i>	182
Gambar 5.1. Skema Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasi Lingkungan ..	198

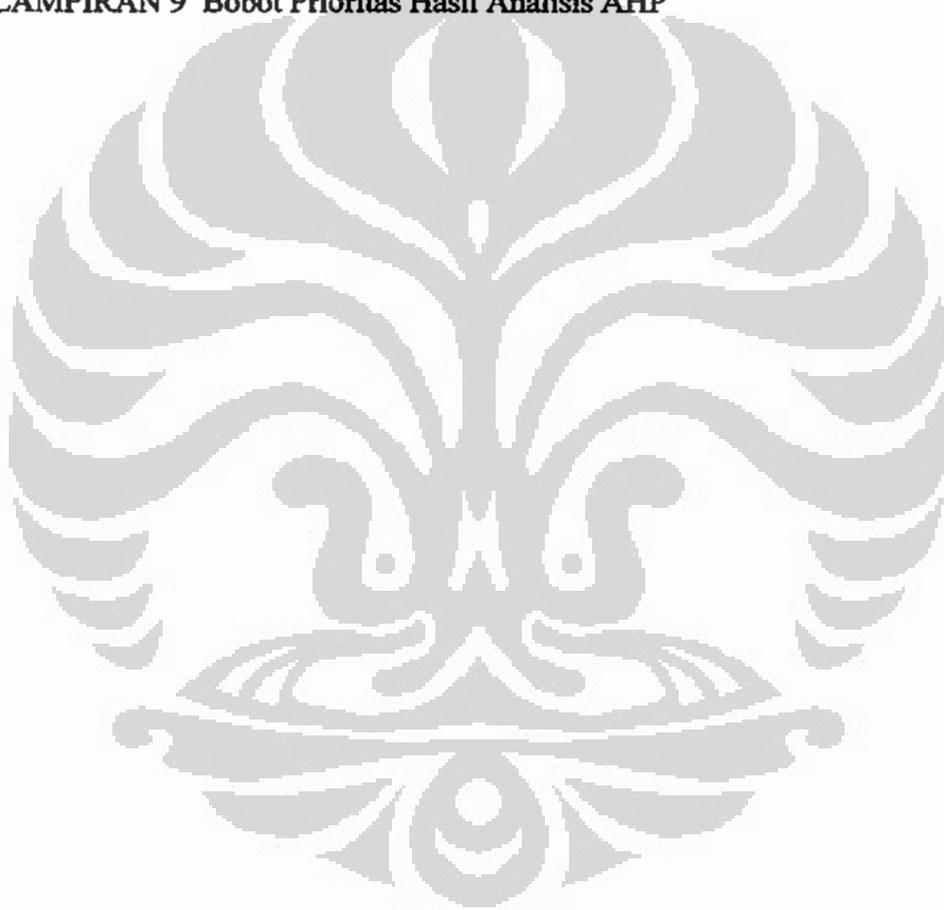
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kategori Kemiskinan Kronis dan Sementara Berdasarkan Lokasi ..	17
Tabel 4.2. Tabel Analisis Global Per Elemen (Kriteria)	190
Tabel 4.3. Tabel Analisis Global Per Elemen (Aktor)	191
Tabel 4.4. Tabel Analisis Global Per Elemen (Kegiatan)	192
Tabel 4.5. Tabel Analisis Global Per Elemen (Hasil)	193



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Kuesioner AHP
- LAMPIRAN 2 Kuesioner Survey Kemiskinan Keluarga dan Kerusakan Lingkungan
- LAMPIRAN 3 Pedoman Wawancara Umum
- LAMPIRAN 4 Hasil *Analytical Hierarchy Process*
- LAMPIRAN 5 Diagram Alur Masyarakat Tanjung Gundap
- LAMPIRAN 6 Diagram Venn Kelembagaan
- LAMPIRAN 7 Diagram Tulang Ikan
- LAMPIRAN 8 Peta Wilayah Tanjung Gundap
- LAMPIRAN 9 Bobot Prioritas Hasil Analisis AHP



BAB 1 PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur oleh Pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

“ Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat ” .

Kekayaan alam tersebut mengacu kepada semua sumber daya alam yang terkandung di Indonesia, tidak terkecuali sumber daya yang dihasilkan oleh laut. Indonesia terkenal sebagai negara maritim. Wilayahnya yang berupa kepulauan, membuat sebagian besar daerah di Indonesia dikelilingi oleh lautan.

Hampir dua pertiga wilayah Indonesia berupa perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, dan teluk (Basri, 2007, p. 2). Menurut Dahuri (1993), sampai saat ini luas laut Indonesia adalah 5.8 juta kilometer persegi termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Panjang garis pantai yang dimiliki oleh Indonesia adalah 81.000 kilometer dan merupakan ke dua terpanjang di dunia. Jumlah pulau, baik besar dan kecil sebanyak 17.504 buah (Basri, 2007, p. 5). Dengan luas tersebut potensi sumber daya perikanan mencapai 6.7 ton per tahun.

Tidak hanya itu saja, laut Indonesia masih memiliki sumber daya lain seperti Minyak dan Gas bumi yang setidaknya ada di 60 cekungan.¹ Menurut Himti (2008), laut Indonesia juga kaya akan keanekaragaman hayati bawah laut dan memiliki pantai yang sangat indah yang cocok untuk objek wisata dan diperkirakan sekitar 28.000 spesies Flora, 350 spesies Fauna dan 110.000 spesies Mikroba hidup didalamnya. Selain itu juga terdapat 600 spesies Terumbu karang dan 40 Genera. Laut Indonesia juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.

Menurut Ahmad (1996), Dahuri et. Al, (1998), Sugandi (1996), sayangnya, hasil tangkapan, pendapatan yang besar dan kekayaan laut Indonesia yang sangat potensial untuk diolah ternyata tidak membuat kondisi kehidupan para nelayan yang merupakan bagian dari masyarakat pesisir menjadi lebih baik.

¹ <http://sitohanguntuktapanuli.wordpress.com/2008/09/06/betulkah-indonesia-negara-kepulauan/>

Nikijuluw (2001) mendefinisikan masyarakat pesisir sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Definisi populasi masyarakat pesisir yang luas ini tidak seluruhnya diambil tetapi hanya difokuskan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai pulau – pulau besar dan kecil. Selanjutnya menurut Ahmad (1996), Dahuri et. Al, (1998), Sugandi (1996), sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah pesisir yang sangat luas yang dihuni sekitar dua juta nelayan dan petambak, akan tetapi diperkirakan 60 persen dari nelayan di desa rata – rata pendapatannya masih dibawah kebutuhan minimalnya (Basri, 2007, p. 35).

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (2007), masyarakat pesisir yang mendiami 8090 desa diperkirakan berjumlah 16,42 juta jiwa. Sedangkan menurut Ditjen P3K (2004), komunitas ini relatif tertinggal, yang ditandai dengan *Poverty Headcount Index (PHI)* masih 0,28. dengan kata lain, masih terdapat kira – kira 28% dari populasi tergolong miskin. Sampai tahun 2008, jumlah masyarakat pesisir yang hidup dibawah garis kemiskinan mencapai 32% (Basri, 2007, p. 35).

Selanjutnya menurut Basri (2007), kemiskinan masyarakat pesisir bersifat multidimensi dan disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah.

Di beberapa daerah, hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan yang berujung pada menurunnya pendapatan mereka. Salah satu penyebab hal ini adalah adanya pencemaran di wilayah perairan, yang paling terkena dampaknya adalah wilayah pesisir. Pencemaran tersebut berasal dari kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, kegiatan pertanian, buangan kapal pengangkut minyak, dan kegiatan pertambangan lepas pantai. Hal ini menyebabkan berkurangnya daya

dukung sumber daya laut. Kualitas dan kuantitas ikan menjadi berkurang. Meskipun termasuk kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, jika pencemaran ini terus terjadi, akan banyak ikan yang mati dan lama – lama akan punah, begitu juga dengan sumber daya laut lainnya. Hal ini tentu saja akan memperburuk kondisi perekonomian masyarakat pesisir yang bergantung hidupnya dari hasil sumber daya laut.

Melihat hal tersebut, maka perlu dibuat sebuah program pemberdayaan masyarakat pesisir yang menjadikan pengelolaan lingkungan sebagai basisnya. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Departemen Perikanan dan Kelautan (Ditjen KP3K DKP), pada tahun 2006 membuat Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Program ini sekarang berintegrasi dengan program – program pemberdayaan DKP lainnya ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan (PNPM MANDIRI-KP) pada tahun 2009. Program PNPM Mandiri KP ini akan dilaksanakan pada 120 kota.

Tujuan utama program ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai komponen kegiatan yaitu perencanaan pembangunan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis desa; pembangunan infrastruktur desa dan lingkungan; penguatan kapasitas sumberdaya manusia aparat dan masyarakat serta kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Sayangnya, Tanjung Gundap sebagai salah satu wilayah pesisir dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi belum memperoleh PNPM Mandiri KP hingga saat ini.

Tanjung Gundap merupakan salah satu wilayah pesisir di Kota Batam. Kasus kemiskinan terjadi di wilayah ini. Kemiskinan di wilayah ini terjadi karena banyak hal, tidak hanya karena sulitnya akses informasi, keterbatasan sarana dan prasarana dan minimnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga masalah kerusakan lingkungan dan masih kurangnya rasa percaya yang ada di masyarakat. Kasus pencemaran akibat pembuangan limbah oli kapal dan limbah rumah tangga yang terjadi selama lebih dari satu dekade terakhir membuat hasil tangkapan masyarakat Tanjung Gundap yang merupakan Nelayan Pantai berkurang sebesar 50% sampai 60% setiap tahunnya.

Sementara itu, berbagai kasus pencemaran terus terjadi di Tanjung Gundap dan telah mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat Tanjung Gundap. Berkurangnya hasil tangkapan berarti semakin berkurang pula pendapatan yang mereka peroleh. Terlebih lagi pekerjaan sampingan berupa pembuatan arang dilarang oleh Pemerintah Kota Batam. Di sisi lain, tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang rendah menyulitkan mereka untuk mencari mata pencaharian lain. Akibatnya, kondisi kemiskinan masyarakat pesisir di wilayah Tanjung Gundap menjadi semakin buruk. Dari 112 Kepala Keluarga, 108 Kepala Keluarga menerima BLT.

Meskipun hampir seluruh Kepala Keluarga menerima BLT, dana yang diberikan belum dimanfaatkan dengan baik. Masyarakat menggunakan dana tersebut untuk memanggil hiburan dangdut, membayar hutang dan membeli makanan, bukan disimpan untuk dijadikan modal usaha.

Beberapa program yang sifatnya memberikan modal usaha kurang membawa manfaat yang baik bagi masyarakat di wilayah ini karena sifat pemberian modal yang diberikan kepada kelompok, padahal di satu sisi masyarakat Tanjung Gundap tidak dapat diterima oleh masyarakat di wilayah ini, karena sulit bagi mereka untuk menumbuhkan *trust* (kepercayaan) di antara anggota kelompok. Sulitnya membentuk kelompok di antara warga Tanjung Gundap antara lain disebabkan oleh sifat masyarakat Melayu yang sulit untuk mempercayai orang lain. Selain itu juga mereka sulit untuk dipimpin karena sifat egois dan individualis mereka yang masih tinggi

Melihat kondisi tersebut, maka dibutuhkan program pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir yang sesuai dengan karakteristik masyarakat pesisir di Tanjung Gundap.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Latar Belakang di atas, diperoleh empat buah inti permasalahan dari kemiskinan yang terjadi di Tanjung Gundap.

Pertama adalah turunnya kualitas lingkungan perairan akibat pencemaran limbah oli kapal dan limbah rumah tangga. Akibatnya banyak wilayah tangkapan

yang tertutupi limbah dan ikan yang mati atau menurun kualitasnya, sehingga wilayah tangkapan dan hasil tangkapan para nelayan menjadi berkurang. Selain itu juga, jumlah hutan bakau di wilayah ini sudah banyak berkurang, akibat penebangan dan reklamasi pantai. Padahal di dalam hutan bakau ini banyak ditemukan ikan, kepiting dan kerang. Hal ini tentu saja berdampak kepada penghasilan mereka, karena sumber pendapatan utama mereka berasal dari kedua sumber daya alam tersebut.

Kedua adalah tidak adanya mata pencaharian alternatif masyarakat. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan masyarakat yang membuat mereka hanya menggantungkan hidupnya dari hasil melaut dan membuat arang. Dengan adanya permasalahan pencemaran dan dilarangnya Dapur Arang membuat mereka harus mencari sumber mata pencaharian lain.

Sedangkan yang ketiga adalah, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat. tidak adanya jalan yang menyulitkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Selain itu juga masyarakat belum merasakan fasilitas listrik yang memadai. Selama ini mereka hanya bergantung pada genset yang merupakan bantuan dari pemerintah. Sarana pendidikan dan kesehatan juga masih sangat terbatas baik dari fasilitas maupun tenaga ahli.

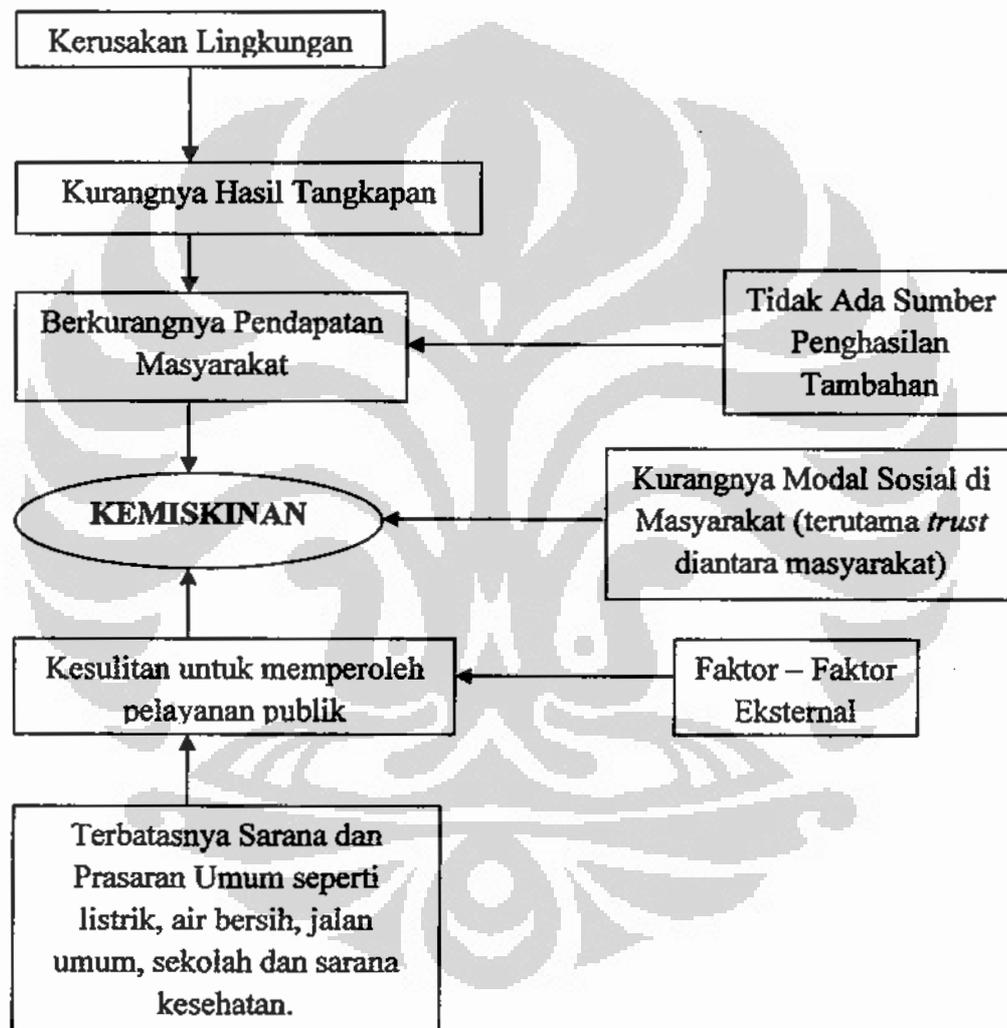
Keempat, kurangnya modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini menyangkut kebiasaan, sifat dan pola pikir yang telah membudaya. Terdapat kecenderungan kurangnya rasa percaya (*trust*) diantara masyarakat. Akibatnya mereka sulit untuk bekerja secara berkelompok. Padahal kebanyakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah diberikan kepada kelompok bukan perorangan.

Selain itu juga mereka cukup sulit untuk diatur oleh seorang pemimpin. Akibatnya ketika mereka harus bekerja di perusahaan mereka mengalami kesulitan dan memilih untuk keluar dari pekerjaannya dan kembali menjadi nelayan. Tingkat keegoisan masyarakat juga cukup tinggi. Jika tergabung dalam kelompok – kelompok, masing – masing kelompok menginginkan keinginan kelompoknyalah yang diperhatikan. Selain itu juga dalam melihat bantuan yang diberikan, mereka cenderung "*money minded*", mereka lebih memilih bantuan

berupa uang yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ketimbang sarana dan prasarana yang bersifat jangka panjang.

Rumusan masalah tersebut dapat dilihat dari Gambar 1. 1 dibawah ini:

Gambar 1. 1.
Rumusan Masalah



Dengan melihat permasalahan tersebut di atas, dirasa perlu disusun strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat memecahkan setidaknya keempat inti permasalahan tersebut. Strategi pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk masyarakat pesisir ini diharapkan dapat menjadi acuan berbagai program pemberdayaan yang akan dilakukan di Tanjung Gundap agar kualitas kehidupan

masyarakat di Tanjung Gundap menjadi lebih baik dan lingkungan alamnya tetap lestari.

1. 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. 3. 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Mengkaji akibat turunya kualitas lingkungan terhadap tingkat kemiskinan di Tanjung Gundap
- b. Mengkaji potensi masyarakat yang ada di masyarakat Tanjung Gundap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Mengidentifikasi alternatif – alternatif kegiatan ekonomi yang produktif dan berwawasan lingkungan bagi masyarakat pesisir di Tanjung Gundap
- d. Menyusun rencana skenario aksi pemberdayaan masyarakat pesisir yang tepat sebagai rekomendasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi pihak sponsor yaitu PT. Medco Power Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan masyarakat pesisir di Tanjung Gundap
- e. Mengkaji faktor – faktor pendukung dan penghambat kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir di Tanjung Gundap

1. 3. 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan rekomendasi bagi program *CSR* PT. Medco Power Indonesia. Selain itu juga penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Batam, pihak swasta yang terlibat dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis lingkungan khususnya di Tanjung Gundap.
- b. Sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis pada waktu dan tempat yang berbeda.

1. 4. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah masyarakat pesisir yang hidup di wilayah Tanjung Gundap, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Akan dilihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah ini. Untuk mengetahui hal tersebut maka akan dilakukan wawancara yang mendalam dan juga kuesioner dengan para *stakeholders* seperti, masyarakat, perangkat desa, dan Pemerintah Kota Batam.

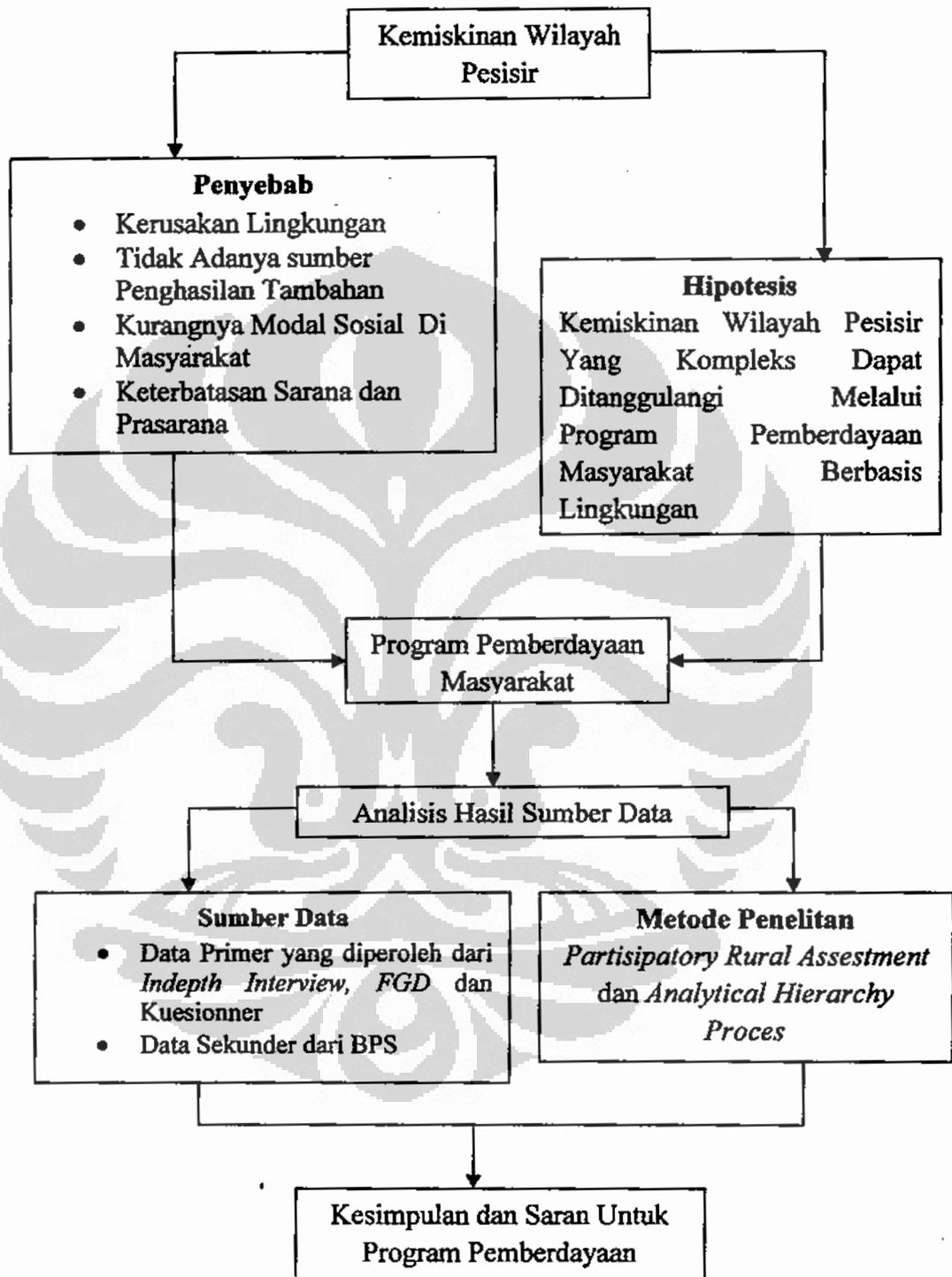
1. 5. Hipotesa

Berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai, maka dalam penelitian ini, dirumuskan hipotesa yang ingin dibuktikan. Hipotesa dari penelitian ini adalah bahwa kemiskinan di wilayah pesisir yang kompleks dapat ditanggulangi melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan.

1. 6. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. 2 di bawah ini menggambarkan secara ringkas, kerangka berfikir untuk keseluruhan penulisan yang dibuat.

Gambar 1. 2
Kerangka Pemikiran



1. 7. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh hasil tulisan yang terstruktur dan mempermudah pemahaman, tesis ini akan disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan ruang lingkup dan batasan penelitian, hipotesa, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab 2. LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan kajian literatur mengenai teori – teori yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, kerusakan lingkungan, hubungan antara kemiskinan dan lingkungan juga mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir. Teori – teori ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis data untuk menjawab pertanyaan dari penelitian sebagai hasil akhir. Selain itu juga akan dilampirkan penelitian – penelitian yang pernah ada yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab 3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan dua buah metode yaitu kualitatif berupa *Participatory Rural Assesment (PRA)* dan Kuantitatif berupa *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, yang menggunakan data primer dari kuesioner yang dibagikan kepada 7 (tujuh) orang *expert* (responden).

Bab 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini data primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisa dengan metode penelitian yang dipakai. Sehingga diketahui dan dirumuskan program pemberdayaan apa yang paling cocok untuk diterapkan di wilayah ini. Kemudian dilihat implementasi dari program yang dibuat.

Bab 5. SKENARIO ACTION PLAN

Pada bab ini dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Tanjung Gundap.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang multidimensi dan sangat kompleks dan harus dilihat dari berbagai sisi. Menurut Dharmayuni (2007), pengertian kemiskinan yang bersifat multidimensi itu antara lain : (1) ekonomi, dimana terdapat ketidakcukupan pendapatan, nutrisi, rumah, dan pakaian; (2) sosial, dimana kurangnya hubungan sosial, keterasingan dan ketidakamanan; (3) politik yang disebabkan oleh ketidakberdayaan dan tidak tersedianya perwakilan politik; (4) budaya, yang berakibat rendahnya rasa kepercayaan sebagai imbas dari tingkat pendidikan dan tingkat melek huruf yang rendah.

Sedangkan menurut Ortiz, definisi dan ukuran kemiskinan mengandung unsur politik yang sangat kuat. Dimana kemudian menurut Nasreen, Hossain, Kundu (2006), dibutuhkan tindakan politis dalam menghadapi kemiskinan. Kebanyakan negara – negara di dunia pada umumnya menyembunyikan tingkat kemiskinan sesungguhnya karena membuat negara – negara tersebut terlihat kurang berkembang dan menjadi bukti dari kegagalan kebijakan publik yang dibuat.

Sedangkan menurut Coudounel dan Hentschel (2000), pengertian kemiskinan bergantung kepada kebutuhan yang diprioritaskan. Biasanya diartikan sebagai kondisi sosial ekonomi yang berkaitan dengan sebuah kebijakan. Sedangkan CARE mendefinisikan kemiskinan dari sisi manusia dan kehidupan sosialnya, dimana menurut CARE kemiskinan adalah gejala dari ketidakadilan sosial yang selanjutnya dapat diartikan sebagai sebuah posisi yang sebagian besar penyebabnya berakar pada sistem kehidupan manusia yang tidak mengikutsertakan, memarginalisasikan dan mendiskriminasi kelompok tertentu dalam masyarakat. Menurut Akinyele (1994), kemiskinan mengacu kepada sebuah bentuk spesifik dan tingkatan pencabutan yang menyebabkan terbatasnya peran dan keberadaan seseorang. (Oduwaye, Lawanson. P.2). Sedangkan menurut Baker (1995), kemiskinan dikategorikan sebagai kehilangan secara material.

Bank dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana masyarakat tidak memiliki tempat tinggal, terkena penyakit dan tidak dapat berobat ke dokter, tidak bisa bersekolah dan membaca, tidak memiliki pekerjaan dan mengalami kekhawatiran mengenai kelanjutan hidup dimasa yang akan datang. Selanjutnya masih menurut Bank Dunia, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang kehilangan anaknya karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidakberdayaan dan kekurangan representasi dan kebebasan.² Kemudian secara umum kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang menjadi miskin atau kekurangan uang atau benda – benda yang bersifat subsisten.³

Menurut Martinsson (2007), dibutuhkan sebuah diskusi yang mendalam untuk menentukan bagaimana kemiskinan diartikan, diukur dan dievaluasi. Karena hal ini memiliki implikasi langsung dengan bagaimana strategi dan prioritas pembangunan dibentuk pada setiap tingkatan, kebijakan dan proses implementasi. Selanjutnya menurut Martinsson (2007), konsep kemiskinan ini akan semakin kompleks dalam proses penanggulangan dan evaluasinya.

Dari pengertian yang bersifat multidisiplin diatas, penyebab kemiskinan juga bersifat multidimensi dan cukup kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Sharp, et. Al (2000), terdapat tiga hal penyebab kemiskinan yang dilihat secara lebih luas, yaitu:

1. Secara mikro, muncul karena ketidaksamaan dalam pola kepemilikan sumber daya
2. Muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia
3. Muncul akibat perbedaan akses dalam memperoleh modal. (Satria, 2009, p. 14)

Sedangkan menurut Spicker (2002), membagi penyebab kemiskinan dalam empat mazhab, antara lain:

1. Penjelasan Individu (*Individual explanation*), diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri: malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebagainya.

² Dikutip dari CARE, "Women's Empowerment"

³ <http://family.jrank.org/pages/1306/Poverty-Definition-Poverty.html> 11 Mei 2009 21:55

2. Penjelasan berdasarkan keturunan (*Familial explanations*), akibat faktor keturunan, dimana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan.
3. Penjelasan Subkultural (*Subcultural explanations*), akibat karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat.
4. Penjelasan Struktural (*Structural explanations*), menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan perbedaan status atau hak. (Satria, 2009, p.16)

Menurut Deaton (2003), kemiskinan terkadang memiliki keterkaitan dengan norma dan kebiasaan masyarakat dimana seseorang tinggal. Menurut PBB (1996), Kemiskinan berkaitan erat dengan kurangnya pengawasan terhadap sumber daya termasuk lahan, keterampilan, pengetahuan, dan modal sosial (Oduwaye, Lawanson. P.2). Menurut *UNEP-IISD* (2004), hubungan antara kemiskinan dengan kehidupan masyarakat terlihat dari ada atau tidaknya determinan – determinan kunci di bawah ini:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar
2. Terbebas dari penyakit yang dapat dicegah
3. Lingkungan tempat tinggal yang bersih dan aman
4. Udara yang bersih
5. Ketersediaan sumber daya energi untuk memasak dan menghangatkan
6. Ketersediaan obat tradisional
7. Penggunaan elemen sumber daya alam yang ditemukan dalam ekosistem dalam pelaksanaan ritual budaya dan keagamaan
8. Kemampuan untuk bertahan dari bencana alam seperti banjir, badai tropis dan tanah longsor
9. Membuat keputusan mengenai pengelolaan keberlanjutan sumber daya agar tetap untuk memperoleh pendapatan yang berkelanjutan. (Nasreen, Hossain, Kundu. 2006. p.3)

Menurut Ortiz, kemiskinan memiliki dimensi non ekonomi, seperti diskriminasi, eksploitasi dan rasa tidak aman. Aspek lain yang harus diperhatikan adalah, kurangnya pengawasan terhadap sumber daya, kurangnya perlindungan

terhadap kejahatan, tindakan korupsi dan kurangnya kesempatan untuk terlibat dalam pembuatan keputusan.

Menurut Islam (2003), kemiskinan dapat dilihat sebagai “defisit individu”, kerugian sosial, dan tidak adanya pengakuan terhadap beberapa hak atau akses terhadap sumber daya yang minimal. (Nasreen, Hossain, Kundu. 2006. p.6). Sedangkan menurut Tobey dan Torell, kemiskinan memiliki dimensi moneter dan non-moneter yang menentukan standar kehidupan. Saat ini sebagian besar perhatian dunia diberikan kepada dimensi kemiskinan non-moneter, yang menunjukkan bahwa pembangunan harus lebih terfokus kepada masyarakat dan berkelanjutan. Selain itu juga harus memasukkan dimensi masyarakat dalam pembangunan seperti partisipasi dalam pembuatan keputusan, jaringan sosial, pemberdayaan, kesetaraan dan pembangunan kapasitas.

Menurut *OECD (2001)*, orang miskin adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Sedangkan *Asian Development Bank (ADB)* mengartikan kemiskinan sebagai hilangnya aset – aset penting dan kesempatan yang seharusnya menjadi hak seseorang. Meskipun memiliki hubungan yang sangat erat, pengertian kemiskinan tidak bisa disamakan dengan kesenjangan.

Dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, dengan menggunakan *Right Base Approach*, orang miskin dilihat sebagai segmen masyarakat yang tidak terpenuhi hak dasarnya (pemenuhan pangan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja dan berusaha, akses perumahan dan sanitasi yang layak, akses air bersih, pemilikan dan penguasaan tanah, kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, jaminan rasa aman dan partisipasi).

Terdapat berbagai jenis kemiskinan, menurut Sachs (2005) dan Nasreen, Hossain, Kundu (2006), terdapat tiga tingkatan kemiskinan, kemiskinan ekstrim (kemiskinan absolut), kemiskinan moderat dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai kondisi dimana pendapatan seseorang kurang dari \$ 1 per hari, yang artinya orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Mereka mengalami kelaparan, tidak bisa memperoleh pelayanan kesehatan, kekurangan air minum

dan sanitasi, tidak bisa memenuhi pendidikan anak – anaknya bahkan tidak memiliki tempat tinggal, dan bahan sandang.

Kemiskinan absolut dapat juga diartikan sebagai status kesejahteraan seseorang yang secara materi berada di bawah suatu batas minimal tertentu yang disebut Garis Kemiskinan yang dihitung berdasarkan nilai uang dari semua barang dan jasa (diluar barang publik) sebagai standar hidup normal.⁴ Selanjutnya menurut Sachs (2005), Kemiskinan absolut dapat didefinisikan sebagai “kemiskinan yang mematikan”. Tidak seperti kemiskinan moderat atau relatif, saat ini kemiskinan ekstrim hanya terjadi di negara – negara yang sedang berkembang.

Kemiskinan moderat didefinisikan sebagai kondisi seseorang dimana pendapatan perharinya berkisar \$ 1 sampai \$ 2, hal ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan kemiskinan relatif didefinisikan sebagai pendapatan rumah tangga berada dibawah proporsi dari rata – rata pendapatan perkapita nasional. Sedangkan Nasreen, Hossain, Kundu (2006), mengartikan kemiskinan relatif sebagai standar kehidupan secara umum pada kelompok masyarakat yang berbeda yang dianggap lebih miskin jika dibandingkan dengan tingkat ketidakmampuan absolut. Ketika kemiskinan diartikan secara relatif, berdasarkan standar kehidupan sekelompok masyarakat tertentu, tingkat kemiskinan akan berbeda – beda pada setiap kelompok masyarakat dan rentang waktu. Kemiskinan relatif dapat dilihat melalui dua analisa yaitu

1. Distribusi fungsional dari pendapatan berdasarkan pembagian faktor (*Functional Distribution of Income Based on Factor Shares*)
2. Ukuran distribusi dari pendapatan berdasarkan ukuran atau tingkat pendapatan (*Size Distribution of Income Based on The Size/ Level Income*)

Lewis (1966), mengemukakan pendapatnya mengenai kemiskinan struktural, dimana kemiskinan bukanlah semata – mata kekurangan dalam ukuran ekonomi tetapi juga melibatkan dalam ukuran kebudayaan dan kejiwaan yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui proses sosialiasi. (Kartubi, 2003,

⁴ Dikutip dari catatan KPKP

p16). Oleh Ragnar Nurske (1950), hal ini disebut sebagai *vicious circle of poverty* (lingkaran setan kemiskinan) ⁵, dimana kemiskinan di satu generasi akan menciptakan kemiskinan di generasi berikutnya, sehingga kalau dilihat dalam perspektif ini kemiskinan tetap lestari. Kemudian menurut Chambers (1983), unsur unsur kemelaratan terjalin erat dalam suatu mata rantai. Mata rantai itu terkadang disebut juga sebagai lingkaran setan, sindrom kemiskinan atau perangkap kemiskinan. (Kartubi, 2003, p15).

OECD (2001) membagi kemiskinan menjadi kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara. Kemiskinan kronis diartikan sebagai kondisi dimana seseorang sudah berada dalam lingkaran kemiskinan untuk jangka waktu yang lama. Secara umum kemiskinan sementara biasanya disebabkan oleh terjadinya gejolak perekonomian makro suatu negara. Selanjutnya kemiskinan kronis dan sementara ini memiliki kategori yang berbeda, tergantung kepada lokasi terjadinya, apakah di pedesaan (*rural*) atau di perkotaan (*urban*), kategori tersebut dapat ditunjukkan oleh tabel 2. 1 di bawah ini:

⁵ Dikutip dari Catatan Kuliah KPKP

Tabel 2. 1
Kategori Kemiskinan Kronis dan Sementara Berdasarkan Lokasi

Tipe Kemiskinan	Pedesaan	Perkotaan
Sementara	Petani, Pendeta dan Pekerja pertanian yang tidak memiliki lahan pertanian akibat bencana alam, pergantian musim; rumah tangga pedesaan dipengaruhi oleh konflik sipil	Pekerja sektor formal perkotaan yang menjadi pengangguran sementara atau mengalami penurunan upah nyata.
Kronis Kemiskinan Asset	Masyarakat yang hanya memiliki sedikit bahkan tidak memiliki lahan pertanian dan terbatas atau tidak memiliki akses terhadap aset – aset produktif dan atau mengalami penurunan kualitas aset masyarakat pedesaan yang terisolasi dari pasar dan pelayanan; rumah tangga pekerja miskin	Sektor informal pedesaan yang memiliki akses terbatas bahkan tidak memiliki akses terhadap aset – aset produktif; rumah tangga miskin terutama yang dikepalai oleh perempuan
Kronis Multidimesi	Masyarakat yang termarginalkan (suku bangsa, kasta, suku bangsa asli, yang termarginalkan); rumah tangga dengan tingkat ketergantungan yang tinggi; sakit kronis dan cacat	Masyarakat yang termarginalkan; rumah tangga yang bergantung kepada kegiatan anti sosial, pengungsi, orang asing yang tidak tercatat dalam satu wilayah masyarakat yang diasingkan

Sumber: OECD

Terdapat ukuran tertentu yang digunakan untuk memetakan kemiskinan. Biasanya mereka yang disebut miskin adalah yang pendapatannya atau konsumsinya berada dibawah garis kemiskinan (Nunan, Grant, Bahiigwa, et al., 2002, p 9). Menurut Ortiz, setiap negara menggunakan metodologi yang berbeda untuk mengukur tingkat kemiskinan, sehingga tingkat kemiskinan akan sulit untuk dibandingkan. Biasanya kemiskinan diukur berdasarkan pengeluaran perkapita untuk memenuhi 2000 – 2500 kalori per hari, ditambah biaya untuk memenuhi konsumsi bukan makanan. Sedangkan Sayogo (1980), kelompok yang dinyatakan miskin adalah bila pengeluaran setara beras 320 Kg perkapita pertahun, miskin sekali jika pengeluaran setara beras kurang dari 320 Kg perkapita pertahun (pedesaan). (Kartubi, 2003, p16).

Meskipun demikian, pengukuran ini tidak menunjukkan pengeluaran lain untuk memenuhi kebutuhan dasar lain seperti pakaian, air minum, perumahan dan akses untuk memperoleh pendidikan dasar dan kesehatan. Kemudian *UNDP* menggunakan *Human Development Index (HDI)* sebagai salah satu alat pengukur kemiskinan, yang melihat angka harapan hidup, tingkat buta huruf, akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih, dan persentase anak dibawah lima tahun yang kurang gizi.

Menurut Narayan (2002), kemiskinan memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan manusia terutama dalam aspek fisik, psikologi dan ekonomi. Masyarakat miskin bertahan dari penyakit fisik yang diakibatkan oleh asupan makanan yang kurang dan jam kerja yang terlalu panjang. Selain itu juga mereka bertahan dari penyakit secara emosional yang diakibatkan oleh ketergantungan dan kurangnya kekuatan yang mereka miliki. Penyakit moral juga mereka rasakan sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk mengambil keputusan akan penggunaan uang yang dimilikinya, apakah untuk berobat ataukah untuk makan sehari – hari. (Nasreen, Hossain, Kundu. 2006. p.6)

Menurut Frederick dan Zaidi (2004), strategi penanggulangan kemiskinan akan terbentuk apabila penyebab dasar kemiskinan yang bersifat multidimensi dapat diperhatikan. Setidaknya hal ini akan menyentuh empat masalah utama yaitu:

- a. keterbatasan kesempatan ekonomi, hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingkat distribusi aset - aset fisik seperti tanah, sumber daya manusia dan aset awal dan kesempatan untuk masuk kedalam pasar yang menentukan pengembalian dari aset – aset tersebut.
- b. Rendahnya kemampuan masyarakat, hal ini berkaitan dengan peningkatan pada indikator kesehatan dan pendidikan , terutama diantara kelompok sosial ekonomi tertentu.
- c. Tingkat rasa aman yang rendah, hal ini berkaitan dengan terjadinya perubahan pada resiko dan pendapatan yang akan meningkat pada tingkat nasional, lokal, rumah tangga ataupun individu dan bisa saja terjadi akibat bencana alam maupun aspek sosial ekonomi.

- d. Ketidakberdayaan masyarakat, hal ini berkaitan dengan kapasitas masyarakat miskin untuk mempengaruhi sebuah institusi dan proses sosial dalam alokasi sumber daya dan pemilihan kebijakan publik (Nasreen, Hossain, Kundu. 2006. P.7-8)

2. 2. Lingkungan dan Degradasi Lingkungan

Menurut Brackley, lingkungan dapat diartikan sebagai kondisi, keadaan, dan pengaruh dimana sebuah organisasi atau sistem berada. Hal ini dapat dipengaruhi atau dijelaskan oleh ciri – ciri fisik, kimia dan biologi, baik alami maupun buatan manusia. Lingkungan juga biasa diartikan sebagai keadaan dimana seseorang tinggal. (Wimpenny, 1990, p.1).

Sedangkan menurut Djajadiningrat (1997), lingkungan alam merupakan suatu aset atau sumber yang agak kompleks dan terdiri dari beberapa komponen atau sumber. Dimana menurut Wimpenny (1991), sumber daya (bahan – bahan) tersebut sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut Fauzi (2004), masing – masing sumber daya tersebut memiliki nilai ekonomi dan dapat dikatakan juga bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Berdasarkan skala waktu pertumbuhannya, komponen – komponen tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui.

Selanjutnya menurut Fauzi (2004), sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*) adalah sumber daya yang dianggap memiliki cadangan yang terbatas, sehingga eksploitasi terhadap sumber daya tersebut akan menghabiskan cadangan sumber daya. Apa yang dimanfaatkan sekarang mungkin tidak lagi tersedia dimasa mendatang. Sumber daya ini termasuk kedalam kelompok stok, sebagai contoh logam, minyak dan gas bumi.

Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) adalah sumber daya yang jumlah kuantitas fisiknya berubah sepanjang waktu. Berapa jumlah yang dimanfaatkan sekarang bisa mempengaruhi atau bisa juga tidak mempengaruhi ketersediaan sumber daya di masa mendatang. Sumber daya ini termasuk kedalam kelompok *flows*, dimana untuk regenerasinya ada yang

bergantung pada proses biologi dan ada yang tidak. Contoh dari sumber daya ini adalah ikan, hutan, gelombang pasang surut dan lain – lain.

Sedangkan berdasarkan kegunaan akhirnya, Hanley et al., (1997), membedakan sumber daya alam menjadi sumber daya material dan sumber daya energi. Sumber daya material merupakan sumber daya yang dimanfaatkan sebagai bagian dari suatu komoditas, sebagai contoh adalah bijih besi dan aluminium. Sumber daya material ini kemudian dapat dibagi lagi menjadi material metalik dan material non metalik. Sumber daya energi merupakan sumber daya yang digunakan untuk kebutuhan menggerakkan energi melalui proses transformasi panas maupun transformasi energi lainnya. Beberapa sumber daya dapat dikategorikan ke dalam keduanya. Contoh sumber daya ini adalah minyak.

Lingkungan alam merupakan salah satu hal yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Komponen – komponen yang telah disebutkan diatas dibutuhkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh Grima dan Berkes (1989), bahwa sumber daya adalah aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia. (Akhmad, 2002. p.2). Jumlah sumber daya yang terpakai ini mengikuti jumlah yang dibutuhkan oleh manusia. Akibatnya lama kelamaan daya dukung lingkungan baik secara kualitas maupun kuantitas akan berkurang (terdegradasi). Menurut Winpenny (1991), degradasi lingkungan ini akan mengurangi nilai dari sumber daya alam tersebut.

Shiva (1992), dalam Oduwaye dan Lawanson, mendefinisikan degradasi lingkungan sebagai proses berkurangnya kualitas lingkungan. Sedangkan Koleosho dan Adeyinka (2006), mendefinisikan degradasi lingkungan sebagai aktivitas yang menyebabkan kondisi lingkungan alam menjadi tidak sehat dan tidak berkelanjutan dari waktu ke waktu. Degradasi lingkungan juga dapat dipahami sebagai penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar, perusakan dari sumber daya alam utama yang dapat diperbaharui (seperti tanah dan hutan), dan dihasilkannya limbah yang sulit untuk diasimilasi atau dihancurkan secara alami. (Oduwaye, Lawanson, P.2)

Terjadinya degradasi lingkungan berhubungan juga dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Degradasi lingkungan juga dapat diartikan sebagai akibat dari hubungan dinamis antara aspek institusi sosial ekonomi

dengan kegiatan ekonomi. Menurut Kusumastanto (2002), meningkatnya interaksi antara aktivitas ekonomi dengan eksistensi sumber daya alam dan lingkungan, baik sisi produksi, distribusi maupun konsumsi akan berdampak pada munculnya masalah lingkungan. Lebih lanjut dikatakan semakin tinggi aktivitas ekonomi dalam pengeksploitasian sumber daya alam dan lingkungan tersebut, maka dampaknya terhadap degradasi sumber daya alam dan lingkungan pun semakin meningkat (Ayuni, 2006, p.2).

Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi, intensifikasi pertanian, peningkatan penggunaan energi dan transportasi. Meskipun demikian, kemiskinan tetap menjadi akar dalam beberapa permasalahan lingkungan.⁶

Menurut Grossman dan Knieger (1995), degradasi lingkungan berhubungan dengan skala komposisi dan teknologi (Barros, Mendonca, Nogueira, 2002, p 3). Hal ini berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi, konsumsi, struktur produksi dan pola teknologi yang diadopsi. Apabila intensitas degradasinya konstan, kenaikan produksi akan meningkatkan degradasi lingkungan dalam tingkat yang sama di seluruh dunia.

Sumber daya alam sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi menurut Nasreen, Hossain dan Kundu (2006), aktifitas pembangunan yang tidak terencana akan menyebabkan degradasi lingkungan di negara – negara berkembang.

Negara yang sedang berkembang rata – rata membutuhkan dan menggunakan sumber daya alam lebih banyak jika dibandingkan dengan negara maju. Akibatnya, Shiva (1992), mengatakan bahwa degradasi lingkungan di negara yang sedang berkembang berkaitan dengan beberapa faktor seperti: padatnya wilayah perkotaan, limbah industri, penggunaan lahan yang berlebihan, pembabatan hutan dan faktor – faktor lain yang bersifat politis. Selain itu juga, terjadi peningkatan tekanan pada lingkungan akibat aktifitas pertanian di lahan marginal, dan penggunaan kayu bakar secara komersil. (Nasreen, Hossain, Kundu,

⁶ "The Underlying Causes of Enviromental Degradation". 6 Mei 2009 22:18. <http://indiabudget.nic.in/es98-99/chap1104.pdf>

p.12) Selain itu juga negara berkembang sering mengalami *trade-off* antara menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dengan upaya untuk mempertahankan lingkungan.

Menurut Lopez (1992), terdapat penyebab internal dan eksternal degradasi lingkungan. Markandya (2001), mengatakan bahwa pembangunan ekonomi perkapita akan menyebabkan degradasi lingkungan dan sumber daya alam. Fungsi dari kebijakan penduduk akan berubah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya perubahan pada tingkat institusional. (Nasreen, Hossain, Kundu, 2006, p.5). Penyebab dari masalah degradasi lingkungan pada dasarnya dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu sosial, ekonomi dan institusi.

Aspek sosial penyebab degradasi lingkungan terdiri dari tiga hal, yaitu populasi, kemiskinan dan urbanisasi. Populasi pada dasarnya merupakan sumber daya utama dalam pembangunan. Akan tetapi populasi juga merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan jika jumlahnya melebihi daya dukung lingkungan tempat populasi tersebut bermukim. Pengaruh populasi terhadap kerusakan lingkungan tercermin dari penggunaan sumber daya alam dan dibasilkannya limbah yang kemudian berpengaruh terhadap rusaknya biota alam, polusi udara dan air, dan meningkatnya tekanan pada lahan untuk bercocok tanam. Dalam menghadapi hal ini, dibutuhkan adanya usaha pengendalian jumlah populasi.

Aspek sosial lain yang berkaitan dengan degradasi lingkungan adalah masalah urbanisasi. Urbanisasi terjadi karena kurangnya kesempatan kerja dan tekanan ekologi yang dialami oleh masyarakat pedesaan. Salah satu efek dari urbanisasi adalah munculnya daerah – daerah kumuh di perkotaan. Pertumbuhan wilayah perkotaan yang cepat dan tidak terencana menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan perkotaan. Hal ini memperparah jarak antara permintaan dan ketersediaan jasa infrastuktur seperti energi, perumahan, transportasi, komunikasi, pendidikan, penyediaan air bersih, saluran pembuangan kotoran, sarana rekreasi, hal – hal tersebut menurunkan kualitas sumber daya lingkungan perkotaan. Selain itu juga, hal – hal tersebut menyebabkan tercemarnya air bersih, bertambahnya daerah kumuh dan penyalahgunaan lahan yang berdampak kepada kemiskinan perkotaan

Berkaitan dengan ekonomi, dalam skala besar, degradasi lingkungan merupakan akibat dari kegagalan pasar yang ditunjukkan oleh lemahnya fungsi pasar bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh lingkungan. Dalam konteks ini, degradasi lingkungan merupakan salah satu kasus eksternalitas konsumsi dan produksi yang ditunjukkan oleh penyimpangan antara biaya privat dan sosial (atau keuntungan). Kurangnya hak penggunaan lahan merupakan salah satu penyebab terjadinya kegagalan pasar. Di sisi lain, adanya kontrol harga akan menyebabkan distorsi pasar dan subsidi akan memperburuk pencapaian tujuan lingkungan. Pencemaran merupakan bentuk lain dari eksternalitas. Dalam kasus pencemaran, seharusnya pelaku pencemaran membayar kompensasi terhadap masyarakat yang terkena pencemaran.

Dalam aspek institusi, lemah dan tidak ditegakkannya peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh pemerintah merupakan faktor kunci terjadinya kerusakan lingkungan di suatu negara. Hal tersebut berkaitan dengan sistem yang berlaku dalam negara tersebut, dimana biasanya terjadi ketidakseimbangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Koordinasi yang efektif diantara pihak – pihak yang berkepentingan dalam masalah lingkungan juga tidak terbentuk.⁷

Menurut Dasgupta dan Maler (1994), Pearce dan Warford (1993), Kegagalan pasar dianggap sebagai penyebab utama dari kerusakan lingkungan. Hal tersebut ditunjukkan oleh pemberian subsidi oleh pemerintah kepada sektor dan produk yang salah, sebagai contoh, pemberian subsidi kepada perusahaan penghasil polutan dan pemberian subsidi bahan bakar.

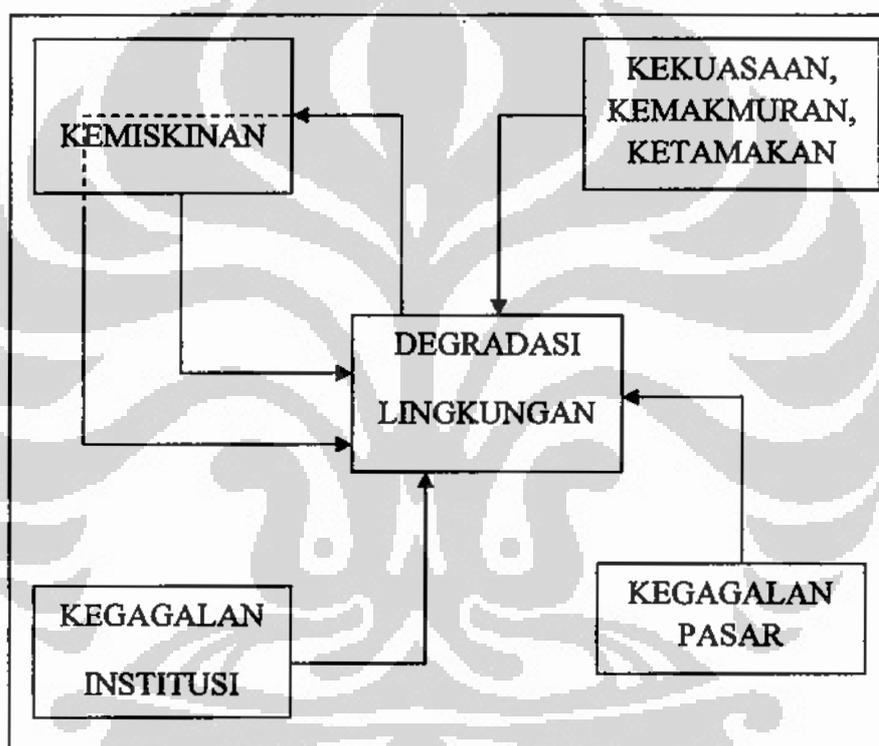
Lebih lanjut kemiskinan bisa dianggap sebagai penyebab sekaligus akibat dari kerusakan lingkungan. Ketidaksetaraan pendapatan akan menyebabkan ketidaklestarian lingkungan karena masyarakat miskin memiliki ketergantungan yang lebih jika dibandingkan dengan mereka yang tidak miskin. Lingkungan yang terdegradasi akan memperparah kemiskinan yang ada, karena masyarakat miskin bergantung langsung kepada hasil alam. Dalam hal ini usaha pemberantasan

⁷ "The Underlying Causes of Environmental Degradation". 6 Mei 2009 22:18. <http://indiabudget.nic.in/es98-99/chapI104.pdf>

kemiskinan dibutuhkan untuk memutus hubungan antara kemiskinan dengan kerusakan lingkungan.

Hal diatas kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Durraipah (1998), menggambarkan hubungan antara kemiskinan dengan kerusakan lingkungan melalui bagan 2. 1 di bawah ini:

Gambar 2. 1
Hubungan Antara Kemiskinan Dengan Kerusakan Lingkungan



Sumber: Durraipah

Gambar 2. 1 diatas menunjukkan penyebab – penyebab kerusakan lingkungan, yang antara lain berupa, kegagalan pasar, kegagalan institusional, kekuasaan, kemakmuran, ketamakan dan juga kemiskinan. Antara kerusakan lingkungan dan kemiskinan saling berhubungan satu sama lain, karena masalah lingkungan dilihat sebagai akibat dari kegagalan pasar dalam memberikan nilai (harga) terhadap jasa yang diberikan oleh lingkungan. (Yusuf, 2004, p.5).

Menurut Barros, Mendonca dan Nogueira (2002), degradasi dapat dikurangi dengan pertumbuhan ekonomi selama produksi yang dilakukan diantara

sektor – sektor yang ada dalam sebuah perekonomian. Selain itu juga adanya investasi sosial, akan menjamin pertumbuhan ekonomi dengan tingkat degradasi lingkungan yang rendah.

Pencemaran merupakan salah satu bentuk dari degradasi lingkungan. Menurut Perman et al., (1996), dalam perspektif biofisik, pencemaran diartikan sebagai masuknya aliran residual (*residual flow*) yang diakibatkan oleh perilaku manusia, ke dalam sistem lingkungan. Apakah kemungkinan residual ini mengakibatkan kerusakan atau tidak, tergantung pada kemampuan penyerapan (*absortive capacity*) media lingkungan, seperti air, tanah, maupun udara (Fauzi, 2004, p. 187) . Selanjutnya menurut Fauzi (2004), dari perspektif ekonomi, pencemaran bukan saja dilihat dari hilangnya nilai ekonomi sumber daya akibat berkurangnya kemampuan sumber daya secara kualitas dan kuantitas untuk menyuplai barang dan jasa, namun juga dari dampak pencemaran tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pencemaran yang terjadi dalam penelitian ini adalah pencemaran air, yang termasuk kedalam pencemaran yang bersifat stok (*stock pollution*), dimana menurut Fauzi (2004), kerusakan yang ditimbulkan merupakan fungsi dari stok residual dan bersifat kumulatif. Akumulasi ini terjadi jika jumlah bahan pencemar yang diproduksi melebihi kapasitas penyerapan lingkungan, sebagai contohnya adalah logam berat yang mencemari air.

Menurut Whittingham dan Townsley, Winpenny (1991), industrialisasi yang terjadi di sekitar wilayah pesisir merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran di wilayah pesisir. Sedangkan menurut Burke et,al (2001), limbah pertanian merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran, dimana sisa cairan kimia yang biasa dipakai dialirkan ke sungai yang kemudian akan berujung dilaut. Hal ini akan menyebabkan matinya udang – udang yang berada di sekitar wilayah perairan tersebut. Selanjutnya menurut Burke et, al (2002), deforestasi akan menyebabkan wilayah pesisir rentan terhadap banjir dan proses sedimentasi yang akan mempengaruhi perikanan dan habitat di sekitar pesisir. (Whittingham, Townsley, p. 4-5)

Menurut Ayuni (2006), perusakan di wilayah pesisir merupakan dampak dari pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dan perkembangan teknologi yang

pesat, sehingga lingkungan laut, khususnya di perairan pantai telah mendapat tekanan yang berat, sehingga menimbulkan kerusakan – kerusakan di berbagai tempat. Selanjutnya menurut Whittingham dan Townsley, daya dukung lingkungan pesisir akan turun seiring dengan meningkatnya pencemaran di wilayah pesisir, perusakan habitat, menurunnya kualitas air, dan turunnya kuantitas sumber daya. Selain itu juga, tidak terkontrolnya jumlah penangkapan sumber daya perairan yang bersifat *open access* merupakan hal lain yang menyebabkan turunnya daya dukung lingkungan pesisir.

Selanjutnya menurut Fauzi (2004), pengendalian pencemaran dapat dilakukan langsung melalui perintah dan pengawasan, dengan menggunakan skema pengaturan administratif dan perundang – undangan yang terkait langsung dengan jumlah pencemaran atau output yang diperbolehkan dan dengan teknologi yang digunakan oleh industri. Bentuk pengendalian yang dilakukan adalah dengan menentukan standar emisi yang menentukan laju emisi maksimum yang diperbolehkan secara hukum dan standar ambient yang menentukan dimensi kualitatif terhadap lingkungan sekitar. Selain itu bisa juga melalui standar teknologi, dimana industri harus mengadopsi teknologi yang mengurangi pencemaran.

Menurut Fauzi (2004), salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah bagaimana menghadapi *trade off* antara pemenuhan kebutuhan pembangunan di suatu sisi dan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan di sisi lain. Selanjutnya menurut Ekins (1997) dan Munashinghe (1998) peningkatan dalam indikator lingkungan merupakan hasil dari peningkatan permintaan kualitas lingkungan. Permintaan ini bertambah seiring dengan peningkatan pendapatan dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan (Barros, Mendonca, Nogueira, 2002, p 3) Selanjutnya menurut Barros, Mendonca dan Nogueira (2002), degradasi dapat dikurangi dengan pertumbuhan ekonomi selama produksi yang dilakukan diantara sektor – sektor yang ada dalam sebuah perekonomian. Selain itu juga adanya investasi sosial, akan menjamin pertumbuhan ekonomi dengan tingkat degradasi lingkungan yang rendah.

2. 3. Kemiskinan dan Degradasi Lingkungan

Sebagai masalah yang bersifat multidimensi, kemiskinan juga berhubungan dengan rusaknya lingkungan alam. Terdapat hubungan yang sangat rumit antara kerusakan lingkungan dengan kemiskinan. Disatu sisi kerusakan lingkungan dapat disebut sebagai penyebab dari kemiskinan, tetapi di sisi lain, kerusakan lingkungan dapat disebut sebagai akibat dari kemiskinan. Hal ini dipertegas oleh Oduwaye dan Lawanson, dimana kerusakan lingkungan merupakan penyebab sekaligus konsekuensi dari kemiskinan.

Menurut Southgate (1988), Mink (1993), de Janvry (1988), meningkatnya kemiskinan dalam sekelompok masyarakat akan terlihat dari meningkatkan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah yang mereka tempati. Sebaliknya berkurangnya kemiskinan akan mengurangi kerusakan lingkungan. (Gupta, 2004, p.) Kemiskinan dapat dianggap sebagai penyebab dan akibat dari degradasi lingkungan. Prakash (1997), menyimpulkan bahwa hubungan antara kemiskinan dan lingkungan diperantarai oleh faktor institusi, sosioekonomi dan budaya. (Nunan et.al. 2002. p18).

Menurut Oduwaye dan Lawanson, kemiskinan menekan masyarakat untuk berada dalam kondisi lingkungan yang buruk dan tidak berkelanjutan. Selanjutnya menurut Boyce dan Torras (2002), kualitas lingkungan akan bertambah buruk pada rentang pendapatan tertentu, dan kemudian akan meningkat pada rentang yang lain, (Barros et.al, 2002, p.5).

Sedangkan menurut Dasgupta dan Maler (1994), masyarakat miskin rentan terhadap degradasi lingkungan karena mereka sangat bergantung terhadap sumber daya alam dan memiliki sedikit sumber daya alam alternatif dan sering dihadapkan pada kerusakan lingkungan dan tidak bisa mengurangi resiko kerusakan lingkungan (Yusuf, 2004, p 2). Pernyataan tersebut dipertegas oleh *OECD* (2001), masyarakat miskin memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap *Common Property Resources*. Menurut Dasgupta (1993, 1996), Kadekodi (1995), Chopra dan Gulati (2001), dampak kerusakan lingkungan akan lebih terasa oleh masyarakat miskin dibandingkan dengan masyarakat yang tidak miskin. (Gupta, 2008). Kemudian menurut World Bank (2000), kemiskinan dan degradasi

lingkungan sama – sama bersifat endogenous, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan pasti apa menyebabkan apa (Yusuf, 2004, p.13)

Selain itu juga hubungan ini akan dipengaruhi oleh lokasi terjadinya kerusakan lingkungan dan kemiskinan, dimana wilayah perkotaan dan pedesaan ataupun pesisir akan mengalami konteks yang berbeda. Menurut *OECD* (2001), di pedesaan yang menjadi isu utama adalah akses kepada sumber daya alam seperti tanah, hutan atau perikanan dan keberlanjutan penggunaan sumber daya tersebut. Di perkotaan agenda utama yang berkaitan dengan kemiskinan dan lingkungan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam seperti air bersih dan udara yang tercemar oleh limbah industri dan dampaknya kepada masyarakat miskin.

Nunan, et al (2002), mengatakan bahwa antara lingkungan dan kemiskinan memiliki hubungan siklis. Hal tersebut dapat digambarkan oleh gambar 2. 2 di bawah ini

Gambar 2. 2
Hubungan antara Kemiskinan dan Lingkungan



Sumber: Nunan, et al

Ketidakmerataan pendapatan akan menyebabkan ketidak berlanjutan lingkungan akibat orang miskin yang lebih membutuhkan sumber daya alam dibandingkan dengan mereka yang sudah kaya. Selanjutnya degradasi lingkungan akan mempermudah proses terjadinya kemiskinan karena orang miskin sangat bergantung pada kekayaan alam.⁸ Sedangkan menurut Oduwaye dan Lawson hubungan antara degradasi lingkungan dengan kemiskinan akan membentuk

⁸ Dikutip dari *The Underlying Causes of Enviromental Degradation*, <http://indiabudget.nic.in/es98-99/chap1104.pdf> diakses pada 6 Mei 2009 Pukul 22:18

lingkaran setan, dimana kemiskinan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang kemudian akan memperparah kondisi kemiskinan itu sendiri.

Sedangkan menurut Broad (1994), kunci hubungan antara kemiskinan dengan lingkungan, antara lain:

- a. Kemiskinan dilihat sebagai salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan
- b. Masyarakat miskin tidak dapat masuk kedalam proses pembangunan yang berkelanjutan
- c. Mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah orang miskin adalah kunci untuk menjaga lingkungan. (Nunan et.al. 2002. p11)

Menurut Gupta (2004), hal – hal yang menyebabkan hubungan tersebut antara lain:

- a. Terjadinya ekstraksi besar – besaran terhadap sumber daya alam, yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup “si miskin”
- b. Masyarakat miskin sering mengabaikan batasan sumber daya lingkungan yang mereka miliki dan konsekuensi dari penggunaan sumber daya tersebut.
- c. Masyarakat miskin memiliki peranan kecil dalam produktivitas sumber daya lingkungan yang mereka miliki.

Masyarakat miskin tidak bisa dipandang sebagai penyebab utama dari terjadinya kerusakan lingkungan. Duraiappah (1998), menyimpulkan bahwa masyarakat miskin tidak secara langsung menjadi penyebab degradasi lingkungan. Bukti – bukti yang ada menunjukkan bahwa masyarakat miskin merupakan korban dari degradasi lingkungan yang terjadi. Dengan kata lain, degradasi lingkungan merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kemiskinan. Dalam hal ini, degradasi lingkungan dianggap sebagai faktor endogen terjadinya kemiskinan (Yusuf, 2004, p.6-7).

Selanjutnya menurut Duraiappah (1998), hal tersebut dapat ditunjukkan oleh beberapa faktor di bawah ini:

- a. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang lebih berkuasa (bukan masyarakat miskin), merupakan penyebab utama terjadinya masalah lingkungan. Hal ini berkaitan dengan motif mencari keuntungan yang

mereka cari, sebagai contoh kegiatan pembabatan hutan yang merupakan penyebab utama terjadinya deforestasi.

- b. Masalah institusional dan kegagalan pasar
- c. Kemiskinan pada dasarnya akan meningkatkan degradasi lingkungan yang merupakan reaksi dari terjadinya degradasi lingkungan yang telah disebutkan diatas. Dalam hal ini, masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain, yang mengakibatkan mereka harus melakukan tindakan yang tidak ramah lingkungan
- d. Masyarakat miskin secara ambiguo merupakan korban dari degradasi lingkungan. (Yusuf, 2004, p. 7)

Kemudian menurut laporan *OECD* (2001), karena antara kemiskinan dan degradasi lingkungan memiliki hubungan yang erat maka seharusnya kedua masalah ini dapat diselesaikan bersama.

Seperti yang telah disebutkan tadi, hubungan kemiskinan dengan lingkungan akan memiliki konteks yang berbeda jika dilihat berdasarkan tempat terjadinya, apakah di perkotaan, pedesaan, atau pesisir. Dalam melihat hubungan di wilayah perkotaan saja, kemiskinan dapat dilihat sebagai penyebab maupun akibat. Di wilayah perkotaan, pola konsumsi masyarakat yang tidak tergolong miskin (terutama kelompok berpenghasilan tinggi) dan sistem produksi dan distribusi yang ada merupakan salah satu penyebab utama terjadinya degradasi lingkungan di wilayah perkotaan.

Masyarakat miskin kota bukanlah penyebab utama terjadinya degradasi lingkungan di wilayah perkotaan karena mereka hanya menggunakan sedikit sumber daya yang kemudian menghasilkan sedikit limbah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengaruh kemiskinan perkotaan terhadap terjadinya degradasi lingkungan dapat dilihat dari beberapa faktor di bawah ini:

- a. Penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui

Kelompok masyarakat perkotaan dengan tingkat pendapatan yang rendah memiliki tingkat konsumsi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat dengan penghasilan menengah dan tinggi. Mereka menggunakan air bersih lebih sedikit meskipun hal ini lebih diakibatkan oleh ketidaksesediaan dan mahalnya harga air bersih.

b. Jumlah limbah yang dihasilkan

Kelompok masyarakat perkotaan dengan tingkat pendapatan yang rendah menghasilkan limbah yang lebih sedikit per orangnya jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat dengan penghasilan menengah dan tinggi. Masyarakat miskin kota, secara umum memiliki peran yang positif secara ekologi, karena mereka lebih banyak menggunakan barang – barang daur ulang jika dibandingkan dengan masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi, dimana mereka lebih banyak menggunakan barang – barang yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah beracun, ataupun zat – zat berat lain yang berbahaya. Usaha – usaha menengah dan kecil, yang biasa dianggap sebagai penyebab masalah lingkungan diperkotaan, pada dasarnya menghasilkan limbah yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan pengolahan yang besar.

c. Efek rumah kaca dan emisi gas

Secara rata – rata, masyarakat berpenghasilan rendah menggunakan bahan bakar fosil lebih sedikit jika dibandingkan dengan masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi. Akan tetapi beberapa dari mereka masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar yang menghasilkan karbondioksida lebih banyak, akan tetapi hal ini masih bisa ditolerir.⁹

Kemudian Bartone (1991), mengatakan bahwa masyarakat miskin kota, merupakan salah satu penyebab terjadinya degradasi lingkungan. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan ekonomi yang mereka miliki dan status mereka yang sebagian besar adalah pengangguran, yang sering dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di perkotaan. Terjadinya degradasi lingkungan menyebabkan terjadinya pemukiman kumuh, rumah gubuk, dan pemukiman liar (Oduwaye, Lawanson, p.3)

Dalam melihat hubungan antara kemiskinan dengan degradasi lingkungan di wilayah pedesaan, Todaro dan Smith (2003) melihat kemiskinan sebagai penyebab terjadinya degradasi lingkungan akibat adanya kepentingan kaum miskin untuk mempertahankan hidup. Sedangkan menurut De Janvry dan Garcia

⁹ The Links Between Poverty and Environmental Degradation

(1998), degradasi lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat miskin di pedesaan pada dasarnya disebabkan oleh kegiatan – kegiatan di bawah ini:

- a. Erosi tanah akibat pembabatan lahan pertanian
- b. Semi-proletarisasi dari penduduk pedesaan dan tidak berdayanya institusi local akibat modernisasi pertanian
- c. Degradasi sumber daya alam termasuk hasil hutan (Nasreen, Hossain, Kundu, 2006, p.5)

Sedangkan Dasgupta (2000) dalam Yusuf (2004), menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan kerusakan lingkungan melalui model yang menghubungkan perekonomian masyarakat miskin desa, populasi dan lingkungan, dibawah ini:

$$\max_n y(n) = -\alpha - \beta n - \gamma n^2 \quad 2.1$$

Dimana: $\alpha, \beta, \gamma > 0$ dan $\beta^2 > 4\alpha\gamma$

Setiap rumah tangga memaksimalkan persamaan diatas melalui α, β & γ .

Kemudian, pilihan optimum rumah tangga akan terlihat dalam persamaan:

$$n^* = \beta/2\gamma \text{ dan } y^* = -\alpha + \beta^2/4\gamma \quad 2.2$$

Model ini menunjukkan bahwa degradasi lingkungan (terlihat dari meningkatnya α atau γ atau menurunnya β) akan menurunkan y^* (kemiskinan)

Kemudian, Dasgupta juga mengembangkan model yang pada intinya populasi desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi degradasi lingkungan dan kemiskinan di wilayah pedesaan. Model tersebut menghubungkan populasi dengan α, β, γ , dimana:

$$\alpha = \alpha(M), \beta = \beta(M), \gamma = \gamma(M) \quad 2.3$$

Yang menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya alam adalah fungsi dari total populasi desa (M), dimana semakin tinggi populasi maka kualitas sumber daya alam akan semakin menurun.

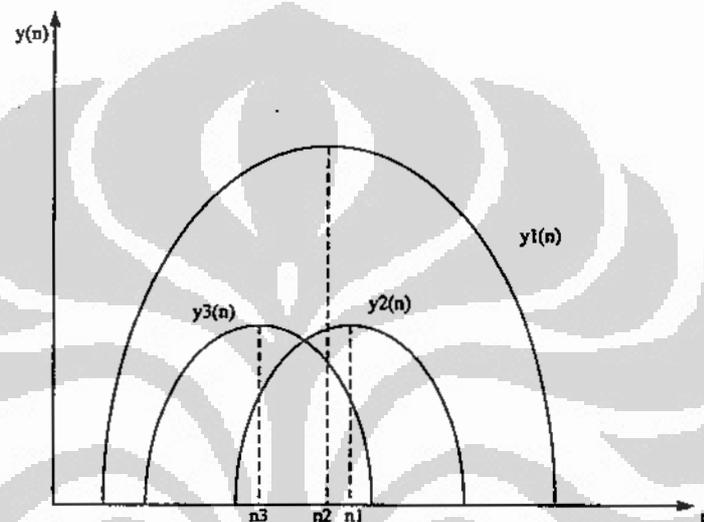
Meskipun demikian, M bukanlah faktor untuk mengoptimalkan perilaku setiap rumah tangga, karena hal ini merupakan masalah eksternal yang dikenal sebagai *reproductive externality* yang ditunjukkan dalam persamaan simetris di bawah ini:

$$M^* = Nn^*$$

2. 4

Kemudian, untuk melihat apakah kemiskinan akan menyebabkan degradasi lingkungan, dapat terlihat dari gambar 2. 3 di bawah ini,

Gambar 2. 3
Kemiskinan dan Degradasi Lingkungan



Sumber: Yusuf (2004)

Gambar diatas merupakan kurva produksi yang menurun (akibat dari degradasi sumber daya eksogen) dari $y_1(n)$ ke $y_\alpha(n)$ yang akan membuat kondisi rumah tangga menjadi lebih miskin (y yang lebih rendah) dan n_1 bukanlah ukuran optimum rumah tangga. Rumah tangga dalam hal ini cenderung memiliki banyak anak dimana n_2 adalah ukuran rumah tangga optimum. Kenaikan ukuran rumah tangga akan menunjukkan meningkatnya populasi desa yang ditunjukkan oleh M^* yang salah satu konsekuensinya adalah penurunan kualitas lingkungan melalui perubahan α , β , γ , yang secara endogen bergantung pada M^* . Dari kurva dan model diatas Dasgupta menyimpulkan bahwa kemiskinan, ukuran rumah tangga dan degradasi lingkungan akan memperkuat satu sama lain dalam putaran yang lebih luas, dimana ketiga variabel tersebut bersifat *endogenous*.

Di wilayah pesisir, degradasi lingkungan dapat dilihat sebagai penyebab sekaligus akibat dari kemiskinan. Rata - rata masyarakat pesisir berprofesi sebagai nelayan. Akan tetapi di satu sisi mereka memiliki tingkat pendidikan yang

rendah dan kurang memperoleh informasi yang berkaitan dengan pekerjaan mereka tersebut. Tidak jarang mereka menggunakan alat tangkap yang berbahaya bagi ekosistem laut, misalnya penggunaan bom ikan yang akan merusak terumbu karang. Akan tetapi di satu sisi mereka juga merupakan korban dari rusaknya ekosistem perairan. Pencemaran air laut yang diakibatkan oleh limbah industri, pabrik galangan kapal dan pembuangan oli kapal, akan menyebabkan ikan, udang dan hewan laut lainnya mati, yang menyebabkan kuantitas dan kualitas tangkapan nelayan akan berkurang dan berpengaruh terhadap pendapatan mereka.

Dalam konteks negara, menurut laporan OECD (2001), dalam melihat hubungan antara kemiskinan dan lingkungan di negara berkembang, sebelum kita mengkhawatirkan masalah lingkungan, kita harus mengurangi kemiskinan terlebih dahulu. Menurut Barros et, al (2002), bukti empiris menunjukkan bahwa kesehatan (kualitas) lingkungan akan bergantung kepada faktor – faktor lain dalam tingkat pembangunan yang dicapai oleh negara tertentu. Pada tingkatan tertentu, sebuah negara akan bergantung pada pertanian dan sumber daya mineral dengan dampak polusi yang relatif rendah. Kemudian menurut Dasgupta (1995), Lopez (1992, 1997), Heath dan Binswanger (1996), terjadinya kemiskinan dan degradasi lingkungan akan menyebabkan perubahan sosial yang penting pada sebuah negara berkembang. Hal tersebut akan terlihat dari kebijakan – kebijakan yang dibuat dan kegiatan eksternal lainnya (Gupta, 2008). Sedangkan menurut Munashinge, *Willingness to Pay (WTP)* untuk barang dan jasa dipengaruhi oleh pendapatan dan tingkat pemahaman individu dalam mengenal lingkungan.

Hubungan antara kemiskinan dan degradasi lingkungan tersebut ditunjukkan oleh Kuznet melalui *Environmental Kuznet Curve (EKC)*, yang berbentuk huruf U terbalik mengatakan bahwa pendapatan masyarakat yang lebih tinggi berarti lebih banyak proses produksi dan konsumsi yang akan menimbulkan polusi. Tapi seiring dengan bertambahnya pendapatan, permintaan untuk perlindungan lingkungan juga meningkat, mengikuti pembangunan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan.

2. 4. Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Secara geologis dan biologis, menurut Ayuni (2006), wilayah pesisir merupakan wilayah pencampuran pengaruh antara laut, darat dan udara. Bentuk wilayah ini merupakan hasil keseimbangan dinamis dari suatu proses penghancuran dan pembangunan dari ketiga unsur dalam tersebut. Wilayah pesisir meliputi bagian darat, baik yang kering maupun yang terendam air yang masih dipengaruhi sifat – sifat air laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Wilayah ini berfungsi sebagai penyangga (*buffer zone*) dan merupakan habitat dari berbagai jenis unggas burung migran, serta habitat bagi pembesaran berbagai jenis ikan dan udang. Wilayah pesisir memiliki gradien perubahan sifat ekologi yang tajam dan pada skala yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berlainan. Pada umumnya wilayah ini memiliki kondisi kesuburan yang tinggi dan menjadi sumber zat organik yang penting dalam rantai makanan di laut.

Jika dihubungkan dengan aspek sosial, budaya dan ekonomi, menurut Whittingham dan Townsley, wilayah pesisir merupakan salah satu lingkungan yang paling kompleks dan dinamis. Wilayah ini terbentuk oleh lingkungan alam, sosial-budaya, sistem ekonomi dan politik yang menarik dan cenderung sulit dalam menghadapi perubahan, tidak hanya pada sisi biofisik tetapi juga dalam aspek jangka panjang seperti pertumbuhan penduduk, industri, pariwisata, polusi, kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati, perubahan untuk masuk kedalam pasar dan teknologi dan pemahaman terhadap perubahan iklim, padahal hal – hal tersebut sangat mempengaruhi kelestarian lingkungan pesisir.

Dahuri (1998), mengatakan bahwa wilayah pesisir pada umumnya adalah kawasan padat penduduk serta tempat berlangsungnya berbagai macam kegiatan pembangunan. Dimana konsentrasi kehidupan manusia dan berbagai kegiatan pembangunan di wilayah tersebut disebabkan oleh tiga alasan ekonomi yang kuat yaitu (a) wilayah pesisir pantai adalah wilayah yang paling produktif di bumi, (b) wilayah pesisir juga merupakan objek wisata yang sangat menarik bagi industri

pariwisata, dan (c) wilayah pesisir merupakan lokasi hunian karena berbagai faktor kemudahan yang mendukung kehidupan masyarakat. (Satiman. 2002. p.1).

Selanjutnya menurut Whittingham dan Townsley, wilayah pesisir terkadang ditunjukkan oleh tingkat kompleksitas yang berkaitan dengan keberagaman dan dinamisme yang mereka miliki, ketersediaan sumber daya alam, sumber daya yang bersifat *open access*, dan konsentrasi eksternalitas. Selanjutnya keberagaman wilayah pesisir menunjukkan proses dan sistem sosial, ekonomi dan politik yang berjalan dan berinteraksi disana yang akan menyebabkan tingkat kompleksitas yang tinggi, dan berpotensi menimbulkan kesempatan dan juga masalah bagi masyarakat dan lingkungan pesisir.

Nikijuluw (2001) mendefinisikan masyarakat pesisir sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Definisi populasi masyarakat pesisir yang luas ini tidak seluruhnya diambil tetapi hanya difokuskan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Dimana menurut Whittingham dan Townsley sumber daya ikan merupakan sumber daya terpenting bagi masyarakat pesisir.

Selanjutnya menurut Nikijuluw (2001), kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai pulau – pulau besar dan kecil. Sebagian masyarakat nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsisten, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu sangat pendek. Oleh karena itu banyak dari mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kemudian menurut Kumar (2005), menyebutkan bahwa kehidupan masyarakat pesisir sangatlah kompleks, mereka memiliki struktur kehidupan yang berbeda – beda dan sulit untuk dipahami, diatur dan perlu diberdayakan

Kekompleksitan yang terjadi di wilayah pesisir membuat masyarakat pesisir tidak luput dari masalah – masalah ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Menurut Whittingham dan Townsley, dulu masyarakat pesisir harus beradaptasi dengan perubahan wilayah pesisir yang dinamis, akan tetapi saat ini mereka harus merespon kondisi lingkungan yang semakin kompetitif, hal ini terjadi karena semakin terbatasnya jumlah dan kesempatan pemakaian sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Untuk beberapa masyarakat pesisir, ketergantungan terhadap sumber daya alam tersebut berarti mereka harus beradaptasi dan menghadapi peningkatan marginalisasi dan ketidakterediaan sumber daya pesisir yang mereka butuhkan.

Selain itu juga menurut Satiman (2002), pada kenyataannya yang dihadapi selama ini masyarakat pesisir relatif tertinggal dari kehidupan sejahtera. Menurut Satiman (2002), masalah pokok yang cukup mendasar masyarakat pesisir adalah kemiskinan struktural dimana kehidupan mereka relatif masih sangat tertinggal dari kehidupan sejahtera. Hal ini karena rendahnya pendidikan dan keterampilan masyarakat, prasarana dasar dan teknologi serta dana dalam mendukung pengelolaan sumberdaya alam khususnya wilayah pesisir.

Selanjutnya menurut Satiman (2002), selain permasalahan kemiskinan struktural, masalah lain yang cukup penting adalah transportasi antar pulau yang relatif terbatas, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sanitasi lingkungan. Disamping itu juga masalah air bersih khususnya untuk minum dan memasak, karena air bersih umumnya didatangkan dari darat atau pulau yang mempunyai sumber air bersih yang cukup memakan waktu dan harganya relatif mahal. Disisi lain tingginya laju kerusakan sumberdaya wilayah pesisir yang umumnya terjadi di wilayah mangrove, terumbu karang dan rumput laut karena limbah industri.

Menurut Dharmayuni (2007), Kemiskinan masyarakat pesisir tidak hanya berakar pada keterbatasan akses permodalan dan kultur kewirausahaan yang tidak kondusif. Sejumlah permasalahan yang timbul untuk masyarakat pesisir timbul dan berputar pada masalah yang selalu sama, yaitu: manajemen usaha yang lemah; rendahnya adopsi teknologi; manajemen usaha yang lemah; rendahnya adopsi teknologi perikanan; kesulitan modal usaha; rendahnya pengetahuan pengelolaan sumber daya perikanan; serta rendahnya peranan dalam proses

pengambilan keputusan, hal inilah yang mengakibatkan kehidupan nelayan terpuruk dalam kemiskinan.

Menurut Pratikto (2005) dan Nikijuluw (2001), dalam konteks masyarakat pesisir, ketidakberdayaan masyarakat pesisir disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu:

a. Kemiskinan struktural

Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pengaruh faktor – faktor eksternal seperti struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif dan disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya pembangunan khususnya sumber daya alam. Hubungan antara variabel – variabel ini dengan kemiskinan umumnya bersifat terbalik. Artinya semakin tinggi intensitas, volume dan kualitas variabel – variabel ini maka kemiskinan semakin berkurang. Khusus untuk variabel struktur sosial ekonomi hubungannya dengan kemiskinan lebih sulit ditentukan. Yang jelas bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi di sekitar atau di lingkup nelayan menentukan kemiskinan dan kesejahteraan mereka.

b. Kemiskinan super struktural

Kemiskinan super struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh variabel – variabel kebijakan makro yang tidak berpihak pada pembangunan masyarakat pesisir, di antaranya adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang – undangan, serta kebijakan pemerintah yang diimplemtnasikan dalam proyek dan progam pembangunan. Kemiskinan semacam ini hanya bisa diatasi apabila pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki komitmen khusus dalam bentuk tindakan – tindakan yang memihak bagi kepentingan masyarakat miskin.

c. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh variabel – variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Variabel – variabel tersebut diantaranya adalah tingkat pendidikan, pengetahuan,

adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan – pandangan tertentu serta ketaatan pada panutan. (Dharmayuni, 2007, p 19-20)

Sedangkan menurut Nikijuluw (2001), pakar ekonomi sumber daya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor – faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Faktor – faktor yang dimaksud membuat nelayan tetap dalam kemiskinannya. Smith (1979) yang mengadakan kajian pembangunan perikanan di berbagai Negara asia dan Anderson (1979) yang melakukannya di Negara – Negara Eropa dan Amerika Utara tiba pada kesimpulan bahwa kekakuan aset perikanan (*fixity and rigidity of fishing assets*) adalah alasan utama kenapa nelayan tetap tinggal atau bergelut dengan kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan itu. Kekakuan aset tersebut adalah karena sifat aset perikanan yang begitu rupa sehingga sulit untuk dilikuidasi atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan bagi kepentingan lain. Akibatnya pada saat produktivitas aset tersebut rendah, nelayan tidak mampu untuk mengalih fungsikan atau melikuidasi aset tersebut. Karena itu, meskipun rendah produktivitas, nelayan tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang sesungguhnya tidak lagi efisien secara ekonomis.

Subade dan Abdullah (1993) mengajukan argumen lain yaitu bahwa nelayan tetap tinggal pada industri perikanan karena rendahnya *opportunity cost* mereka. *Opportunity cost* nelayan menurut definisi, adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha ekonomi lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan kata lain, *opportunity cost* adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila *opportunity cost* rendah maka nelayan cenderung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien. Ada juga argumen yang mengatakan bahwa *opportunity cost* nelayan, khususnya di negara berkembang, sangat kecil dan cenderung mendekati nihil. Bila demikian maka nelayan tidak punya pilihan lain sebagai mata pencahariannya. Dengan demikian apa yang terjadi nelayan tetap bekerja sebagai nelayan karena hanya itu yang bisa dikerjakan. Panyoutou (1982) mengatakan bahwa nelayan tetap mau tinggal

dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (*preference for a particular way of life*).

Kemudian menurut Whittingham dan Townsley, meskipun kemiskinan di wilayah pesisir terlihat secara nyata, masih banyak wilayah pesisir miskin yang luput dari fokus pembangunan suatu negara. Ketika wilayah pesisir lain merasakan dampak dari pembangunan, wilayah ini justru sulit untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada

Pandangan berbeda diberikan oleh Whittingham dan Townsley yang melihat hubungan antara ekosistem laut dan kedinamisan lingkungan pesisir dengan kemiskinan di wilayah pesisir, dimana salah satu aspek kunci terjadinya kemiskinan di wilayah pesisir adalah kesempatan produktif dari spesies dan ekosistem laut yang begitu luas akan tetapi tidak bisa ditingkatkan skala ekonominya oleh masyarakat pesisir karena keterbatasan – keterbatasan yang mereka miliki. Kekompleksitasan ekosistem sebuah wilayah pesisir cenderung membuat kemiskinan yang terjadi menjadi lebih kompleks.

Terlebih lagi wilayah pesisir memiliki lingkungan yang sangat dinamis. Perubahan pasang surut air laut setiap hari dan pola perubahan cuaca dan musim merupakan faktor umum yang mempengaruhi kedinamisan ini. Wilayah pesisir juga rentan terhadap bencana alam yang terjadi tiba – tiba seperti tsunami, badai dan banjir. Perubahan – perubahan yang biasa terjadi di wilayah ini antara lain:

- a. Jumlah populasi
- b. Urbanisasi dan industrialisasi wilayah pesisir
- c. Peningkatan kerusakan habitat
- d. Peningkatan polusi dan sedimentasi
- e. Pembangunan budidaya perairan di wilayah pesisir
- f. Meningkatnya akses terhadap pasar global
- g. Meningkatnya penggunaan teknologi baru dan eksploitasi sumberdaya
- h. Menurunnya produktivitas sumber daya
- i. Penangkapan ikan yang berlebihan
- j. Perubahan iklim

Sedangkan menurut Whittingham dan Townsley, dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat miskin pesisir akibat perubahan – perubahan yang

terjadi di wilayah pesisir akan meliputi masalah keuangan, meningkatnya pengangguran, hilangnya hak – hak dasar, kriminalisasi, meningkatnya tenaga kerja dibawah umur dan meningkatnya ketidaksetaraan gender. Selanjutnya kebanyakan masyarakat miskin pesisir mengalami penurunan pendapatan sebagai akibat dari meningkatnya kompetisi yang terjadi di wilayah tersebut. Perubahan yang terjadi di wilayah pesisir akan memunculkan kesempatan, akan tetapi masyarakat memiliki kemampuan yang berbeda dalam merespon kesempatan tersebut.

Masyarakat miskin pesisir biasanya sulit untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Mereka memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi, keterampilan, pengetahuan, kepercayaan diri, dan pendidikan untuk menggunakan kesempatan tersebut. Sehingga pada akhirnya hal ini akan meningkatkan marginalisasi dan pemindahan.

Kedinamisan wilayah pesisir dan perubahan – perubahan yang kerap terjadi, menuntut masyarakat pesisir untuk terus dapat beradaptasi agar mereka dapat mempertahankan hidupnya dan juga kelestarian lingkungan pesisir. Apalagi sumber daya perairan, terutama perikanan memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat pesisir, terlebih lagi bagi masyarakat miskin.

Terlepas dari pernyataan – pernyataan diatas, pembangunan yang tidak terencana akan menimbulkan dampak negatif bagi wilayah pesisir. Hal ini tidak hanya berdampak pada proses penangkapan ikan, tetap juga terhadap hutan mangrove dan ekosistem lain yang banyak terdapat disekitar wilayah pesisir. Menurut Ayuni (2006), perusakan di wilayah pesisir merupakan dampak dari pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dan perkembangan teknologi yang pesat, sehingga lingkungan laut, khususnya di perairan pantai telah mendapat tekanan yang berat, sehingga menimbulkan kerusakan – kerusakan di berbagai tempat.

Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir, termasuk masyarakat dan lingkungan alam. Sebagai contoh adalah pembangunan pabrik galangan kapal disekitar wilayah pesisir tanpa disertai tempat penampungan limbah yang memadai. Jika limbah yang dihasilkan dibuang ke wilayah perairan disekitar pesisir, tentu saja hal ini akan mempengaruhi kualitas

sumber daya yang terdapat dalam wilayah perairan dan pada akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat pesisir yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan.

2. 5. Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan

Konsep pembangunan yang berkelanjutan pada dasarnya telah berkembang sejak lama. Akan tetapi konsep ini baru benar – benar dikenal pada tahun 1987 dalam buku yang diterbitkan oleh *World Commission on Environment and Development* atau *Brundtland Commission*.

Konsep ini berkaitan erat dengan teori Malthus (1798) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan ketersediaan pangan. Dimana pertumbuhan penduduk mengikuti deret geometrik sedangkan ketersediaan pangan mengikuti deret aritmatika. Dalam hal ini dibutuhkan usaha agar ketersediaan pangan dapat terus bertumbuh mengikuti pertumbuhan penduduk.

Konsep ini juga berkaitan erat dengan teori Meadow, dimana Meadow et al.,(1972), mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan bias dilakukan secara terus – menerus. (Fauzi, 2004, p. 230).

Menurut Komisi Brundtland (1987), pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. (Fauzi, 2004, p.231). Menurut Gupta (2004), pembangunan yang berkelanjutan diartikan sebagai kehidupan yang berkelanjutan dalam studi sosial ekonomi yang berhubungan dengan pengaturan sumber daya alam.

Berikut ini definisi – definisi dari pembangunan yang berkelanjutan dari berbagai sudut pandang:

- a. J. Coomer (1979), masyarakat yang berkelanjutan adalah mereka yang hidup dengan kesadaran akan keterbatasan lingkungan. Mereka bukanlah “masyarakat yang tidak berkembang”, akan tetapi lebih

kearah masyarakat yang menyadari keterbatasan lingkungan dan mencari alternatif lain untuk berkembang.

- b. J. Pezzey (1989), pembangunan dikatakan berkelanjutan apabila utilitas pendapatan perkapita tidak menurun karena adanya kesetaraan antar generasi
- c. D. Pearce (1987), pembangunan yang berkelanjutan adalah sebuah kondisi dimana setiap generasi akan mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya.
- d. M. Hart (2000), keberlanjutan berhubungan dengan kualitas hidup masyarakat, meskipun sistem perekonomian, sosial dan lingkungan membuat masyarakat memperoleh kehidupan yang sehat, produktif dan berarti bagi setiap seluruh lapisan, saat ini maupun di masa yang akan datang.
- e. R. Allen (1980), pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan manusia dalam jangka panjang dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. (Sors, 2001, p.4)

Saat ini, menurut Nasreen, Hossain dan Kundu (2006), istilah pembangunan yang berkelanjutan memiliki pengertian yang lebih luas dan menyangkut masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat baik di negara berkembang maupun maju. Dalam perspektif ekonomi, menurut Pearce, Markandya, dan Barbier (1990), pembangunan yang berkelanjutan secara tidak langsung berarti tidak ada generasi di masa yang akan datang yang kondisinya lebih buruk daripada generasi saat ini, dengan kata lain, masyarakat tidak boleh membiarkan kesejahteraannya menurun. (Nasreen, Hossain dan Kundu, 2006, p. 4). Dimana menurut Hamilton (2000), apabila kesejahteraan perkapita masyarakat menurun, generasi di masa yang akan datang akan hidup dengan sumber daya alam yang lebih sedikit daripada tingkat konsumsi saat itu. (Nasreen, Hossain dan Kundu, 2006, p. 4).

Kemudian menurut Tolba (1987), dalam pengertian yang lebih luas lagi, konsep pembangunan yang berkelanjutan meliputi:

- a. Bantuan bagi masyarakat yang sangat miskin, karena mereka tidak memiliki pilihan untuk bertahan hidup selain merusak lingkungan alam yang mereka miliki
- b. Dibutuhkannya inisiatif masyarakat yang memusat
- c. Manusia merupakan sumber daya

Selanjutnya menurut Allen (1980), pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk pembangunan yang ingin mencapai kepuasan dalam jangka panjang dari kebutuhan masyarakat dan usaha peningkatan kualitas kehidupan manusia. (Nasreen, Hossain, Kundu, 2006, p. 3)

Menurut Hediger (2000), keberlanjutan pembangunan tidak bisa dilihat dari sudut pandang lingkungan saja, tetapi juga dari perspektif ekonomi, sosial dan ekologi. Hal ini memberikan dua isu utama, yaitu pertama berkaitan dengan tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan, apa yang harus tetap lestari dan cara pembangunan yang seperti apa yang harus kita lakukan. Hal tersebut merupakan pertanyaan normatif yang mempengaruhi nilai keputusan mengenai tujuan masyarakat yang berkaitan dengan tujuan sistem sosial, ekonomi dan ekologi. Nilai keputusan ini terlihat dalam bentuk fungsi kesejahteraan sosial yang mengevaluasi *trade-off* diantara tujuan – tujuan pada sistem yang berbeda.

Hal yang kedua berkaitan dengan aspek positif dari pembangunan yang berkelanjutan yaitu apa yang dapat dilestarikan dan sistem seperti apakah yang akan kita peroleh. Hal ini membutuhkan pemahaman mengenai bagaimana sistem yang berbeda berinteraksi dan berkembang dan bagaimana mereka dapat diatur. Secara formal hal ini dapat ditunjukkan dalam model dinamis berbentuk persamaan diferensial dan *additional constraint*. Kombinasi sosial, ekonomi dan ekologi yang *feasible* menerangkan transformasi antar waktu sebuah perekonomian dalam lingkup yang lebih luas.

Dalam penelitian ini, pembangunan yang berkelanjutan akan dilihat juga sebagai keberlanjutan penghidupan (*sustainable livelihoods*), istilah ini digunakan karena penelitian ini merupakan penelitian sosial ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Menurut Gupta (2008), keberlanjutan penghidupan dari setiap *stakeholders* berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam.

PBB sendiri dalam United Nation Millenium Declaration, memasukkan keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu aspek dalam *Millenium Development Goals (MDG's)*. Kemudian konsep ini diadopsi oleh 200 negara dan diharapkan akan tercapai pada tahun 2015. Dalam hal ini, prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan akan menjadi bahan pertimbangan dalam setiap kebijakan dan program yang dibuat oleh suatu Negara dengan tujuan mengurangi kerusakan sumber daya alam yang terjadi. (Cullen, 2006, p. 1- 2).

Menurut Perman et al., (1996), setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama menyangkut alasan moral. Generasi kini yang menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan memiliki kewajiban moral untuk menyisakan layanan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang merusak lingkungan sehingga menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama.

Kedua, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati, misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi sehingga aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada hal yang mengancam fungsi ekologi tersebut.

Faktor ketiga yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria berkelanjutan. Kemudian seperti kita ketahui, dimensi ekonomi keberlanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergenerational welfare maximization*). (Fauzi, 2004, p. 230-231).

Menurut Harris (2000), konsep keberlanjutan dapat dirinci menjadi tiga aspek pemahaman:

- a. Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya

ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.

- b. Kelestarian lingkungan: sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber – sumber ekonomi.
- c. Keberlanjutan sosial: keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Selanjutnya menurut Harris (2000), ketiga elemen keberlanjutan ini mau tidak mau menambah kompleksitas konsep sederhana mengenai keberlanjutan yang sudah dicanangkan oleh komisi Brundtland. (Fauzi, 2004, p.233)

Selanjutnya menurut Sors (2001), terdapat empat prinsip dasar yang mendasari proses pembangunan yang berkelanjutan, yaitu:

- a. Kesetaraan; baik antar generasi (contoh: memberikan kesempatan yang sama bagi generasi di masa yang akan datang) maupun dalam satu generasi (contoh: mengurangi kesenjangan antara si kaya dan miskin dalam satu generasi)
- b. Perencanaan jangka panjang; perencanaan seringkali dianggap sebagai agenda politik jangka pendek. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil.
- c. Integrasi antara lingkungan, perekonomian dan masyarakat. Secara tradisional hal ini dilihat sebagai entitas yang berbedaa, meskipun hubungan dan timbal balik dari komponen ini merupakan dasar lain bagi keberlanjutan.

Menurut Ascher dan Healy (1990), terdapat empat tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, keempat tujuan tersebut adalah:

- a. Untuk mencapai konsumsi perkapita yang berkelanjutan pada periode yang tidak terbatas

- b. Untuk mencapai keseimbangan distribusi diantara masyarakat
- c. Untuk mencapai perlindungan alam termasuk perlindungan keberagaman sumber daya hayati
- d. Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dari setiap sektor yang ada mulai dari tingkat dasar sampai pembuatan keputusan.

Berkaitan dengan kelestarian lingkungan, menurut Hediger (2000), terdapat tiga paradigma yang berbeda mengenai kelestarian lingkungan, yaitu

a. Kelestarian yang lemah (*weak sustainability*)

Hal ini diartikan sebagai prinsip nilai ekonomi yang ditemukan dalam teori modal neoklasik. Hal ini meliputi nilai dari modal agregat termasuk modal buatan manusia, sumber daya alam yang sudah tersedia (*initial endowment*) dan aset sosial yang harus dipelihara sepanjang waktu. Dengan kata lain, hal ini berkaitan dengan keseluruhan modal. Tujuan dari hal ini adalah untuk menjaga tingkat kesejahteraan sosial

b. Kelestarian yang sangat lemah (*Very weak sustainability*)

Hal ini pada dasarnya berkaitan dengan modal ekonomi. Dalam pengertian yang lebih luas, kelestarian yang sangat lemah meliputi produksi kapasitas yang tergeneralisir dari perekonomian yang utuh. Dalam pengertian yang lebih luas, dalam kelestarian yang lemah, potensi kesejahteraan dari seluruh modal dasar dianggap utuh. Tujuan dari hal ini adalah menjaga pendapatan perkapita tetap konstan sepanjang waktu.

c. Kelestarian yang kuat

Ide ini berkembang dari analisa dasar dari ilmu ekonomi ekologi, yang menganggap perekonomian merupakan subsistem yang terbuka dari sumber daya yang terbatas dan ekosistem global yang tidak berkembang. Secara sederhana hal ini berkaitan dengan modal ekologi. Dalam versi yang sangat terbatas, kelestarian yang kuat merupakan kumpulan dari konstrain yang tidak berubah dan harus diadakan pada skala makro ekonomi. Sedangkan berdasarkan pandangan yang tidak terlalu terbatas, hal ini diartikan sebagai prinsip ekosistem yang mirip dengan pengertian

kelestarian/keberlanjutan yang berkembang saat ini, dimana pembangunan yang berkelanjutan menghasilkan dampak yang merugikan pada kualitas udara, air dan elemen lingkungan lainnya yang kemudian diminimalisir untuk melestarikan ekosistem dalam keseluruhan integritas. Tujuan dari hal ini adalah untuk menjaga modal ekologi tetap pada tingkat awalnya.

Selanjutnya Hediger (2000), mengembangkan model yang menunjukkan pengertian dari kelestarian yang lemah dan kuat. Hal ini merupakan pengembangan dari fungsi nilai social – ekologi – dan ekonomi. Dalam model ini, kelestarian yang lemah membutuhkan nilai agregat U agar tetap konstan sepanjang waktu. Akan tetapi kelestarian yang lemah ini tidak dapat ditentukan begitu saja oleh pertumbuhan pendapatan dan perubahan lingkungan, tetapi juga perubahan sosial dan makroekonomi. Hal tersebut ditunjukkan oleh persamaan di bawah ini:

$$U = U_Y Y + U_M M + U_S S + U_Q Q \geq 0 \quad 2.5$$

Dimana kemudian kelestarian yang kuat ditunjukkan oleh persamaan:

$$a. \text{ Keberlanjutan ekonomi: } U_Y Y + U_M M \geq 0 \quad 2.6$$

$$b. \text{ Keberlanjutan Sosial: } S \geq 0 \quad 2.7$$

$$c. \text{ Keberlanjutan Ekologi: } Q \geq 0 \quad 2.8$$

Dan pembangunan ekonomi (dengan pertumbuhan penduduk konstan) yang ditunjukkan oleh persamaan $Y \geq 0$. Kebutuhan minimum untuk keberlanjutan ekologi dan sosial adalah tidak berkurangnya stok modal ekologi dan sosial yang tidak berkurang, sedangkan keberlanjutan ekonomi membutuhkan nilai agregat dari pertumbuhan pendapatan dan perubahan kondisi makro ekonomi yang tidak menurun sepanjang waktu.

Menurut Norse (1993), Le Quesne dan McNally (2005), perkembangan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa dilakukan pemeliharaan terhadap kesehatan dari lingkungan. (Cullen, 2006, p. 1). Selanjutnya, menurut Sors (2001), pembangunan yang didasarkan pada PDB, cenderung tidak berkelanjutan, dengan kata lain hal ini tidak bisa dilanjutkan dengan pasti karena lingkungan dalam kegiatan ekonomi bersifat dependen dan tidak dapat memenuhi tekanan pembangunan dalam jangka panjang. Sebagai tambahan, pertumbuhan ekonomi

akan meningkatkan pengeluaran sosial. Hal ini terjadi karena lingkungan dan biaya sosial dieksternalisasikan dalam PDB, kemudian apabila hal ini digunakan sebagai alat ukur kemajuan pembangunan, degradasi sosial dan lingkungan tidak akan dihitung, dan oleh karena itu hal ini dapat menjadi pengeluaran pada kemajuan ekonomi.

Auty (2003), dalam penelitiannya menggunakan EARA (*Environmental and Natural Resource Accounting*), untuk melihat habisnya sumber daya alam yang terbatas. Dalam EARA, PNB (Produk Nasional Bruto) merupakan identitas dari Standar Perhitungan Nasional (*Standard National Accounts (SNA)*) yang menahan investasi dan output karena setiap tahunnya beberapa modal yang dimiliki terdepresiasi. Hal ini hanya dikoreksi dalam SNA dengan menghitung Produk Nasional Netto (PNN) yang sama dengan PNB dikurangi depresiasi modal yang dimiliki per tahun yang terlihat dalam ENP1. Selanjutnya dengan mengurangi biaya kerusakan lingkungan akan diperoleh ENP2, yang dirumuskan oleh persamaan di bawah ini:

$$ENP_2 = GNP - D_p - D_r - D_e + E \quad 2.9$$

Dimana :

ENP 2 = *Environmental National Product* yang disesuaikan untuk melihat habisnya sumber daya alam yang terbatas

PNN = Produk Nasional Netto

D_p = Depresiasi aset yang dihasilkan

D_r = Habisnya aset sumber daya alam yang terbatas

D_e = Habisnya asset lingkungan

E = Peningkatan tingkat pendidikan netto

Ukuran yang biasa dipakai untuk menghitung habisnya sumber daya yang terbatas adalah harga netto, yang menghitung koefisien habisnya sumber daya alam per tahun sebagai total rente (pendapatan dikurangi keseluruhan biaya produksi dari produsen yang efisien termasuk resiko pengembalian investasi). Meskipun metode ini cenderung menekan koefisien habisnya sumber daya alam (*depletion coefficient*), karena lebih memasukkan biaya rata – rata daripada biaya marginal. Ukuran alternatif dari koefisien habisnya sumber daya alam adalah “biaya pengguna” yang membagi rente kedalam dua komponen yaitu:

1. Komponen pendapatan yang dapat dikonsumsi oleh generasi di masa yang akan datang, dan
2. Komponen modal yang rentenya didefinisikan sebagai jumlah investasi setiap tahun untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk menggantikan pendapatan dari sumber daya ketika sumber daya tersebut habis.

Disamping itu tidak ada konsensus yang menyebutkan bagaimana mengukur biaya kerusakan terhadap lingkungan, selain dengan menghitung ENP2. Penyesuaian ini berdasarkan kepada produksi yang hilang dari sumber daya yang tercemar dan/atau biaya dari penyakit dan kerusakan akibat emisi.

Selanjutnya Pearce et al. (1996), mengatakan bahwa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, ENP₂ tidak boleh berkurang sepanjang waktu. Hal ini menghitung tingkat simpanan asli sebagai indeks keberlanjutan dan menjelaskan tingkat simpanan asli dengan:

$$GS = GNP - C - G - D_p - D_r - D_e + E \quad 2.10$$

Dimana:

GS = Simpanan asli (*Genuine saving*)

C = Konsumsi

G = Konsumsi pemerintah

PNN, D_p, D_r, D_e dan E memiliki definisi yang sama dengan persamaan 1 diatas. Untuk keberlanjutan, tingkat simpanan asli harus lebih besar atau sama dengan penjumlahan dari depresiasi barang modal yang dihasilkan dikurangi modal sumber daya alam yang habis, dikurangi degradasi modal lingkungan (Auty, 2003, p.15)

Berkaitan dengan wilayah pesisir, PBB (2002) dan Wilkinson (2004) menyebutkan, bahwa dalam *World Summit on Sustainable Development* di Johannesburg tahun 2002, dikatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan pengurangan angka kemiskinan secara global, membutuhkan wilayah perairan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pertemuan ini kemudian menaruh perhatian pada terumbu karang, hutan mangroves dan ekosistem perairan dangkal lainnya. (Cullen, 2006, p.)

Akan tetapi menurut Elliott et al. (2001), hambatan utama pembangunan yang berkelanjutan sumber daya pesisir adalah kemiskinan dan kurangnya penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, yang pada umumnya menggantungkan kehidupan mereka dengan menjual ikan dan sumber daya perairan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. (Cullen, 2006, p.12)

2. 6. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi

Menurut Daly dan Cobb (1994), pemberdayaan adalah proses terus menerus individu dan kelompok masyarakat untuk mewujudkan tindakan kolektif. Sedangkan menurut Satiman (2002), kata pemberdayaan secara umum adalah suatu cara dimana orang – orang, organisasi atau komunitas mampu mengendalikan atau menguasai kehidupan mereka. Pemberdayaan dapat dipandang sebagai suatu proses maupun tujuan. Jika dikaitkan dengan konteks kemiskinan, menurut Kumar (2005), pemberdayaan berarti membuat masyarakat miskin dapat meningkatkan kekuatannya, membangun kapasitas dan kepercayaan dirinya untuk masuk kedalam proses pembangunan dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki.

Menurut Kumar (2005), pemberdayaan tidak hanya sulit untuk digambarkan tetapi juga sulit untuk dicapai karena prosesnya yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan memiliki banyak dimensi yang saling berkaitan. Sedangkan menurut Martinsson (2007), pemberdayaan sangatlah rumit karena terdapat proses yang bersifat non linear dalam pencapaiannya, proses tersebut saling berhubungan dan multidinamis pada setiap tingkatan. Selanjutnya pemberdayaan harus dilihat sebagai kegiatan jangka panjang yang akan memberikan dampak secara individual, oleh karena itu kegiatan pemberdayaan tidak boleh dibebani oleh jangka waktu tertentu ataupun hasil tertentu.

Sedangkan Martinsson (2007), mengatakan bahwa pemberdayaan dapat dilihat sebagai proses transformatif yang akan memberikan dampak secara personal dan merupakan bagian dari keterkaitan antara tingkatan struktural yang berbeda. Kemudian menurut Kabeer (2004), proses transformatif tersebut melibatkan tindakan politis yang berasal dari pengalaman sehari – hari yang

melibatkan individu pada tingkatan yang paling bawah menghadapi pihak birokrat yang ada. (Martinsson, 2007, p. 24).

Menurut Yuniarsih (2005), konsep pemberdayaan masyarakat muncul dari suatu keadaan di mana terjadi kesenjangan yang diakibatkan adanya sebagian masyarakat yang tidak mampu mengikuti proses transformasi yang terjadi dalam segala bidang sosial, ekonomi, demografi, teknologi dan lain – lain, sehingga perlu diberdayakan agar tidak tertinggal. Dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang mandiri melalui pemberdayaan masyarakat maka beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kelembagaan/institusional dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif baik internal maupun eksternal sehingga tercipta akses dan peluang, mengupayakan pembangunan organisasi untuk menggalang potensi kelompok dan memberikan wadah kerjasama, dan meningkatkan pembangunan manusia, individu, keluarga dan komunitas agar tercipta suatu produktifitas masyarakat secara ekonomi dan efektif secara sosial.

Menurut Henderson dan Thomas (1987), pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam mengontrol atau mengatur kondisi tempat tinggal dan bekerja dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Menurut Kumar (2005), dengan adanya pemberdayaan, tidak hanya masyarakat saja yang diuntungkan tetapi juga organisasi yang terkait dalam proses pemberdayaan tersebut. Selain itu juga hal ini dibutuhkan dalam proses negosiasi, dimana negosiasi memiliki kecenderungan menjadi lebih berhasil ketika pihak – pihak yang bernegosiasi memiliki tingkatan kekuatan yang sama.

Menurut A.M.W Pranaka (1996), prinsip dan asumsi pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Semua manusia memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan
- b. Setiap manusia mempunyai hak yang sama
- c. Masalah manusia tidak hanya ekonomi dan kebijakan tetapi juga personal
- d. Pemberdayaan adalah konsep fasilitasi (Satiman, 2002, p.)

Menurut Lord dan Hutchison (1993), pemberdayaan dilakukan dengan dasar tidak adanya distribusi yang merata diantara masyarakat yang tercermin dalam pengalaman dan lemahnya kekuatan masyarakat tersebut. Kekuatan

tersebut memiliki sumber yang berbeda – beda, sebagai contoh sikap, organisasi, kekayaan, kesejahteraan dan tingkat sosial. Kemudian Kumar (2005), yang menjadi dasar proses pemberdayaan adalah kepercayaan bahwa masyarakat miskin dan kelas menengah kebawah harus bisa merubah kondisi komunitas dan lingkungan tempat mereka tinggal serta meningkatkan kemampuan mereka dengan usaha mereka sendiri, termasuk dalam membangun kondisi perekonomian dan social. Dalam hal ini mereka harus bisa mengidentifikasi sumber daya baru dan kesempatan yang ada untuk mengembangkan pendekatan baru demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan berkaitan dengan banyak hal, dimana menurut Ortiz, pemberdayaan dan mobilisasi sosial berhubungan secara intrinsik dengan agenda pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada rakyatnya. Sedangkan menurut Martinsson (2007), dalam pelaksanaannya pemberdayaan berhubungan dengan berbagai bentuk kekuasaan yang terbentuk dalam interaksi sosial. Menurut Kabeer (2001), Parpart et al (2002), Chant (2006), pemberdayaan berkaitan dengan berbagai bentuk kekuatan (*Power*) yang bersifat multidimensi untuk memilih dan menentukan prioritas (Martinsson, 2007, p.22), dimana menurut Martinsson (2007), kekuatan ini terbentuk dan terlaksana melalui interaksi social. Selanjutnya kekuatan dalam konteks ini menurut Parpart et.al (2002) dan Rowlands (1997), sulit untuk diidentifikasi meskipun ditunjukkan sebagai kontrol bagi sumber daya, norma, dominansi atau subordinasi yang ada. Kekuatan merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam strategi pembangunan dan hubungan antara pihak – pihak yang ada.

Kabeer (1994), menggambarkan keterkaitan kekuatan dengan pemberdayaan melalui empat hal dibawah ini, yang kemudian digunakan untuk memahami pemberdayaan sebagai sesuatu yang multidimensi;

- a. *Power Over*, mengacu kepada sumber daya, manusia dan struktur. Pemberdayaan dalam hal ini adalah akses untuk memperoleh ketiga hal tersebut.
- b. *Power Within*, mengacu kepada kesadaran individu, rasa percaya dan kepedulian diri, persepsi dan pemahaman kritis terhadap perbedaan atas realita yang dihadapi oleh masing – masing individu

- c. *Power With*, mengacu kepada kolektifitas, partisipasi dan kemampuan untuk menggerakkan dan mengorganisir secara politis untuk mencapai "*Power To*"
- d. *Power To*, stimulasi perubahan, transformasi, berkontribusi dalam pembuatan keputusan dengan memberikan ide – ide dan pengaruh. (Martinsson, 2007, p.23)

Selanjutnya menurut Martinsson (2008), proses pemberdayaan sangatlah rumit, karena tidak ada proses linear dalam pelaksanaannya, melainkan saling berhubungan dan multi dinamis pada setiap tingkatan. Paling tidak terdapat tiga tingkatan yang harus dicapai dari program pemberdayaan, yaitu:

- a. Pemberdayaan pada tingkat individu, berupa pengembangan potensi dan keterampilan
- b. Pemberdayaan pada tingkat kelompok/organisasi, yakni yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi kelompok dan pembangunan
- c. Pemberdayaan pada tingkat kesisteman, yakni berwujud meningkatnya kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosiologis maupun politis.

Kemudian menurut Parpart et, al (2002), dalam prosesnya, untuk mengidentifikasi dan memfasilitasi pemberdayaan individu, proses pemberdayaan yang ada harus dilihat dalam konteks struktur ekonomi dan politik, norma budaya discourses, praktek institusional dan lain – lain. Dengan kata lain, proses pemberdayaan individu dipengaruhi oleh proses – proses yang ada pada setiap tingkatan. (Martinsson, 2007, p.24)

Proses pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan lebih baik apabila mengikutsertakan seluruh komponen yang ada di masyarakat. Pendekatan yang baik untuk digunakan adalah *Bottom Up* karena melalui pendekatan ini, akan diketahui dengan pasti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pendekatan secara *bottom up* menurut Suadnya, Ross dan Chamala, akan menempatkan masyarakat sebagai pusat dari pembangunan. Selain itu juga hal ini memungkinkan semua faktor dan sumber daya termasuk masyarakat lokal dan dan pihak diluar masyarakat berpartisipasi dalam usaha pemberdayaan. Hal ini memungkinkan

masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya melalui partisipasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan lainnya yang akan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Selain itu juga karena masyarakat berpartisipasi dari awal pelaksanaan proses pemberdayaan hingga proses implementasi pada akhirnya akan timbul rasa memiliki di dalam diri mereka.

Kemudian Menurut Vogt dan Murrell (1990), dalam Suadnya, Ross dan Chamala proses yang terjadi berdasar kepada asumsi yang sinergis mengenai kekuatan, oleh karena itu proses pemberdayaan lebih merubah kekuatan pada situasi tersebut daripada meredistribusikan ini. Hubungan kemasyarakatan yang lebih baik akan tercapai dengan dimasukkannya inisiatif dari masyarakat dan kapasitas pihak pemerintah dan anggota masyarakat. Hal ini akan menciptakan pemberdayaan yang lebih baik, keikutsertaan dan membangun modal social bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Kumar (2005), dalam melihat pemberdayaan nelayan menyatakan bahwa komunitas nelayan sangatlah rumit, memiliki struktur yang berbeda – beda, sulit untuk dijelaskan, diatur dan membutuhkan kegiatan pemberdayaan. Dalam hal ini, pemberdayaan dibangun diatas beberapa prinsip, antara lain;

- a. Manajemen penangkapan dan pengolahan ikan akan berjalan dengan baik setelah adanya peningkatan dalam pemenuhan kesejahteraan nelayan dalam aspek, kesehatan, pendidikan, pendapatan, tingkat kepercayaan.
- b. Membantu masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri. Pemberian bantuan dan sumbangan mengandung banyak kelemahan, karena hanya akan meningkatkan ketergantungan nelayan. Mereka membutuhkan kerjasama dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas mereka
- c. Masyarakat seharusnya tidak diawasi atau dipaksa untuk berubah, melainkan distimulasi melalui pemberian informasi, bimbingan dan intervensi untuk meningkatkan kapasitas diri
- d. Tantangan, kesulitan dan pertahanan akan membuat masyarakat menjadi lebih kuat

- e. Partisipasi dalam pembuatan keputusan, perencanaan dan implementasi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas
- f. Membuat masyarakat menyadari potensi dan kekuatan yang dimiliki merupakan salah satu bentuk pemberdayaan
- g. Pembangunan yang tidak sesuai pada akhirnya tidak akan berkelanjutan
- h. Meningkatkan kepedulian adalah hal yang harus dilakukan, akan tetapi jangan sampai menimbulkan ekspektasi yang berlebihan di masyarakat
- i. Terpenuhinya tahapan – tahapan pemberdayaan adalah elemen yang penting proses pemberdayaan, dimana masyarakat mampu memberdayakan dirinya sendiri.
- j. Pemberdayaan masyarakat dapat dicapai hanya dengan memberdayakan baik laki – laki maupun perempuan dalam masyarakat
- k. Semakin banyak pihak yang memperoleh akses terhadap fasilitas dan pelayanan umum, maka semakin besar tingkat keberdayaan mereka
- l. Informasi adalah kekuatan, dan informasi merupakan dimensi yang penting dalam pemberdayaan
- m. Masyarakat akan lebih baik jika dilihat secara keseluruhan

Selanjutnya Menurut Satiman (2002), upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi/daya yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam kerangka ini diperlukan langkah – langkah lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan atau input serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang

- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah proses yang dapat membuat pihak yang lemah menjadi lebih lemah.

Menurut Suadnya, Ross dan Chamala, ketika pemberdayaan telah dilakukan maka terdapat lima aspek yang dapat menunjukkan bahwa seseorang telah merasa diberdayakan. Kelima aspek tersebut antara lain:

- a. Kontrol: tingkatan dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi strategi secara administratif atau menjalankan pekerjaan (Ashforth 1989). Dengan kata lain pemberdayaan adalah kontrol bagi keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka
- b. Kompetensi; merupakan kepercayaan individu mengenai kemampuannya untuk menjalankan aktivitas dengan keterampilan yang ia miliki (Thomas dan Velthouse 1990)
- c. Pilihan; merupakan perasaan memiliki pilihan untuk dilaksanakan, dipilih dan diatur (Deci et al. 1989)
- d. Tugas dan tujuan yang sangat bernilai bagi individu berdasarkan standarnya (Thomas dan Velthouse 1990)
- e. Akses terhadap informasi, dukungan dan sumber daya

Konsep pemberdayaan tidak bisa lepas dari konsep partisipasi. Terdapat kecenderungan dimana program pemberdayaan yang menggunakan pendekatan dari atas (*top-down approach*), pada akhirnya tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya rasa memiliki terhadap program oleh masyarakat, selain itu juga tidak jarang, program yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai proses evaluasi. Dalam hal ini masyarakat diposisikan sebagai subjek sekaligus sebagai objek. Hingga pada akhirnya tidak hanya masyarakat saja yang menjadi berdaya tetapi pembangunan di lingkungan masyarakat tersebut akan terus berkelanjutan.

Supriyadi (2001), mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan atau keterlibatan secara sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Partisipasi adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek – proyek

pembangunan untuk masyarakat. Menurut Oetomo (1994) dan Davis (1990), partisipasi adalah keterlibatan mental dan pikiran dan perasaan seseorang didalam suatu kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan atau bantuan kepada kelompok tersebut dalam upaya mencapai tujuan bersama dan turut bertanggung jawab kepada kegiatan yang bersangkutan (Taupiqurahman, 2005, p.26).

Kemudian Taupiqurahman (2005), mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan secara sadar untuk mengambil bagian dalam menentukan hal – hal yang menyangkut atau mempengaruhi hidup dan penghidupan masyarakat itu sendiri. Sedangkan dalam konteks Negara, Tjokroamidjojo (1984) dan Ndaraha (1987), medefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat atau rakyat sesuai mekanisme proses pemerintah dalam suatu Negara, turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan. (Supriyadi, 2001, p.26)

Menurut Conyers (1991), terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat penting dalam proses pembangunan, yaitu pertama bahwa partisipasi masyarakat dapat menjadi telinga untuk memperoleh informasi mengenai kondisi permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Kedua bahwa efektivitas dan efisiensi dari program atau proyek pembangunan akan lebih mudah dicapai, apalagi dalam kondisi adanya kontribusi masyarakat sehingga ini dapat mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu implementasi pembangunan. Ketiga bahwa partisipasi secara etik-moral merupakan hak demokrasi bagi rakyat, sehingga dengan partisipasi yang maksimal dari masyarakat tersebut secara tidak langsung meredam potensi resistensi dan protes social sebagai adanya efek – efek samping pembangunan.

Menurut Duselldrop (1989), terdapat tiga tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan , yaitu:

- a. Partisipasi bebas, yang terdiri atas partisipasi spontan atau partisipasi terpengaruh. Partisipasi spontan terjadi bila seseorang mengambil inisiatif dalam porses pembangunan, sedangkan partisipas terpengaruh terjadi apabila partisipasi yang dilakukan oleh individu muncul karena dipengaruhi oleh pihak lain.

- b. Partisipasi dipaksakan, merupakan partisipasi yang dilakukan oleh seseorang karena adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain.
- c. Partisipasi karena kebiasaan merupakan partisipasi yang berorientasi pada tuntutan nilai – nilai dan norma – norma dalam kehidupan masyarakat. (Yuniarsih, 2005, p.)

Menurut Tjokroamidjojo (1999), partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus memperhatikan empat aspek, yaitu:

- a. Arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat
- b. Perlu dikembangkan kemampuan – kemampuan masyarakat dan terutama organisasi – organisasi masyarakat sendiri untuk mendukung proses pembangunan
- c. Kegiatan yang harus dilakukan harus nyata dan konsisten dengan arah strategi dan rencana yang telah ditentukan dan
- d. Memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi menyangkut kesejahteraan mereka serta dalam memetik hasil program pembangunan. (Taupiqurahman, 2005, p. 17)

Kemudian menurut Sutrisno (1995), partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi rakyat dalam pembangunan, melainkan adalah pertama kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. Kedua untuk melembagakan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ketiga untuk membangkitkan partisipasi rakyat dalam pembangunan harus diciptakan suatu perubahan dalam persepsi pemerintah terhadap kritik pikiran alternatif yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat dinamika pembangunan itu sendiri, karena kritik dan pikiran alternatif itu merupakan suatu bentuk dari partisipasi rakyat dalam pembangunan. (Taupiqurahman, 2005, p.)

Pada dasarnya tahapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah menurut Cohen dan Uphoff (1997), meliputi empat tahapan yaitu:

- a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan – kegiatan perencanaan program pembangunan serta menyusun

rencana kerjanya. Tahapan ini merupakan tahapan paling ideal untuk mengikutsertakan masyarakat, karena masyarakat diajak untuk mendefinisikan apa kebutuhan atau masalah mereka, mendiskusikan bagaimana cara yang tepat untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan mereka, memikirkan bagaimana proses penyelesaian masalah/pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan serta merundingkan bagaimana penyelesaian masalah/pemenuhan kebutuhan tersebut dinilai keberhasilannya (Taupiqurahman, 2005, p.26)

b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam bentuk sumbangan pemikiran, bantuan, tenaga, uang dan materi, serta keikutsertaannya sebagai salah satu unsur/peserta dalam suatu program pembangunan.

c. Tahap menikmati hasil

Tahap menikmati hasil merupakan segala sesuatu yang bisa diperoleh masyarakat setelah adanya program pembangunan yang tidak bisa mereka dapatkan sebelum ada program pembangunan di daerahnya.

d. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap untuk mengetahui seberapa besar hasil dari suatu program pembangunan dan bagaimana sistem pengawasan untuk menjelaskan arah serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program pembangunan tersebut. (Yuniarsih, 2005, p.17)

Sedangkan menurut Mubyarto, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat dibedakan dalam tiga tahap, yaitu:

a. Tahap perencanaan

Masyarakat desa ikut berpartisipasi mengajukan usulan atau rencana pembangunan desa. Biasanya tidak seluruh masyarakat ikut terlibat melainkan mereka diwakili oleh perwakilan yang duduk dalam pemerintahan desa atau tokoh masyarakat desa.

b. Tahap pelaksanaan

Masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program baik secara fisik maupun non fisik

c. Tahap pemanfaatan

Masyarakat desa ikut berpartisipasi memanfaatkan dan menikmati hasil – hasil pembangunan. (Yuniarsih, 2005, p.17-18)

Membangkitkan dan mengelola modal sosial merupakan salah satu hal yang harus dicapai melalui partisipasi masyarakat. Menurut Fukuyama, modal sosial adalah serangkaian nilai atau norma – norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. Dimana kemudian menurut Ridel (1997), terdapat tiga parameter modal social yaitu kepercayaan (*trust*), norma (*norms*) dan jejaring (*networks*), dimana kemudian menurut Putnam (1995), modal sosial mengacu pada aspek – aspek utama organisasi sosial yang dapat meningkatkan efisiensi dalam masyarakat. Modal sosial hanya dapat dibangun jika tiap individu belajar dan mempercayai individu lain untuk membangun tanggung jawab dan komitmen.¹⁰

Berdasarkan pernyataan Putnam (1995) tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik apabila diantara masyarakat tersebut tidak ditemui kepercayaan (*trust*). Menurut Fu (2004), kepercayaan memiliki hubungan yang erat dengan modal social. Dimana menurut Coleman (1988), sistem kepercayaan yang saling menguntungkan merupakan bentuk dari modal sosial yang merupakan awal dari kewajiban dan ekspektasi di masa yang akan datang. (Fu, 2004. p. 13).

Molering (2001) yang berusaha mengelaborasi pemikiran Simmel tentang *trust*, mengkonseptualisasikan *trust* sebagai suatu kondisi dari harapan yang ada mengenai tindakan dan tujuan masyarakat. Oleh karena itu hal ini dilihat sebagai dasar bagi individu untuk mengambil resiko, bekerjasama, mengurangi kekompleksitasan sosial, ketertiban dan modal sosial (Dharmawan, 2002, p 4).

Sedangkan menurut Putnam (1995), *trust* adalah bagian penting dari modal masyarakat untuk berdemokrasi secara sehat (Dharmawan, 2002, p 5). Sedangkan Fukuyama (2001) mengatakan bahwa *trust* adalah salah satu “ruh” dari modal sosial. Semangat tersebut kelak akan menentukan dan memberikan corak budaya dari suatu sistem sosial kemasyarakatan (Dharmawan, 2002, p 5). Dimana

¹⁰ Dikutip dari pertemuan sesi -3 kuliah PBM – Modal di Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Lokal

menurut Nahapiet dan Ghoshal (1998), kepercayaan merupakan kunci dari dimensi hubungan dalam modal sosial, dimana hubungan antara kepercayaan dan modal sosial merupakan bagian dari hasil hubungan yang erat antara sumber kepercayaan dengan sumber modal sosial. (Fu, 2004, p.13).

Dari rumusan Mollering diatas, *trust* membawa konotasi aspek negosiasi harapan dan kenyataan yang dibawakan oleh tindakan sosial individu-individu atau kelompok dalam kehidupan kemasyarakatan. Ketepatan antara harapan dan realisasi tindakan yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok dalam menyelesaikan amanah yang diembannya, dipahami sebagai tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan akan tinggi, bila penyimpangan antara harapan dan realisasi tindakan, sangat kecil. Sebaliknya, tingkat kepercayaan menjadi sangat rendah apabila harapan yang diinginkan tak dapat dipenuhi oleh realisasi tindakan sosial (Dharmawan, 2002, p 4).

Menurut Coleman (1990), kepercayaan hanya bisa timbul dalam kelompok masyarakat yang informal, sedikit, dan homogen, dimana struktur sosial sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan modal sosial dan juga kepercayaan. (Fu, 2004, p.15 – 16). Selanjutnya menurut Putnam (1993), kepercayaan sosial dapat tumbuh dari hukum timbal balik, dimana hal ini sama dengan pembentukan modal sosial. Sedangkan menurut Fukuyama (1995), kepercayaan merupakan ekspektasi yang tumbuh di masyarakat dan berasal dari kejujuran, tindakan yang kooperatif, dan rasa saling membagi diantara anggota dalam masyarakat. (Fu, 2004, p.20)

2.7. Penelitian Sebelumnya

1. Penelitian Hossain dan Shamsuddoha

Dalam penelitiannya yang berjudul *Improving Coastal Resource Management for Socio-Economic Development of Rural Communities in Cox's Bazar: A Participatory Appraisal*, Hossain dan Shamsuddoha (2008), ingin melihat isu – isu dan mencoba untuk mengidentifikasi keinginan masyarakat pesisir yang sangat bergantung kepada sumber daya alam disekitar di wilayah Cox Bazar Bangladesh, secara bottom up. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui,

seperti lahan kosong, hutan mangrove, sungai, perbukitan, pulau – pulau, pasir pantai, dan batu karang. Sebagian besar pendapatan masyarakat diperoleh dari hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan system *GIS (Geography Information System)* untuk mengetahui kondisi geografis wilayah penelitian dan PRA dalam mengidentifikasi keinginan jangka panjang masyarakat. Metode PRA digunakan dengan asumsi bahwa peran serta masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan dan program di wilayah pesisir kebijakan dan program pengelolaan wilayah pesisir akan meningkatkan rasa memiliki mereka sehingga, kebijakan dan program tersebut akan lebih berhasil dijalankan.

Sebagian besar masyarakat di wilayah ini bekerja sebagai petani, penangkap udang, dan nelayan, bahkan tak jarang seorang penduduk memiliki dua pekerjaan sekaligus. Pekerjaan masyarakat ini bersifat musiman dan sangat bergantung kepada perubahan musim yang terjadi. Berdasarkan pohon masalah yang dibuat, permasalahan yang terjadi disebabkan oleh, gangguan terhadap air laut, bencana alam, meningkatnya ketinggian air laut dan tambak dibagian hulu. Keempat masalah utama tersebut berdampak pada rusaknya keanekaragaman hayati dan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan di wilayah ini.

2. Penelitian Aluko (2004)

Dalam penelitian yang berjudul *Sustainable Development, Environmental Degradation and The Entrenchment of Poverty in The Niger Delta of Nigeria*, Aluko (2004), mengambil wilayah Niger Delta di Nigeria sebagai lokasi penelitian. Niger Delta sangat kaya akan sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, dan memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang.

Akan tetapi proses pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang banyak dilakukan oleh perusahaan minyak internasional, dan masyarakat tersebut tidak diikuti oleh kebijakan dan tindakan yang memadai. Akibatnya masyarakat Niger Delta masih hidup dalam kemiskinan dan mengalami degradasi lingkungan. Melalui penelitian ini Aluko (2004), mencoba untuk mengetahui, bagaimana degradasi lingkungan dapat mempertahankan kemiskinan di Niger Delta Nigeria

dan langkah – langkah pengelolaan lingkungan apa saja yang harus dilakukan di Niger Delta untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui wawancara yang mendalam dan melihat data primer dan sekunder. Dari metode tersebut diketahui bahwa 95% responden mengatakan bahwa penambangan minyak dan degradasi lingkungan merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan dan masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk meningkatkan taraf hidupnya. 75.6% responden mengatakan degradasi lingkungan merupakan salah satu penyebab menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Kemudian, 80.2% responden mengatakan perusahaan penambangan minyak, tidak memberikan kompensasi yang pantas terhadap kerusakan yang dibuat, dan 64% responden mengatakan kemiskinan tetap bertahan di Niger Delta karena perusahaan minyak terus mengeksploitasi lingkungan yang sama saja artinya tidak dapat mempertahankan kelestarian lingkungan.

Dari hasil penelitian tersebut, Aluko (2004), menyarankan agar perencanaan lingkungan dan kemiskinan harus dibuat terpisah. Pada awalnya harus dipastikan bahwa kebijakan penurunan kemiskinan dan lingkungan merupakan komponen utama dalam program kemiskinan dan kementerian lingkungan menjadi badan koordinasi bagi program ini. Selanjutnya masyarakat yang dirugikan akibat kerusakan lingkungan harus diberi kompensasi yang layak agar mereka tidak terjerumus dalam kemiskinan.

Wilayah Niger Delta juga harus diberikan infrastruktur sosial seperti air minum yang bersih, listrik, sekolah, rumah sakit, jalan penghubung yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan minyak yang beroperasi di Niger Delta harus mengikuti standar lingkungan dengan baik, mereka harus mengatur tindakan eksploitasi yang mereka lakukan agar lingkungan tidak terdegradasi, hal ini merupakan salah satu cara agar pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai. Selain itu juga perusahaan minyak ini harus menyediakan lapangan pekerjaan dan beasiswa bagi kaum muda di wilayah ini. Terakhir Aluko (2004), menyarankan adanya pertemuan nasional yang dapat membahas mengenai masalah – masalah yang dihadapi oleh Niger

Delta dan apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertemuan – pertemuan sebelumnya menunjukkan bahwa Nigeria harus melakukan restrukturisasi terhadap masyarakat lokal, warga negara minoritas dan setiap segmen dalam masyarakat agar memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menentukan proses – proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

3. Penelitian Nasreen, Hossain, Kundu

Dalam penelitiannya yang berjudul *The Interrelationship Between Poverty, Environment, and Sustainable Development in Bangladesh: An Overview*, Nasreen, Hossain dan Kundu memfokuskan penelitiannya pada permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan di Bangladesh dari sudut pandang perlindungan lingkungan dan keseimbangan ekologi. Dalam hal ini ketiga hal tersebut (kemiskinan, pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan) menjadi variabel utama.

Bangladesh mengalami masalah kemiskinan yang cukup rumit, dimana bencana alam seperti banjir, badai dan tanah longsor, merupakan salah satu faktor utama terjadinya kemiskinan. Disisi lain, Bangladesh juga menghadapi masalah lingkungan yang cukup berat seperti akibat dari pemanasan global, tanah longsor, banjir, penipisan lapisan ozon, urbanisasi yang tidak direncanakan dengan baik, air tanah yang terkontaminasi racun arsenik, budidaya udang yang mencemari air laut, deforestasi, langkanya sumber daya energi, dan limbah yang berbahaya.

Akan tetapi, perhatian pemerintah dan organisasi internasional lebih terfokus pada usaha penanggulangan kemiskinan, sedangkan masalah degradasi lingkungan terabaikan, padahal degradasi lingkungan berhubungan dengan kemiskinan yang terjadi. Selain itu juga, banyak organisasi internasional dan perusahaan asing yang memaksa pemerintah Bangladesh untuk membuat kebijakan yang tidak berkelanjutan yang pada akhirnya menyebabkan degradasi lingkungan.

Pemerintah Bangladesh membuat *Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP)*, yang berisi rencana dan strategi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, dimana salah satunya adalah mengenai lingkungan dan pembangunan

yang berkelanjutan. Isu – isu yang diangkat adalah konservasi lingkungan, degradasi lahan pertanian dan salinitas, keanekaragaman hayati, sumber daya alam yang bersifat *common resources*, energi bagi masyarakat desa, penanaman hutan dan urbanisasi yang berkaitan dengan lingkungan. Akan tetapi PRSP ini dianggap kurang partisipatif dan melihat kemiskinan sebagai isu politik.

Selanjutnya menurut Nasreen, Hossain dan Kundu pada dasarnya masyarakat Bangladesh membutuhkan pemenuhan bahan pangan. Hal tersebut merupakan hak dasar untuk menentukan akses untuk memelihara kehidupan mereka. Bangladesh telah mengadaptasi kebijakan pembangunan negara – negara barat akan tetapi ternyata hal tersebut gagal untuk mengurangi kemiskinan dan penambahan populasi.

Faktor – faktor yang menyebabkan hal ini adalah, kurangnya *good governance* dan institusi politik, korupsi, penggunaan sumber daya alam yang tidak terencana, proses industrialisasi dan urbanisasi, disparitas sosial, eksploitasi dan ketidaksetaraan. Dalam hal ini dibutuhkan strategi yang komprehensif untuk menjaga kelestarian lingkungan yang dapat mengurangi kemiskinan.

4. Penelitian Wiber, Charles, Kearney dan Berkes (2008)

Artikel yang berjudul *Enhancing Community Empowerment Through Participatory Fisheries Research*, merupakan laporan penelitian dari Wiber, Charles, Kearney dan Barkes yang bertujuan untuk menunjukkan hasil dari adanya pendekatan partisipatif peneliti dalam proses pemberdayaan kehidupan masyarakat nelayan di wilayah Scotia-Fundy Kanada. Penelitian ini sendiri dilakukan selama 10 tahun (1993 – 2003) dan melibatkan beberapa organisasi perikanan, tiga organisasi non-profit, empat universitas dan beberapa daerah yang menjadi objek utama penelitian (*first nation*). Pendekatan partisipatif ini merupakan jembatan bagi gap yang terjadi antara masyarakat dengan pihak – pihak seperti pemerintah.

Dalam penelitian ini, masyarakat merupakan institusi yang menjadi fokus utama untuk pengelolaan yang berbasis masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap daerah diteliti dengan masalah yang berbeda, antara lain: melihat pengaruh *Marshall Decision* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kanada, melihat

pengaruh ekonomi dari jumlah ikan dasar laut, mendata pilihan masyarakat untuk mengetahui perannya dalam proses pengelolaan, memberikan pengetahuan diantar masyarakat melalui pelatihan, mengetahui peran wanita dalam komunitas nelayan.

Penelitian partisipatif ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui dua hal, yaitu: landasan yang lebih baik untuk penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan membangun masyarakat pesisir yang lebih berkelanjutan, dan meningkatkan modal sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya dalam pelaksanaan penelitian partisipatif ini diketahui bahwa, pengawasan terhadap masyarakat tidak boleh terlalu ketat. Harus ada hubungan dan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan peneliti. Selain itu juga fokus peneliti harus lebih tertuju pada proses yang dijalankan bukan hasil yang akan diperoleh.

Dari penelitian ini diketahui bahwa, untuk melihat mengembangkan *capacity building*, kita harus melihat biaya dan keuntungan yang diperoleh dari berbagai pendekatan. Selain itu juga, modal sosial tidak dapat dianggap sebagai “dana”, melainkan sebagai proses yang membutuhkan kepercayaan diantara pihak – pihak yang terkait. Proses ini merupakan proses politis yang bisa saja memiliki tujuan yang berbeda untuk memperoleh hasil yang berbeda pula, bergantung pada jumlah faktor yang ada.

Penelitian yang bersifat partisipatif tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Dibutuhkan waktu yang banyak untuk membuat masyarakat berkomitmen pada program yang akan dibuat. Selain itu juga, Negara – Negara donor, NGO harus berfikir secara kreatif tentang bagaimana caranya mengurangi ketidakseimbangan kekuatan yang inheren yang ditemukan dalam proses politis dalam pendekatan partisipatif ini, baik diantara masyarakat maupun dengan aktor politik diluar masyarakat.

Penelitian yang partisipatif dapat menjadi salah satu alat utama dalam pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu juga hal ini dapat memberikan hasil yang signifikan dalam pemikiran kita mengenai modal sosial yang ada dimasyarakat dan bagaimana kita mengembangkan masyarakat berdasarkan pengelolaan sumber daya alam untuk masa depan yang berkelanjutan

BAB 3

GAMBARAN UMUM DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi Tanjung Gundap secara Geografis, Administrasi, demografi, sarana, prasarana dan mata pencaharian. Penjelasan ini didasarkan pada pengamatan langsung yang dilakukan.

3.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah

Tanjung Gundap merupakan salah satu wilayah pesisir kota Batam. Letaknya tepat di pinggir pantai. Secara administratif, pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2005 tentang pemekaran Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, Tanjung Gundap termasuk kedalam wilayah administrasi Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Sebelumnya wilayah Tanjung Gundap masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Sei Beduk, Kelurahan Sagulung Kota Batam.

Tidak diketahui secara pasti luas dari Tanjung Gundap, karena sampai saat ini masih diperdebatkan batasan Tanjung Gundap, apakah sebatas wilayah pemukiman yang diusulkan untuk menjadi kampung tua¹¹, atau sampai dengan wilayah diluar kampung tua. Batas wilayahnya antara lain:

- a. Sebelah utara : Perairan Tanjung Gundap
- b. Sebelah Selatan : Perumahan Citra Sarana Sejati
- c. Sebelah Barat : Sungai Gundap
- d. Sebelah Timur : Sungai Lumut dan Hutan Mangrove

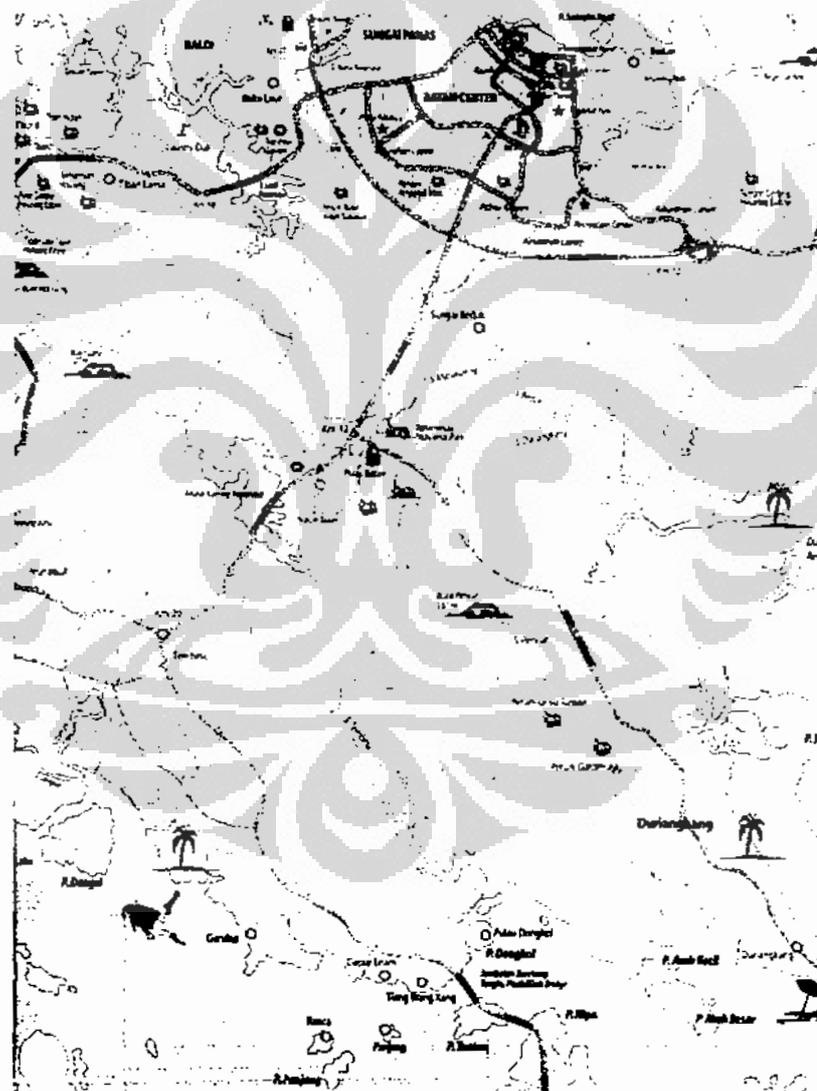
Topografinya terdiri dari bukit – bukit kapur dan dataran dengan ketinggian maksimum sepuluh meter diatas permukaan laut, perairan dan Hutan Mangrove.

¹¹ Kampung tua merupakan kawasan lama yang biasanya terletak di pinggir pantai dan dihuni oleh masyarakat Melayu. Mereka menempati wilayah tersebut secara turun menurun. Terdapat 126 titik kampung tua dengan jumlah penduduk 80.600 jiwa. Pengelolaan kampung tua diatur berdasarkan SK Wali Kota Batam KPTS.105/HK/III/2004, dan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam pada pasal 21 ayat 4, yang kemudian direvisi pada tanggal 19 Maret 2008 dan mendapat rekomendasi dari Gubernur Kepri tanggal 11 Oktober 2008.

Beberapa wilayah menjorok di tepi pantai. Penduduk menggunakan lahan tidak hanya untuk pemukiman tetapi juga sebagai tempat memproduksi arang. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu minimum berkisar 21.3 derajat celcius – 23.6 derajat celcius, dan maksimum berkisar 31.5 derajat celcius – 34,2 derajat celcius. Suhu rata – rata sepanjang tahun 2007 adalah 26.2 derajat celcius – 28.4 derajat celcius dengan hari hujan sebanyak 186 hari sepanjang tahun 2007. Letak Tanjung Gundap dapat dilihat dari peta di bawah ini

Gambar 3.1

Peta Tanjung Gundap



Sumber: Travel Maps Batam

3. 1. 2. Kondisi Demografi Tanjung Gundap

Tanjung Gundap memiliki 112 Kepala Keluarga yang terbagi menjadi dua buah RT dan satu buah RW. Jumlah penduduk di Tanjung Gundap adalah 346 jiwa yang tersebar di dua buah RT. Dimana terdapat 187 orang perempuan dan 159 orang pria. Penduduk paling banyak berusia 16 – 55 tahun, atau dalam usia produktif. Suku bangsa yang mendiami wilayah ini adalah Melayu dan bekas Suku Laut yang menetap.

Mayarakat Tanjung Gundap bermukim di pinggiran pantai. Mereka mereka membuat rumah – rumah kayu yang menjorok kearah laut. Rumah ini ditopang oleh batang pohon yang sudah diperkirakan ketinggiannya agar air tidak masuk saat laut pasang. Meskipun demikian, ada juga penduduk yang tinggal agak jauh dari tepi pantai, yaitu dekat dengan hutan bakau dan sekolah. Rumah – rumah ini masih berupa rumah kayu yang berukuran kurang lebih 5 x 4 meter.

Penduduk yang ada sudah turun temurun tinggal di Tanjung Gundap. Antara warga yang ada masih memiliki ikatan kekerabatan yang erat. Sebenarnya pemukiman di Tanjung Gundap terbagi dua, dengan jarak yang sangat berdekatan. Pemukiman pertama dihuni oleh suku bangsa Melayu yang semuanya beragama Islam, sedangkan pemukiman kedua dihuni oleh bekas Suku Laut yang semuanya beragama Protestan.

Meskipun demikian tidak ada konflik yang berarti diantara kedua suku, mereka hidup berdampingan dengan rukun. Masing – masing suku memiliki tetuanya sendiri, dalam hal ini yang dianggap tetua adalah mereka yang sudah sejak lama mendiami wilayah tersebut. Meskipun demikian para tetua tersebut tidak terlalu berpengaruh di masyarakat.

Hanya sedikit warga pendatang yang tinggal di Tanjung Gundap. Para pendatang sebagian besar berasal dari pulau – pulau disekitar Batam. Mereka masuk ke Tanjung Gundap karena menikah dengan penduduk asli. Tetapi ada juga pendatang yang berasal dari pulau Jawa dan Flores. Salah satunya adalah Guru SD. Tanjung Gundap yang berasal dari Jawa Tengah.

Penduduk Tanjung Gundap memiliki kecenderungan untuk enggan melakukan migrasi. Hanya seorang warga yang keluar dari Tanjung Gundap untuk bersekolah di Pulau Jawa. Akan tetapi beberapa penduduk yang berusia muda

keluar dari wilayah Tanjung Gundap dan mencari pekerjaan di pulau – pulau sekitar Batam.

3. 1. 3. Mata Pencarian Masyarakat Tanjung Gundap

Berdasarkan jenis pekerjaannya masyarakat yang berada di Tanjung Gundap bekerja di sektor informal. Pada intinya mereka berprofesi sebagai nelayan. Tetapi mereka memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai pemilik dan buruh dapur arang.

Para nelayan umumnya berjenis kelamin pria. Tapi tak jarang wanita yang masih muda ikut melaut bersama suaminya dan mereka membawa anak – anaknya yang masih kecil. Biasanya mereka mulai mencari ikan dimalam hari setelah Isya. Kegiatan ini berlangsung hingga pukul lima subuh. Sedangkan kaum wanita, sebagian besar hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Hanya sesekali saja mereka ikut mencari ikan, selebihnya mereka menghabiskan waktu dirumah. Terkadang saat musim kerang, mereka pergi mencari kerang setelah memasak makan siang, yaitu sekitar pukul sepuluh pagi, hingga pukul lima sore. Ada beberapa wanita yang mencoba untuk berwiraswasta dengan membuka warung kelontong. Barang – barang yang diperjual belikan mereka peroleh dari Batam.

Proses penangkapan ikan dilakukan secara tradisional, para nelayan ada yang menggunakan perahu bermesin kecil yang disebut Pompong dan ada pula yang masih menggunakan dayung. Biasanya Pompong ini digunakan saat mencari udang, kerang dan kepiting di daerah yang cukup jauh dengan jumlah tangkapan yang cukup besar. Kapal dan perahu ini adalah milik mereka sendiri. Biasanya uang dari hasil penjualan ikan saat sedang musim panen, sebagian mereka belikan mesin untuk kapal. Ada juga nelayan yang memiliki bubu atau keramba, bahkan tak jarang warga diluar Tanjung Gundap yang ikut memasang bubu disana.

Akan tetapi saat sedang tidak musim panen ikan, hasil tangkapan mereka sangatlah sedikit. Pada saat inilah mereka beralih profesi menjadi pembuat arang agar mereka masih bisa tetap memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari mereka.

Pekerjaan sampingan ini biasanya dilakukan ketika sedang tidak musim panen ikan, yaitu pada bulan Maret hingga Oktober. Terdapat lebih dari sebelas Dapur Arang di wilayah ini. Dibutuhkan waktu kurang lebih selama tiga bulan

untuk memproduksi arang. Lamanya proses pembuatan arang ini tergantung pada musim yang sedang terjadi. Jika musim hujan, proses pembakaran akan semakin lama, karena suhu udara yang lembap dan basah. Sedangkan pada musim kemarau, proses pembakaran akan lebih cepat. Proses tersebut terdiri dari mencari batang kayu, memotongnya hingga pembakaran. Batang kayu yang digunakan adalah Batang Kayu Bakau yang sudah tua. Masyarakat mendapatkan batang kayu bakau dari hutan bakau yang banyak tumbuh di sekitar Tanjung Gundap. Perahu pompong digunakan untuk mengangkut batang kayu yang akan digunakan.

Beberapa penduduk Tanjung Gundap, pernah bekerja di sektor lain seperti sebagai tenaga keamanan dan buruh di perusahaan – perusahaan di sekitar Tanjung Gundap. Akan tetapi, sifat mereka yang sulit untuk diatur membuat mereka tidak bertahan lama menekuni profesi tersebut. Pada akhirnya mereka kembali menjadi nelayan. Saat ini ada beberapa anak muda yang meninggalkan Tanjung Gundap untuk ikut bekerja di rombongan joged di pulau – pulau sekitar Batam.

3. 1. 4. Sarana dan Prasarana

Jalan beraspal di wilayah ini hanyalah jalan menuju jembatan Barelang, yang merupakan salah satu akses untuk masuk ke Tanjung Gundap. Akan tetapi dari jalan beraspal tersebut, untuk menuju Tanjung Gundap, harus dilalui jalan tanah yang sangat buruk kondisinya sepanjang kurang lebih tiga kilometer dengan lebar dua sampai tiga meter yang masih bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Dari pusat Kota (Nagoya dan Batam Center) dibutuhkan waktu selama 1.5 jam untuk mencapai wilayah ini.

Jalan tanah ini akan sangat berdebu ketika musim kemarau dan akan sangat becek dan licin ketika hujan turun. Struktur jalan yang buruk inilah yang dikeluhkan oleh masyarakat, karena tidak ada kendaraan umum yang melewati wilayah tempat tinggal mereka. Satu – satunya alat transportasi umum yang dapat menempuh wilayah ini adalah ojeg dan dibutuhkan ongkos yang cukup mahal.

Akibatnya beberapa aktifitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan menjadi terhambat. Pada saat hujan turun, karena harus berjalan sepanjang tiga kilo meter, banyak anak sekolah yang memutuskan untuk tidak masuk, karena

bagaimanapun juga sesampainya di sekolah baju mereka akan basah. Sebagian besar penduduk lebih memilih untuk menggunakan Pompong atau perahu dayung sebagai alat transportasinya karena biaya yang dikeluarkan tidak sebesar jika mereka menggunakan alat transportasi darat.

Dibagian kanan dan kiri jalan tanah ini adalah bukit kapur, semak belukar dan hutan, diantara semak belukar tersebut terdapat jalan – jalan tanah kecil yang akan menghubungkan ke Dapur Arang yang dimiliki oleh masyarakat. Tidak ada lampu atau alat penerangan lain disini.

Hampir semua rumah penduduk di wilayah ini, bisa dikatakan semi permanen yang terdiri dari kayu, triplek, atap seng, lantai kayu bahkan ada beberapa rumah yang ditutupi oleh spanduk bekas atau beratap daun. Bangunan ini didirikan pinggir laut, berupa rumah panggung yang ditopang oleh tiang kayu. Tinggi dari rumah ini sudah diperkirakan, agar saat laut pasang, air tidak masuk kedalam rumah. Hanya ada satu rumah yang terbuat dari semen, itupun hanya di bagian depannya saja.

Kondisi sebagian besar rumah masyarakat bisa dibilang sangat memprihatinkan, karena sudah banyak kayu yang lapuk, bahkan kayu penyangganya pun sebagian besar sudah lapuk karena terkena air laut. Pihak masyarakat dan Kelurahan sudah mendaftarkan rumah – rumah warga untuk dimasukkan kedalam program Bedah Rumah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam. Akan tetapi sampai pada tingkat kecamatan usaha ini tersendat, bahkan yang mendapatkan bantuan dari program ini adalah pemukiman yang kondisinya jauh lebih baik di daerah Batu Aji, kecamatan Sagulung. Mahalnya bahan baku membuat masyarakat kesulitan untuk membetulkan rumahnya sendiri.

Meskipun begitu, lahan yang masih luas, membuat masyarakat masih bisa membuat rumahnya menjadi cukup besar, rata – rata berukuran 7 x 5 meter. Tetapi ada juga rumah yang lebih besar dari itu yaitu rumah yang dimiliki oleh para tetua adat, meskipun besar, rata – rata hanya memiliki dua buah kamar tidur.

Beberapa rumah memiliki balai – balai yang berukuran 4 x 5 meter di belakang rumahnya. Fungsinya sebagai tempat berkumpul keluarga bahkan para tetangga. Biasanya ibu – ibu yang sudah selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya

berkumpul disini untuk beristirahat dan berbincang sambil menunggu anak mereka pulang dari sekolah dan suami mereka yang pulang melaut di sore hari.

Antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya, bahkan antara rumah bagian depan dengan rumah bagian belakang, dihubungkan dengan jalan yang terbuat dari kayu. Kondisi kayunya sudah hampir lapuk dan beberapa sudah berlubang.

Hampir semua rumah sudah memiliki MCK sendiri, meskipun kondisinya sangat memprihatinkan. MCK ini terletak didalam sebuah bilik kayu yang ditutupi seng, bahkan beberapa rumah yang menutupnya dengan spanduk. MCK ini dibuat menjorok ke laut, karena kotoran yang dibuang langsung ke laut. Tidak ada sistem pembuangan akhir di wilayah ini. Meskipun demikian masih ada warga yang belum memiliki fasilitas MCK di rumahnya. Mereka memanfaatkan sebuah MCK untuk mandi dan mencuci.

Meskipun dekat dengan dua buah Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), masyarakat Tanjung Gundap belum merasakan listrik dari pemerintah. Listrik yang ada bersumber dari sebuah generator yang diberikan oleh Pemerintah Kota yang pengelolaannya dikelola oleh masyarakat yang dipimpin oleh Ketua RW. Kapasitas Generator ini adalah 65 KVA yang mampu memberikan listrik sebesar 4 Ampere ke setiap rumah. Meskipun demikian, generator ini hanya dijalankan mulai pukul enam sore sampai sebelas malam, dan masyarakat harus membayar sebesar Rp. 4000,- setiap harinya. Ada juga seorang penduduk (Keluarga Pak Badak) yang memiliki generator sendiri yang dibeli dari hasil penjualan arang. Generator ini lebih banyak digunakan secara pribadi terutama ketika melakukan peribadatan. Lokasi yang bisa dikatakan terpencil, membuat akses listrik sulit untuk masuk ke wilayah ini, karena dibutuhkan banyak tiang dan kabel listrik.

Selain listrik, ketersediaan air bersih di wilayah ini masih sangat kurang. Air bersih diperoleh dari sumur yang dimiliki secara bersama – sama oleh warga. Jika sedang musim hujan, masyarakat menampung air hujan. Jika musim kemarau, terkadang membeli air. Prasarana pembuangan air kotor tidak tersedia di wilayah ini. Masyarakat membuangnya langsung ke bagian bawah rumah mereka yang kemudian mengalir ke laut atau dibuang di tanah. Begitu juga dengan sampah rumah tangga. Masyarakat mengumpulkannya di depan rumah atau

dibawah kolong rumahnya, dan ketika sudah menumpuk sampah – sampah tersebut kemudian dibakar.

Terdapat sebuah musholla yang cukup besar di wilayah ini. Biasanya dipakai oleh warga untuk shalat jumat juga shalat hari raya. Musholla ini dikelola oleh seorang Imam Masjid yang merupakan penduduk asli Tanjung Gundap. Di Musholla ini juga terdapat TPA bagi anak – anak. Sayangnya TPA ini tidak dikelola dengan baik karena kekurangan tenaga pengajar. Bagi mereka yang beragama Protestan, untuk beribadah biasanya ada seorang Pendeta yang datang ke pemukiman warga dan mengadakan kebaktian di salah satu rumah. Ibadah tersebut biasanya dilakukan pada hari Jumat pukul dua siang dan Minggu pagi. Sebulan sekali mereka pergi ke daerah Tiang Wangkang yang memiliki Gereja. Tapi tak jarang mereka mengadakan kebaktian di salah satu rumah warga.

Terdapat sebuah SD dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang tersedia bagi masyarakat disekitar Tanjung Gundap. Keberadaan SD ini baru ada sejak awal tahun 1980an. Akibatnya masyarakat yang lahir di tahun 1970an kebawahlah yang baru merasakan pendidikan dasar, orang tua mereka sama sekali tidak pernah bersekolah.

SD Tanjung Gundap memiliki lima orang guru termasuk seorang kepala sekolah yang juga merangkap sebagai guru. Jumlah siswa kelas satu sampai enam adalah 80 orang dimana enam diantaranya adalah anak suku laut yang dibiayai oleh donatur. Meskipun memiliki banyak keterbatasan, terutama dalam sarana pendukung kegiatan belajar mengajar, proses kegiatan belajar mengajar di sekolah ini berjalan dengan sangat baik. Siswa kelas enam yang akan menghadapi Ujian akhir mendapatkan pelajaran tambahan sepulang sekolah. Para gurulah yang memberikan pelajaran tambahan ini. Tahun ini, untuk pertama kalinya SD Tanjung Gundap melakukan ujian mandiri, karena di tahun – tahun sebelumnya mereka menumpang di sekolah lain.

Pemerintah Kota Batam, sangat memperhatikan kondisi sekolah ini. Dana BOS sudah diberikan, meskipun tidak mencukupi, karena dana BOS ini diberikan berdasarkan jumlah siswa yang ada. Diharapkan pada tahun ajaran baru mendatang, jumlah siswa yang masuk bertambah banyak. Kesejahteraan gurupun

sangat diperhatikan. Mereka mendapat gaji dan insentif yang sesuai dengan golongannya.

Adanya kecenderungan masyarakat di Tanjung Gundap yang membawa anaknya untuk melaut di malam hari, membuat pihak sekolah membuat peraturan yang tidak mengizinkan anak – anak usia sekolah untuk ikut melaut bersama orang tuanya di malam hari. Pihak sekolah akan memberi peringatan, apabila ditemukan kasus seperti itu. Anak – anak sekolah hanya boleh mencari ikan pada saat sore hari setelah mereka pulang dari sekolah.

Sarana kesehatan yang ada di wilayah ini adalah seorang Bidan (Bidan Berta Uli) yang bertugas di PUSTU, meskipun tidak datang setiap hari. Padahal kesadaran masyarakat untuk berobat secara medis sudah cukup tinggi. Masyarakat ketika sakit, memeriksakan kehamilan dan melahirkan lebih memilih untuk ke bidan ataupun puskesmas di wilayah Tanjung Gundap, Batam maupun di Pulau Belakang Padang. Beberapa orang warga lebih memilih untuk mengunjungi Puskesmas di Pulau Belakang Padang karena dapat dijangkau dengan menggunakan Pompong, sehingga ongkos yang mereka keluarkan jauh lebih murah. Sebenarnya sekitar 7 km dari lokasi pemukiman, terdapat sebuah rumah sakit besar yaitu RS. Casa Medika.

Meskipun demikian masih ada juga penduduk yang berobat ke dukun yang merupakan tetua masyarakat Tanjung Gundap. Biasanya penduduk yang merasa mengalami sakit non medis-lah yang mengunjungi dukun ini. Beberapa orang wanita juga lebih memilih untuk melahirkan dibantu oleh tetua yang mereka panggil “Nenek”. Program KB di wilayah ini berjalan dengan cukup baik, banyak warga yang mengikuti program KB suntik dan pil. Untuk program KB ini, masyarakat mempercayakannya ke Bidan.

3. 2. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan Kuantitatif. Metode Kualitatif yang digunakan adalah *Participatory Rural Assesment (PRA)*, sedangkan metode kuantitatif yang digunakan adalah *AHP (Analytical Hierarchy Process)*. Metode *PRA* digunakan untuk menggali informasi secara lengkap dari masyarakat dan pihak – pihak yang akan berpartisipasi dalam program

pemberdayaan. Selain itu juga hal ini dapat menstimulus partisipasi masyarakat. Sedangkan metode *AHP* digunakan untuk mengetahui prioritas kriteria, pelaku, kegiatan dan hasil. Prioritas – prioritas ini kemudian akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan jenis program pemberdayaan yang akan dilakukan.

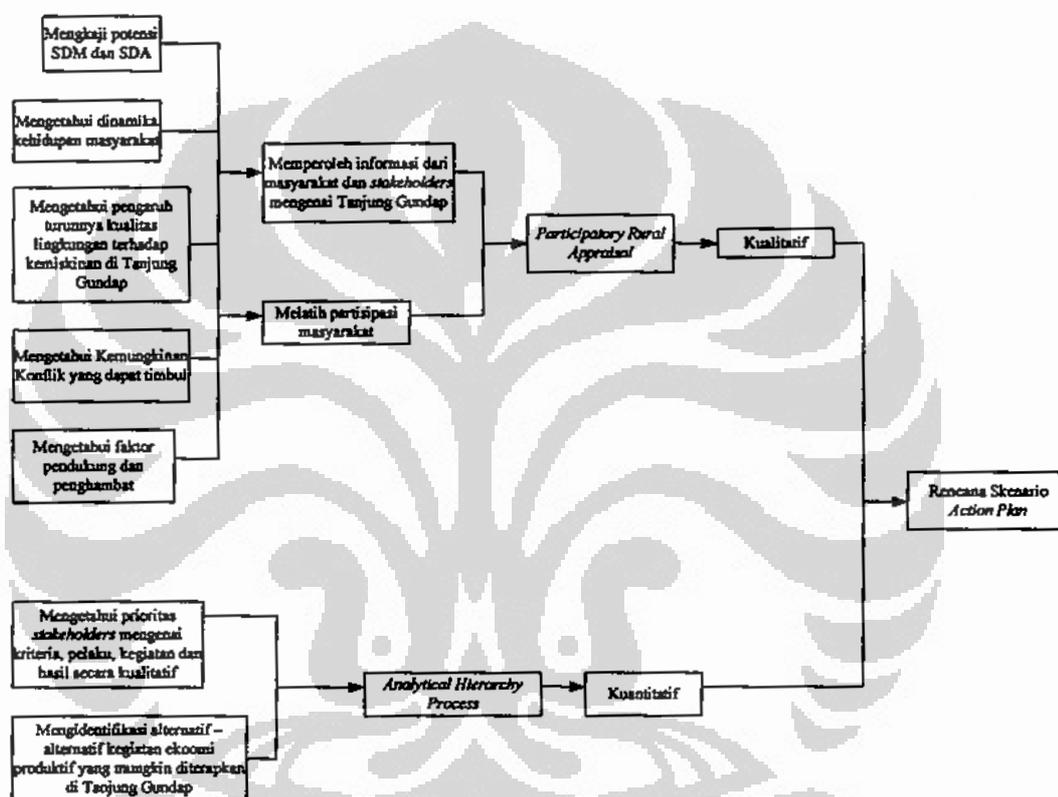
Untuk metode kualitatif data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui proses indepth interview langsung dengan masyarakat, *Focus Discussion Group (FGD)* dan pembagian kuesioner kepada masyarakat. Terdapat 50 Kepala keluarga yang menjadi responden yang dipilih secara random. Dari *FGD* yang dilakukan dan melibatkan kurang lebih 20 orang masyarakat diperoleh data secara visual (gambar, tabel, bentuk) yang dibuat oleh masyarakat untuk mengenali potensi, masalah, peluang dan ancaman bagi masyarakat sendiri (*SWOT Analysis*)

Data – data visual yang akan diperoleh itu antara lain: sejarah desa, pemetaan desa, kalender musim, Transek (penelusuran desa), Diagram Venn (bagan hubungan kelembagaan), bagan perubahan dan kecenderungan, analisa waktu penggunaan sehari, kajian mata pencaharian, diagram alur, yang kemudian akan dianalisa secara kualitatif. Selanjutnya dalam analisa, data primer yang diperoleh kemudian ditriagulasi dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Batam.

Analisa kuantitatif berupa *AHP* menggunakan data yang berasal dari kuesioner yang sesuai dengan format *AHP*. Dalam kuesioner tersebut terdapat beberapa alternatif pilihan jawaban yang membandingkan antara satu pilihan dengan pilihan lainnya. Responden selain diminta untuk memilih, juga harus memberikan bobot kepada pilihannya tersebut. Kuesioner ini diberikan kepada pihak – pihak yang menjadi stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat di Tanjung Gundap, antara lain: perwakilan masyarakat, Ketua Lurah, Pimpinan PT. Mitra Energy Batam, Perwakilan dari Dinas Sosial dan Pemakaman, Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan, Perwakilan Dinas Kesejahteraan Masyarakat dan Perwakilan dari Bappeda.

Sistematika penggunaan kedua metode (*PRA* dan *AHP*) dan hubungannya terhadap tujuan yang ingin dicapai dapat digambarkan dalam Gambar 3. 2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Sistematika penggunaan *PRA* dan *AHP* dan hubungannya terhadap tujuan



3. 2. 1. *Participatory Rural Appraisal (PRA)*

Menurut Hossain dan Shamsuddoha (2008), *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, merupakan sekelompok pendekatan kualitatif yang bersifat multidisiplin. Pendekatan ini berguna untuk mempelajari tentang kondisi di tingkat lokal dan pandangan masyarakat lokal. Sedangkan menurut Chambers *PRA* adalah sekumpulan teknik dan alat yang mendorong masyarakat untuk turut serta meningkatkan dan menganalisa pengetahuannya mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan.¹²

¹² Dikutip dari paparan kuliah Pemberdayaan Berbasis Masyarakat oleh Didit B. Sulistiowati

Menurut Taupiqurahman (2006), Metode *PRA* merupakan suatu teknik untuk menyusun dan mengembangkan program yang operasional dalam pembangunan tingkat desa. Metode ini ditempuh dengan memobilisasikan sumber daya manusia dan alam setempat dan lembaga lokal guna mempercepat peningkatan produktivitas, menstabilkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mampu pula melestarikan sumber daya setempat.

Menurut Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara (1996) dan Depsos RI (1999), *PRA* adalah cara yang digunakan dalam melakukan kajian untuk memahami keadaan atau kondisi desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Jika diartikan perkata dari *PRA* tersebut adalah:

1. *Participatory* (partisipasi), merupakan partisipasi (keikutsertaan) masyarakat, dimana para petugas lembaga – lembaga pembangunan masyarakat ikut serta pada kegiatan masyarakat. Artinya program dirancang oleh masyarakat dengan difasilitasi orang luar. Jadi dengan demikian aktivitas pembangunan selalu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
2. *Rural* (desa), pengertian desa dalam hal ini adalah masyarakat. Jadi *PRA* merupakan kajian masyarakat bukan kajian desa, karena metode *PRA* juga dapat diterapkan pada daerah kota atau daerah pertemuan antara desan dan kota.
3. *Appraisal* (Pengkajian/penelitian)
Metode *PRA* memang mengembangkan teknik – teknik kajian keadaan masyarakat, tetapi metode *PRA* sendiri bukanlah metoda penelitian yang menekankan pada penggunaan teknik – teknik *PRA* untuk pengumpulan data. Metode *PRA* merupakan metode pembelajaran masyarakat. Teknik – teknik kajian keadaan masyarakat tersebut hanyalah sebagai alat pada proses belajar dengan masyarakat. Proses belajar itu sendiri tidak berhenti pada saat kegiatan pengkajian saja, tetapi pada saat “orang luar” menjalankan program bersama masyarakat, karena tujuan praktis kegiatan pengkajian dengan menggunakan teknik – teknik *PRA* adalah pengembangan program.

Dalam metode ini, perubahan sosial merupakan tujuan yang sangat mendasar, karena perubahan yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat yang lebih baik dan dilakukan sendiri oleh masyarakat, yang berarti masyarakat akan digerakkan dan didorong agar mampu mengenali dan menggali potensi dirinya. Artinya, masyarakat melakukan sendiri kegiatannya mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan sekaligus mengawasi dan mengevaluasi kegiatan tersebut.¹³

Dalam merumuskan pemberdayaan masyarakat yang tepat bagi masyarakat di Tanjung Gundap, metode *PRA* merupakan metode yang tepat. Masyarakat Tanjung Gundap merupakan masyarakat pesisir yang memiliki masalah yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan mereka. Selain itu juga terdapat kecenderungan di masyarakat Tanjung Gundap, dimana banyak program yang tidak berjalan dengan baik karena tidak sesuai dengan karakter dan kemampuan masyarakat. Diharapkan metode *PRA* ini dapat menangkap karakter, kemampuan dan keinginan masyarakat dengan tepat. Sehingga program pemberdayaan yang dirumuskan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Karena dalam *PRA*, proses pelibatan masyarakat yang ada terjadi secara "*overall*" melalui "*self assessment*" dan "*self belonging*".

Karena sifatnya yang *bottom up*, diharapkan dapat membuat masyarakat di Tanjung Gundap benar – benar terlibat dan menyampaikan semua pendapat dan informasi yang dimilikinya, karena merasa terlibat dalam proses penelitian. Hal ini akan memudahkan dalam pengolahan data, penyusunan laporan dan perencanaan program yang akan diusulkan. Pada akhirnya dalam penerapan program masyarakat akan menjalankannya dengan baik, karena sesuai dengan yang mereka inginkan.

Hal ini didukung oleh pernyataan Hossain dan Shamsuddoha (2008), yang menyebutkan bahwa terdapat kecenderungan dimana keinginan dan isu – isu yang berkembang di wilayah pesisir sering terabaikan dalam usaha – usaha pembangunan masyarakat. Padahal, mengetahui isu – isu yang ada di wilayah pesisir dan memperhatikan keinginan masyarakat melalui pendekatan yang *bottom*

¹³ Buku Panduan Pengambilan Data Dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA) Volume 2. Dirjen KP2K Departemen Kelautan dan Peikanan Tahun 2006

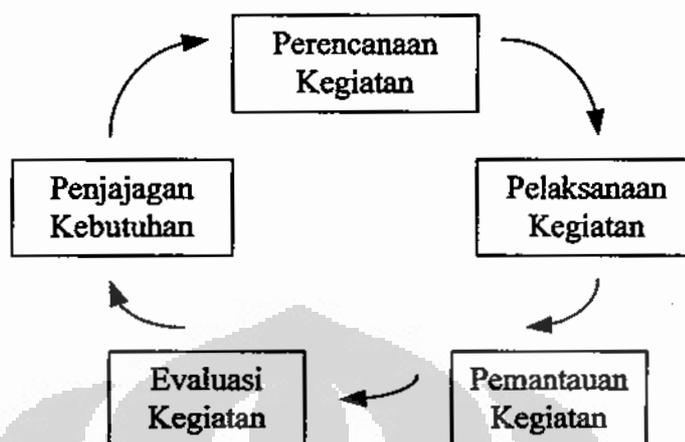
up merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat dan perencanaan yang berkelanjutan.

Selanjutnya menurut Hossain dan Shamsuddoha (2008), *PRA* akan membangkitkan opini masyarakat untuk menganalisa situasi yang mereka hadapi baik berkaitan dengan sumber daya alam pesisir, pola penggunaan lahan, dan sumber daya yang potensial. Interaksi yang terajalin antara peneliti dengan *stakeholders* yang berkaitan akan mempermudah usaha – usaha pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial – ekonomi masyarakat pesisir.

Menurut Townsley (1996), untuk beberapa pihak dan organisasi, *PRA* bukan hanya sebagai alat bagi perencana pembangunan dalam mempelajari kondisi wilayah pedesaan dan mengetahui keinginan masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk melatih kelompok masyarakat yang menjadi objek, dalam menerima peran sebagai perencana dan pembuat keputusan yang biasanya dilakukan oleh institusi atau organisasi. Dalam hal ini para ahli dan perencana pembangunan tidak hanya untuk menganalisa informasi – informasi yang diperoleh tetapi juga membangkitkan opini, analisa dan kesimpulan masyarakat mengenai program pembangunan yang mereka inginkan.

PRA adalah tahap pertama dalam siklus pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Setelah kajian, masyarakat akan masuk tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setelah itu dilanjutkan dengan mengkaji ulang sebagai dasar untuk rencana baru. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh gambar 3. 3 di bawah ini:

Gambar 3. 3
Daur Program PRA¹⁴



Sumber: Didit B. Sulistyowati, 2009, telah diolah kembali

Dalam pelaksanaannya *PRA* tidak hanya melibatkan masyarakat tetapi juga pihak – pihak lain yang berkaitan. Menurut Warren (2001), dalam pelaksanaan *PRA* yang harus dilihat partisipasi dari banyak tingkatan *stakeholders* seperti *stakeholders* utama (*Primary stakeholders*), yaitu masyarakat dan pihak – pihak yang akan berperan dalam program, *stakeholders* sekunder (*Secondary stakeholders*), termasuk institusi pemerintahan lokal, dan institusi lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sektor privat. Terakhir adalah *stakeholders* tersier (*Tertiary stakeholders*) yang terdiri dari, organisasi pembangunan dalam skala nasional, LSM lokal, pembuat kebijakan dan organisasi internasional. (Hossain dan Shamsuddoha, 2008, p. 3).

Metode *PRA* muncul karena terdapat beberapa kelemahan dari pendekatan secara *top down*, antara lain:

1. Adanya ketidakselarasan antara Peneliti dan Perencana dengan pelaksana kegiatan
2. Dari kenyataan selama ini bahwa masyarakat hanya sekedar sebagai pelaksana, tidak merasa sebagai pemilik program kegiatan, dan tidak melanjutkannya apabila program itu selesai.

Dimana, dengan kata lain bahwa dengan pendekatan *top down planning*, terdapat ketidakselarasan antara peneliti dan perencana dengan pelaksana, dan masyarakat

¹⁴ Dikutip dari paparan kuliah Pemberdayaan Berbasis Masyarakat oleh Didit B. Sulistyowati

dalam hal ini hanya sekedar pelaksana bukan pemilik. Sehingga dibutuhkan sebuah pendekatan lain yang bersifat *bottom up* dimana:

1. Pendekatan ini benar – benar melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses bukan hanya dalam pelaksanaan
2. Lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat merasa memiliki program kegiatan yang diberikan.

Sebagai metode yang *bottom up*, *PRA* ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

1. Metode ini bukan sekedar pengkajian, melainkan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses kegiatan sejak mulai mengenal kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai mengevaluasi kegiatan.
2. Metode ini bukan saja untuk masyarakat pedesaan, melainkan juga untuk perkotaan dan termasuk juga masyarakat pantai atau masyarakat pesisir
3. Metode ini bukan hanya masyarakat yang ikut – serta terhadap kegiatan “orang luar” melainkan sebaliknya.¹⁵

Sedangkan menurut Townsley (1996), kelebihan – kelebihan yang dimiliki oleh *PRA* dalam konteks pembangunan masyarakat perairan lain:

1. Identifikasi terhadap prioritas dari kelompok masyarakat yang menjadi objek. *PRA* memungkinkan masyarakat lokal (objek) untuk menunjukkan prioritasnya dalam pembangunan dan memungkinkan mereka bergabung dalam merumuskan perencanaan pembangunan. Ketika masyarakat perairan diidentifikasi sebagai prioritas dalam pelaksanaan *PRA*, para perencana akan mendapatkan informasi mengenai hal yang benar – benar menjadi keinginan masyarakat, apakah itu peningkatan pendapatan, penyediaan air bersih atau pemasaran hasil tangkapan. Melalui *PRA*, resiko dimana masyarakat tidak tertarik akan program pembangunan yang ditawarkan dapat diminimalisir.

2. Penyerahan Kewajiban Manajemen

Salah satu tujuan utama dari *PRA* adalah mendorong pengembangan kepercayaan diri dengan tanggung jawab yang besar untuk manajemen dan

¹⁵ Buku Panduan Pengambilan Data Dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA) Volume 2. Dirjen KP2K Departemen Kelautan dan Peikanan Tahun 2006

implementasi dari kegiatan pembangunan yang diserahkan kepada masyarakat lokal. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dari kegiatan pembangunan dan mengurangi beberapa masalah yang berkaitan dengan kepemilikan kegiatan pembangunan dalam tingkatan masyarakat. Dalam kasus pembangunan masyarakat perairan, beberapa kegiatan yang dijalankan oleh pihak – pihak diluar masyarakat, masalah yang paling sering terjadi adalah kesalahan dalam sistem manajemen dan pencurian. Hal ini berkaitan dengan fakta dimana masyarakat tidak memiliki rasa memiliki terhadap kegiatan tersebut. Melalui *PRA* kegiatan pembangunan akan dikelola oleh masyarakat.

3. Motivasi dan mobilisasi pelaksana pembangunan

Partisipasi pelaksanaan pembangunan dalam *PRA*, baik yang berasal dari LSM, Pemerintah atau pihak lain, dapat meningkatkan motivasi dan tingkat mobilisasi dalam mendukung proyek atau program yang dibuat. Dimana perubahan dalam pendekatan pembangunan dapat ditunjukkan. Misalnya dalam menunjukkan mekanisme perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, *PRA* akan menunjukkan bagaimana mekanisme ini dapat berjalan, sekaligus meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku lokal. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa dilibatkannya masyarakat dari berbagai tingkat administrasi dan organisasi adalah hal yang sangat penting, karena komitmen akan terbangun melalui mekanisme tersebut. *PRA* akan menunjukkan prioritas dari para pelaku.

4. Membentuk hubungan yang lebih baik diantara masyarakat dan institusi pembangunan

PRA dapat membantu membuat hubungan yang lebih baik diantara masyarakat dengan pihak – pihak yang bergerak di bidang pembangunan pedesaan. Hal ini dapat membantu masyarakat perairan dalam mengawasi pembangunan dan isu – isu di wilayah perairan. Sebagai contoh dalam mengawasi hutan mangrove, *PRA* akan mendorong pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat sehingga memungkinkan mereka dalam mengawasi eksploitasi hutan mangrove yang terjadi. *PRA* memungkinkan terjadinya interaksi yang intensif antara masyarakat dengan orang lain yang.

5. Penggunaan sumber daya lokal

Dalam hal ini, masyarakat dimungkinkan untuk merancang kegiatan – kegiatan yang dapat mengembangkan sumber daya yang mereka miliki secara penuh. Dalam kasus di wilayah perairan, hal ini bisa berupa pengembangan ikan hias yang dimiliki oleh wilayah tersebut. *PRA* memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan apa yang sudah mereka miliki daripada membuat strategi baru

6. Mobilisasi sumber daya masyarakat

Komitmen masyarakat yang kuat juga berarti mobilisasi sumber daya masyarakat yang kuat bagi pembangunan dan berkurangnya ketergantungan akan sumber daya dari luar. Sumber daya ini dapat berupa tenaga kerja, simpanan dan fungsi manajemen.

7. Aktivitas pembangunan yang lebih berkelanjutan

Kombinasi dari hasil yang diperoleh metode *PRA* akan membentuk kegiatan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dalam hal ini ketergantungan akan bantuan dari pihak luar dapat dikurangi dan program yang dibuat lebih cocok secara teknis, lingkungan dan sosial bagi masyarakat.

Menurut Hossain dan Shamsuddoha (2008), dalam penelitiannya mengenai pengelolaan wilayah pesisir di Cox's Bazaar Bangladesh, dengan menggunakan pendekatan partisipasi dalam perencanaan wilayah pesisir, peneliti akan menemukan keinginan jangka panjang dari masyarakat pesisir. Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa program dan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir akan berjalan lebih baik jika masyarakat lokal ikut serta dalam proses perencanaan dan implementasi. Keikutsertaan masyarakat pesisir akan meningkatkan kesadaran mereka akan sumber daya yang mereka miliki dan meyakinkan mereka mengenai pentingnya keberlanjutan kehidupan dan perekonomian mereka.

Terdapat dua tujuan yang ingin dicapai melalui metode ini

1. Tujuan jangka pendek: melaksanakan kegiatan bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan praktis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Tujuan jangka panjang: untuk mencapai pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial dengan pengembangan masyarakat melalui proses pembelajaran.

Menurut Sulistyowati (2009), dari proses *PRA* ini akan diperoleh informasi – informasi mengenai:

- a. Potensi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat
- b. Potensi sosial dan perekonomian masyarakat;
- c. Potensi lembaga atau kelompok kegiatan yang ada, latar belakangnya, strukturnya, kegiatannya dan lain-lain;
- d. Masalah-masalah masyarakat;
- e. Prioritas dan penyebab masalah;
- f. Peluang-peluang pengembangan.

Selanjutnya menurut Sulistyowati (2009), terdapat sebelas prinsip *PRA*, yaitu mengutamakan yang terabaikan, pemberdayaan masyarakat, masyarakat sebagai pelaku, orang luar sebagai fasilitator, saling belajar dan menghargai perbedaan, santai dan informal, triangulasi (cek dan re-cek data, informan dan teknik), mengoptimalkan proses dibandingkan hasil, orientasi praktis, keberlanjutan dan selang waktu, belajar dari kesalahan dan terbuka. Sedangkan menurut Buku Panduan Pengambilan Data Dengan Metode *Rapid Rural Appraisal* dan *Participatory Rural Appraisal* Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2006), terdapat lima prinsip utama metode *PRA*, yaitu:

1. Partisipatif: masyarakat setempat diperlakukan sebagai mitra dalam pengumpulan dan analisis data
2. Luwes: bukan sebagai metode baku, tergantung pada tujuan sumber daya, keterampilan, keahlian dan waktu
3. Bekerjasama: antara pihak luar dan masyarakat, laki – laki maupun perempuan, dan gabungan berbagai disiplin ilmu.
4. Hemat: menghemat biaya dan waktu, tetapi memadai untuk analisis dan perencanaan
5. Sistematis: Pengambilan sampel ter-strata agar memperbesar tingkat keabsahan dan kepercayaan untuk memeriksa ulang hasil survei dasar.

PRA memiliki enam jenis dan teknik utama, yaitu metode kelompok yang terdiri atas *Focus Discussion Group (FGD)* dan *Brainstorming*, metode matrik yang terdiri atas ranking masalah dan rangking sosial ekonomi, metode analisis *SWOT*, metode visualisasi dan diagram hubungan yaitu dengan pohon masalah dan diagram Venn. Kemudian metode tempo yang terdiri atas kalender musim, lintasan sejarah, aktivis harian, transek dan trend, dan yang terakhir adalah metode spasial ruang seperti pemetaan partisipatif, transek dan beberapa teknik lainnya.

Pelaksanaan metode *PRA* tidak terlepas dari peran fasilitator, dimana fasilitator akan menggunakan teknik – teknik *PRA* sebagai alat diskusi dengan masyarakat untuk:

- a. Mengembangkan rancangan pengkajian wilayah
- b. Mengembangkan alat – alat pengkajian wilayah/penerapan *PRA*
- c. Menyampaikan tujuan pengkajian kepada masyarakat
- d. Menyampaikan cara dan proses pengkajian kepada masyarakat
- e. Memfasilitasi kegiatan pengkajian bersama masyarakat
- f. Mengalihkan keterampilan menganalisis kepada masyarakat
- g. Mengalihkan peran fasilitator sedikit demi sedikit kepada masyarakat
- h. Menengahi perbedaan pendapat dan perselisihan
- i. Memfasilitasi perencanaan kegiatan
- j. Menyusun hasil pengkajian untuk laporan
- k. Menyampaikan hasil pengkajian guna ditindaklanjuti

Meskipun demikian, metode *PRA* ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Menimbulkan harapan yang berlebihan pada diri masyarakat. Padahal campur tangan pihak luar mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat
2. Keinginan untuk memperoleh data kuantitatif yang dapat dihitung secara statistik
3. Keinginan untuk memiliki cara yang mudah ditetapkan

4. Tingkat kepercayaan atas hasil *PRA* mungkin masih dianggap kurang meyakinkan¹⁶

Sedangkan menurut Sulistyowati (2009), keterbatasan - keterbatasan yang dimiliki oleh *PRA* antara lain:

5. Kualitas informasi yang digali biasanya tinggi namun terkadang kurang tepat secara kuantitatif.
6. Sangat tergantung pada keterampilan dan sikap fasilitator
7. Keterpakuan pada kegiatan menerapkan teknik dan lupa bahwa teknik *PRA* hanyalah alat dalam proses pengalihan keterampilan analisis kepada masyarakat
8. Kembali melakukan penyuluhan satu arah (kebiasaan dahulu)
9. Sifat *PRA* yang terbuka akan memunculkan beda pendapat dan bisa menimbulkan konflik
10. Menanggap *PRA* sebagai “resep” (pendekatan fleksibel dan terbuka)
11. Terpatok pada waktu, *PRA* membutuhkan waktu dan jangan terburu – buru
12. Masih mengutamakan target. Akibatnya partisipasi menjadi semu dan membuat *PRA* menjadi rutinitas
13. Menganggap masyarakat sebagai objek. Padahal hal ini dapat mengecewakan masyarakat
14. Sering terjadinya kebiasaan antara *PRA* dan *RRA*

Menurut Townsley (1996), kelemahan metode *PRA* jika diaplikasikan kepada masyarakat pesisir antara lain:

1. Menimbulkan ekspektasi yang berlebihan di masyarakat

Salah satu resiko yang harus dihindari dalam proses *PRA* adalah munculnya ekpektasi yang berlebihan dari masyarakat yang sulit untuk direalisasikan. Hal ini bisa saja terjadi karena situasi politik, kekuatan politik masyarakat lokal, dan struktur sosial. Salah satu tujuan *PRA* adalah membangkitkan dan mengetahui ekspektasi masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya jangan sampai ekpektasi yang muncul di

¹⁶ Buku Panduan Pengambilan Data Dengan Metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)* dan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* Volume 2. Dirjen KP2K Departemen Kelautan dan Peikanan Tahun 2006

masyarakat tersebut terlalu berlebihan dan diluar kemampuan pihak – pihak yang mendukung.

2. Proposal rencana pembangunan yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak – pihak yang terlibat

Hal ini berkaitan dengan prioritas pembangunan yang diperoleh dari masyarakat melalui proses *PRA*, dimana prioritas tersebut pada kenyataannya tidak dapat dipenuhi oleh pihak – pihak yang terkait. Akibatnya hal ini hanya akan menimbulkan ekspektasi saja di masyarakat. Hal ini terjadi akibat tidak adanya batasan dalam pendekatan – pendekatan yang dilakukan dalam proses *PRA*.

3. Terdapat beberapa resiko dengan diberikannya masyarakat tanggung jawab dalam pembuatan keputusan, perencanaan dan identifikasi masalah. Dalam hal ini ada beberapa pihak masyarakat yang memonopoli kegiatan – kegiatan yang ada, terlebih lagi jika mereka memiliki tingkat pendidikan dan kekuasaan yang cukup tinggi. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya peranan dari pihak luar harus dikurangi. Masyarakat miskin dalam kelompok masyarakat yang terlibat biasanya akan mendukung keputusan masyarakat terlebih lagi pada kegiatan – kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Akan tetapi sering terjadi kasus dimana mereka jarang untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, karena rendahnya posisi mereka di masyarakat, sehingga keputusan yang diambil sering kali tidak menguntungkan mereka.
4. Terbaikannya pendapat dari masyarakat miskin.

Pada kenyataannya, *PRA* seringkali dilaksanakan oleh masyarakat secara keseluruhan, dimana tingkat kemakmuran, status sosial, gender, suku bangsa seringkali diabaikan. Hal ini mungkin saja terjadi, meskipun penelitian awal telah menunjukkan adanya perbedaan tingkatan dan keinginan di masyarakat. Dalam *PRA*, keputusan bagaimana mengakomodasi keinginan yang berbeda diantara banyak kelompok harus diserahkan kepada masyarakat. Pihak luar hanya terlibat dalam usaha negosiasi dan arbitrase diantara keinginan kelompok yang berbeda. Akan sulit bagi pihak luar yang terlibat, apabila sebagian masyarakat

memutuskan bahwa mereka ingin menyelesaikan masalah tanpa memperhatikan keinginan masyarakat miskin, apalagi jika mereka sudah berkomitmen untuk menyerahkan masalah tersebut kepada masyarakat.

Dibawah ini akan dijelaskan teknik – teknik *PRA* yang digunakan dalam menganalisa masyarakat pesisir di Tanjung Gundap berdasarkan Dirjen KP2K Departemen Kelautan dan Perikanan (2006) dan Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara (1996)

3. 2. 1. 1. Metode Kelompok

Metode kelompok dalam *PRA* terdiri dari kegiatan *Focus Discussion Group (FGD)* dan *Brainstorming*.

A. *Focus Discussion Group (FGD)*

Focus Discussion Group (FGD) atau diskusi kelompok terfokus merupakan suatu diskusi yang dilakukan dengan kelompok terpilih yang terdiri dari empat sampai delapan anggota masyarakat. Pemilihan masyarakat untuk diskusi disesuaikan dengan topik diskusi dan latar belakang pengetahuan masyarakat.

FGD berguna untuk:

- a. Mengumpulkan informasi, membangun konsensus, mengklarifikasi informasi yang ada dan mengumpulkan berbagai pendapat pada isu tertentu
- b. Mengumpulkan informasi pada isu tertentu di bidang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi di Tanjung Gundap, dinamika kehidupan masyarakat sehari – hari, modal sumber daya alam dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat, pandangan dan pendapat masyarakat juga pihak – pihak lain yang berkaitan dengan masyarakat Tanjung Gundap mengenai kemiskinan yang mereka hadapi, pandangan dan pendapat masyarakat juga pihak – pihak lain mengenai program pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan dan yang mungkin untuk dilakukan oleh mereka, hubungan masyarakat dengan para *stakeholders*. Informasi –

informasi yang sudah terkumpul akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana program pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan.

Berikut ini adalah langkah – langkah dalam pelaksanaan *FGD*

- a. Menentukan dan mendiskusikan tujuan diskusi dengan masyarakat
- b. Menentukan target peserta dan mendiskusikannya dengan pemimpin masyarakat mengenai kriteria pemilihan peserta. Kriteria peserta dapat didasarkan atas umur, tingkat pendidikan, etnis/suku/ras, bahasa, wawasan, status perkawinan, status ekonomi, agama, jenis kelamin, pengalaman kerja, dan lamanya bermukim di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini *FGD* dilakukan beberapa kali. Pertama dilakukan dengan para tokoh masyarakat termasuk Kepala Lurah, Kedua dengan kaum perempuan dan anak - anak, Ketiga dengan keseluruhan masyarakat.
- c. Merencanakan jadwal diskusi dengan pihak – pihak yang akan terlibat
- d. Merancang acuan diskusi
- e. Memaparkan pendahuluan mengenai masalah yang akan didiskusikan kepada masyarakat, dimulai dengan topik yang sederhana mengenai Tanjung Gundap tetapi masih berhubungan dengan masalah yang akan dibahas
- f. Melakukan diskusi dengan masyarakat dimana topik dan pertanyaan diskusi berdasar kepada acuan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti.
- g. Menjaga agar alur diskusi tetap sesuai dengan topik yang dibicarakan
- h. Membuat kesimpulan diskusi.

B. *Brainstorming* / Curah Pendapat

Curah pendapat adalah suatu kegiatan berkelompok yang diikuti oleh masyarakat terpilih dimana peserta bergiliran untuk membagi ide yang

berkenaan dengan suatu topik atau suatu pertanyaan. Dalam hal ini fasilitator akan mendorong peserta untuk bereaksi atas suatu permasalahan dan ditanggapi oleh peserta lain.

Teknik ini berguna untuk mendapatkan informasi baru, perspektif dan ide atau mengumpulkan berbagai pendapat dari berbagai orang terhadap suatu masalah. Informasi yang dihasilkan biasanya kasar, tetapi bisa diikuti dengan teknik partisipasi lain seperti diagram venn, metode rangking dan FGD. Dalam penelitian ini, dengan adanya *brainstorming* diperoleh informasi yang lebih spesifik mengenai permasalahan yang terjadi dan tidak diungkapkan secara eksplisit oleh masyarakat secara keseluruhan dalam FGD. *Brainstorming* dilakukan dengan beberapa orang tokoh masyarakat, Kepala Desa dan Pihak PT. MPI.

Hal – hal yang harus dipersiapkan dalam metode ini antara lain:

- a. Menentukan dan mendiskusikan tujuan diskusi dengan masyarakat
- b. Menentukan target peserta dan mendiskusikannya kepada pemimpin masyarakat tentang kriteria pemilihan peserta. Kriteria peserta dapat didasarkan atas umur, tingkat pendidikan, etnis/ suku/ ras, bahasa, wawasan, status perkawinan, status ekonomi, agama, jenis kelamin, pengalaman kerja, dan lama berdomisili.
- c. Merencanakan jadwal kegiatan
- d. Merancang acuan diskusi

Dalam pelaksanaan curah pendapat, hal – hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Menerangkan dan mendiskusikan tujuan dan mekanisme diskusi sampai semua peserta mengerti
- b. Memperkenalkan topik yang akan dibahas yaitu mengenai kemiskinan, pencemaran lingkungan yang terjadi di Tanjung Gundap dan juga kehidupan sehari – hari masyarakat disana
- c. Meminta dan memancing peserta untuk membagi ide mereka berkenaan dengan topik. Dimana ide – ide mereka tersebut tidak disensor sama sekali karena ide – ide tersebut merupakan informasi yang penting bagi penelitian. Ide – ide tersebut kemudian dicatat.

- d. Bersama – sama dengan peserta mengurutkan, mengklasifikasikan dan menggabungkan ide yang tertulis
- e. Mendiskusikan dan menganalisis hasil secara bersama – sama atau menggunakan ide tersebut sebagai masukan untuk hal lain

3.2.1. 2. Metode Survey dan Wawancara

Metode survey dan wawancara terdiri dari wawancara semi terstruktur, dan survey rumah tangga.

A. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah suatu wawancara atau percakapan baik dilakukan dengan individu atau kelompok untuk suatu tujuan tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari masyarakat. Biasanya digunakan suatu daftar panduan pertanyaan. Metode ini berbeda dengan wawancara terstruktur yang memiliki daftar pertanyaan yang terstruktur dan dilengkapi pilihan – pilihan, dalam metode ini, pewawancara bertanya sesuai dengan panduan dan dikombinasikan dengan pertanyaan yang muncul pada saat wawancara berlangsung. Pertanyaan yang diajukan dalam metode ini bersifat semi terbuka, karena merupakan bahan acuan wawancara. Isi dan kajian bisa dirubah disesuaikan dengan proses diskusi, untuk mencapai tujuan.

Wawancara ini bisa dilakukan kepada beberapa jenis narasumber, tergantung kepada kebutuhan informasi atau data yang dibutuhkan.

Misalnya:

- a. Wawancara informan kunci: wawancara ini dilakukan jika dibutuhkan kajian dengan narasumber informasi yang dianggap dimiliki oleh sumber informan khusus. Informan kunci biasanya adalah orang yang dianggap punya pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai sesuatu. Bila kita masuk ke dalam suatu masyarakat yang baru, orang seperti ini akan sangat berguna sebagai narasumber pertama. Informan kunci ini bisa saja orang yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut, petinggi

desa atau masyarakat yang aktif dalam kegiatan – kegiatan di wilayah tersebut.

- b. Wawancara keluarga/rumah tangga. Wawancara ini dilakukan untuk mengkaji berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hasil dari wawancara ini disebut Profil Keluarga, yaitu gambaran keadaan suatu keluarga sebagai informasi untuk mengetahui taraf kesejahteraan penduduk, taraf kesehatan penduduk, dan pendidikan, serta harapan dan rencananya di masa depan.
- c. Wawancara kelompok masyarakat dengan profesi tertentu. Dalam kasus Tanjung Gundap, yang diwawancara adalah kelompok nelayan. Wawancara ini dilakukan untuk membahas sejumlah topik informasi yang telah diterapkan di dalam pedoman wawancara, tetapi dibahas dan didiskusikan di tingkat kelompok. Apabila terjadi perbedaan pendapat, kelompok akan mendiskusikan jawaban yang disepakati bersama, bukan perorangan. Hal – hal yang didiskusikan tergantung dari kebutuhan informasi. Biasanya dipergunakan untuk proses triangulasi dari dua jenis wawancara sebelumnya atau teknik *PRA* lain.

Teknik ini berguna untuk melengkapi pengamatan yang telah dilakukan, membuka dimensi baru suatu masalah dan mendapatkan jawaban yang akurat berdasarkan pengalaman pribadi. Proses pelaksanaan dari metode ini antara lain

- a. Membuat daftar panduan pertanyaan mengenai kondisi di Tanjung Gundap. Pertanyaan yang dibuat merupakan pertanyaan terbuka, yang dapat memancing opini masyarakat Tanjung Gundap mengenai masalah yang mereka hadapi
- b. Mencari informasi mengenai pengertian istilah lokal, terlebih lagi masyarakat Tanjung Gundap masih menggunakan bahasa melayu dalam percakapan sehari - hari
- c. Membuat daftar orang yang layak diwawancara

- d. Melakukan wawancara dengan pihak – pihak yang berkaitan. Dalam penelitian ini pihak – pihak tersebut antara lain Kepala Lurah, Tokoh masyarakat dan pihak PT. MEB/DEB
- e. Sebelum melakukan wawancara peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan wawancara
- f. Pertanyaan yang diajukan dimulai dari pertanyaan umum yang sederhana baru kemudian pertanyaan khusus mengenai kondisi di Tanjung Gundap
- g. Jawaban dari pihak – pihak yang diwawancara direkam dan juga ditulis untuk dokumentasi

B. Survey Rumah Tangga

Survey Rumah Tangga adalah survey terstruktur yang dilakukan pada rumah tangga (KK). Daftar pertanyaan yang ada merupakan pertanyaan baku. Pertanyaan ini disesuaikan dengan permasalahan yang ingin diketahui. Biasanya survey ini mencantumkan nama dari responden. Survey ini berguna untuk mendapatkan data dasar seperti jumlah penduduk, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan pendapatan keluarga.

Proses pelaksanaan metode ini adalah:

- a. Menyiapkan kuesioner dimana kuesioner yang dibuat mengacu kepada kuesioner SUSENAS
- b. Meminta bantuan salah seorang tokoh masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mengisi kuesioner karena jumlah pertanyaan kuesioner cukup banyak dan terdapat beberapa istilah yang tidak dimengerti masyarakat
- c. Memberi pengertian tentang pertanyaan dan istilah yang ada
- d. Membagi daerah – daerah yang akan disurvei berdasarkan tempat tinggal, karena wilayah pemukiman masyarakat Muslim dan Protestan terpisah
- e. Melihat ulang hasil survey dan menanyakan kembali beberapa jawaban masyarakat yang kurang jelas.

3. 2. 1. 3. Matriks

Metode Matriks terdiri dari metode ranking masalah, metode ranking sosial ekonomi, analisis *SWOT* dan metode ranking sosial ekonomi. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah Analisis *SWOT*.

SWOT merupakan singkatan dari *Strength, Weakness, Opportunity and Threat* (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman). Menurut Soesilo (2002), Analisis *SWOT* adalah jabaran dari manajemen srategik versi Chicago dengan prinsip “*inside out*”. Dalam analisis ini, kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi.

Kegunaan dari analisis *SWOT* ini antara lain:

- a. Untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang dan mencari jalan bagaimana untuk mengoptimalkannya, serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman supaya dapat dicari cara mengatasinya
- b. Analisi *SWOT* merupakan salah satu bagian dari penyusunan rencana strategis

Selanjutnya menurut Soesilo (2002), sebelum menjabarkan analisis *SWOT* dengan langkah – langkahnya, maka hal paling utama yang harus diputuskan adalah siapakah stakeholder utama. Penentuan ini sangat penting karena kita sering menghadapi banyak *stakeholders* dan seringkali tujuan utamanya sering bertentangan. Proses pelaksanaan analisis *SWOT* ini antara lain:

- a. Menjelaskan kepada masyarakat masalah apa yang akan dibuat analisis *SWOT*-nya
- b. Menjelaskan maksud dari dilakukannya analisis ini kepada masyarakat, termasuk menjelaskan dan memberi contoh.
- c. Meminta peserta untuk menguraikan kekuatan dari kelompok dan berdiskusi. Kemudian proses ini diulangi kembali untuk mengetahui kelemahan, peluang dan ancaman
- d. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis kembali dengan pertanyaan:
 - a. Bagaimana kelemahan dapat dilengkapi
 - b. Bagaimana agar peluang yang ada dapat diperbesar
 - c. Bagaimana cara menghindari ancaman

- e. Merancang strategi baru atau rencana aksi dari hal tersebut.

3. 2. 1. 4. Visualisasi dan Diagram Hubungan

A. Pohon Masalah

Pohon masalah merupakan diagram yang menggambarkan masalah, sebab dan akibat. Ini dilakukan setelah masyarakat menyusun prioritas masalah. Kegunaan dari teknik ini adalah:

- a. Mengidentifikasi inti masalah, akan penyebab dan akibatnya
- b. Membantu untuk merumuskan pemecahan masalah

Proses pelaksanaan metode ini antara lain:

- a. Menjelaskan kepada masyarakat masalah apa yang akan dianalisis
- b. Memberikan contoh untuk membedakan masalah, sebab dan akibat
- c. Menggambar sebuah pohon besar di papan tulis. Untuk menggambarkan masalah.
- d. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk berpikir tentang sebab dari masalah. Kemudian menggambar suatu akar untuk tiap sebab. Mengulangi pertanyaan mengapa untuk melihat sebab sekunder yang kemudian ditulis di bawah akar sebelumnya
- e. Kemudian menanyakan peserta tentang akibat yang ditimbulkan dengan pertanyaan apa yang akan terjadi jika masalah tersebut terus berlanjut.

B. Diagram Venn

Diagram Venn merupakan salah satu cara untuk menggambarkan hubungan antara suatu lembaga dengan lembaga lain dalam satu daerah atau suatu proyek. Diagram Venn ini menggunakan lingkaran – lingkaran untuk menggambarkan lembaga. Ukuran lingkaran menggambarkan besarnya pengaruh lembaga. Posisi lingkaran relatif ke batas menggambarkan lembaga tersebut di dalam atau diluar masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat yang mengerti hubungan antar lembaga dalam masyarakat.

Teknik ini berguna untuk mengidentifikasi kelompok atau lembaga baik internal maupun eksternal dan hubungannya dengan lembaga masyarakat atau antar lembaga. Informasi yang dikaji antara lain:

- a. Lembaga secara umum: yaitu informasi mengenai semua lembaga yang berhubungan dengan masyarakat desa, baik yang berada di dalam desa tersebut, maupun yang berada di luar desa tetapi berhubungan dengan desa misalnya Puskesmas di Kecamatan. Jenis lembaga yang dikaji adalah: lembaga lokal (tradisional), lembaga – lembaga pemerintah (misal: Pemerintah Desa, Puskesmas, Koperasi Unit Desa/KUD), lembaga – lembaga swasta (misal: Lembaga Swadaya Masyarakat).
- b. Lembaga – lembaga khusus: yaitu informasi mengenai lembaga – lembaga tertentu saja, misalnya lembaga yang kegiatannya berhubungan dengan pertanian saja, kesehatan saja, lembaga adat.

Sumber informasi untuk teknik ini antara lain:

- a. Sumber informasi utama adalah para warga masyarakat, terutama mereka yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengalaman yang menyangkut lembaga – lembaga yang bersangkutan
- b. Informasi dari masyarakat bisa dicek – silang (triangulasi) dengan informasi dari pengelola lembaga yang bersangkutan
- c. Data sekunder (misalnya dari kantor desa, dan dari lembaga yang bersangkutan) bisa juga digunakan sebagai perbandingan.

Proses pelaksanaan metode ini antara lain:

- a. Mempersiapkan alat bantu berupa lingkaran karton dengan berbagai ukuran
- b. Mengumpulkan masyarakat/tokoh masyarakat
- c. Menjelaskan tujuan dan kegunaan diagram venn
- d. Mempersilahkan masyarakat menulis kelompok atau lembaga yang ada di karton lingkaran berdasarkan pengaruhnya. Lingkaran besar menunjukkan pengaruh besar dan sebaliknya. Dalam hal ini peneliti tidak hanya mangawasi tetapi juga turut membantu masyarakat, karena ada beberapa hal yang kurnag dipahami oleh mereka.

- e. Mempersilahkan masyarakat untuk meletakkan lingkaran tersebut diatas kertas
- f. Hasil dari peletakan tersebut kemudian dibahas bersama – sama.

Manfaat teknik ini bagi masyarakat antara lain:

- a. Diskusi ini akan lebih memperhatikan keberadaan lembaga – lembaga di desa karena seringkali lembaga – lembaga luar hanya dikenal oleh sebagian kecil masyarakat yang terlibat.
- b. Diskusi ini juga berguna untuk membahas peningkatan berbagai lembaga. Setelah mendiskusikan permasalahan dalam hubungan masyarakat dengan lembaga tersebut, kemudian mengkaji harapan – harapan mereka mengenai kegiatan lembaga dan bentuk hubungan yang sesuai dengan harapan tersebut.

Sedangkan manfaat teknik ini bagi diluar masyarakat antara lain:

- a. Untuk memahami cara masyarakat membuat urutan prioritas terhadap kegiatan lembaga – lembaga tersebut dan penilaian mereka tentang sumbangan yang diberikannya kepada masyarakat desa.
- b. Bagi lembaga “luar” yang telah menyelenggarakan program, informasi yang terungkap bisa menjadi umpan balik yang bermanfaat dalam memperbaiki pelayanan lembaganya pada masyarakat. Sedangkan bagi yang sedang menjajaki kemungkinan pengembangan program, kajian ini menjadi bahan acuan bagi kemungkinan kerjasama dalam membuat kegiatan.

3. 1. 2. 5. Metode Tempo

A. Kalender Musim

Kalender musim merupakan suatu cara untuk mendokumentasikan periode siklus reguler (suatu musim) dan kegiatan – kegiatan utama yang ada selama setahun dan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi, hal ini merupakan salah satu teknik *PRA* yang memfasilitasi pengkajian kegiatan – kegiatan dan keadaan – keadaan yang terjadi berulang dalam suatu kurun waktu tertentu (musiman) dalam kehidupan masyarakat yang dituangkan dalam kalender kegiatan atau keadaan yang biasanya dalam jarak waktu 1 tahun

musim (12 bulan). Kalender musim ini berisi gambar – gambar lingkungan, budaya, dan sosial ekonomi dalam periode satu tahun.

Manfaat dari teknik ini adalah:

- a. Gambaran mengenai pola kegiatan dan pola pembagian kerja masyarakat memunculkan berbagai pemikiran tentang keadaan usaha mereka sendiri terutama usaha pertanian. Melalui teknik ini muncul pembahasan tentang masa – masa sulit (masa – masa kritis) dan masa – masa baik usaha mereka, serta keadaan – keadaan yang mempengaruhi terjadinya masa – masa itu.
- b. Informasi yang diperoleh melalui teknik kalender musim dapat menjadi masukan dalam pembuatan perencanaan. Sebagai contoh dalam merencanakan suatu program pertanian di desa perlu diketahui keadaan pertanian yang sudah ada, misalnya pola tanam di desa yang bersangkutan.
- c. Teknik ini juga berguna sebagai salah satu cara untuk menilai suatu tawaran program, misalnya tentang penanaman jenis tanaman baru, perbaikan varietas, perubahan pola tanam, atau anjuran penanaman serentak

Proses pelaksanaan dari teknik ini antara lain:

- a. Mempersiapkan masyarakat/peserta dan membuat kalender kosong pada karton
- b. Meminta peserta untuk mengidentifikasi periode – periode kondisi lingkungan, kegiatan – kegiatan, sosial ekonomi dalam satu tahun yang berpengaruh kepada kondisi masyarakat
- c. Mencatat aktifitas dan kejadian – kejadian yang terjadi di masyarakat seperti,
 - Kondisi lingkungan (cuaca, arus)
 - Penangkapan (hasil, jenis ikan tertangkap, kegiatan, alat tangkap)
 - Aktivitas ilegal (bom, trawl, tambang pasir, polusi)
 - Aspek ekonomi (pendapatan, harga pasar)
 - Aspek sosial (kesehatan, pendidikan)

- Mata pencaharian lain (pertanian, wisata, kerajinan)
- Kegiatan sosio kultural (semah laut, hari raya, liburan)

B. Aktivitas Harian

Teknik ini merupakan suatu cara untuk mencari informasi tentang berbagai aktivitas yang dilakukan setiap hari baik secara produktif maupun reproduktif. Teknik ini berguna untuk mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan oleh berbagai masyarakat dalam satu hari, baik dari segi gender, dan mata pencaharian. Proses pelaksanaan teknik ini antara lain:

- a. Mengadakan pertemuan masyarakat dimana dalam penelitian ini masyarakat dibuat berkelompok berdasarkan jenis kelamin yang terdiri dari 6 orang
- b. Menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan
- c. Mempersiapkan bagan kosong pada karton
- d. Meminta para peserta untuk menuliskan kegiatan hariannya dan waktu pelaksanaan setiap harinya.

3. 2. 1. 6. Metode Ruang

A. Pemetaan Partisipatif

Metode ini berguna untuk memplot informasi yang ada pada suatu daerah dalam suatu peta. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan partisipasi masyarakat. Dimana masyarakat yang mengetahui keberadaan informasi tersebut, memplot sendiri informasi yang ada pada peta dasar atau langsung membuat peta sendiri. Ada dua macam peta yang dibuat yaitu peta sket dan peta berdasarkan peta dasar. Informasi yang ada dalam peta tersebut pada akhir pemetaan harus dicek kebenarannya langsung dilapangan.

Jadi, pemetaan partisipatif adalah metode untuk mengumpulkan dan memetakan informasi yang ada serta yang terjadi dalam masyarakat serta kondisi sekitar. Informasi – informasi tersebut kemudian digambarkan kedalam peta atau sketsa desa. Ada peta yang menggambarkan keadaan sumber daya umum desa dan ada peta dengan tema tertentu yang

menggambarkan hal – hal yang sesuai dengan ruang lingkup tema tersebut (misalnya, peta desa yang menggambarkan jenis – jenis tanah, peta sumber daya pertanian, peta penyebaran penduduk, peta pola pemukiman dan sebagainya).

Dalam kasus di Tanjung Gundap, peta yang dibuat adalah peta sumber daya umum. Peta ini dibuat untuk melihat keadaan umum desa dan lingkungannya yang menyangkut sumber daya dan sarana dan prasarana yang ada di desa, keadaan fisik lingkungan desa seperti kondisi topografis (kemiringan lahan, padang, perbukitan, dsb), luas dan tata letak lahan – lahan kebun, penyebaran daerah pemukiman, daerah berhutan, lahan – lahan kritis, mata air, sungai atau aliran air, koperasi, pasar, sekolah, posyandu, puskesmas, jalan raya.

Selain itu juga, hal – hal tersebut dikumpulkan, dipetakan dan dianalisis untuk membantu pengelola memahami kondisi yang lalu, kondisi saat ini serta memperkirakan potensi atau kondisi yang akan datang bagi pengelolaan wilayah Tanjung Gundap. Selain itu juga untuk mengidentifikasi keterbatasan serta kesempatan pemanfaatan sumberdaya alam bagi pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

Kegunaan dari teknik ini antara lain:

- a. Mengetahui status sumberdaya, habitat, konflik, keterlibatan lelaki dan perempuan dalam pengelolaan sumber daya.
- b. Menentukan daerah perlindungan atau daerah pengelolaan
- c. Mengetahui jarak dan akses terhadap sarana prasarana serta penggunaan lahan
- d. Mendukung masyarakat untuk mengidentifikasi, menempatkan, mengklasifikasi antara lain kondisi sumber daya alam, kondisi sosial, aktivitas keseharian dan lainnya.
- e. Mendukung terbangunnya hubungan antara berbagai jenis informasi.

Dalam melihat kondisi wilayah pesisir keuntungan penggunaan pemetaan secara partisipatori antara lain:

- a. Bisa didapat detail kawasan pesisir, seperti lokasi terumbu karang, lokasi mangrove, lokasi tambak

- b. Bisa didapat detail kondisi waktu tertentu misalnya tentang waktu reproduksi ikan dan musim tangkap
- c. Dapat secara efektif memfasilitasi latihan kelompok serta dapat diverifikasi dalam kelompok yang lebih besar.

Untuk mencapai partisipasi yang efektif, terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Waktu partisipasi, kapan partisipasi mau dilakukan
- b. Siapa yang berpartisipasi
- c. Bentuk partisipasi
- d. Seberapa tingkat kesertaan/partisipasi masyarakat baik kelompok maupun individual dalam mengontrol pengambilan keputusan untuk inisiatif kegiatan.

B. Transek

Secara harafiah, transek adalah gambar irisan muka bumi. Pada awalnya, transek dipergunakan oleh para ahli lingkungan untuk mengamati dan mengenali wilayah – wilayah ekologi (pembagian wilayah lingkungan alam berdasarkan sifat khusus keadaanya). Sedangkan pengertian sebagai teknik *PRA*, Transek adalah suatu pengamatan yang dilakukan ketika melakukan perjalanan melewati suatu daerah. Hasil dari transek berguna untuk membuat profil wilayah.

Terdapat tiga jenis transek berdasarkan jenis informasi yaitu transek sumber daya desa (umum), transek sumber daya alam dan transek topik - topik lain. Dalam melihat wilayah Tanjung Gundap, transek yang digunakan adalah transek sumber daya alam.

Transek sumber daya alam dilakukan untuk mengenal dan mengamati secara lebih tajam mengenai potensi sumber daya alam serta permasalahan – permasalahannya, terutama sumber daya pertanian. Seringkali lokasi kebun dan lahan pertanian lainnya milik masyarakat berada di batas dan luar desa, sehingga transek sumber daya alam ini bisa sampai ke luar desa.

Informasi – informasi yang biasanya muncul antara lain adalah:

- a. Bentuk dan keadaan permukaan alam (topografi): termasuk ke dalamnya adalah kemiringan lahan, jenis tanah dan kesuburannya, daerah tangkapan air dan sumber – sumber air (sungai, mata air, sumur)
- b. Pemanfaatan sumber daya tanah (tataguna lahan): yaitu untuk wilayah pemukiman, kebun, sawah, ladang, hutan, bangunan, jalan, padang gembala
- c. Pola usaha tani: mencakup jenis – jenis tanaman penting (antara lain jenis – jenis local) dan kegunaannya (misalnya tanaman pangan, tanaman obat, pakan ternak), produktivitas lahan dan hasilnya
- d. Teknologi setempat dan cara pengelolaan sumber daya alam, termasuk teknologi tradisional, misalnya penahan erosi dari batu, kayu, atau pagar hidup; pohon penahan api; pemeliharaan tanaman keras; sistem beternak; penanaman berbagai jenis rumput untuk pakan ternak, penahan air, penutup tanah; sistem pengelolaan air (konservasi air, kontrol erosi, dan pengairan) dan beberapa hal lainnya
- e. Pemilikan sumber daya alam: biasanya terdiri dari milik perorangan, milik adat, milik umum/desa, milik pemerintah (misal: hutan).

Berdasarkan lintasannya, transek dibagi menjadi:

- Transek lintasan garis lurus: penelusuran wilayah dilakukan mengikuti garis atau jalan utama dan jalan – jalan di pemukiman, wilayah pertanian, dan berbagai wilayah lain. Bisa juga dilakukan dengan berjalan dari titik terendah sampai ke titik tertinggi atau sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk membandingkan kondisi lahan dan jenis usaha pertanian yang dilakukan pada tingkat ketinggian yang berbeda di wilayah dataran tinggi).
- Transek bukan garis lurus: dalam teknik ini, lintasan jalan yang ada diabaikan, hal yang menentukan adalah letak – letak atau lokasi pengamatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian

perjalanan dimulai dengan lokasi yang paling dekat, kemudian paling jauh. Arah perjalanan untuk mencapai lokasi – lokasi yang akan diamati tersebut bisa dilakukan dengan beberapa kemungkinan, yaitu:

- Berkelok – kelok (zig – zag)
- Bisa pulang pergi, atau juga berputar
- Menyapu (semua arah)

Lintasan yang bukan garis lurus mampu menghasilkan informasi yang lebih menyeluruh daripada garis lurus. Transek inilah yang digunakan dalam melihat wilayah Tanjung Gundap, karena sumber daya alam dan pemukiman di Tanjung Gundap cenderung menyebar.

- Transek lintasan saluran air (sumber air)
Penelusuran ini dilakukan dengan berjalan mengikuti aliran air secara sistematis untuk menyusuri aliran air atau tepian sungai. Pengamatan dilakukan terhadap daerah di sepanjang saluran air atau tepian sungai untuk mengkaji penataan sumber air bagi pertanian dan memperoleh informasi tentang pengelolaan Daerah Aliran sungai (DAS) yang dilakukan oleh petani.

Bagi para peneliti Transek ini dapat menjadi alat bantu untuk melihat dengan jelas mengenai kondisi alam dan rumitnya sistem pertanian dan pemeliharaan sumber daya alam yang dijalankan oleh masyarakat. Selain itu juga dapat diketahui cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alamnya. Dalam perencanaan program. Transek dapat dipergunakan untuk observasi langsung bagi kegiatan peninjauan kebutuhan dan potensi. Sedangkan dalam evaluasi program, teknik ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui fakta – fakta dan perubahan yang telah terjadi.

3. 3. *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

Analytical Hierarchy Process (AHP), adalah metode yang dikembangkan oleh Thomas A. Saaty, dimana metode ini menggabungkan pendekatan sistemik dan deduktif¹⁷ dalam memahami persoalan, yaitu dengan cara menstruktur suatu

¹⁷ Pendekatan Sistemik adalah cara memahami persoalan secara keseluruhan terlebih dahulu tanpa perlu mengerti secara detail bagian – bagiannya.

sistem serta lingkungannya kedalam bagian – bagian yang saling berinteraksi kemudian melakukan sintesa terhadap bagian – bagian tersebut dengan membuat peringkat pengaruh bagian tersebut terhadap sistem secara keseluruhan. Menurut Mulyono (1996), *AHP* merupakan salah satu model perangkat pengambilan keputusan yang memanfaatkan sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya adalah tidak hanya persepsi manusia, tapi juga pengetahuan/*knowledge*. (Taupiqurahman,2006)

Menurut Permadi (1992), peralatan utama *AHP* adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia. Dengan hirarki tersebut, suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecah ke dalam kelompok – kelompok yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki pengambilan keputusan dilakukan dengan cara memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur menjadi kelompok – kelompok

Dalam metode ini, yang menjadi input utama adalah persepsi manusia yang dianggap sebagai "*expert*", dimana "*expert*" dalam hal ini mengacu kepada orang yang mengerti benar permasalahan yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah atau punya kepentingan terhadap masalah tersebut. Tidak ada batasan yang pasti mengenai jumlah *expert* yang menjadi responden. Persepsi manusia merupakan input yang bersifat kualitatif.

Menurut Taupiqurahman (1996), model *AHP* merupakan salah satu model yang dapat diterapkan dalam model perencanaan. Model perencanaan yang dibentuk dengan *AHP*, yang menekankan peranan penting dari pengalaman dan intuisi dalam pengambilan keputusan menjadikan *AHP* sebagai suatu sistem yang menghasilkan output yang diinginkan. Dengan menghasilkan output tersebut maka *AHP* sesuai digunakan sebagai model perencanaan karena perencanaan sendiri merupakan serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Input dasar model *AHP* berbentuk skala rasio, yang menyatakan bagaimana persepsi seseorang dalam menghadapi suatu masalah pengambilan keputusan. Karena otak manusia yang terbatas, maka skala rasio diberi batasan 1 sampai dengan 9, angka yang tidak terlalu besar tapi cukup menampung persepsi manusia. Akan tetapi dalam memberikan penilaiannya, seorang "*expert*" akan

Pendekatan deduktif adalah cara memahami persoalan dengan memahami bagian – bagian dari suatu sistem terlebih dahulu untuk dapat mengerti sistem kerja secara keseluruhan.

memperhitungkan juga hal – hal yang tidak bisa diukur disamping hal – hal yang bisa diukur. Jadi bisa dikatakan, bahwa model *AHP* adalah suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif yang memperhitungkan hal – hal kuantitatif dan kualitatif sekaligus.

Selanjutnya menurut Taupiqurahman (2006), bentuk hirarki dalam *AHP* merupakan bentuk yang fleksibel dan peka terhadap perubahan sehingga dimungkinkan dimasukkannya lebih dari satu tujuan dan kriteria sebagai elemen dari hirarki tersebut. Dengan adanya multi tujuan dan multi kriteria serta bobot dari masing – masing elemen maka dapat diperoleh kombinasi kebijakan yang lebih tepat dan mencakup semua permasalahan.

3.3.1. *Forward dan Backward Process*

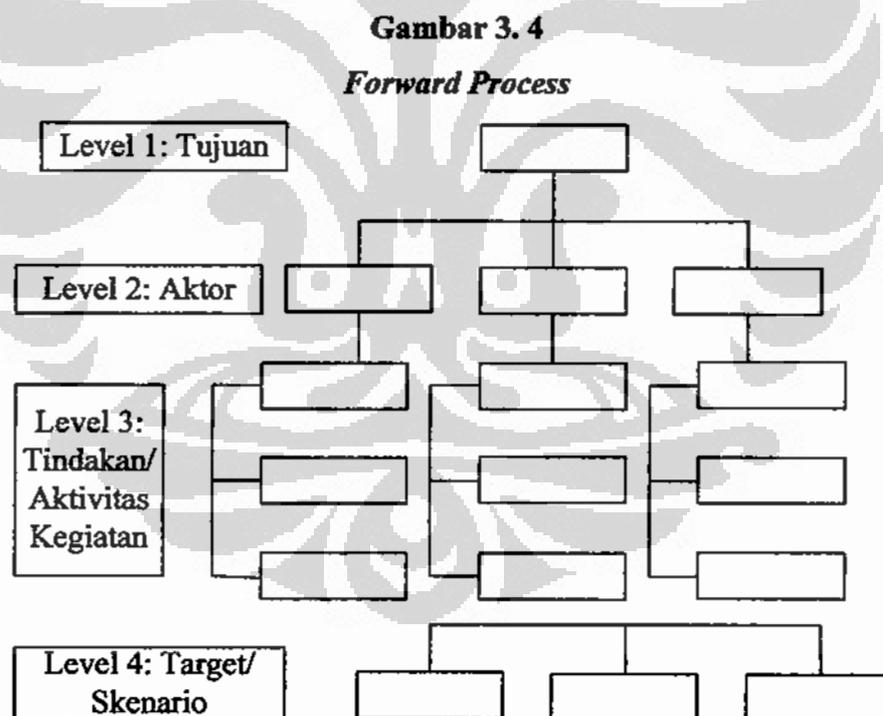
Model perencanaan dengan *AHP* terdiri dari model proyeksi dan model perencanaan. Model proyeksi yang biasa disebut dengan *Forward Process* dimaksudkan untuk memperkirakan kondisi masa depan yang keliatannya mungkin atau layak terjadi berdasarkan kondisi yang ada atau sedang berjalan.

Hirarki dalam model ini terdiri atas empat *level* yang terdiri dari tujuan, pelaku, aktivitas dan skenario. Model ini menggunakan empat level karena dalam merencanakan proses pemberdayaan yang akan dilaksanakan harus diketahui dengan pasti apa tujuan yang ingin diprioritaskan, karena cukup banyak permasalahan di Tanjung Gundap yang harus diperhatikan, tetapi tidak mungkin semuanya diselesaikan dalam waktu yang sama. Selain itu juga harus diperhatikan pelaku yang akan diprioritaskan karena hal ini menyangkut program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan banyak pihak. Jenis kegiatan yang akan dilakukan merupakan hal lain yang harus diketahui prioritasnya karena banyak sekali kemungkinan kegiatan yang dapat dilakukan, tetapi pada pelaksanaannya akan ada satu kegiatan yang menjadi prioritas, dimana kegiatan tersebut harus sesuai dengan keinginan masyarakat dan *stakeholders* yang berperan. Begitu juga dengan target yang dibuat harus dilihat prioritasnya karena tidak semua target yang ingin dicapai dapat dicapai dalam satu waktu, jadi harus ada target prioritas.

Keempat level yang ada ini juga berhubungan dengan *backward* dan *forward process* yang dilakukan. Kemudian keempat level tersebut disusun seperti urutan dibawah ini:

- Level 1: Tujuan (*Goal*): Menentukan kondisi masa depan suatu permasalahan
- Level 2: Pelaku/ aktor yang berperan atau ikut mempengaruhi permasalahan tersebut
- Level 3: Aktivitas/kebijakan/tindakan yang sudah dan akan dilakukan oleh masing – masing aktor/pelaku pada level 2
- Level 4: Skenario/Target di masa depan yang mungkin terjadi

Dalam model ini antara level 2 dan 3 tidak harus simetris. Kemudian hirarki dalam model ini dapat digambarkan oleh Gambar 3. 4 di bawah ini



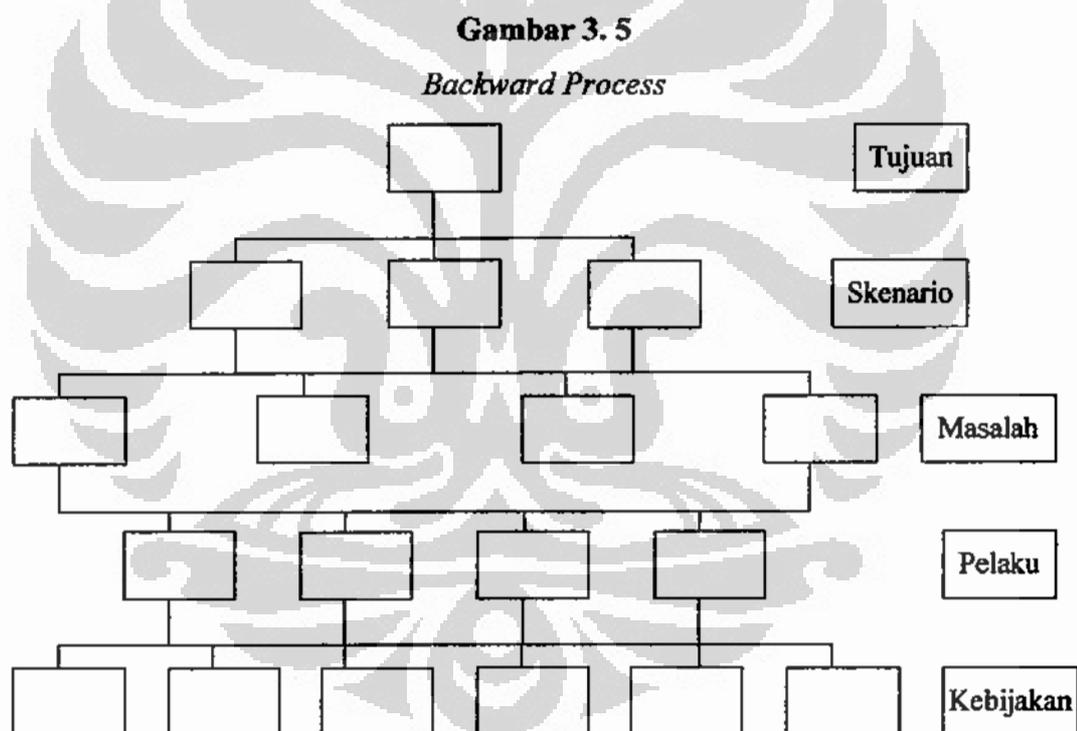
Sumber:Khoirunnurofik, telah diolah kembali

Sedangkan model perencanaan yang biasa disebut dengan *backward process* bertujuan menentukan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan di masa depan. Model ini terdiri atas lima level, antara lain:

- Level 1: tujuan yaitu masa depan yang diinginkan dari suatu permasalahan

- Level 2: Skenario/target yang diinginkan (mungkin sama dengan level 4 pada *forward process*)
- Level 3: Masalah – masalah yang diperkirakan akan menghambat pencapaian target yang diinginkan
- Level 4: Aktor/pelaku yang berperan atau berpengaruh dalam pencapaian target (sama dengan level 2 pada *forward process*)
- Level 5: Kebijakan – kebijakan yang diperlukan untuk mencapai target yang diinginkan.

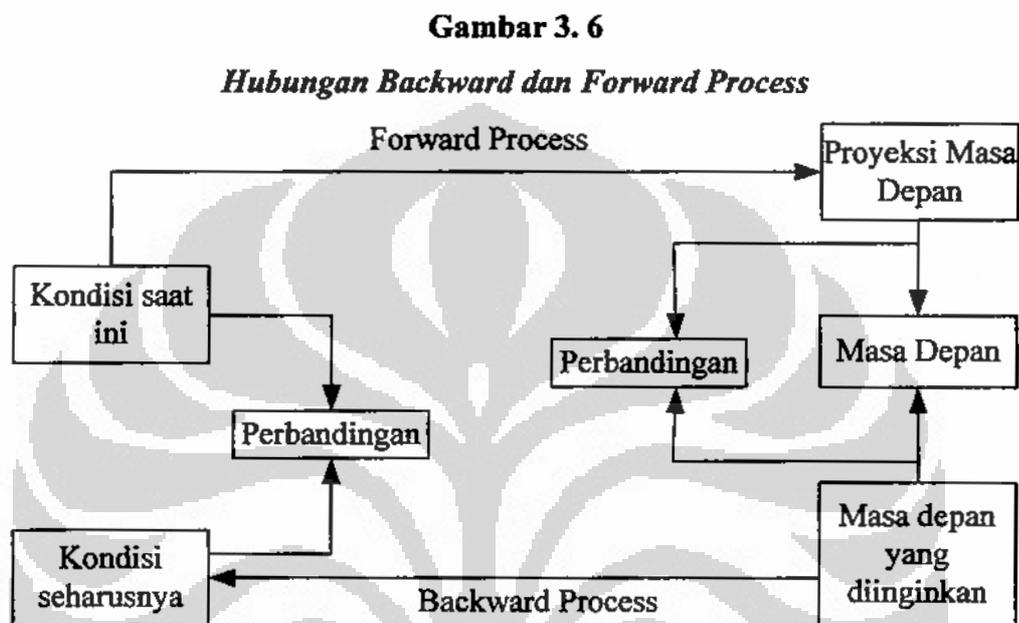
Hirarki dalam *Backward process* dapat digambarkan oleh diagram 3. 5 di bawah ini:



Sumber: Khoirunnurofik, tela diolah kembali

Forward dan *Backward Process* dapat berlangsung berkali – kali dengan beberapa modifikasi pada hierarkinya, terutama pada level 3 *forward* sebagai pengaruh dari level 5 *backward* prosce sebelumnya. Pada proses berikutnya, biasanya elemen yang mendapat bobot kecil dihilangkan sehingga makin lama elemen yang dibandingkan makin sedikit sampai didapatkan suatu keadaan yang stabil, dimana urutan elemen tidak berubah lagi meskipun ada modifikasi pada level di atasnya.

Penghubung utama kedua proses tersebut adalah skenario. Pada dasarnya untuk mencapai perencanaan yang lebih efektif, maka kedua model diatas dapat digabungkan. Hubungan antara *Backward* dan *Forward Process* dapat digambarkan oleh diagram 3. 6 di bawah ini,



Sumber: Khoirunnurofiq, telah diolah kembali

Menurut Khoirunnurofiq (2009), terdapat beberapa alasan diperlukannya metode *AHP*, yaitu:

- Jika data historis atau empiris variabel yang akan diramal tidak tersedia secara lengkap dan berkualitas
- Metode kualitatif hanya membutuhkan *judgement*, opini dan pengalaman dari yang ahli, karena itu *AHP* dinamakan juga *judgemental forecasting method*
- Metode peramalan kualitatif tidak selalu mengikuti secara kaku tahapan prosedur peramalan, tapi menyesuaikan dengan situasi dan hasilnya tidak selalu berupa besaran atau angka. Jika metode ini dipakai yang menjadi pemroses informasi bukan semata aturan dan model matematik, tapi juga imajinasi peramal.
- Kendati metode ini mengandung subyektivitas tinggi, ia tetap sistematis dan ilmiah. Masalahnya, meski jenis metode kualitatif yang digunakan

adalah sama, hasilnya antar peramal dapat berbeda tajam sehingga kurang dapat lengkap dan ternyata teknik ini banyak dipakai dan berkembang.

Dalam melihat pemberdayaan masyarakat di Tanjung Gundap, metode *AHP* digunakan karena terbatasnya data sekunder yang ada. Selain itu juga melihat segala keterbatasan yang terjadi di Tanjung Gundap, dibutuhkan sebuah program pemberdayaan yang benar – benar sesuai, dalam hal ini perlu pendapat dari setiap stakeholder yang ada secara kuantitatif dan kualitatif.

3.3.2. Aksioma AHP

Dalam pelaksanaan metode *AHP* terdapat empat aksioma yang harus diperhatikan. Jika terjadi pelanggaran terhadap aksioma – aksioma ini maka model yang digunakan menjadi tidak valid. Aksioma – aksioma tersebut antara lain:

1. Aksioma 1: *Reciprocal Comparison*, artinya pengambil keputusan harus bisa membuat perbandingan elemen – elemen dari suatu kriteria alternatif dan menyatakan preferensinya. Sebagai contoh, jika A lebih disukai daripada B dengan skala X, maka B lebih disukai dengan skala 1/X. Jadi,

$$A_{ij} = \frac{1}{A_{ji}}$$

3. 1

Dimana i dan j masing – masing adalah baris dan kolom.

Tidak terpenuhinya aksioma pertama ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk menyatakan preferensi dari sepasang elemen yang dibandingkan tidak tepat atau tidak jelas.

2. Aksioma 2: *Homogeneity*, artinya preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen – elemennya dapat dibandingkan satu sama lain. Kalau aksioma ini tidak dipenuhi maka elemen – elemen yang dibandingkan tersebut tidak homogenous dan harus dibentuk suatu “*cluster*” (kelompok elemen – elemen) yang baru.

Aksioma kedua ini sebenarnya menjelaskan keterbatasan otak manusia dalam membuat perbandingan – perbandingan terutama untuk elemen – elemen yang kurang jelas hubungannya satu sama lain atau perbedaannya terlalu besar.

3. Aksioma 3: *Independence*, artinya preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif – alternatif yang ada melainkan oleh obyektif secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pola ketergantungan atau pengaruh dalam metode *AHP* adalah searah keatas. Artinya perbandingan antara elemen – elemen dalam suatu level dipengaruhi atau tergantung oleh elemen – elemen dalam level di atasnya.

Pelanggaran dari aksioma ini, hanya dimungkinkan dalam *AHP* dengan bentuk hirarki non-linier. Dalam hirarki *AHP* non-linier ini mungkin terjadi hubungan timbal balik antara kriteria dan alternatif, sehingga mungkin saja pemilihan kriteria dipengaruhi oleh alternatif. Hal ini dapat dipecahkan dengan melakukan generalisasi model *AHP* yang biasa disebut supermatriks.

4. Aksioma 4: *Expectations*, artinya untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur hirarki diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka si pengambil keputusan tidak memakai seluruh kriteria dan atau obyektif yang tersedia atau diperlukan sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap. Hal terpenting dari aksioma keempat ini adalah bahwa si pengambil keputusan mengerti benar masalah yang dihadapinya atau dapat dianggap *expert*.

3.3.3. Tahapan – tahapan Pembentukan Model *AHP*

Dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan *AHP* terdapat dua tahapan yang harus dilakukan, yaitu tahapan penyusunan hirarki dan tahapan evaluasi hirarki.

1. Penyusunan Hirarki (*decomposition*)

Dekomposisi merupakan proses penyusunan hirarki. Menurut Khoirunnurofik (2009), hal ini merupakan proses memecah persoalan yang utuh menjadi unsur – unsurnya. Karena untuk mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap unsur – unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tngkatan dari persoalan tadi. Membuat hirarki adalah menguraikan realitas menjadi kelompok –

kelompok yang homogen, dan menguraikannya lagi menjadi bagian yang lebih kecil.

Terdapat beberapa keunggulan dari hirarki, antara lain:

- a. Menggambarkan sistem yang dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana perubahan prioritas pada tingkat diatas akan mempengaruhi tingkat dibawahnya
- b. Memberikan informasi yang sangat mendetail tentang struktur dan fungsi sistem pada tingkat yang rendah dan memberikan gambaran mengenai pelaku dan tujuan pada tingkat diatasnya. Batasan dari elemen disuatu tingkat paling baik disajikan pada level berikutnya.
- c. Sistem secara alamiah merupakan suatu hirarki
- d. Stabil, dimana sedikit perubahan mempunyai sedikit pengaruh, dan fleksibel dimana tambahan hirarki pada yang sudah terstruktur dengan baik tidak akan merusak kinerjanya.

Hirarki dapat bersifat lengkap yaitu jika semua elemen pada suatu tingkatan hirarki memiliki keterkaitan dengan tingkatan sebelumnya; atau bersifat tidak lengkap jika semua elemen pada tingkatan hirarki memiliki keterkaitan dengan tingkatan selanjutnya.

Menurut Permadi (1992), Proses ini mencakup tiga proses yang berurutan dan saling berhubungan, yaitu identifikasi level dan elemen, definisi konsep dan formulasi pertanyaan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi level – level dan elemen – elemen yang akan ditempatkan dalam suatu level. Kemudian semua level dan elemen tadi didefinisikan dan dipakai dalam tahap formulasi pertanyaan, jika pembuat hirarki mengalami kesulitan, maka level – level dan konsep –konsep tadi harus direvisi dan dimodifikasi. Pada dasarnya dekomposisi merupakan bagian terpenting karena dari sinilah validitas dan kemampuan model diuji.

2. Evaluasi Hirarki

a. Penilaian (*Comparative Judgement*)

Comparative Judgement pada dasarnya merupakan tahapan dalam membuat penilaian tentang kepentingan relatif antara dua elemen pada suatu level tertentu berkaitan dengan level diatasnya. Dalam proses ini pengambil

keputusan menterjemahkan seluruh persepsi dan informasi yang tersedia ke dalam perbandingan sepasang elemen dengan menggunakan skala sebagai berikut:

- 1 Sama penting (*equal importance*)
- 3 Sedikit lebih penting (*moderate importance*)
- 5 Lebih penting (*essensial/strong importance*)
- 7 Sangat lebih penting (*very strong importance*)
- 9 Mutlak sangat penting (*extreme importance*)

Skala 2,4,6,8 merupakan angka kompromi dari penilaian diatas.

Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam suatu matriks yang disebut dengan matriks *pairwise comparison*. Dalam hal ini berlaku aksioma resiprokal, yaitu jika elemen i dinilai 3 kali lebih penting dari elemen j, maka elemen j harus sama dengan 1/3 kali lebih penting dari elemen i. Dengan berpegang pada aksioma resiprokal, maka untuk matriks berukuran n, penilaian yang diberikan responden atau dengan kata lain jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden pada suatu level mengikuti rumus $n(n-1)/2$. Sebagai contoh:

	I	j	k
i	1	1/3	6
j	3	1	5
k	1/6	1/5	1

Matriks 3 x 3 ini dikatakan konsisten jika $A_{ij} \cdot A_{jk} = A_{ik}$

b. *Synthesis of Priority* (Sintesa Hasil)

Pada dasarnya *Synthesis of Priority* adalah mencari prioritas elemen pada setiap level berdasarkan matriks *pairwise comparison*, untuk mendapatkan prioritas lokal melalui normalisasi yang didasarkan pada konsep *eigen vector* dan *eigenvalue*. Karena matriks *pairwise comparison* terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan prioritas global harus dilakukan sintesa diantara prioritas lokal. Dalam hal ini yang dilihat adalah *eigen vector* dan *eigen value*.

Eigenvektor adalah sebuah vektor yang apabila dikalikan sebuah matriks hasilnya adalah vektor itu sendiri dikalikan dengan sebuah bilangan skalar

atau parameter yang tidak lain adalah *eigenvalue*. Bentuk persamaannya adalah:

$$A \cdot w = \lambda \cdot W \quad 3.2$$

dimana: A = matriks bujursangkar A

w = eigenvektor

λ = *eigenvalue*

Dari *eigen vector* yang diperoleh ditentukan *local priority* yaitu prioritas untuk satu level. Prioritas global diperoleh dengan mengalikan prioritas elemen di atasnya sampai ke level terakhir. Eigenvektor ini biasa disebut sebagai vektor karakteristik dari sebuah matriks bujursangkar, sedangkan *eigenvalue* merupakan akar karakteristik dari matriks tersebut. Metode inilah yang akhirnya dipakai sebagai alat pengukur bobot prioritas setiap matriks perbandingan dalam model *AHP* karena sifatnya yang lebih akurat dan memperhatikan semua interaksi antar elemen dalam matriks.

Kemudian menurut Taupiqurahman (2006), setelah vektor prioritas akhir atau hirarki selesai dihitung maka langkah berikutnya adalah memeriksa tingkat inkonsistensi hirarki secara keseluruhan. Untuk sampai pada tahap ini, terlebih dahulu harus dilakukan penghitungan inkonsistensi untuk setiap matriks perbandingan (matriks *pairwise*)

Dalam menghitung indeks konsistensi atau *Consistency Index (CI)* dari suatu matriks *pairwise* digunakan rumus:

$$CI = \frac{(\lambda_{maks} - n)}{(n - 1)} \quad \text{dimana } n \text{ adalah ukuran matriks.}$$

Namun dalam penggunaannya, indeks konsistensi tersebut biasa disebut dengan indeks inkonsistensi karena rumus diatas memang lebih cocok untuk mengukur inkonsistensi suatu matrik.

Indeks inkonsistensi ini kemudian diubah ke dalam bentuk rasio konsistensi dengan cara membaginya dengan suatu indeks random. Untuk mengukur tingkat konsistensi rasio atau *Consistency Ratio (CR)* digunakan rumus:

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad \text{Dimana: } CR = \text{Rasio konsistensi}$$

CI = Indeks konsistensi

RI = Indeks Random

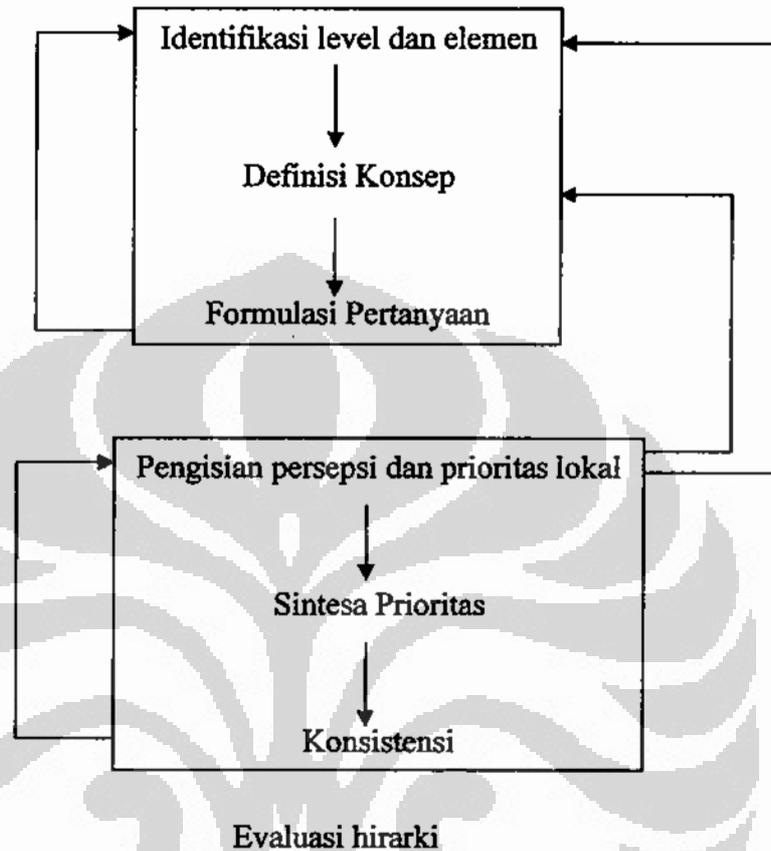
Nilai indeks random telah ditentukan melalui sebuah eksperimen oleh *Oak Ridge National Laboratory* dan kemudian dilanjutkan oleh *Wharton School*. Berikut ini adalah indeks random untuk matriks berukuran 1 sampai dengan 10 dimana matriks berukuran 1 dan 2 mempunyai indeks random 0 dan inkonsistensi juga sama dengan 0 (nol):

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	58	19	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

Batasan diterima atau tidaknya konsistensi suatu matriks sebenarnya tidak ada yang baku, hanya menurut beberapa eksperimen dan pengalaman tingkat inkonsistensi sebesar 10% kebawah adalah tingkat inkonsistensi yang masih dapat diterima. Lebih dari itu maka harus ada revisi penilaian karena tingkat inkonsistensi yang terlalu besar dapat menjurus pada suatu kesalahan.

Secara sederhana langkah – langkah penyusunan AHP dapat dilihat oleh gambar 3. 7 di bawah ini

Gambar 3.7
Alur Tahapan AHP
 Dekomposisi



Sumber:Khoirunnurofiq, telah diolah kembali

3.3.4. Kelebihan dan Kelemahan Metode AHP

A. Kelebihan metode AHP

- Metode AHP mampu menyelesaikan masalah yang “*multiobjectives*” dan “*multicriterias*”. Kebanyakan model yang ada memakai “single objective” dengan “*multicriteria*”. Kelebihan AHP ini disebabkan oleh fleksibilitasnya yang tinggi terutama dalam pembuatan hiriarkinya, yang memungkinkan AHP menangkap beberapa tujuan dan beberapa kriteria sekaligus dalam sebuah model ataupun hirarki.
- Keputusan yang diambil melalui metode AHP sudah memperhitungkan berbagai tujuan dan kriteria yang berbeda – beda bahkan saling

bertentangan satu sama lain. Sehingga *AHP* bisa memecahkan masalah yang mempunyai tujuan, dan kriteria yang berlawanan.

- Jika dikaitkan dengan kepentingan politik suatu negara, *AHP* bersifat demokratis. Dalam model *AHP* masyarakat dimungkinkan turut serta dalam proses perencanaan pembangunan lewat proses pembuatan hirarki dan pengisian kuesioner bersama – sama aparat pemerintah. Melalui cara ini, diharapkan persepsi masyarakat dapat dimengerti pemerintah dan diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan. Sehingga pada akhirnya pembangunan tidak hanya bersifat “*top-down*” tetapi juga “*bottom up*”
- Menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Penilaian tidak saja berdasarkan angka absolut, melainkan juga relatif (menggunakan skala), atau secara implisit dapat melibatkan sejumlah variabel pengambilan keputusan yang banyak baik kualitatif dan kuantitatif.
- Menggunakan data primer, sehingga tidak mengalami masalah ketersediaan data. Dapat digunakan sebagai suatu model analisis yang mampu diterapkan dalam pendekatan yang melibatkan berbagai unsur atau elemen pelaku (manusia)
- Perhitungan tidak terlalu rumit dengan bentuk yang sangat sederhana
- Inkonsistensi pengisian persepsi responden dapat diukur.

B. Kelemahan model *AHP*

- Ketergantungan model ini pada input berupa persepsi seorang *expert* akan membuat hasil akhir dari model ini menjadi tidak ada artinya apabila si *expert* memberikan penilaian yang keliru
- Belum adanya kriteria yang jelas untuk seorang *expert* yang membuat orang sering ragu – ragu dalam menanggapi solusi yang dihasilkan oleh model ini. Kebanyakan orang akan bertanya apakah persepsi dari seorang *ekspert* itu dapat mewakili kepentingan orang banyak atau tidak, apakah responden tersebut pantas dianggap *expert* atau tidak. Sehingga dibutuhkan batasan yang tegas dari seorang *expert* untuk meyakinkan masyarakat.

untuk menjadi suatu kebijakan yang optimal guna mengatasi kemiskinan masyarakat pesisir di wilayah Tanjung Gundap.

Dalam mencapai tujuan terbentuknya suatu hasil kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis lingkungan yang optimal, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan: Tercapainya program pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis lingkungan yang optimal dalam menganggulangi kemiskinan di wilayah Tanjung Gundap
2. Kriteria dan Tujuan yang hendak dicapai tersebut adalah sebagai berikut:
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat
 - Pengelolaan Program yang baik
 - Ketepatan sasaran
 - Berkurangnya kerusakan lingkungan yang terjadi
3. Pelaku yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program antara lain:
 - Penduduk miskin/ Kelompok sasaran
 - Pemerintah Kota Batam
 - Otorita Batam
 - Pendamping
 - LSM
 - Pihak Swasta
4. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan :
 - Pembangunan sarana dan prasarana (Pengolahan limbah, Pengolahan sampah, Air bersih, MCK, dll)
 - Bantuan modal usaha ekonomi produktif di bidang lingkungan
5. Hasil yang diharapkan dari program adalah:
 - Berkurangnya kerusakan lingkungan
 - Adanya mata pencaharian alternatif masyarakat
 - Meningkatnya pendapatan masyarakat
 - Kemandirian masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif

Berbagai elemen masalah yang telah dirumuskan dari hasil penelitian seperti yang telah diuraikan diatas, diturunkan menjadi hirarki yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan AHP. Dengan demikian

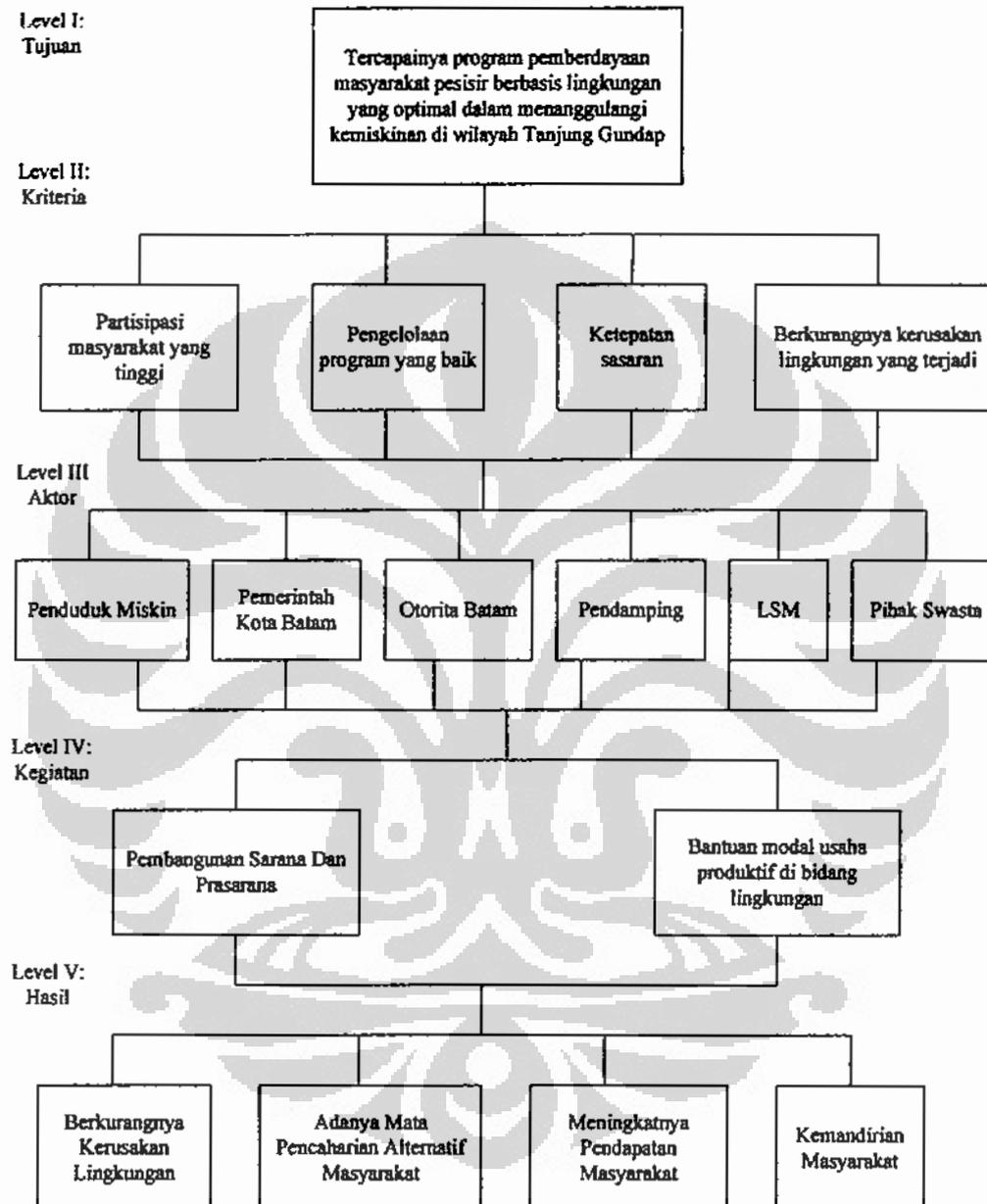
permasalahan tersebut dapat diturunkan dengan hirarki seperti yang ditunjukkan oleh sub-bab 3.3.6 dibawah ini.

3.3.6. Penyusunan Elemen dan Hirarki

Dalam penentuan definisi, level, tujuan, kriteria, aktor, dan dampak yang diharapkan didasari atas pengamatan dan studi yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil pembahasan yang bersumber dari pengamatan dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan program pemberdayaan yang pernah dilakukan, disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Tanjung Gundap, belum mencapai tingkat yang optimal, artinya masih perlu perbaikan. Kondisi belum optimal tersebut didasari oleh kriteria seperti yang digambarkan pada gambar 3. 8 di bawah ini,



Gambar 3. 8
Hirarki Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam
Rangka Mengentaskan Kemiskinan di Tanjung Gundap



Pembuatan hirarki seperti gambar 3. 8 secara umum dapat digunakan untuk menganalisis bentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir yang optimal dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah Tanjung Gundap. Adapun responden *expert* AHP yang berpengaruh pada kerangka hirarki dan penentuan prioritas perlemen masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saniman, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Batam
2. Desman Wardi, Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kelautan BAPPEDA Kota Batam
3. Alexander, Kepala Bidang Program Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam
4. Drs. Tukijan, Kepala Lurah Tembesi
5. Wahidin, HSE Koordinator PT. Mitra Energi Batam dan PT. Dalle Energi Batam
6. M. Sahir, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Batam
7. Dedy Suryadi, Dinas PMP-KUKM Kota Batam.

3.3.7. Penjelasan Definisi Elemen dan Hirarki

Dalam penentuan definisi, level, tujuan, kriteria, aktor dan dampak yang diharapkan didasari atas pengamatan dan studi kualitatif yang dilakukan secara langsung ke wilayah Tanjung Gundap. Berdasarkan tahapan – tahapan kualitatif yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di wilayah Tanjung Gundap belum optimal dilakukan dan masih membutuhkan perbaikan

Hirarki yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat level. Dalam level pertama hirarki , tujuan hirarki adalah menganalisa suatu kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir yang optimal guna menanggulangi kemiskinan di wilayah Tanjung Gundap. Optimal dalam hal ini berarti kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir tersebut tidak hanya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Tanjung Gundap juga dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang mempengaruhi kondisi kemiskinan di Tanjung Gundap, tetapi juga dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan rencana yang dibuat dimana masyarakat ikut berpartisipasi dari awal pelaksanaan program. Kemudian pada level kedua, kriteria utama dalam mencapai tujuan tersebut antara lain:

- Partisipasi masyarakat yang tinggi
- Pengelolaan program yang baik

- Ketepatan sasaran penerima
- Berkurangnya kerusakan lingkungan

Kriteria partisipasi masyarakat yang tinggi, merupakan salah satu indikator tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini tidak hanya dalam pelaksanaan program tetapi juga dari awal perumusan program, pelaksanaan, sampai pemeliharaan program. Dalam pembuatan program pemberdayaan masyarakat di Tanjung Gundap, masyarakat terlibat dalam proses metode PRA yang dilakukan. Dari metode ini diketahui permasalahan dan keinginan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Selain itu juga dengan melibatkan masyarakat, diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dalam diri masyarakat terhadap program yang dijalankan, sehingga mereka akan benar – benar memahami dan menjalankan program tersebut dengan baik. Selain meningkatkan kesejahteraan, tujuan lain program pemberdayaan adalah meningkatkan kemandirian masyarakat. Diharapkan dengan terlibatnya masyarakat dari awal, lambat laun, program pemberdayaan ini dapat dikelola oleh masyarakat dengan porsi yang lebih besar daripada pemerintah atau pihak swasta dan dapat mengembangkan modal sosial dan sumber daya alam yang ada di wilayah Tanjung Gundap.

Kriteria pengelolaan program yang baik, kriteria ini dipilih karena sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai. Indikasi kriteria ini bila tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan – permasalahan seperti yang pernah terjadi pada program – program yang pernah dijalankan, misalnya: penyalahgunaan bantuan, kurangnya bimbingan pengenalan program dari pemerintah yang membuat masyarakat tidak memahami maksud dari program. Kondisi – kondisi tersebut tentu akan menghambat tercapainya tujuan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Berkurangnya kerusakan lingkungan, merupakan kriteria lain yang harus diperhatikan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah Tanjung Gundap. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu masalah utama yang terjadi di wilayah ini dan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat. Selain hal itu juga hal ini menjadi fokus utama dalam program pemberdayaan masyarakat.

Kriteria ketepatan sasaran, dalam konsep pemberdayaan masyarakat pesisir yang baik, berkaitan dengan objek yang akan menerima program tersebut. Hal ini harus diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan program kebijakan pengentasan kemiskinan. Kriteria ini sangat dipengaruhi oleh aktor – aktor atau pelaku kebijakan. Pelaku atau aktor yang sangat berperan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir adalah:

- Penduduk miskin
- Pemerintah Kota
- Otorita Batam
- Pendamping
- Masyarakat/ LSM
- Pihak Swasta

Pelaku yang terlibat dalam program pemberdayaan ini diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian di wilayah Tanjung Gundap

Penduduk miskin atau Kelompok sasaran, merupakan masyarakat pesisir di Tanjung Gundap yang menjadi objek dari program ini. Mereka inilah yang harus diberdayakan dan diyakini dapat mempengaruhi berbagai kriteria tujuan yang hendak dicapai. Mereka dianggap miskin tidak hanya dilihat dari pendapatan yang mereka peroleh tetapi juga dari keterbatasan – keterbatasan mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik, tidak tersedianya sarana transportasi yang memadai, tidak adanya sarana air bersih dan listrik dan kerusakan lingkungan yang mereka hadapi.

Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini pihak – pihak yang harus dilibatkan antara lain, Bappeda, Bappedalda, Dinas Sosial, Dinas KP2LK dan Dinas PMP-UKM. Kesemua badan dan dinas tersebut merupakan pihak – pihak yang biasa terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah Tanjung Gundap. Selain itu juga, diharapkan program yang akan dibuat, sejalan dengan program – program yang telah dibuat oleh pemerintah kota, yang pada akhirnya akan mempermudah proses pelaksanaan program.

Otorita Batam, pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan pemerintah. Akan tetapi Otorita Batam lebih terfokus pada pengembangan wilayah dan daerah. Diharapkan dengan melibatkan pihak Otorita Batam dalam program pemberdayaan ini pengembangan wilayah Tanjung Gundap menjadi lebih terarah. Terlebih lagi saat ini fokus pengembangan Kota Batam oleh Otorita saat ini adalah kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan program *social development*, yang diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan sosial yang timbul sebagai eksternalitas negatif dari pembangunan yang telah berlangsung.

Pendamping, dalam hal ini akan membantu keterlibatan masyarakat, khususnya dalam pemahaman program. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kondisi masyarakat khususnya dalam memahami program yang ada.

Lembaga Swadaya Masyarakat atau Masyarakat Umum, keterlibatan pihak ini adalah sebagai penekan dan pengawas program pemberdayaan yang dilakukan agar program dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu juga pihak LSM dapat juga berperan dalam membantu pihak swasta sebagai penyelenggara dan pendana program pembiayaan dalam melatih dan membimbing masyarakat dalam pelatihan – pelatihan yang dilakukan. LSM yang berperan bisa berasal dari bidang lingkungan maupun sosial.

Pihak swasta, dalam program pemberdayaan ini yang menjadi pihak swasta adalah PT. Mitra Energi Batam dan PT. Dalle Energi Batam yang merupakan anak perusahaan dari PT. Medco Power Indonesia. Perusahaan – perusahaan ini akan menjadikan wilayah Tanjung Gundap sebagai objek *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian, rasa terima kasih dan tanggung jawab sosial, perusahaan – perusahaan tersebut karena telah diizinkan untuk beroperasi di Tanjung Gundap. Kedua perusahaan tersebut tidak hanya mendanai program pemberdayaan yang dilakukan tetapi juga ikut berperan dalam perancangan hingga pengawasan program.

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, yaitu:

- Pembangunan sarana dan prasarana (pengolahan limbah, pengolahan sampah, Air Bersih, MCK, dll)
- Bantuan modal usaha ekonomi produktif di bidang lingkungan

Pembangunan sarana dan prasarana, merupakan pembangunan infrastruktur yang bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Bantuan modal usaha produktif di bidang lingkungan, yaitu pemberian bantuan dana yang akan digunakan sebagai modal kepada kelompok masyarakat. Dana yang diberikan bukan berbentuk pinjaman, melainkan dana tunai yang kemudian penggunaan dan pengelolaannya dalam hal ini diawasi oleh pihak swasta sebagai pemberi dana. Pemberian dana modal ini hanya diberikan untuk membiayai kegiatan – kegiatan wirausaha masyarakat yang memiliki unsur pelestarian lingkungan didalamnya. Sehingga meskipun usaha tersebut menggunakan sumber daya alam sebagai sumber daya utamanya, usaha pelestarian lingkungan tetap tidak dilupakan.

Kemudian terdapat beberapa hasil yang diharapkan dari tujuan tercapainya kebijakan pemberdayaan masyarakat yang optimal di masyarakat, yaitu:

- Berkurangnya kerusakan lingkungan
- Adanya mata pencaharian alternatif masyarakat
- Meningkatnya pendapatan masyarakat
- Kemandirian masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif

Berkurangnya kerusakan lingkungan, merupakan salah satu hasil yang diharapkan. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu permasalahan utama yang terjadi di wilayah ini. Diharapkan dengan berkurangnya kerusakan lingkungan kondisi kehidupan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Tanjung Gundap menjadi lebih baik.

Adanya mata pencaharian alternatif masyarakat. Larangan beroperasi dapur arang membuat masyarakat Tanjung Gundap kehilangan mata pencaharian alternatif. Akibatnya mereka hanya mengandalkan sektor perikanan yang sudah mulai berkurang sebagai mata pencahariannya. Diharapkan dengan adanya program pemberdayaan masyarakat pesisir ini, dapat diperoleh bentuk mata pencaharian baru bagi masyarakat Tanjung Gundap, salah satunya dengan

memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Tanjung Gundap yang belum dikelola dengan baik, misalnya perkebunan. Dimana sebelumnya masyarakat diberikan pengenalan dan pelatihan mengenai mata pencaharian alternatif ini.

Meningkatnya Pendapatan Masyarakat, pendapatan merupakan salah satu indikator untuk melihat kondisi kemiskinan yang terjadi, karena berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu salah satu tujuan program pemberdayaan masyarakat pesisir adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka yang kemudian berpengaruh terhadap kesejahteraanya.

Kemandirian masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, kemandirian merupakan salah satu hasil yang diharapkan dari setiap program pemberdayaan masyarakat yang dibuat. Dengan adanya kemandirian ini, masyarakat diharapkan tidak akan bergantung kepada pemerintah atau pihak lain, dan mampu mengembangkan dan mengelola potensi yang ada dengan baik dalam usaha – usaha ekonomi yang produktif. Selain itu juga diharapkan dapat membantu dan menginspirasi masyarakat lain yang belum mandiri.

Berdasarkan hirarki yang dibuat tersebut, ketujuh *expert* yang ditemui sudah menyetujui bentuk hirarki yang dibuat, oleh karena itu dibuat kuesioner sebagai peralatan analisis perbandingan setiap sel. Kuesioner tersebut adalah sarana jawaban penilaian atau persepsi dari *expert* yang dijadikan responden. Setiap elemen dari hirarki tersebut dituangkan dalam matrik perbandingan dengan skala 1 sampai dengan 9, guna melihat berbagai bobot prioritas elemen per level. Pengisian kuesioner pada masing – masing *expert* terpisah bagi ketujuh *expert*. Kemudian untuk menganalisis secara keseluruhan hasil persepsi responden dibuat rata – rata ukur bagi ketujuh responden. Hasil yang dibuat kemudian dianalisis dan diperoleh suatu persepsi gabungan dari ketujuh responden yang mencerminkan pendapat mereka terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah Tanjung Gundap

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1. Analisa Kualitatif

Analisa kualitatif penelitian ini dilakukan dengan melihat hasil *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, berupa Sejarah Desa, Diagram Venn Kelembagaan, Diagram Alur Masyarakat, Kalender Musim, Analisa Penggunaan Waktu Sehari dan hasil wawancara yang mendalam dan diskusi kelompok dan analisis *SWOT*. Tetapi sebelumnya akan dilihat juga dinamika kehidupan saat ini yang terlihat. Selain itu juga ditambahkan informasi yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan. Analisa kualitatif ini kemudian di triangulasi dengan teori yang telah disebutkan dan juga data sekunder dari BPS.

4. 1. 1. Dinamika Kehidupan Saat Ini

Perubahan – perubahan yang terjadi di Tanjung Gundap membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi masyarakat Tanjung Gundap. Dalam Dinamika Kehidupan Saat ini akan dilihat kecenderungan – kecenderungan perubahan yang terjadi di masyarakat akibat adanya perubahan. Kecenderungan ini akan dilihat dari sisi Status wilayah, Status desa, status kepemilikan tanah, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana termasuk sarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan.

Status Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2005 tentang pemekaran Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, wilayah Tanjung Gundap menjadi bagian wilayah administratif Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Setelah sebelumnya Tanjung Gundap masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Sei Beduk, Kelurahan Sagulung Kota Batam. Kemudian wilayah Tanjung Gundap ini terdiri dari satu RW dan dua RT,

sebenarnya Rukun Warga (RW) ini terdiri dari empat RT akan tetapi dua RT berada di wilayah Tiang Wangkang dan Pulau Manchu.

Masih belum diketahui pasti berapa luas dari Tanjung Gundap karena sampai saat ini, Tanjung Gundap masih diperdebatkan apakah termasuk kedalam kampung tua atau tidak. Wilayah yang akan termasuk kedalam kampung tua-pun masih diperdebatkan apakah sebatas pemukiman suku Melayu dan suku Laut, atau sampai ke wilayah pemukiman yang berjarak kurang lebih 500 m dari pemukiman. Sampai saat ini pemerintah kota Batam masih mengusulkan beberapa pemukiman di wilayah pesisir sebagai kampung tua, termasuk wilayah Tanjung Gundap.

Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan di Tanjung Gundap sama seperti kebanyakan wilayah – wilayah lain di Indonesia. Lingkungan terkecil masyarakat dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh masyarakat. Biasanya yang dipilih adalah mereka yang benar – benar dipercaya oleh masyarakat. Wilayah ini memiliki dua buah RT dimana RT yang pertama terletak di wilayah pemukiman masyarakat melayu

Untuk lingkungan yang lebih besar dipimpin oleh Ketua RW yang juga dipilih oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan hilang jika orang tersebut membuat masalah atau hal lain yang dianggap merugikan masyarakat dimana kemudian ia tidak akan dipercaya kembali oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005, Tanjung Gundap merupakan bagian dari Kelurahan Tembesi sekaligus terpilihnya Kepala Lurah yang baru. Bagi masyarakat Tanjung Gundap pemekaran wilayah yang terjadi sedikit menguntungkan mereka. Mereka merasa perhatian dari pihak Kelurahan jauh lebih baik, khususnya bagi suku Melayu. Pihak kelurahan khususnya Ketua Lurah memberikan perhatian yang cukup intensif bagi masyarakat, bahkan Ia sengaja membuat kelong (tambak ikan) agar bisa lebih dekat dengan masyarakat.

Selain itu juga pihak kelurahan sering membuat program – program pelatihan bagi masyarakat di wilayah yang dinaunginya. Selain itu juga, biasanya rapat atau musyawarah masyarakat biasanya dilakukan di kantor kelurahan

meskipun masih minim fasilitas. Ketua Lurah berharap ada bantuan dari pemerintah untuk membangun balai pertemuan warga yang lebih besar dan memadai, terlebih lagi lahan untuk bangunan sudah ada tepat dibelakang kantor lurah. Dalam menjalankan tugasnya, ketua lurah dibantu oleh seorang sekretaris lurah dan dua orang pegawai administrasi.

Sayangnya masyarakat Suku Laut merasa perhatian lurah sama saja. Mereka menganggap lurah masih lebih dekat dengan masyarakat Melayu. Akan tetapi mereka tidak terlalu mempermasalahkan hal ini.

Pihak kecamatan masih dianggap kurang memperhatikan masyarakat Tanjung Gundap. Mereka hanya datang ke wilayah ini jika ada acara atau bantuan dari pihak pemerintah kota. Kondisi ini terjadi sejak sebelum terjadinya pemekaran wilayah. Lokasi kantor kecamatan yang jauh dan wilayah administratif yang luas merupakan salah satu penyebab.

Tanjung Gundap baik dari masyarakat Melayu ataupun Suku Laut tidak memiliki tokoh masyarakat atau tetua adat yang sangat dipercaya. Hanya ada orang yang mereka anggap sebagai “orang tua”, akan tetapi mereka tidak memiliki pengaruh yang kuat bagi masyarakat.

Jika terjadi konflik di masyarakat, biasanya yang menjadi penengah adalah ketua RT, RW atau Kepala Lurah. Jika masalah tersebut berkepanjangan dan menimbulkan konflik yang harus melibatkan pihak yang berwajib, maka jalur penyelesaiannya berawal dari pelaporan kepada ketua RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelurahan kemudian Kapolsek.

Status Kepemilikan Tanah

Tanjung Gundap sendiri merupakan wilayah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batam. Sama seperti wilayah lain di Kota Batam, tanah dan lahan yang ada dimiliki oleh Otorita Batam, masyarakat hanya memiliki hak pakai. Penduduk Tanjung Gundap mendiami wilayah ini secara turun temurun, jauh sebelum Kota Batam dibentuk. Sampai saat ini, belum adanya status resmi mengenai wilayah Tanjung Gundap, membuat masyarakat belum memiliki sertifikat atas tanah dan bangunan yang mereka miliki dari Badan Pertanahan

Nasional, sebagai bukti kepemilikan. Banyak perusahaan yang membeli tanah warga tanpa disertai sertifikat.

Karena sudah merasa mendiami wilayah tersebut secara turun temurun, masyarakat tidak merasa perlu adanya sertifikat, lagipula rumah yang dimiliki adalah rumah kayu yang tidak permanen. Bagi masyarakat Tanjung Gundap, para pendatang yang membeli lahanlah yang harus memiliki sertifikat. Oleh karena itu masyarakat membuat "Surat Teruk" digunakan sebagai bukti dan diarsipkan oleh pihak kelurahan. Surat ini merupakan pernyataan dari pemilik, RT, RW yang berisi batasan – batasan lahan, sedangkan luas lahan tidak disebutkan. Saat ini harga tanah per meter di Tanjung Gundap adalah Rp. 2000,00 – Rp. 3000,00

Pengelolaan Sumber Daya Alam

Perekonomian Tanjung Gundap mengandalkan sektor perikanan. Komoditi utama dari wilayah ini adalah, Ikan, Udang, Kepiting dan Cumi – cumi. Saat menjelang hari raya Imlek, biasanya muncul ikan Dingkis yang sering digunakan untuk bersembahyang. Harga dari ikan ini sangatlah mahal, bisa mencapai Rp. 100.000,. Sampai awal tahun 1990-an, hasil tangkapan mereka sangatlah banyak. Bahkan mereka bisa menjual sendiri ikan – ikan tersebut ke Singapura, terlebih lagi saat itu mereka masih bebas masuk ke Singapura tanpa persyaratan yang rumit. Tak jarang ikan yang berhasil mereka tangkap dibeli dengan menggunakan Dollar Singapura.

Akan tetapi sekitar tahun 1990-an hasil tangkapan ikan mereka menurun, jika biasanya mereka bisa mendapat 20 sampan untuk sekali melaut, kini hanya tinggal 13 – 15 sampan dan itupun dengan kualitas tangkapan yang tidak terlalu bagus. Hal ini tentu saja berpengaruh kepada kondisi perekonomian keluarga di Tanjung Gundap. Turunnya hasil tangkapan diakibatkan oleh terjadinya pencemaran dari *Shipyard* (pabrik galangan kapal) Marcopollo yang letaknya di Dapur Duabelas sekitar 10 Km dari pemukiman, akan tetapi masih termasuk kedalam perairan Tanjung Gundap. Pencemaran dari pabrik galangan kapal ini sudah menyebar dari Tanjung Uncang sampai ke Tanjung Gundap. Bagi masyarakat Tanjung Gundap, pencemaran tidak akan berhenti sebelum pabrik galangan kapal tersebut digusur. Penyebab lain adalah pencemaran sungai akibat

limbah rumah tangga yang berasal dari perumahan di sekitar Tanjung Gundap. Dari tahun 2000 sampai sekarang, kondisi ini menjadi semakin buruk.

Wilayah pemukiman masyarakat Tanjung Gundap pada dasarnya berada di tepi laut yang merupakan muara dari sungai – sungai yang berada di wilayah ini. Sungai – sungai yang ada di Tanjung Gundap kaya akan ikan, udang dan kepiting. Masyarakat Tanjung Gundap biasanya mencari ikan sampai ke wilayah ini. Tak jarang kaum wanita ikut mengambil kerang, kepiting dan udang. Selain itu juga banyak warga Batam yang mengetahui wilayah ini, datang untuk memancing. Mereka biasanya menggunakan sepeda motor untuk mencapai wilayah ini. Sungai ini sebenarnya bisa dijadikan salah satu potensi wisata. Akan tetapi belum dikelola dengan baik oleh masyarakat. Rencananya dalam dua tahun kedepan lokasi ini dapat dibenahi dan dikelola dengan baik untuk menambah pendapatan warga.

Sayangnya wilayah sungai ini juga tercemar oleh limbah dan sampah rumah Tangga dari perumahan Cipta Asri. Limbah dan sampah ini menutup permukaan sungai, sehingga permukaan air menjadi berbau busuk, keruh dan menyulitkan masyarakat untuk mencari ikan, udang dan kepiting. Terlebih lagi saat musim hujan, air sungai menjadi lebih keruh dan nelayan tidak bisa mencari udang, kepiting dan ikan. Biasanya saat musim hujan, nelayan menggunakan umpan akan tetapi hal ini bukan jaminan untuk mendapat tangkapan yang banyak. Terkadang memaksakan untuk mencari udang, ikan, kerang dan kepiting di sungai pada musim hujan, justru merugikan mereka, Karena mereka biaya yang mereka keluarkan untuk membeli/membuat umpan tidak sebanding dengan hasil menjual tangkapan.

Masyarakat mengeluhkan akhir – akhir ini mereka lebih sering melihat popok bayi daripada ikan, udang, kerang ataupun kepiting. Mereka menginginkan adanya pengetesan kadar limbah air sungai, sebagai bukti telah terjadinya pencemaran. Pengetesan terakhir dilakukan pada tahun 1999.

Turunnya kualitas dan kuantitas hasil tangkapan, berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh nelayan. Toke ikan memberikan harga sesuai dengan kualitas ikan yang ditangkap. Untuk udang, nelayan akan memperoleh Rp.

40.000,00/Kg untuk udang yang masih hidup dan Rp. 35.000,00 untuk udang yang sudah mati.

Pemerintah Kota Batam bersama Dinas KP2K dan Dinas Sosial pernah memberikan bantuan berupa bibit untuk budi daya ikan. Sayangnya program ini tidak berjalan dengan baik. Keruhnya air akibat pencemaran membuat ikan tidak bisa melihat makanannya, akhirnya ikan – ikan tersebut mati dan tidak menghasilkan apa – apa.

Berkaitan dengan pencemaran yang terjadi, masyarakat Tanjung Gundap saat ini sedang dalam tahap negosiasi untuk meminta pertanggung jawaban dan ganti rugi dari perumahan Cipta Asri. Negosiasi ini melibatkan para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW dan Kepala lurah.

Selain pencemaran, dihilangkannya subsidi BBM oleh pemerintah ternyata mempersulit masyarakat untuk melaut. Turunnya pendapatan akibat pencemaran dan mahal nya harga BBM, terkadang membuat uang hasil menjual tangkapan hanya cukup untuk menutupi biaya bahan bakar. Terlebih lagi, terkadang untuk menangkap udang mereka membutuhkan minyak tanah. Selain itu juga untuk memperoleh BBM masyarakat harus meminta surat yang ditandatangani oleh kepala lurah, agar pihak SPBU mau memberikan BBM kepada mereka. Hal ini terjadi karena pihak SPBU takut BBM ini disalah gunakan dengan cara dijual kembali secara eceran.

Di Tanjung Gundap juga, banyak terdapat hutan bakau yang merupakan sumber daya alam lain. Hutan bakau ini terletak di pinggiran sungai dan juga terdapat rawa bakau. Masyarakat memanfaatkan batang bakau yang sudah tua untuk dikelola menjadi arang. Dibutuhkan waktu dua sampai tiga bulan untuk membakar arang. Hal ini dipengaruhi oleh musim yang sedang berlangsung. Biasanya saat musim hujan, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses arang karena suhu udara yang lembab, sebaliknya ketika musim kemarau, waktu yang dibutuhkan agak lebih cepat. Akan tetapi usaha arang yang sudah dilakukan secara turun temurun ini dilarang untuk beroperasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, karena dianggap dapat mengganggu kelestarian hutan bakau yang merupakan salah satu pelindung bagi wilayah pesisir, terlebih lagi wilayah hutan bakau di kota Batam saat ini sudah sangat berkurang.

Masyarakat beralih justru kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan oleh pemerintah yang merusak hutan bakau. Kegiatan reklamasi merusak hutan bakau secara sekaligus, sedangkan untuk dapur arang, masyarakat hanya mengambil batang yang sudah tua. Masyarakat tidak berani mengambil seluruh batang karena biasanya udang kerang dan kepiting hidup dibawah batang bakau. Jika mereka mengambil semuanya sama artinya dengan mematikan udang, kepiting dan kerang yang ada. Beberapa perusahaan yang berada di sekitar Tanjung Gundap, termasuk PGN pernah menggunakan lahan hutan bakau. Akan tetapi mereka memberikan ganti rugi kepada masyarakat.

Saat ini masyarakat Tanjung Gundap masih mengoperasikan dapur arang dalam skala kecil. Dapur arang yang besar sudah tidak diaktifkan lagi. Untuk bahan baku, masyarakat menggunakan batang bakau dari hutan di sekitar pemukiman. Tapi terkadang mereka mencari batang bakau dari tempat yang lebih jauh.

Terdapat lahan perkebunan yang cukup luas di Tanjung Gundap, akan tetapi tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat. Sejak awal tahun 1990an, ketika mulai banyak pendatang dari luar pulau Batam, lahan perkebunan ini disewakan kepada pendatang untuk dikelola. Sampai saat ini komoditi utamanya adalah sawi dan kol.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam

Sejak awal menempati wilayah Tanjung Gundap, penduduk mengandalkan kehidupannya dengan bekerja sebagai nelayan. Mereka adalah nelayan pantai yang wilayah tangkapannya tidak terlalu jauh. Nelayan Tanjung Gundap untuk melaut hanya menggunakan perahu pompong sederhana, tetapi masih ada nelayan yang menggunakan perahu dayung. Keterbatasan peralatan ini tidak memungkinkan mereka untuk melaut lebih jauh. Pekerjaan ini sampai awal tahun 1990-an cukup menjanjikan bagi mereka, akan tetapi akibat pencemaran yang terjadi yang mengakibatkan berkurangnya hasil tangkapan, yang kemudian mempengaruhi pendapatan mereka. Rata – rata pendapatan sehari mereka saat ini adalah Rp. 10.000,00, setelah dikurangi biaya untuk membeli bahan bakar. Oleh karena itu mereka melakukan pekerjaan alternatif dengan membuat Dapur Arang.

Dapur Arang adalah pekerjaan alternatif dari masyarakat Tanjung Gundap. Hal ini sudah dilakukan secara turun temurun. Biasanya dilakukan ketika sedang tidak panen ikan (sekitar bulan Maret hingga Oktober), untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Terdapat lebih dari sebelas Dapur Arang di wilayah ini. Arang yang sudah jadi kemudian dipasarkan disekitar Pulau Batam dan Singapura oleh toke yang datang. Biasanya untuk setiap kilogram arang diberi harga Rp. 2200,00/Kg dan dijual oleh tauke dengan harga Rp. 4000,00/Kg

Akan tetapi sejak tahun 2007, usaha dapur arang ini dilarang karena dianggap dapat merusak Hutan Bakau yang merupakan salah satu usaha perlindungan bagi wilayah pesisir. Akibatnya banyak pemilik dapur Arang yang takut untuk beroperasi. Dengan kondisi hasil tangkapan yang menurun drastis, ditutupnya dapur arang ini membuat kondisi perekonomian masyarakat di Tanjung Gundap menjadi bertambah buruk.

Beberapa orang wanita di wilayah ini membuka warung kecil – kecilan. Usaha ini mereka lakukan sejak Tahun 2000, ketika hasil tangkapan sudah mulai berkurang drastis. Barang – barang diperoleh dari titipan warga yang berasal dari kota. Sayangnya warung ini tidak dikelola dengan baik. Warung hanya buka ketika ada warga lain yang membutuhkan barang. Selain itu juga ada warga yang membuka usaha setrum Accu, dan itupun tidak dikelola dengan baik. Seorang warga juga membuka usaha membuat kerajinan topi anyaman yang ia jual kepada sesama nelayan dengan harga Rp. 15.000,00. Kurangnya wilayah pemasaran, menyebabkan ia tidak membuat topi anyaman setiap hari.

Sifat masyarakat Melayu yang sulit untuk diatur dan dipimpin merupakan salah satu hambatan yang cukup berarti bagi masyarakat Tanjung Gundap dalam mencari pekerjaan. Pihak kelurahan sering meminta bantuan kepada perusahaan – perusahaan yang ada di sekitar Kelurahan Tembesi dan Bareleng agar mereka mau mengambil tenaga kerja dari wilayah Tanjung Gundap. Beberapa orang warga pernah menjadi tenaga keamanan dan buruh di beberapa perusahaan di sekitar kelurahan Tembesi dan Bareleng. Akan tetapi karena sifat yang sudah turun temurun tersebut membuat mereka tidak betah untuk bekerja dan memilih untuk keluar. Padahal gaji yang mereka terima jauh lebih besar daripada penghasilan mereka sebagai nelayan.

Selain itu juga, masyarakat Tanjung Gundap tidak ada keinginan untuk melepas pekerjaan nelayan mereka, sebenarnya mereka mau untuk bekerja di tempat lain asalkan mereka masih memiliki waktu untuk melaut. Tentu saja hal ini sulit untuk dipenuhi, karena kebijakan waktu kerja perusahaan – perusahaan di Kota Batam, kebanyakan menggunakan sistem shift, pagi atau malam selama 8 jam perhari.

Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki, merupakan salah satu penyebab lain sulitnya masyarakat Tanjung Gundap untuk mencari pekerjaan. Keahlian lain kaum pria adalah mengolah kayu, sayangnya keahlian mereka ini kurang diminati oleh perusahaan – perusahaan di sekitar Batam. Terkadang mereka nekat untuk masuk ke pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian mereka, pada akhirnya mereka hanya bertahan sebentar dan memilih untuk keluar dan kembali menjadi nelayan.

Beberapa remaja putri suku laut memilih untuk bergabung kedalam rombongan joged untuk bekerja sebagai penari. Sebenarnya hal ini dilarang oleh orang tua mereka, akan tetapi mereka terpaksa diizinkan karena mereka membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Biasanya rombongan joged ini keliling dari satu kampung ke kampung lain di sekitar Kota Batam atau ke pulau lain seperti Pulau Belakang Padang, selama dua sampai enam bulan.

Kegiatan PKK tidak berjalan dengan baik di Tanjung Gundap, hanya bertahan selama 4 tahun saja. Pemerintah Kota Batam memberikan pelatihan PKK kepada ibu – ibu dengan harapan mereka memiliki keterampilan yang pada akhirnya keterampilan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Di Tanjung Gundap pelatihan PKK ini diberikan oleh pihak kelurahan. Pelatihan yang pernah diberikan adalah cara membuat kue dan tudung saji.

Kegiatan PKK ini tidak berjalan dengan baik karena kurangnya jalur pemasaran dari produk – produk yang dihasilkan. Biasanya kue dan tudung saji hanya dipasarkan di pemukiman masyarakat. Masyarakat menganggap, jika semua orang membuat kue dan tudung saji, dan jalur pemasaran hanya diperkampungan, siapa yang akan membeli. Kesulitan untuk memperoleh bahan baku merupakan hambatan lain, untuk membuat tudung saji dari rotan, mereka harus mencari rotan dari hutan dan hal ini menyulitkan mereka.

Meskipun demikian, kegiatan PKK masih dirasakan oleh ibu – ibu yang tinggal di pemukiman Suku Laut. Mereka dilatih oleh ibu – ibu PKK dari kota Batam sekaligus mengadakan ibadah disana. Mereka biasanya mengadakan pelatihan pembuatan aksesoris yang terbuat dari kulit kerang dan membuat kue.

Perekonomian Keluarga dan Peran Perempuan di Dalamnya

Seperti masyarakat Melayu kebanyakan, kaum lelaki memiliki peranan yang lebih besar dalam keluarga jika dibandingkan dengan perempuan. Kaum lelaki tidak hanya sebagai kepala keluarga tapi juga sebagai pencari nafkah utama. Ketika sedang musim ikan, mereka berkerja dari malam hingga pagi hari. Sepulangnya biasanya mereka beristirahat. Tidak jarang ada kaum wanita yang ikut melaut. Tetapi jika sedang tidak musim ikan, mereka biasanya bekerja sejak pagi hingga sore untuk mencari kayu.

Perempuan di Tanjung Gundap, berperan sebagai pengatur rumah tangga. Hampir semua perempuan di wilayah ini bekerja sebagai ibu rumah tangga. Perempuan usia sekolah yang sudah putus sekolah, biasanya membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Keuangan keluarga diatur oleh perempuan. Biasanya pihak laki – laki memberikan uang hasil menjual ikannya dan pihak perempuan yang mengelola. Penurunnya pendapatan yang diperoleh suami sangatlah merepotkan mereka. Akibatnya mereka lebih sering menerapkan prinsip gali lubang tutup lubang, untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari mereka.

Bagi perempuan di wilayah Tanjung Gundap, pekerjaan mereka sebagai ibu rumah tangga sudah cukup merepotkan dan menghabiskan waktu. Sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mencari pekerjaan sampingan. Hanya sesekali mereka mencari kerang, udang dan ikan di sekitar sungai.

Sarana dan Prasarana

Sampai saat ini Tanjung Gundap belum memiliki jalan beraspal. Kondisi jalan masih berupa jalan tanah. Jalan beraspal di wilayah ini hanyalah jalan menuju jembatan Bareleng, yang merupakan salah satu akses untuk masuk ke Tanjung Gundap. Akan tetapi dari jalan beraspal tersebut, untuk menuju Tanjung Gundap, harus dilalui jalan tanah yang sangat buruk kondisinya sepanjang kurang

lebih tiga kilometer dengan lebar dua sampai tiga meter yang masih bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Jalan tanah ini sifatnya sementara, bisa saja berubah. Jalan tanah ini akan sangat berdebu ketika musim kemarau dan akan sangat becek dan licin ketika hujan turun. Tidak adanya fasilitas air yang memadai, membuat masyarakat tidak bisa menyiram jalan untuk mengurangi debu.

Struktur jalan yang buruk inilah yang dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya bagi suku Melayu yang lebih senang menggunakan jalan darat daripada laut, karena tidak ada kendaraan umum yang melewati wilayah tempat tinggal mereka. Akibatnya beberapa aktifitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan menjadi terhambat. Pada saat hujan turun, karena harus berjalan sepanjang tiga kilo meter, banyak anak sekolah yang memutuskan untuk tidak masuk, karena bagaimanapun juga sesampainya di sekolah baju mereka akan basah.

Meskipun mengeluhkan fasilitas jalan yang minim, tidak ada usaha dari masyarakat untuk mengumpulkan uang atau membuat tabungan masyarakat untuk membuat jalan. Masyarakat hanya menunggu bantuan dari pihak pembangun perumahan yang dibangun di lahan menuju pemukiman masyarakat (Perumahan Aviari 2). Pihak pembangun menjanjikan akan membuat jalan jika perumahan tersebut sudah berdiri. Sedangkan menurut kepala desa, jalan tersebut merupakan salah satu bentuk ganti rugi atas lahan yang digunakan. Sayangnya masyarakat lebih memilih ganti rugi uang daripada Jalan. Sampai sekarang, hal ini masih diperdebatkan, karena pihak pembangun hanya akan memberi salah satu antara fasilitas jalan atau uang.

Selanjutnya menurut Kepala Desa, jika dibandingkan dengan Tiang Wangkang, pembangunan fasilitas di Tanjung Gundap sangatlah minim, karena pilihan masyarakat yang lebih memikirkan kepentingan dirinya dan lebih mementingkan bantuan berupa uang daripada fasilitas. Masyarakat Tiang Wangkang sadar akan pentingnya jalan, ketika ada pihak yang menawarkan bantuan jalan mereka menerima bantuan tersebut dan saat ini, sudah berdiri sebuah restoran sea food.

Bagi masyarakat Suku Laut, minimnya fasilitas jalan tidak terlalu mempengaruhi kehidupan mereka. Untuk sarana transportasi mereka lebih

memilih untuk menggunakan perahu dayung karena tidak usah mengeluarkan biaya untuk membeli bensin. Terkadang untuk mendapat fasilitas kesehatan, mereka lebih memilih pergi ke pulau lain daripada harus ke kota, karena pulau tersebut bisa dicapai dengan menggunakan perahu. Sedangkan bagi masyarakat Melayu, mereka tidak suka menggunakan perahu dayung dan perahu pompong biaya bahan bakarnya lebih mahal daripada sepeda motor.

Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya penyuluhan mengenai bantuan yang diberikan membuat cara pandang masyarakat Tanjung Gundap terhadap bantuan masih sangat sempit. Bagi masyarakat Tanjung Gundap, bantuan berupa jalan tidak bisa mereka nikmati secara pribadi dan langsung. Beda dengan bantuan berupa uang, jika uang mereka bisa membeli apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan mereka. Akan tetapi bantuan berupa uang juga masih mereka anggap tidak sesuai karena uang tersebut akan habis sebelum mereka meninggal. Bagi mereka bantuan berupa subsidi adalah yang paling tepat. Dalam hal ini masyarakat mengartikan subsidi sebagai pemberian uang secara berkala. Padahal bantuan seperti ini justru akan meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dan tidak menumbuhkan kemandirian masyarakat.

Listrik di desa ini diperoleh dari sebuah generator yang merupakan sumbangan pemerintah kota Batam yang disalurkan oleh dinas PMP UKM, pada tahun 2002, yang dikelola oleh Koperasi Usaha Bersatu. Kapasitas generator ini adalah 65 KVA yang mampu memberikan listrik sebesar 4 Ampere ke setiap rumah. Generator listrik ini akan digerakkan pada pukul enam sore sampai sebelas malam setiap harinya. Untuk fasilitas sini, masyarakat ditarik pungutan sebesar Rp. 4000,00 untuk membeli minyak diesel penggerak Genset. Akan tetapi saat ini pengelolaan generator tidak lagi dikelola oleh koperasi melainkan oleh salah seorang warga.

Masyarakat sebenarnya menginginkan masuknya listrik dari PLN, akan tetapi kendala yang terjadi adalah tidak adanya sarana jalan yang memadai yang memungkinkan masuknya fasilitas listrik. Selain itu juga dibutuhkan kabel dan tiang listrik yang sangat banyak dari gardu PLN terdekat agar listrik masuk ke pemukiman warga, sedangkan PLN belum memiliki biaya yang cukup untuk membiayainya. Masyarakat masih menunggu selesainya pembangunan

perumahan Aviari 2, karena jika perumahan tersebut selesai dibangun, maka fasilitas jalan dan listrik untuk perumahan tersebut akan disalurkan ke pemukiman warga.

Pertengahan tahun 1990an, terdapat Koperasi Nelayan yang merupakan Koperasi jual beli yang menyediakan BBM bagi nelayan. Akan tetapi, Koperasi ini tidak berjalan lancar, karena tidak adanya kepercayaan antara pengurus dengan pembina dan juga kurangnya kerjasama antara pengurus yang ada. Akibatnya Koperasi ini dibubarkan. Pada tahun 2009 ini, beberapa warga mengusulkan adanya Koperasi untuk dapur arang. Dengan harapan, dapat meningkatkan harga jual dan memperluas wilayah distribusi arang yang mereka hasilkan. Kemudian sejak tahun 2002, untuk mendukung bantuan fasilitas generator listrik yang diberikan, maka dibentuklah Koperasi Usaha Bersatu, yang akan mengelola iuran masyarakat. Meskipun saat ini pengelolaan generator diserahkan ke salah seorang warga.

Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan masuk ke wilayah ini sejak awal tahun 1980-an. Sebelumnya tidak ada satupun fasilitas pendidikan yang masuk. Akibatnya banyak penduduk usia produktif yang buta huruf. Sarana pendidikan yang pertama masuk adalah SD Negeri Tanjung Gundap. Saat itu banyak warga yang memasukkan anaknya ke sekolah tersebut, tidak sedikit anak tersebut sudah bukan usia SD lagi, sehingga pada saat kelulusan banyak yang sudah berusia diatas 14 Tahun. Awalnya yang bersekolah disini hanyalah anak – anak warga Tanjung Gundap, akan tetapi pada tahun ajaran baru 2008, sekolah ini menerima enam orang siswa yang merupakan anak Suku Laut. Mereka bersekolah atas biaya dari donatur.

Sampai saat ini SD Tanjung Gundap memiliki lima orang guru termasuk seorang kepala sekolah yang juga merangkap sebagai guru. Jumlah siswa kelas satu sampai enam adalah 80 orang. Sejak awal tahun ajaran 2009 SD Tanjung Gundap sudah berdiri sendiri tidak bergabung lagi dengan SD Tembesi 01, hal ini tentu saja mempermudah pelaksanaan ujian akhir, karena sebelum berdiri sendiri

para siswa harus pergi ke SD untuk mengikuti ujian. Selain itu juga hal ini memungkinkan masyarakat untuk membentuk komite sekolah.

Pemerintah Kota Batam, sangat memperhatikan kondisi sekolah ini. Dana BOS sudah diberikan, meskipun tidak mencukupi, karena dana BOS ini diberikan berdasarkan jumlah siswa yang ada. Kesejahteraan gurupun sangat diperhatikan. Mereka mendapat gaji dan insentif yang sesuai dengan golongannya. Saat ini SD Tanjung Gundap sedang membangun gedung sekolahnya, direncanakan akan dibuat tiga tingkat.

Sejak dulu siswa SD Tanjung Gundap terkenal dengan prestasinya dibidang tarian melayu dan sepak takraw. Mereka sering dipanggil menari di acara – acara yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Batam. Untuk sepak takraw, dengan prestasinya ini, pemerintah Kota Batam memberikan bantuan untuk berlatih. Pada bulan Juli 2009 kemarin siswa SD Tanjung Gundap mengikuti perlombaan Dragon Boat yang diadakan oleh pemerintah Kota Batam. Kegiatan pelatihan Dragon Boat ini didukung oleh pihak kelurahan termasuk pemberian dana.

Dengan adanya BOS, orang tua murid tidak perlu lagi membayar uang sekolah, mereka hanya membayar uang buku dan seragam pada tahun ajaran baru. Besarnya adalah Rp. 340.000,00 untuk satu orang anak. Tetapi jika orang tua tersebut memiliki dua orang anak, maka komite sekolah memberikan diskon, dimana untuk dua orang anak dikenai biaya Rp. 360.000,00. Begitu juga kalau orang tua tersebut memiliki tiga anak atau lebih. Dari uang yang dibayarkan tersebut, siswa akan memperoleh buku, seragam batik, seragam muslim untuk hari jumat dan seragam olah raga. Untuk seragam putih siswa diharuskan membeli sendiri.

Meskipun demikian, sekolah ini masih membutuhkan alat pendukung belajar mengajar, misalnya alat peraga IPA, untuk menunjang materi yang diberikan. Meskipun demikian kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar. Siswa kelas enam yang akan menghadapi Ujian Akhir mendapatkan pelajaran tambahan sepulang sekolah. Para gurulah yang memberikan pelajaran tambahan ini. Tingkat kelulusan siswa SD Tanjung Gundap adalah 99%. Pada tahun ajaran 2008, hanya ada seorang siswa yang tidak lulus, itu pun bukan

karena ia mengundurkan diri di akhir semester, melainkan karena merasa malu dengan bentuk tubuhnya yang besar. Diharapkan pada tahun ajaran baru mendatang, jumlah siswa yang masuk bertambah banyak dan tingkat kelulusan tetap bisa dipertahankan.

Tidak ada fasilitas pendidikan lain, akibatnya sebagian besar penduduk di Tanjung Gundap pendidikannya hanya sampai SD, dan banyak warga yang setelah lulus SD langsung menikah. SMP dan SMA terdekat dari wilayah Tanjung Gundap adalah di Aviari. Untuk kesana harus ditempuh jarak kira – kira 10 KM. Mahalnya ongkos dan tidak adanya sarana transportasi yang memadai menyulitkan lulusan SD di Tanjung Gundap untuk melanjutkan pendidikannya. Hanya sedikit yang melanjutkan pendidikan dan hanya ada satu orang yang berhasil melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi di Pulau Jawa.

Sekitar tahun 2007, masuk sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merupakan bantuan dari pemerintah. Fasilitas ini merupakan pendidikan dasar bagi anak – anak yang belum mencapai usia sekolah. Selain itu juga sejak tahun 2000 terdapat Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) yang dikelola oleh pemerintah. Sayangnya TPA ini kekurangan tenaga pengajar. Pengajar yang disediakan dan digaji oleh pemerintah sering tidak datang, dan tinggal di luar wilayah Tanjung Gundap.

Pada dasarnya kemauan masyarakat untuk sekolah cukup tinggi, khususnya bagi mereka yang lahir setelah tahun 1990an. Mereka ingin memiliki tingkat pendidikan yang sama dengan orang tua, alasannya agar mudah mencari pekerjaan. Akan tetapi keinginan mereka terbentur masalah biaya dan fasilitas yang tersedia. Selain itu juga persepsi orang tua mereka mengenai pendidikan yang masih sangat sempit, khususnya pendidikan bagi anak perempuan. Sampai saat ini hanya ada satu orang warga yang lulus perguruan tinggi dari Pulau Jawa, itupun karena diberi bantuan, dan ada dua orang yang lulus SMK. Masih banyak orang tua yang menganggap anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena pada akhirnya akan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Masih rendahnya tingkat pendidikan orang tua, cukup menyulitkan mereka dalam membantu anaknya untuk belajar di rumah, karena tingkat kesulitan pelajaran saat ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan saat mereka sekolah dulu.

Sarana Peribadatan

Meskipun terdiri dari penduduk Muslim dan Protestan, sarana peribadatan yang ada di wilayah ini hanyalah sebuah Mushola yang tidak begitu besar. Mushola ini berdiri pada Tahun 1989 atas swadaya masyarakat. Awalnya mushola ini sangat minim fasilitasnya. Kemudian pada tahun 2007, PT. Mitra Energi Batam memberikan bantuan berupa Toilet kepada Mushola ini. Pengelolaan Mushola diserahkan kepada masyarakat. Mushola ini kemudian dipimpin oleh seorang imam masjid yang tinggal di pemukiman penduduk. Sampai saat ini Mushola dipakai untuk kegiatan keagamaan seperti Shalat jumat dan hari raya juga TPA bagi anak - anak. Mushola ini dipimpin oleh seorang imam yang merupakan masyarakat Tanjung Gundap.

Tidak ada sarana peribadatan bagi Suku Laut yang beragama protestan. Untuk beribadah sebulan sekali mereka pergi ke Tiang Wangkang, dimana ada sebuah gereja disana. Biasanya mereka mengumpulkan uang untuk membeli bahan bakar untuk pompong atau menyewa mobil untuk pergi ke Tiang Wangkang. Untuk ibadah setiap minggunya, biasanya setiap hari jumat ada seorang pendeta yang datang dan mengadakan ibadah di rumah salah seorang warga (Pak Badak), terkadang, ibu - ibu PKK dari kota datang untuk memberikan pelatihan dan juga mengadakan ibadah.

Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di wilayah ini adalah seorang Bidan (Bidan Berta Uli) yang bertugas di PUSTU, meskipun tidak datang setiap hari. Padahal kesadaran masyarakat khususnya Suku Melayu untuk berobat secara medis sudah cukup tinggi. Masyarakat ketika sakit, memeriksakan kehamilan dan melahirkan lebih memilih untuk ke bidan ataupun puskesmas di wilayah Tanjung Gundap, Batam maupun di Pulau Belakang Padang. Masyarakat Tanjung Gundap mengeluhkan hal ini, karena akan merepotkan mereka jika ada salah seorang warga yang sakit tiba - tiba. Padahal bidan tersebut sudah disediakan rumah dengan kondisi yang sangat bagus (berlantai keramik, dinding yang terbuat dari tembok), jika dibandingkan dengan rumah warga yang lain.

Beberapa orang warga lebih memilih untuk mengunjungi Puskesmas di Pulau Belakang Padang karena dapat dijangkau dengan menggunakan Pompong (Perahu Kecil), sehingga ongkos yang mereka keluarkan jauh lebih murah. Sebenarnya sekitar 7 km dari lokasi pemukiman, terdapat sebuah rumah sakit besar yaitu RS. Casa Medika.

Meskipun demikian masih ada juga penduduk yang berobat ke dukun yang merupakan tetua masyarakat Tanjung Gundap. Biasanya penduduk yang merasa mengalami sakit non medis-lah yang mengunjungi dukun ini. Beberapa orang wanita juga lebih memilih untuk melahirkan dibantu oleh tetua yang mereka panggil "Nenek". Alasannya adalah biaya melahirkan yang lebih murah ketimbang mereka harus pergi ke bidan atau rumah sakit. Program KB di wilayah ini berjalan dengan cukup baik, banyak warga yang mengikuti program KB suntik dan Pil. Untuk program KB ini, masyarakat mempercayakannya ke Bidan.

Sebagian besar warga Tanjung Gundap sudah terdaftar sebagai penerima ASKESKIN. Akan tetapi masih terdapat banyak kesalahan identitas seperti nama, alamat dan umur yang tertera di kartu ASKESKIN mereka. Hal ini terkadang menyulitkan warga untuk berobat khususnya bagi mereka yang sudah dewasa, karena sebagai bukti mereka harus membawa kartu keluarga. Tapi untuk anak – anak hal ini tidak menjadi masalah. Kartu ASKESKIN ini bisa diterima oleh dua buah rumah sakit daerah yang terletak di Sekupang dan Batu Aji.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan kebutuhan air sehari – hari, diperoleh air dari Sungai yang kemudian ditampung didalam sumur penampungan. Hal ini sangat menyulitkan warga karena lokasi sungai yang jauh dari pemukiman dan harus ditempuh dengan sepeda motor. Sebenarnya masyarakat Tanjung Gundap sudah memiliki sumur galian, akan tetapi airnya masih belum jernih, payau, terasa asin dan jika digunakan sebagai air minum, biasanya masyarakat akan merasa sakit perut. Oleh karena itu, masyarakat merasa membutuhkan saluran air bersih yang memadai. Saat musim kemarau terkadang masyarakat menampung air hujan di sumur tersebut.

Fasilitas MCK di wilayah ini sangatlah minim. Tidak semua rumah memiliki MCK sendiri. Bagi masyarakat Tanjung gundap MCK hanya untuk mandi saja, untuk buang air kecil dan besar, mereka hanya membuat jarak

diantara kayu – kayu yang digunakan untuk membuat MCK. Tidak ada saluran pembuangan khusus, kotoran dibuang langsung ke laut. Di wilayah pemukiman Suku Laut ada sebuah MCK umum dengan ukuran 1 x 2 m dan bisa dikatakan cukup, meskipun sangat minim, karena sulitnya air bersih. Biasanya mereka menggunakan MCK ini untuk mencuci, akan tetapi ada juga yang menggunakannya untuk membersihkan badan dan buang air.

Masyarakat di wilayah ini belum memiliki fasilitas pembuangan sampah akhir yang memadai. Sampah yang ada ditumpuk dibawah rumah mereka atau dikumpulkan disebuah tanah kosong. Ketika sudah menumpuk, sampah – sampah tersebut kemudian dibakar. Untuk masalah kebersihan kesadaran masyarakat sangatlah minim, bagi mereka selama tidak mengeluarkan bau yang mengganggu hal tersebut masih bisa ditolelir.

Sosial dan Politik

Hal – hal yang patut digaris bawahi di bidang sosial adalah adanya perbedaan cara pandang dan sifat antara masyarakat Melayu dengan masyarakat Suku Laut. Masalah utama yang terjadi di wilayah ini berkaitan dengan sifat dasar masyarakat khususnya masyarakat Melayu.

Sifat – sifat tersebut antara lain:

- a. Kurangnya rasa percaya diantara masyarakat, yang berujung pada sulitnya mereka untuk bekerja secara berkelompok. Banyak pihak, khususnya mereka yang berasal dari pemerintah mengeluhkan sifat masyarakat Tanjung Gundap yang tidak bisa bekerja secara berkelompok. Hal ini disebabkan oleh sering hilangnya kepercayaan diantara anggota masyarakat, terlebih lagi jika sudah menyangkut masalah uang.

Mereka mudah sekali kehilangan kepercayaan dengan seseorang, meskipun orang tersebut hanya membuat kesalahan yang sangat kecil. Bubarnya koperasi merupakan salah satu contoh. Koperasi di wilayah ini bubar karena tidak adanya kepercayaan antara anggota dengan pengurus bahkan antar pengurus itu sendiri. Begitu pula ketika pemerintah Kota Batam memberikan bantuan berupa jaring untuk beberapa kelompok nelayan agar bisa dipakai untuk bersama – sama. Karena tidak adanya rasa percaya, pada akhirnya

jaring tersebut menjadi barang rebutan karena masing – masing ingin menggunakan secara pribadi.

Selain itu juga dalam kegiatan yang berkelompok, masih ditemui “*free rider*”, dimana orang tersebut hanya mengandalkan anggota yang lain, sedangkan ia sendiri tidak bekerja. Pada akhirnya banyak bantuan yang terpaksa ditolak oleh Lurah karena sifat masyarakat yang seperti ini. Karena pada akhirnya bantuan tersebut malah akan menambah konflik di masyarakat.

Kurangnya rasa percaya ini juga yang menyebabkan wilayah Tanjung Gundap tidak memiliki tokoh masyarakat yang bisa menjadi penengah. Masyarakat cenderung untuk mengganti RT atau RW jika mereka dianggap sudah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau membuat sebuah masalah. Saat ini pihak yang paling dipercaya oleh warga adalah Kepala Lurah.

- b. *Money Oriented*, hal ini berkaitan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan pihak lain, masyarakat Tanjung Gundap, khususnya mereka yang berasal dari suku Melayu. Dalam menyikapi hal ini suku Melayu sendiri terbagi menjadi dua kubu, yang pertama berisi para “orang tua” yang berfikir lebih luas, dimana menurut mereka, bantuan seperti fasilitas jalan dan listrik jauh lebih baik daripada pemberian uang, karena bisa dirasakan untuk jangka panjang dan akan membawa pengaruh yang positif bagi wilayah Tanjung Gundap. Kubu yang kedua adalah “kaum muda” yang menganggap bantuan berupa uang jauh lebih baik, karena mereka bisa membeli apa yang mereka inginkan dan merasakannya langsung.

Bagi mereka bantuan dan ganti rugi yang pernah diberikan juga masih belum sesuai. Mereka mengartikan ganti rugi sebagai “diganti” kemudian “dirugikan”, karena uang ganti rugi tersebut akan habis sebelum mereka meninggal. Mereka menginginkan ganti rugi yang berkala sampai mereka meninggal dan terus berlanjut. Saat ini masyarakat Tanjung Gundap sebenarnya sedang menunggu ganti rugi dari pihak pembangun perumahan yang menggunakan lahan masyarakat. Pihak perumahan tersebut menawarkan fasilitas berupa jalan dan listrik. Tetapi sebagian warga (kaum muda) tidak

setuju dengan ganti rugi tersebut, mereka menuntut ganti rugi berupa uang. Akibatnya sampai saat ini ganti rugi tersebut belum diberikan.

- c. Malas dan belum adanya keinginan untuk berubah. Masyarakat dari suku Melayu cenderung untuk hidup dalam "*comfort zone*", dan tidak ingin keluar dari wilayah tersebut. Mereka sebenarnya memiliki lahan perkebunan yang dapat diolah sebagai mata pencaharian tambahan. Akan tetapi mereka malas untuk belajar berkebun dan tetap menjadi nelayan atau pembuat arang meskipun hasilnya sudah sangat menurun. Mereka beralih karena tidak ada pihak yang mau memberikan pelatihan, akan tetapi pada dasarnya mereka tidak ada keinginan untuk belajar.

Selain itu, terdapat kecenderungan dimana mereka baru akan bekerja ketika uang mereka habis. Ketika mereka mendapatkan uang dari hasil menjual tangkapan, uang itu akan langsung mereka gunakan. Mereka baru akan melaut lagi ketika uang mereka sudah habis.

Adanya bantuan – bantuan dari berbagai pihak, sedikit membuat mereka terlena dan pada akhirnya membuat mereka malas untuk menggerakkan modal sosial yang ada di masyarakat. Mereka sangat tergantung pada bantuan – bantuan yang diberikan, yang justru bersifat tidak memberdayakan mereka sama sekali, terlebih lagi dengan sifat mereka yang cenderung "*money oriented*". Terlebih lagi ketika mereka sudah mengetahui cara membuat proposal permohonan dana bantuan. Mereka akan mengajukan proposal – proposal baik untuk mendanai pembuatan acara ataupun pengadaan fasilitas.

Pihak PT. Mitra Energi Batam misalnya mengeluhkan sering mendapatkan proposal permohonan dana. Bahkan untuk satu kegiatan mereka bisa mendapat dua proposal berbeda dari kedua kubu yang ada di masyarakat. Masyarakat masih menganggap perusahaan akan selalu memiliki dana untuk membantu mereka, apalagi perusahaan tersebut berdiri di lahan yang mereka tempati, mereka tidak mengetahui terbatasnya dana yang dimiliki oleh perusahaan. Seorang warga menuturkan saat PGN berdiri, pihak PGN menjanjikan akan memberikan subsidi sebesar Rp. 10 juta setiap tahunnya

kepada masyarakat. Akan tetapi sampai saat ini bantuan tersebut belum ada dan masyarakat masih menantikannya

- d. Ketidakmampuan mengelola pendapatan dengan baik. Pemberian BLT di wilayah ini cenderung tidak efektif. Karena masyarakat menggunakan uangnya pertama kali untuk memanggil joged dangdut, kemudian sisa uang tersebut baru digunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari dan membayar utang. Pada dasarnya masyarakat masih belum mengerti maksud dan tujuan dari BLT. Bagi mereka saat ini pemerintah belum adil karena masih ada masyarakat yang belum mendapat BLT. Padahal jika dilihat lagi, masyarakat yang tidak mendapat BLT adalah mereka yang kondisinya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan yang lain (bisa terlihat dari kondisi rumah yang lebih baik). Mereka menginginkan semua penduduk di wilayah ini mendapat BLT.

Masyarakat di wilayah ini belum mengenal adanya bank untuk menyimpan uang. Bagi mereka uang yang mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak ada lagi yang bisa mereka tabung. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan sifat malas mereka tadi.

- e. Cara pandang dalam melihat kemiskinan, berbeda dengan masyarakat Melayu, masyarakat Suku Laut cenderung menerima apa yang terjadi dengan mereka. Bagi mereka kemiskinan yang mereka alami adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan, dan mereka tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk berubah. Hal ini sebenarnya akan menjadi ancaman tersendiri di masa depan karena tidak adanya keinginan mereka untuk berubah. Meskipun demikian dalam melihat bantuan yang ada, mereka cenderung berfikir untuk jangka panjang. Mereka lebih memilih untuk diberikan fasilitas yang memudahkan aktifitas mereka. Masyarakat Suku Laut cenderung tidak bersifat "*money oriented*".

Sedangkan masalah politik dapat dilihat dari perpindahan penduduk yang ada. Hal ini jarang terjadi di wilayah ini. Masyarakat Tanjung Gundap cenderung merasa nyaman untuk tinggal di wilayah ini meskipun dengan fasilitas yang

sangat terbatas. Warga yang keluar dari Tanjung Gundap untuk bekerja atau sekolah, pada akhirnya kembali lagi dan memilih untuk menjadi nelayan, kecuali para perempuan yang menikah dengan laki – laki yang berasal dari daerah lain. Biasanya mereka keluar dan menetap bersama suaminya.

Pendatang yang tinggal di wilayah pemukiman warga biasanya tinggal di wilayah ini karena pernikahan. Tetapi ada juga yang datang karena ditugaskan di Tanjung Gundap, seperti seorang guru SD Tanjung Gundap yang sudah lebih dari 15 Tahun tinggal di pemukiman warga karena mengajar. Selain itu ada orang Flores yang tidak sengaja datang ke wilayah ini dan pada akhirnya menetap di pemukiman suku laut. Ada juga pendatang dari Pulau Jawa, mereka biasanya menyewa lahan perkebunan milik masyarakat, akan tetapi mereka tinggal terpisah dari pemukiman warga meskipun jaraknya masih dibidang cukup dekat dari pemukiman. Masyarakat Tanjung Gundap secara umum, menerima pendatang dengan baik. Tidak ada rasa curiga ataupun takut. Mereka cenderung bersikap ramah kepada pendatang yang baru mereka kenal.

Budaya dan Agama

Faktor budaya tidak terlalu dominan dalam kehidupan masyarakat Tanjung Gundap. Tidak ada lagi upacara – upacara atau ritual kebudayaan yang masih dilakukan oleh masyarakat di wilayah ini, baik oleh mereka yang berasal dari suku Melayu maupun dari Suku Laut. Warisan budaya yang masih mereka pertahankan hanyalah tarian melayu. Warga Tanjung Gundap sejak dulu terkenal dengan kemahirannya untuk menari tarian melayu. Tarian ini mereka pertahankan dengan mengajarkannya kepada anak – anak diluar jam sekolah mereka. Ada seorang warga yang menjadi pelatih. Tak jarang anak – anak Tanjung Gundap dipanggil untuk menari hingga ke kota Pekanbaru.

Terdapat mitos yang beredar di masyarakat Kota Batam, bahwa “orang pulau” (julukan yang mereka berikan kepada masyarakat pesisir dan kampung tua) masih sering melakukan kegiatan mistis (santet), jangan sampai pendatang membuat masalah dengan mereka, karena mereka bisa saja melakukan hal – hal yang berbau mistis bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tetapi hal tersebut tidak terjadi di Tanjung Gundap. Meskipun memiliki latar pendidikan yang rendah dan

jauh dari kehidupan kota, mereka sudah tidak mempercayai hal – hal yang bersifat mistis, meskipun beberapa penduduk masih mengerti akan hal tersebut.

Masyarakat Tanjung Gundap terdiri dari dua suku dan dua agama yang berbeda, masyarakat Melayu yang beragama Islam dan masyarakat suku laut yang beragama Protestan. Meskipun mereka berbeda suku dan agama, kehidupan bermasyarakat mereka sangatlah baik, tidak pernah ada konflik yang mengatasnamakan suku ataupun agama.

Berbeda dengan wilayah lain yang didominasi oleh masyarakat muslim, pelaksanaan ritual – ritual agama Islam di wilayah ini bisa dikatakan kurang. Musholla hanya digunakan untuk Shalat jumat setiap minggu dan Shalat ied. Diluar kegiatan tersebut, tidak ada kegiatan lain yang dilakukan. Pengajian ibu – ibu tidak ada di wilayah ini, alasannya adalah mereka tidak bisa mengaji dan tidak ada yang mau mengajarkan mereka untuk mengaji. Kalaupun ada mereka sudah merasa terlalu tua untuk belajar. Begitu juga dengan kegiatan TPA, meskipun sebagian besar orang tua menyuruh anaknya untuk ikut TPA, tidak diimbangi oleh jumlah tenaga pengajar TPA. Hanya ada seorang pengajar dan itupun tidak datang setiap hari karena tempat tinggalnya jauh dari Tanjung Gundap. Masjid di wilayah ini hanya dikelola oleh seorang imam. Sayangnya imam di wilayah ini kurang berperan dalam kehidupan masyarakat.

Berbeda dengan masyarakat Melayu yang beragama Islam, masyarakat Suku Laut cenderung bersifat religius, mereka adalah penganut Kristen protestan yang sangat taat. Padahal sebelum menganut agama Protestan mereka adalah penganut animisme. Saat ini mereka sudah tidak lagi melakukan ritual – ritual animisme. Mereka menganut agama Protestan setelah mereka memutuskan untuk tinggal di darat bukan di dalam perahu lagi. Saat itu mereka mendapatkan banyak bantuan dari para misionaris hingga akhirnya mereka mengenal agama Kristen.

Setiap hari jumat siang, mereka rutin mengadakan ritual ibadah yang dipimpin oleh pendeta dari Tiang Wangkang. Ibadah ini dilakukan dirumah Pak Badak. Sebulan sekali, datang ibu – ibu PKK yang beragam Protestan dari berbagai wilayah di kota Batam untuk melakukan ibadah bersama sekaligus memberikan pengarahan dan bimbingan bagi masyarakat. Dari ibu – ibu inilah banyak perempuan suku laut yang mendapatkan keterampilan untuk membuat

kerajinan. Biasanya setiap bulan pada minggu terakhir, masyarakat Suku Laut pergi ke Tiang Wangkang untuk beribadah di gereja.

Dampak Modernisasi

Meskipun letaknya dari dari perkotaan dan fasilitas pendukung arus informasi yang terbatas seperti surat kabar dan televisi, wilayah Tanjung Gundap tidak terlepas dari arus modernisasi. Penyebabnya antara lain adalah tontonan televisi yang mereka lihat. Meskipun hanya mendapatkan aliran listrik selama 6 jam per hari, masyarakat Tanjung Gundap tetap menggunakannya untuk menonton televisi.

Sayangnya tontonan yang dilihat oleh masyarakat adalah Sinetron yang mempertontonkan kemewahan dan menimbulkan gagap budaya di masyarakat. Akibatnya mereka tergiur dan menginginkan barang – barang yang dipakai oleh tayangan tersebut. Salah satu akibatnya yang terlihat adalah perubahan preferensi penggunaan uang mereka. Meskipun mereka mengaku miskin, mereka memiliki telepon genggam, televisi dan radio compo. Biasanya barang – barang ini mereka beli saat musim panen ikan dan dibawa oleh para pedagang yang datang ke wilayah ini, tapi terkadang mereka sengaja pergi ke kota untuk membeli barang – barang tersebut. Tak jarang mereka harus menjual barang – barang tersebut ketika sedang tidak musim ikan. Sampai saat ini, masyarakat Tanjung Gundap belum mengenal adanya lembaga penyimpanan uang seperti Bank.

Faktor lain yang mendukung arus modernisasi di Tanjung Gundap adalah, dibukanya jembatan Bareleng pada tahun 1998. Dengan adanya jembatan Bareleng, orang – orang di pulau Batam mulai mengenal Tanjung Gundap, dan tentu saja hal ini mempermudah mobilitas masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan sehari – hari yang terkadang harus diperoleh dari kota.

Selain itu juga, sudah banyak pemuda yang mengenal minuman keras. Pada acara – acara perayaan, seperti pesta pernikahan, banyak pemuda yang membawa minuman keras dan mabuk. Hal ini pernah menyebabkan konflik, dimana sekelompok pemuda bertengkar dengan pemuda lain dalam keadaan

mabuk. Untungnya hal ini tidak berkepanjangan. Masalah ini bisa diselesaikan secara damai tanpa harus melibatkan pihak yang berwajib.

4. 1. 2. Sejarah Desa

Wilayah pemukiman di Tanjung Gundap pada awalnya dibentuk oleh suku Melayu. Mereka menempati wilayah ini secara turun temurun. Kemudian sekitar Tahun 1950-an banyak Suku Laut yang biasanya hidup didalam kapal secara nomaden memilih untuk menetap dan tinggal di wilayah ini.

Sehingga terbentuk dua perkampungan dalam satu wilayah, dimana yang pertama dihuni oleh suku Melayu dan satu lagi oleh Suku Laut. Sejak awal tidak ada konflik di wilayah ini. Lambat laun, Suku Laut yang saat itu memiliki kepercayaan animisme, memutuskan untuk memeluk agama Kristen Protestan. Hal ini merupakan pengaruh datangnya misionaris yang membantu mereka.

Kehidupan masyarakat Tanjung Gundap pada awalnya sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh sulitnya akses ke wilayahnya yang terpencil, terlebih lagi saat itu Kota Batam belum terbentuk. Mereka menggantungkan hidupnya dari melaut dan membuat arang

Sekitar Tahun 1980-an, ketika Kota Batam terbentuk yang ditandai dengan berdirinya Otorita Batam, lambat laun fasilitas – fasilitas pendukung mulai masuk ke wilayah ini. Saat itu wilayah Tanjung gundap termasuk kedalam wilayah kecamatan Sei Beduk. Salah satunya adalah Sekolah Dasar dan Musholla. Animo masyarakat untuk bersekolah sangat tinggi. Mereka tetap bersekolah meskipun umurnya sudah lebih dari usia sekolah, akibatnya banyak siswa yang setelah lulus memilih untuk menikah. Sejak dulu siswa Tanjung Gundap terkenal pandai menari Tarian melayu dan sepak Takraw.

Sekitar tahun 1990an berdiri Koperasi nelayan yang berfungsi sebagai penyedia minyak bahan bakar popmpong. Sayangnya koperasi ini tidak bertahan lama, karena tidak adanya rasa percaya diantara pengurus dan anggota. Padahal saat itu hasil tangkapan nelayan di wilayah ini mulai menurun akibat pencemaran yang terjadi.

Awal tahun 2000an banyak perumahan yang mulai berdiri di sekitar Tanjung Gundap dan menggunakan lahan milik masyarakat. Salah satunya adalah

perumahan Cipta Asri. Hal ini cukup menimbulkan konflik di masyarakat, dimulai dengan masalah penggantian hak guna lahan, hingga yang masih diributkan hingga saat ini yaitu masalah pencemaran akibat limbah rumah tangga yang masuk ke sungai. Dalam hal ini warga masih menuntut ganti rugi dan belum mendapatkan tanggapan. Padahal di satu sisi hasil tangkapan nelayan sudah sangat berkurang.

Pada akhir tahun 2008, muncul sebuah perumahan baru, yang letaknya sangat dekat dari pemukiman masyarakat. Karena menggunakan lahan milik masyarakat Tanjung Gundap, pihak perumahan ini menawarkan ganti rugi berupa perbaikan fasilitas jalan dan masuknya listrik, yang akan diberikan setelah perumahan tersebut selesai dibangun. Sayangnya sampai saat ini diantara warga sendiri masih memperdebatkan bentuk ganti rugi yang akan diberikan. Ada pihak yang lebih memilih fasilitas tetapi ada juga yang memilih uang.

Sekitar 3 kilometer dari wilayah Tanjung Gundap, berdiri Perusahaan Gas Negara. PGN ini mengelola gas alam yang ditemukan di sekitar wilayah ini untuk disalurkan ke daerah – daerah sekitar Batam. Kemudian, pada tahun 2003, berdiri PT. Mitra Energi Batam yang mengelola PLTG Panaran I disusul dengan berdirinya PT. Dalle Energi Batam yang mengelola PLTG Panaran II. Berdirinya PGN dan perusahaan – perusahaan pengelola, tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Menurut masyarakat pada awal berdirinya PGN sudah memberikan ganti rugi penggunaan lahan, meskipun pada akhirnya uang ganti rugi tersebut habis. Sampai saat ini, masyarakat masih memberikan proposal – proposal permohonan bantuan ke PT. Mitra Energi Batam. Pada tahun 2007, PT. Mitra Energi Batam, memberikan bantuan berupa toilet yang terletak di dekat musholla.

Pada tahun 2002, masyarakat Tanjung Gundap memperoleh fasilitas genset yang diberikan oleh dinas sosial. Genset ini kemudian dikelola oleh masyarakat melalui Koperasi Usaha Bersatu. Akan tetapi saat ini, pengelolaan genset diserahkan kepada salah seorang warga.

Pada tahun 2005, Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2005 tentang pemekaran Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, wilayah Tanjung Gundap menjadi bagian wilayah administratif Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Hal ini

ditandai dengan pengangkatan Ketua Lurah yang baru. Pemekaran wilayah ini cukup membawa pengaruh yang baik bagi masyarakat, khususnya perhatian dari pihak pemerintah.

Pada tahun 2007, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Pemerintah Kota Batam melarang beroperasinya dapur arang, dengan alasan kelestarian lingkungan. Akibatnya banyak usaha arang, khususnya yang berskala cukup besar menghentikan operasinya, dan beberapa dapur arang kecil, beroperasi secara sembunyi – sembunyi. Dilarangnya usaha dapur arang ini sangat berpengaruh kepada penghasilan masyarakat, karena usaha ini merupakan pekerjaan sampingan masyarakat. Disisi lain, pada tahun 2007 berdiri sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh pemerintah Kota Batam.

Sampai saat ini, belum diketahui secara pasti berapa luas wilayah Tanjung Gundap. Saat ini berdasarkan SK Wali Kota Batam KPTS.105/HK/III/2004 dan Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Taat Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam pada pasal 21 ayat 4 yang direvisi pada tanggal 19 Maret 2008 dan direkomendasi oleh Gubernur Kepulauan Riau tanggal 11 Oktober 2008, Tanjung Gundap menjadi salah satu wilayah yang diusulkan menjadi kampung tua, karena keberadaan masyarakat Melayu dan Suku Laut yang sudah mendiami wilayah pesisir kota Batam sejak turun temurun. Akan tetapi belum diketahui batasan wilayah yang akan dijadikan kampung tua.

4. 1. 3. Diagram Alur Masyarakat

Terdapat dua buah komoditi yang diperjual belikan dan berasal dari wilayah Tanjung Gundap. komoditi tersebut berupa hasil laut dan Arang. Hasil laut yang diperoleh nelayan Tanjung Gundap, biasanya dijual kepada Tauke yang kemudian menjualnya keluar Tanjung Gundap. Tauke – tauke tersebut rata – rata berasal dari luar Tanjung Gundap. Meskipun demikian ada juga Tauke yang berasal dari Tanjung Gundap. Terkadang nelayan menjual langsung hasil tangkapannya kepada penduduk.

Tauke menghargai ikan yang ditangkap oleh nelayan berdasarkan jenisnya. Ikan yang paling mahal adalah Ikan Dingkis, yang banyak ditemukan menjelang imlek. Harga ikan ini bisa mencapai Rp. 100.000,00/kg. ikan ini

biasanya digunakan untuk sembahyang saat imlek. Sedangkan untuk udang tauke menghargai Rp. 40.000,00/Kg untuk udang yang masih hidup dan Rp. 35.000,00/Kg untuk udang yang sudah mati.

Sedangkan untuk Arang, arang yang dihasilkan langsung diberikan kepada Tauke. Biasanya untuk satu Kilogram arang dibeli dengan harga Rp. 2.200,00. oleh Tauke arang – arang ini dijual ke Batam dan Singapura dengan Harga Rp. 4000, 00 per kilo. Para pemilik dapur arang di wilayah ini sangat bergantung kepada Tauke. Mereka membuat Arang sesuai dengan permintaan Tauke bahkan untuk biaya perbaikan dapur arangpun mereka menunggu dana pinjaman dari Tauke, karena mereka merasa tidak mampu untuk memperbaiki dapur arang. Masyarakat Tanjung Gundap sebenarnya menginginkan adanya Koperasi yang dapat menyalurkan Arang akan tetapi sampai saat ini hal tersebut masih sebatas rencana. Diagram alur Masyarakat Tanjung Gundap dapat dilihat pada lampiran 5.

4. 1. 4. Diagram Venn Kelembagaan

Struktur kemasyarakatan di wilayah ini pada dasarnya terbagi kedalam dua bagian, yang pertama adalah masyarakat asli Melayu yang beragama Islam dan yang kedua adalah masyarakat bekas Suku Laut yang beragama Protestan. Meskipun tinggal di satu wilayah yang sama, mereka tinggal terpisah dengan kelompoknya sendiri. Akan tetapi hubungan antara kedua kelompok masyarakat ini sangatlah erat, tidak ada konflik yang terjadi di antara mereka. Mereka mampu menghargai dan menghormati satu sama lain.

Institusi yang berperan sebagai *stakeholders* di wilayah ini berbeda berdasarkan suku dan agama. Secara umum, sama seperti daerah yang lain, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Bidan, Guru, pemilik perusahaan di sekitar wilayah, pemerintah Kota merupakan pihak – pihak yang mempengaruhi wilayah ini.

Masyarakat muslim memiliki hubungan yang baik dengan Kepala Lurah, tak jarang Kepala Lurah ikut dengan warga untuk memancing bahkan menginap di rumah warga. Masyarakat sangat terbuka terhadap Kepala Lurah dan tidak malu untuk mengutarakan persoalan yang mereka hadapi. Terkadang kepala lurah turun langsung untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Begitu pula dengan pegawai kelurahan yang lain. Mereka sering turun langsung untuk melihat kondisi

yang terjadi bahkan tidak segan untuk membina pelatihan – pelatihan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk Kepala Camat dan pihak Kecamatan lainnya, baik Kepala Lurah maupun warga merasa sangat tidak diperhatikan. Pihak kecamatan kurang dapat mengerti keinginan dan keterbatasan yang dimiliki oleh warga Tanjung Gundap, terutama masalah administrasi, padahal warga sudah berusaha untuk menjelaskan kondisi mereka.

Meskipun memiliki sebuah mushola dan mayoritas penduduk beragama Islam, imam masjid tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Imam masjid hanya berperan sebagai pengurus mushola. Ia tidak terlibat dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Usahanya untuk berperan di masyarakat pun masih kurang. Bahkan bisa dibilang tidak ada usaha untuk menarik masyarakat datang ke masjid untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti pengajian ibu – ibu atau ceramah umum. Padahal ia tinggal di wilayah ini.

Begitu juga dengan pihak PKK, yang tidak berjalan dengan baik di wilayah ini. Penyebab utamanya adalah kurangnya tenaga pembina. Selain itu juga masyarakat masih menganggap pelatihan yang diberikan oleh PKK kurang bermanfaat bagi mereka, terlebih lagi dengan tidak adanya jalur distribusi pemasaran hasil kerajinan yang dibuat.

Berbeda dengan masyarakat Muslim, masyarakat Protestan justru tidak merasa dekat dengan Kepala Lurah, mereka menganggap Kepala Lurah lebih dekat dengan masyarakat Muslim, meskipun masih tetap memperhatikan mereka. Masyarakat Protestan di wilayah ini sangat religius dan sangat dekat dengan Pendeta yang berasal dari Tiang Wangkang. Hampir setiap minggu Pendeta datang ke wilayah ini untuk memimpin ibadah atau sekedar menjenguk warga. Sebulan sekali pada hari minggu biasanya masyarakat menyewa mobil atau berperahu menuju Tiang Wangkang untuk ke Gereja.

Pendeta tidak hanya sebagai pemuka agama bagi masyarakat Suku Laut, tetapi juga sebagai pendengar dan penengah jika terjadi masalah. Masyarakat Suku Laut sangat mempercayai pendeta, dan pendeta ini mampu mempengaruhi pola pikir mereka dalam melihat kemiskinan yang terjadi, termasuk masalah bantuan yang akan diberikan kepada mereka.

Meskipun Kegiatan PKK tidak berjalan dengan baik di wilayah Tanjung Gundap, tapi bagi masyarakat Protestan, mereka sering dikunjungi oleh Ibu – ibu PKK dari Perumahan Cipta Asri dan Nagoya. Biasanya setiap akhir pekan mereka datang ke wilayah ini untuk mengadakan peribadatan yang kemudian dilanjutkan pelatihan membuat kerajinan tangan. Kegiatan ini disambut dengan baik oleh warga.

Baik Masyarakat Muslim maupun Protestan memiliki hubungan yang baik dengan bidan dan petugas kesehatan yang berada di Pustu Kesehatan. Masyarakat lebih memilih untuk berobat ke mereka daripada ke dukun atau pengobatan alternatif lainnya. Begitu juga dengan pihak sekolah. Pihak sekolah mampu memengaruhi penduduk tentang betapa pentingnya pendidikan bagi anak – anak. Semua anak – anak di Tanjung Gundap bersekolah meskipun hanya sampai SD. Tingkat kelulusannya pun mencapai 99%. Dari seluruh siswa hanya satu orang yang tidak lulus, karena ia malu dengan kondisi tubuhnya yang gemuk.

Terdapat dua buah perusahaan yang mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang berada di sekitar wilayah Tanjung Gundap, yaitu PT. Mitra Energi Batam dan PT. Dalle Energi Batam. Akan tetapi masyarakat tidak merasa adanya hubungan yang cukup dekat, meskipun masyarakat hampir setiap membuat kegiatan mengajukan proposal permohonan dana, dan permohonan tersebut pada umumnya disetujui. Selain itu juga PT. Mitra Energi Batam pernah memberikan bantuan berupa Toilet kepada Mushola di Tanjung Gundap. Kedua perusahaan tersebut bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik, tetapi tidak memberikan kontribusi berupa sarana penerangan ke masyarakat.

Disekitar wilayah Tanjung Gundap berdiri dua buah perumahan. Perumahan pertama adalah perumahan Cipta Asri. Sejak awal berdirinya perumahan ini sedikit menimbulkan konflik di masyarakat, dimulai dari ganti rugi penggunaan lahan, hingga masalah limbah rumah tangga yang menutupi sungai. Sampai saat ini, masyarakat masih melakukan negosiasi mengenai pencemaran yang terjadi. Dalam hal ini yang berperan adalah beberapa warga dan Kepala Lurah.

Begitu juga dengan perumahan yang mulai dibangun di jalan menuju Tanjung Gundap. Mereka menjanjikan akan memberikan bantuan berupa

perbaikan jalan dan listrik. Meskipun demikian masih terjadi perdebatan diantara warga mengenai bantuan yang akan diberikan.

Pihak Pemerintah Kota Batam dan Otorita dianggap tidak dekat dengan masyarakat di Tanjung Gundap. Pemerintah Kota Batam hanya pernah memberikan sebuah generator listrik, sedangkan pihak Otorita belum pernah memberikan kontribusinya bagi masyarakat. Padahal warga Tanjung Gundap sudah sangat sering memberikan usulan – usulan kepada Pemerintah seperti penyediaan bus sekolah yang langsung ke Tanjung Gundap, pengajar untuk program KEJAR Paket A dan B, dan program bedah rumah. Tetapi tidak diperhatikan oleh pihak pemerintah.

Beberapa program bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah terpaksa ditolak oleh warga karena tidak sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat. Contohnya bantuan modal kerja diberikan untuk kelompok, bukan perorangan, padahal masyarakat di wilayah ini tidak bisa bekerja secara kelompok. Selain itu juga untuk kredit, harus ada agunan yang pasti, padahal masyarakat Tanjung Gundap tidak memiliki apa – apa yang bisa dijadikan agunan. Padahal masyarakat di wilayah ini sangat tertarik dengan bantuan – bantuan modal usaha perorangan. Hubungan – hubungan yang terjadi diantara masyarakat Tanjung

Di sisi lain misalnya pihak Dinas Sosial mengaku, bahwa sejak adanya otonomi daerah, program bantuan dan pemberdayaan diserahkan secara langsung kepada dinas – dinas yang terkait. Untuk wilayah pesisir seperti Tanjung Gundap hal ini diserahkan kepada Dinas KP2K dan Dinas PMP-UKM. Sayangnya pemberian bantuan oleh dinas – dinas tersebut tidak diikuti dengan bimbingan dan penyuluhan secara intensif, sehingga seringkali bantuan yang diberikan malah tidak berjalan dengan baik, seperti kasus di Tanjung Gundap. Padahal dengan adanya bimbingan dan penyuluhan hal tersebut dapat diminimalisir.

Hubungan antar lembaga yang berpengaruh di Tanjung Gundap ini dapat dilihat pada lampiran 6.

4. 1. 5. Kalender Musim

Perekonomian Masyarakat di wilayah Tanjung Gundap sangat bergantung kepada musim yang terjadi. Karena hal ini berpengaruh terhadap hasil tangkapan

mereka. Masyarakat Tanjung Gundap mengenal empat Musim yang terbagi berdasarkan arah angin.

Pada bulan Maret sampai Mei terjadi Angin Musim Timur. Pada musim ini, kondisi perekonomian masyarakat mulai sulit, karena hasil laut mulai sedikit. Biasanya ini terjadi saat awal musim kemarau. Masyarakat biasanya mulai membuat arang di musim ini.

Bulan Juni sampai Agustus, terjadi musim Angin Selatan. Hasil tangkapan benar – benar sulit pada musim ini, begitu juga dengan perekonomian masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, masyarakat mengandalkan hasil panen Arang. Tetapi bagi masyarakat yang tidak memiliki dapur arang biasanya mereka menggadaikan barang – barang yang telah mereka beli saat musim panen ikan.

Angin Musim Barat terjadi pada bulan September hingga Oktober. Pada musim ini, hasil laut sudah mulai banyak, sehingga perekonomian masyarakat tidak terlalu sulit. Angin Musim Barat juga menunjukkan awal musim hujan.

Bulan Desember hingga Februari perekonomian di wilayah Tanjung Gundap mengalami peningkatan. Masyarakat mampu membeli barang – barang yang bisa dikatakan mewah. Pada bulan tersebut terjadi Musim Angin Utara, dimana pada musim tersebut hasil tangkapan mereka sangat banyak. Harga ikan pun meningkat, terlebih lagi saat menjelang Imlek. Pada musim ini, muncul ikan yang hanya ada di perairan Kepulauan Riau, yaitu ikan Dingkis. Ikan ini memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi sehingga sangat enak untuk dimakan. Biasanya digunakan untuk sembahyang bagi warga Tiong Hoa. Harga ikan ini bisa mencapai Rp. 100.000,00 untuk setiap kilonya.

4. 1.6. Analisa Penggunaan Waktu Sehari

Profesi yang sama membuat penggunaan waktu sehari masyarakat Tanjung Gundap hampir seragam satu sama lain. Tidak hanya bagi kaum pria sebagai kepala keluarga tetapi juga kaum wanita dan anak – anak.

Anak – anak di Tanjung Gundap memulai aktifitasnya pada pukul lima pagi. Saat itu mereka menyiapkan keperluan sekolah dan bersiap – siap untuk berangkat. Sekolah dimulai pada pukul tujuh dan berakhir pada pukul 12.30 siang.

Sepulang sekolah biasanya mereka menghabiskan waktu untuk beristirahat sampai pukul tiga sore. Sedangkan khusus bagi siswa kelas enam yang akan ujian, waktu istirahat tersebut mereka pakai untuk pemantapan di sekolah. Pada pukul tiga sore biasanya mereka memanfaatkan waktu dengan bermain atau mencari ikan disekitar pantai sampai pukul lima sore. Pada pukul lima sore biasanya mereka mandi dan bagi yang beragama Islam mereka bersiap untuk mengaji di TPA sampai maghrib. Makan malam dilakukan setelah shalat maghrib dan pukul tujuh biasanya mereka belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah sampai pukul sembilan. Mereka mulai tidur pada pukul sembilan malam.

Kaum pria memiliki pola penggunaan waktu sehari yang bergantung pada pekerjaan apa yang sedang mereka lakukan saat itu. Pada saat musim ikan biasanya mereka mulai melaut pada pukul delapan malam hingga lima subuh. Mereka baru mulai beristirahat sekitar pukul enam hingga siang hari ketika anak – anak mereka pulang dari sekolah. Setelah makan siang biasanya mereka mengerjakan dapur arang, baik itu memotong kayu atau mengawasi pembakaran, jika tidak mereka lebih memilih untuk beristirahat. Biasanya dilakukan hingga pukul lima sore. Pukul lima sore mereka menyiapkan peralatan yang akan dibawa untuk melaut, termasuk memeriksa kondisi kapal yang akan mereka pakai. Setelah makan malam baru mereka pergi melaut.

Ketika sedang tidak melaut biasanya kaum pria mencari kayu dari pukul tujuh pagi hingga lima sore. Kayu – kayu ini mereka peroleh dari hutan bakau disekitar Tanjung Gundap yang akan digunakan untuk membuat arang. Pukul sepuluh malam biasanya mereka memilih untuk tidur dan bangun keesokan harinya pada pukul lima.

Kaum wanita di Tanjung gundap memiliki waktu luang yang sangat banyak. Mereka bangun pukul lima untuk menyiapkan kebutuhan anak dan suami mereka, biasanya sampai pukul tujuh pagi. Setelah itu mereka mulai membereskan rumah, mencuci dan memasak makan siang sampai pukul sepuluh pagi. Sambil menunggu anak mereka pulang sekolah biasanya mereka mengobrol dengan tetangga atau bersantai. Ketika anak mereka sampai dirumah mereka menyiapkan makan siang setelah itu mereka kembali bersantai tanpa kegiatan apapun sampai pukul lima sore. Hanya sekali – sekali saja mereka mencari kerang

disungai. Biasanya dilakukan pada pukul sepuluh hingga lima sore. Pukul lima sore mereka memasak makan malam setelah itu membantu suami untuk menyiapkan peralatan untuk mencari ikan. Setelah semuanya beres biasanya mereka bersantai atau menemani anak mereka belajar kemudian tidur pada pukul sepuluh malam.

4. 2. Analisa SWOT

4.2.1. Akar Masalah

Berdasarkan uraian mengenai kondisi objek penelitian, dapat ditarik beberapa masalah yang terkait dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang akan menjadi focus dalam penelitian. Hal ini kemudian akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisa potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan wilayah tersebut dan akan berpengaruh terhadap kebijakan program pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Tanjung Gundap.

Pada analisa kualitatif, terlihat bahwa sebenarnya masyarakat Tanjung Gundap sudah tidak bisa disebut sebagai masyarakat tradisional. Mereka sangat terbuka dengan proses modernisasi yang terjadi di sekitar Kota Batam. Sebagai contoh, keinginan mereka untuk bersekolah bisa dikatakan tinggi dan mereka lebih memilih pengobatan medis ketimbang non medis. Sayangnya hal tersebut tidak didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana medis dan pendidikan yang memadai.

Salah satu penyebabnya keterbatasan tenaga ahli. Lokasi Tanjung Gundap yang jauh dari pusat kota dan tidak memiliki sarana transportasi yang memadai membuat banyak tenaga ahli seperti guru dan perawat enggan untuk ditempatkan di Tanjung Gundap. Sebagai contoh Bidan desa yang seharusnya tinggal di pemukiman masyarakat memilih untuk tinggal di lokasi lain dan tidak setiap hari datang ke Tanjung Gundap. Akhirnya masyarakat jika ingin berobat terpaksa ke daerah lain ada yang memilih menggunakan motor ke Batu Aji, ada pula yang menggunakan Perahu ke Pulau Belakang Padang atau Pulau Buluh.

Perhatian dari pemerintah Kota Batam sebenarnya sudah ada, SD Tanjung Gundap menerima bantuan BOS, meskipun masih dirasakan kurang jumlahnya tetapi bantuan ini sangat membantu. Selain itu juga pemerintah telah mendirikan

PAUD bagi anak – anak dan lagi – lagi sedikit terhambat oleh kurangnya tenaga pengajar.

Selain itu juga masyarakat di Tanjung Gundap belum bisa lepas dari kebiasaan – kebiasaan yang sudah menjadi budaya. Meskipun jarang mengalami konflik, rasa percaya sulit tumbuh diantara masyarakat, apalagi jika menyangkut masalah uang. Hal ini kemudian menjadi salah satu penghambat tidak optimalnya kebijakan pemberdayaan masyarakat yang diberikan kepada mereka. Selain itu juga usaha masyarakat untuk merubah nasibnya masih rendah. Mereka masih bergantung kepada bantuan – bantuan yang diberikan oleh pihak – pihak seperti pemerintah, swasta ataupun masyarakat diluar Tanjung Gundap. Keinginan masyarakat untuk berubah masih rendah, Ketergantungan mereka akan bantuan yang diberikan oleh pihak lain sangatlah tinggi. Selain itu juga masyarakat harus merasakan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak – pihak diluar pemukiman, akan tetapi membawa pengaruh yang besar terhadap kondisi perekonomian masyarakat.

Hal di atas masih sebagian dari banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Tanjung Gundap. Gambaran mengenai akar masalah yang terjadi di Tanjung Gundap, dapat dilihat secara skematis pada gambar diagram tulang ikan yang terlampir pada lampiran 7. Diagram tulang ikan ini digunakan sebagai patokan untuk membuat analisa SWOT yang akan menunjukkan potensi masyarakat dan wilayah yang dapat dikembangkan dalam proses pemberdayaan masyarakat pesisir. Kemudian hal ini akan menjadi dasar dalam skenario rencana aksi pada Bab 5.

4. 2. 2. Analisa *SWOT*

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, untuk memperoleh gambaran potensi ke depan dan strategi yang dikembangkan, maka dilakukan analisis *SWOT* seperti yang diuraikan dibawah ini:

Strenghts

Berdasarkan Klasifikasi *SWOT* yang dilakukan dilapangan dan dapat dilihat pada bagian lampiran, dapat disimpulkan bahwa kekuatan utama

sebenarnya adalah sumber daya manusia dan alam. Beberapa poin kekuatan di Tanjung Gundap antara lain:

1. Banyaknya penduduk yang berusia produktif
2. Banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh Masyarakat Tanjung Gundap, terutama kaum perempuan.
3. Tidak ada budaya yang melarang kaum perempuan untuk bekerja.
4. Kesadaran sebagian besar masyarakat mengenai pentingnya pendidikan
5. Adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan taraf hidupnya
6. Pilihan masyarakat yang lebih memilih untuk berobat secara medis ketimbang non medis
7. Keterbukaan masyarakat terhadap pihak luar
8. Masih banyak sumber daya alam yang belum dipergunakan secara maksimal, misalnya perkebunan.
9. Terdapatnya sarana pendidikan dasar yang cukup memadai meskipun masih terbatas. Tanjung Gundap memiliki satu buah PAUD dan SD.
10. Biaya pendidikan yang gratis, dan terdapat lima orang guru SD
11. Wilayah Tanjung Gundap bisa dikatakan strategis karena hanya 3 Kilometer dari Jembatan Bareleng yang menghubungkan 6 Pulau
12. Perhatian Pendeta dan ibu – ibu PKK dari wilayah di sekitar Pulau Batam yang cukup besar bagi masyarakat yang tinggal di pemukiman Suku Laut.
13. Adanya dukungan yang cukup besar dari Kepala Lurah dan pihak swasta.
14. Adanya bantuan dari pihak – pihak di luar Tanjung Gundap dengan memberikan beasiswa kepada beberapa siswa SD. Bahkan ada seorang warga yang dibiayai hingga perguruan tinggi

Berdasarkan kekuatan – kekuatan yang dimiliki oleh wilayah Tanjung Gundap terlihat kekuatan terbesar masyarakat Tanjung Gundap terletak pada sumber daya manusia dan alam. Kedua sumber daya tersebut dapat dijadikan modal utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang baik.

Weakness

Terdapat beberapa kelemahan mendasar yang terdapat di wilayah Tanjung Gundap. Kelemahan – kelemahan tersebut antara lain:

1. Tidak adanya sarana transportasi yang memadai dan memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik
2. Kurangnya rasa percaya diantara masyarakat Tanjung Gundap, terutama jika berkaitan dengan masalah uang.
3. Poin nomer dua diatas membuat masyarakat Tanjung Gundap sulit untuk bekerja secara berkelompok
4. Pola pikir masyarakat yang masih berpikiran bahwa mereka baru harus bekerja jika uang yang mereka miliki sudah hampir habis.
5. Kebiasaan masyarakat untuk berhutang.
6. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengelola pendapatan yang diterimanya dengan baik.
7. Rasa malas yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Akibatnya keinginan untuk merubah kondisi kehidupan tidak diikuti dengan usaha.
8. Pencemaran di wilayah perairan yang disebabkan oleh adanya pabrik galangan kapal (*shipyard*) dan perumahan di sekitar Tanjung Gundap.
9. Tidak adanya fasilitas MCK yang memadai. Hampir setiap rumah memiliki fasilitas MCK tetapi tidak disertai saluran pembuangan kotoran. Kotoran dibuang langsung ke laut.
10. Tidak ada tempat pembuangan sampah rumah tangga yang memadai. Sampah hanya ditumpuk dibawah kolong rumah, dan dibakar jika sudah menumpuk
11. Tidak adanya fasilitas air bersih yang memadai.
12. Ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap sumber daya perikanan dan hutan bakau
13. Keterampilan masyarakat Tanjung Gundap yang masih sangat rendah, yang membuat mereka hanya bisa bekerja sebagai nelayan, penambang kayu dan pembuat arang.
14. Kondisi fisik tempat tinggal masyarakat yang masih sangat buruk. Sebagian besar rumah penduduk merupakan rumah panggung yang

ditancapkan di pinggir laut dan terbuat dari kayu. Bahkan masih ada rumah yang beratapkan daun pohon kelapa.

15. Kurangnya peranan pemuka agama Islam bagi masyarakat Tanjung Gundap yang tinggal di wilayah pemukiman masyarakat muslim
16. Kurang terjaganya kebersihan rumah
17. Tidak adanya petugas kesehatan yang memadai. Bidan yang bekerja di Pustu hanya datang sesekali saja
18. Keterbatasan kemampuan orang tua dalam membantu anaknya untuk belajar di rumah.
19. Kurangnya sarana hiburan bagi masyarakat
20. Pola pikir masyarakat yang masih sangat sempit yang cenderung "*money minded*".
21. Ekspektasi masyarakat yang berlebihan akan bantuan yang akan diberikan kepada mereka
22. Tidak adanya sarana belajar tambahan seperti perpustakaan bagi anak – anak
23. Jauhnya lokasi sarana pendidikan dasar lanjutan (SMP, SMU) dari pemukiman masyarakat
24. Minimnya sarana listrik
25. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengelola perkebunan
26. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan hutan bakau
27. Besarnya beban Kepala Lurah, karena kurangnya perhatian dari pihak – pihak lain
28. Berkaitan dengan poin nomer 27, ketergantungan masyarakat terhadap Kepala Lurah sangat tinggi
29. Pilihan masyarakat yang lebih memilih untuk membeli barang elektronik ketimbang menabung ketika memperoleh uang hasil panen
30. Masyarakat Tanjung Gundap, cenderung sulit untuk diatur. Hal ini membuat mereka tidak betah bekerja di perusahaan atau instansi. Mereka lebih memilih untuk bekerja secara individu tanpa diperintah oleh orang lain.
31. Tidak adanya tokoh masyarakat yang menjadi panutan

Hampir keseluruhan poin – poin kelemahan yang ada di wilayah Tanjung Gundap berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Tanjung Gundap yang sudah membudaya dan pengelolaan sumber daya lingkungan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu hal ini masih terbentur pengetahuan dan kemampuan masyarakat.

Opportunities

Dari serangkaian kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Tanjung Gundap, ditemukan beberapa kesempatan yang akan menunjang program pemberdayaan masyarakat pesisir yang akan dibuat. Kesempatan – kesempatan itu antara lain:

1. Wilayah perkebunan yang cukup luas
2. Kebutuhan masyarakat akan mata pencaharian alternatif yang tinggi, terutama setelah adanya larangan operasi dapur arang
3. Usulan mengenai akan dijadikannya wilayah pemukiman masyarakat Tanjung Gundap sebagai Kampung Tua. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu potensi pariwisata
4. Adanya pinggiran sungai yang bisa dijadikan tempat wisata memancing
5. Kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi akan fasilitas jalan , kendaraan umum dan listrik
6. Banyaknya penduduk usia produktif yang tidak memiliki pekerjaan yang memadai
7. Banyaknya waktu senggang yang dimiliki oleh masyarakat khususnya kaum wanita
8. Adanya program pemberdayaan masyarakat yang diusulkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan juga Dinas – dinas yang terkait.
9. Keberadaan Pendeta dan ibu – ibu PKK sebagai pihak yang banyak membantu masyarakat Tanjung Gundap yang hidup di pemukiman suku laut
10. Peran guru yang masih dapat dimaksimalkan fungsinya untuk perkembangan anak – anak Tanjung Gundap di masa yang akan datang

11. Kemauan masyarakat yang tinggi untuk memperoleh pendidikan yang tinggi
12. Fasilitas sekolah yang masih dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk perkembangan siswa.
13. Adanya kemauan beberapa orang warga terutama mereka yang sudah berusia tua untuk merubah pola pikir masyarakat yang masih "*money minded*" dalam memilih bantuan yang ditawarkan, dengan sesuatu yang bisa bermafaat dalam jangka panjang.
14. Kemauan yang kuat dari Kepala Lurah untuk memperbaiki pola hidup, dan kebiasaan masyarakat.
15. Adanya perhatian dari pihak – pihak swasta mengenai kondisi kehidupan masyarakat Tanjung Gundap yang masih sangat minim.

Melihat peluang – peluang diatas, hampir keseluruhan peluang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, maksimalisasi fasilitas yang ada dan kemauan dari berbagai *stakeholder* yang ada di wilayah Tanjung Gundap termasuk beberapa orang warga untuk merubah pola pikir dan budaya negatif masyarakat yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat.

Threat

Terdapat beberapa tantangan bagi pelaksanaan program pemberdayaan yang akan dijalankan. Tantangan – tantangan tersebut antara lain:

1. Sifat warga yang sulit untuk bekerja secara berkelompok akan menyulitkan pemberian bantuan yang mengharuskan masyarakat bekerja atau menerima bantuan untuk kelompok
2. Ketika masyarakat sudah terbagi dalam beberapa kelompok, terdapat kecenderungan bagi mereka untuk memaksakan kehendak kelompoknya.
3. Sulitnya merubah kebiasaan yang sudah membudaya di masyarakat. dibutuhkan waktu yang cukup lama
4. Beberapa masalah penting seperti fasilitas jalan, listrik, sarana MCK, bantuan modal usaha belum menjadi prioritas masyarakat
5. Tidak adanya keinginan masyarakat untuk mengusahakan uang yang mereka terima. Uang yang diperoleh mereka habiskan untuk memenuhi

kebutuhan sehari – hari atau membeli barang tertier seperti televisi dan telepon genggam.

6. Sulitnya menambah tenaga pengajar dan kesehatan karena sedikit sekali guru dan Bidan/Dokter yang mau ditempatkan di wilayah yang jauh dari pusat kota seperti Tanjung Gundap
7. Status wilayah Tanjung Gundap yang belum jelas apakah akan dijadikan Kampung Tua atau tidak
8. Anggaran pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sangat terbatas
9. Kurangnya dukungan instansi pemerintah seperti Lurah dan Camat terhadap usaha – usaha pemberdayaan yang diberikan oleh pendeta dan ibu – ibu PKK terhadap masyarakat Tanjung Gundap yang berasal dari Suku Laut
10. Tuntutan masyarakat yang cukup besar akan program bantuan yang akan diberikan. Bagi mereka program bantuan yang cocok berbentuk uang, padahal hal tersebut tidak bersifat memberdayakan karena tidak digunakan sebagai modal usaha oleh masyarakat
11. Belum adanya keterampilan masyarakat untuk berwirausaha dan mengelola sumber daya alam yang ada secara komersil
12. Lambatnya daya serap masyarakat dalam memahami maksud dan tujuan program pemberdayaan yang diberikan
13. Adanya intervensi dari pihak – pihak yang tidak mendukung program ini. Karena dana program ini berasal dari swasta, pihak – pihak yang dapat menjadi ancaman antara lain pemerintah, otorita, LSM yang cenderung vokal bahkan dari sekelompok masyarakat Tanjung Gundap sendiri
14. Adanya tuntutan bantuan lain dari masyarakat Tanjung Gundap.
15. Sulitnya masyarakat untuk lepas dari program pendampingan dalam pelaksanaan program.

Dapat dikatakan hambatan yang paling dasar adalah kemauan masyarakat untuk berubah, karena hal ini akan menyangkut kebiasaan mereka yang sudah membudaya. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk merubah kebiasaan yang ada di masyarakat.

4. 2. 3. Kondisi Eksisting dan Potensi Masalah Kedepan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian – bagian sebelumnya, bila dilihat dari dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini, upaya pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Tanjung Gundap masih belum maksimal. Masih banyak kekurangan dari program – program yang telah diberikan bahkan potensi masalah (ancaman) terhadap program pemberdayaan yang akan dilakukan masih banyak. Masalah terbesar terkait mengenai kebiasaan dan sifat masyarakat, dimana masyarakat Tanjung Gundap cenderung sulit untuk bekerja secara berkelompok dan malas. Mereka akan mencari uang ketika uang yang mereka miliki sudah habis. Kemudian masalah lain yang terjadi adalah berkurangnya pendapatan masyarakat akibat kerusakan lingkungan dan tidak adanya mata pencaharian alternatif yang dimiliki oleh masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam seperti perkebunan yang tidak maksimal, tidak adanya tokoh yang menjadi panutan bagi masyarakat, tingkat pendidikan yang rendah merupakan masalah – masalah lain yang terjadi. Jika hal – hak tersebut disimpulkan berdasarkan faktor – faktor dalam SWOT, diperoleh hal – hal berikut ini:

Dilihat dari hasil identifikasi SWOT, dari sisi kekuatan dan peluang yang ada, wilayah Tanjung Gundap sangat bergantung kepada sumber daya alam yang mereka miliki, khususnya sumber daya perikanan dan hutan bakau. Wilayah perairan Tanjung Gundap sangatlah luas, karena terdiri dari wilayah pantai, laut dan sungai – sungai kecil yang kaya akan udang, kepiting dan kerang. Selain itu juga, wilayah Tanjung Gundap memiliki lahan perkebunan yang luas dan cukup subur. Perkebunan selama ini dikelola oleh masyarakat pendatang. Mereka menanam kol dan sawi, dimana rata – rata untuk kol dijual Rp. 4000, 00/kg dan sawi Rp. 12.000,00/kg.

Pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan bisa dikatakan kondisinya sudah cukup baik, hanya saja bidan yang bertugas di Pustu hanya sesekali datang, padahal kesadaran masyarakat tentang kesehatan sangatlah tinggi. Sarana pendidikan di Tanjung Gundap bisa dikatakan baik, meskipun hanya ada satu sekolah dasar dengan lima guru, tetapi para guru berusaha untuk memaksimalkan kualitas pendidikan yang diberikan.

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik juga cukup tinggi, begitu juga dengan pihak kelurahan dan Swasta yang ada di sekitar Tanjung Gundap. Beberapa program pemberdayaan pernah diberikan meskipun tidak terlihat hasilnya. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan masyarakat untuk bekerja secara berkelompok.

Jika dilihat dari sisi kelemahan dan hambatan, faktor – faktor ini berasal dari masyarakat dan kondisi lingkungan di Tanjung Gundap. Modal sosial yang dimiliki oleh Masyarakat Tanjung Gundap bisa dikatakan sangat lemah. Mereka memiliki kebiasaan yang sudah membudaya dimana mereka sulit untuk bekerja secara berkelompok, cenderung malas, dan sulit untuk dipimpin. Hal yang paling utama adalah tidak adanya kepercayaan (*trust*) diantara mereka. Tingkat ketergantungan masyarakat akan bantuan yang diberikan sangatlah besar. Sebagian besar masyarakat Tanjung Gundap mereka menganggap diri mereka miskin dan perlu memperoleh bantuan. Hal ini mengakibatkan mereka tidak mau mengusahakan modal sosial dan potensi yang ada di masyarakat.

Selain itu juga mereka memiliki kecenderungan "*money minded*", dimana bagi mereka bantuan berupa uang tunai jauh lebih bermafaat daripada fasilitas jalan, listrik ataupun pemberian modal. Padahal uang tunai yang diberikan tidak mereka manfaatkan dengan baik, dan cenderung dibelikan barang – barang yang bersifat tertier. Akibatnya uang tersebut habis tanpa ada hasil yang menunjukkan bahwa masyarakat tersebut sudah berdaya. Bantuan – bantuan berupa alat tangkap dan pancing juga tidak bisa digunakan secara maksimal, karena masyarakat cenderung untuk berebut menggunakan alat tersebut, yang seharusnya digunakan secara berkelompok.

Berdasarkan hal – hal diatas terlihat perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang sangat bergantung kepada kemauan masyarakat untuk merubah sifat, pola pikir dan kebiasaan yang dimiliki. Peran pemerintah, pihak swasta dan pendamping bahkan para guru sekolah sangat dibutuhkan dalam hal ini, Karena tidak mudah untuk merubah budaya suatu masyarakat.

4. 2. 4. Penentuan Prioritas Masalah dan Alternatif Solusi Atas Masalah

Atas dasar pembahasan *SWOT* diatas dapat ditentukan beberapa prioritas masalah yang harus ditangani segera. Urgensi hal ini didasari oleh pertimbangan mengenai potensi masalah untuk menjadi lebih besar, frekuensi terjadinya masalah, dan dampak yang ditimbulkan bagi orang banyak. Bila dilihat dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, prioritas masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Kekuatan

Melihat kekuatan – kekuatan yang dimiliki oleh wilayah Tanjung Gundap, terlihat bahwa masyarakat sudah memiliki modal berupa kayanya sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan tergerus oleh pencemaran yang terjadi. Selain itu juga Tanjung Gundap letaknya cukup strategis karena cukup dekat dengan jembatan Bareleng yang menghubungkan enam buah pulau. Masyarakat di Tanjung Gundap juga memiliki kemauan yang cukup besar untuk belajar dan merubah nasib dan hal ini didukung oleh pihak Kelurahan dan Swasta yang sangat menginginkan masyarakat Tanjung Gundap memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hal – hal tersebut dapat dijadikan modal untuk membebaskan masyarakat pesisir di Tanjung Gundap dari kemiskinan yang mereka alami.

Kelemahan

Dari keseluruhan kelemahan yang telah disebutkan bersumber dari sifat dan kebiasaan masyarakat Tanjung Gundap yang sudah membudaya. Kelemahan yang paling mendasar adalah kesulitan mereka untuk merubah sifat malas, sulit untuk dipimpin, sulit untuk bekerja secara berkelompok dan belum tumbuhnya kepercayaan diantara warga masyarakat. Hal – hal tersebut menyulitkan mereka dalam memperoleh bantuan yang akan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan

Peluang

Berdasarkan peluang – peluang yang telah disebutkan diatas, hampir seluruh peluang berkaitan dengan masih banyaknya sumber daya baik alam maupun

manusia yang belum dioptimalkan. Hal ini sebenarnya didukung oleh keinginan dari pihak – pihak kelurahan, swasta dan pihak lain seperti ibu – ibu PKK dan pendeta untuk dan sebagian masyarakat untuk merubah nasib masyarakat pesisir di wilayah Tanjung Gundap. Meskipun demikian dari pihak masyarakat sendiri hal ini masih dikatakan kurang, mereka hanya memiliki keinginan tanpa berbuat apa – apa. Mereka hanya menunggu program bantuan yang diberikan oleh pihak lain.

Tantangan

Dari keseluruhan uraian diatas dapat diketahui bahwa tantangan yang paling besar bagi program pemberdayaan yang dibuat adalah merubah sifat dan pola pikir yang telah membudaya di masyarakat. karena hal ini akan berpengaruh terhadap usaha masyarakat untuk berubah. Jika sifat – sifat tersebut masih ada di masyarakat hal ini akan menyulitkan pelaksanaan program pemberdayaan yang dibuat.

Berdasarkan analisa SWOT dan kuantitatif dapat ditentukan beberapa prioritas masalah yang harus segera diatasi, yaitu:

- Masalah rendahnya modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan sifat dan pola pikir yang telah membudaya.
- Masalah kerusakan lingkungan yang terjadi, baik yang diakibatkan oleh pencemaran maupun berkurangnya hutan bakau.
- Tidak adanya mata pencaharian alternatif yang dimiliki oleh masyarakat.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat

Masalah – masalah lain seperti kondisi tempat tinggal masyarakat yang tidak layak, tidak adanya fasilitas MCK dan air bersih yang memadai, begitu juga dengan sarana listrik merupakan hal penting lain yang harus dipikirkan, akan tetapi tidak menjadi prioritas untuk ditangani terlebih dahulu karena yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi berdasarkan lingkungan yang pada akhirnya selain akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Tanjung Gundap.

Berdasarkan prioritas – prioritas yang telah dibuat, dilakukan analisa yang lebih mendalam untuk diperoleh alternatif solusi yang dapat mengatasi permasalahan – permasalahan yang terjadi untuk kemudian dituangkan dalam skenario rencana aksi. Analisa tersebut diuraikan sebagai berikut:

Rendahnya Modal Sosial yang Dimiliki Oleh Masyarakat

Salah satu kendala yang harus diberi perhatian di wilayah Tanjung Gundap adalah rendahnya modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Faktor kebiasaan dan sifat yang telah membudaya menjadi salah satu pemicu. Berdasarkan keterangan dari beberapa *expert* yang menajadi responden, seperti pihak Dinas Sosial dan Pemakaman, Bappeda dan Kepala Lurah, masyarakat Melayu Pesisir cenderung malas untuk bekerja. Mereka hanya bekerja jika uang yang mereka miliki sudah sedikit. Mereka tidak mengenal menabung, uang yang mereka peroleh langsung mereka belanjakan. Selain itu juga mereka cenderung egois dan sulit untuk diatur, akibatnya ketika mereka bekerja dan berstatus sebagai bawahan, mereka merasa tidak nyaman dan memilih untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Lain halnya jika mereka bekerja sendiri seperti menjadi nelayan, yang menjadi pekerjaan utama mereka saat ini.

Sifat yang egois dan sulit diatur juga terlihat saat mereka memperoleh bantuan, biasanya masyarakat akan terbagi kedalam beberapa kelompok, dimana masing – masing kelompok membawa kepentingan yang berbeda dan ingin membuat kepentingan kelompoknya dilihat. Padahal kepentingan kelompok mereka tersebut belum tentu cocok dengan bentuk bantuan yang diberikan. Meskipun terbagi dalam beberapa kelompok hal terpenting yang harus diperhatikan dan menjadi salah satu dasar dari permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya *trust* (kepercayaan) diantara masyarakat.

Hal tersebut menjadi salah satu indikator lemahnya modal sosial yang ada di masyarakat. Menurut Lewadowski (2006), modal sosial mengacu kepada jaringan dari kepercayaan sosial dan hubungan sosial yang ada di sebuah kelompok masyarakat tertentu. Modal sosial ini tidak memiliki bentuk fisik, akan tetapi nilainya tersimpan dan terakumulasi dalam hubungan diantara seseorang dengan orang lain atau seseorang dengan masyarakat.

Tidak adanya kepercayaan diantara masyarakat akan menjadi salah satu tantangan yang terbesar dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan program pemberdayaan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan *bridging* dari masyarakat Tanjung Gundap. Dimana jika masalah ini tidak ditangani dengan baik akan berpotensi menyebabkan konflik diantara masyarakat. Meskipun sampai saat ini belum pernah terjadi konflik yang besar diantara masyarakat, kemungkinan tersebut masih sangat mungkin untuk terjadi. Terlebih lagi saat ini dengan terus bertambahnya kebutuhan masyarakat, masalah uang, bantuan dan program yang diberikan akan menjadi isu yang sangat sensitif bagi masyarakat Tanjung Gundap.

Tidak mudah untuk merubah kebiasaan sekelompok masyarakat, apalagi yang telah membudaya dan menjadi sifat masyarakat. dibutuhkan waktu yang sangat lama, dan bimbingan yang benar – benar intensif agar masyarakat secara perlahan meninggalkan sifatnya tersebut.

Dalam hal ini solusi yang ditawarkan adalah, pembuatan bimbingan psikologis bagi masyarakat dari para ahli yang dilakukan secara bertahap. Masyarakat akan dibagi dalam kelompok – kelompok kerja dalam jumlah sedikit (*peer group*), dimana anggota kelompok ini lama – kelamaan akan bertambah sampai akhirnya menjadi sebuah kelompok besar. Melalui pelatihan ini, masyarakat tidak hanya dituntut untuk dapat bekerja sama, tetapi juga menyelesaikan konflik diantara anggota kelompok maupun antar kelompok.

Dalam pelatihan tersebut hal terpenting yang harus ditumbuhkan adalah keinginan masyarakat untuk berubah. Kegiatan ini akan sia – sia jika masyarakat tidak memiliki keinginan untuk berubah. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, masyarakat mampu melaksanakan program pemberdayaan dengan baik, karena disini mereka tidak hanya sebagai objek tetapi juga menjadi subjek.

Kerusakan Lingkungan Baik yang Diakibatkan Oleh Pencemaran Maupun Berkurangnya Hutan Bakau

Kerusakan lingkungan merupakan masalah lain yang terjadi di wilayah ini. Faktor penyebab kerusakan lingkungan datang dari dalam dan luar masyarakat Tanjung Gundap. Berkurangnya jumlah pohon bakau disebabkan dari masyarakat Tanjung Gundap. Mereka menebang pohon bakau sebagai bahan baku untuk

membuat arang. Meskipun menurut mereka penebangan yang dilakukan tidak akan berdampak negatif terhadap kelestarian hutan bakau, karena mereka menebang pohon bakau yang sudah tua, justru kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan oleh pemerintah yang merusak hutan bakau di wilayah ini.

Tanpa mereka sadari, penebangan pohon bakau yang tidak disertai oleh penanaman pohon bakau kembali sama saja dengan mengurangi jumlah pohon bakau yang ada. Dalam hal ini harus ada usaha pemeliharaan hutan bakau, apalagi ini sudah menjadi salah satu sumber daya yang mendatangkan penghasilan bagi masyarakat.

Pencemaran air laut dan sungai, merupakan masalah yang datang dari luar masyarakat Tanjung Gundap. Hal ini disebabkan oleh limbah pabrik galangan kapal dan limbah rumah tangga dari perumahan Cipta Asri. Kerusakan yang terjadi mengakibatkan hasil tangkapan nelayan Tanjung Gundap berkurang drastis, dan kemudian berpengaruh terhadap pendapatan yang mereka peroleh, apalagi mereka tidak memiliki mata pencaharian alternatif.

Kedua masalah ini berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sumber daya alam merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat. Dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan di Tanjung Gundap, sama dengan artinya dengan mempertahankan modal utama masyarakat di wilayah ini sekaligus mempertahankan pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari adanya program pemberdayaan di wilayah Tanjung Gundap adalah lingkungan yang terus lestari atas usaha dari masyarakat, dimana dengan mempertahankan kelestarian lingkungan yang ada, masyarakat akan menjadi berdaya. Menurut Mitchel (2002), pembangunan yang berkelanjutan juga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat lokal, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam isu – isu pembangunan dan lingkungan. (Ramayani. 2008. P.1). Lingkungan yang lestari juga merupakan salah satu poin dalam *Millenium Development Goals* yang diharapkan akan tercapai pada tahun 2015.

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai contoh, untuk kasus yang datang dari pihak diluar masyarakat Tanjung

Gundap, dibutuhkan adanya kesepakatan diantara masyarakat Tanjung Gundap dengan pihak pencemar, mengenai batas toleransi limbah yang diperbolehkan dan juga ganti rugi yang harus diberikan. Untuk mencapai kesepakatan ini, pihak pemerintah misalnya kelurahan, Bapedalda dan juga Bappeda seharusnya mendampingi masyarakat. mengingat keterbatasan – keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat dibodohi hanya karena iming – iming ganti rugi yang diberikan.

Contoh lain yang dapat ditempuh adalah pemberian modal kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sekaligus pemeliharaan lingkungan. Sebagai contoh mereka diberi modal untuk mengolah tanaman bakau, dengan syarat tanaman bakau yang diambil harus digantikan dengan tanaman bakau yang baru dengan kuantitas yang sama atau lebih daripada yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada.

Fasilitas alat pengolahan air yang tercemar juga dapat dijadikan salah satu alternative untuk menyelesaikan masalah. Akan lebih baik jika pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat karena hal ini dapat menjadi salah satu mata pencaharian alternatif mereka.

Tidak Adanya Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat

Mata pencaharian alternatif sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tanjung Gundap saat ini. Pendapatan yang mereka peroleh dari hasil melaut menurun drastis sejak satu dekade terakhir. Membuat arang yang menjadi mata pencaharian alternatif, mulai dilarang oleh pemerintah kota Batam pada tahun 2007. Akibatnya banyak pengusaha dapur arang yang menghentikan operasinya, dan mengandalkan pendapatan yang diperoleh dari melaut.

Meskipun memiliki sumber daya alam lain yang dapat diolah seperti perkebunan, masyarakat Tanjung Gundap tidak bisa mengolahnya secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki. Rata – rata penduduk usia kerja di Tanjung Gundap pendidikan tertingginya adalah Sekolah Dasar. Hal ini membuat mereka tidak memiliki pengetahuan yang lebih yang akan mendukung mereka untuk mencari pekerjaan alternatif.

Pelatihan dan penyuluhan tambahan yang diberikan oleh pihak pemerintah, swasta maupun LSM masih sangat kurang. Pelatihan yang mendorong masyarakat untuk berwirausaha dengan membuat produk – produk karya masyarakat juga masih sangat kurang. Hal ini diperparah dengan belum terbukanya jalur distribusi dan pemasaran barang – barang yang dihasilkan.

Bimbingan dan pelatihan merupakan cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pihak pemberi bantuan (swasta), dapat memanggil pembimbing baik dari institusi pemerintah, swasta maupun LSM. Pelatihan ini dapat digabung dengan pelatihan peningkatan modal sosial yang ada di masyarakat, tetapi bisa juga terpisah. Pelatihan yang diberikan sebisa mungkin dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk berwirausaha. Karena diharapkan selain dapat menciptakan lapangan pekerjaan alternatif bagi dirinya sekaligus bagi orang lain.

Mendirikan koperasi merupakan salah satu alternatif lain. Akan tetapi melihat pengalaman terdahulu, dimana koperasi yang didirikan di Tanjung Gundap pada akhirnya bubar karena tidak adanya kepercayaan dari anggota terhadap pengurus, maka harus dipastikan terlebih dahulu kepercayaan tersebut sedikit demi sedikit sudah mulai tumbuh di masyarakat. Selain itu juga pihak – pihak yang menjadi pengurus telah diberi bimbingan dan pelatihan sebagai salah satu jaminan bahwa mereka pantas untuk dipercaya sebagai pengurus koperasi.

Koperasi yang dapat dibuat dapat berupa koperasi jual beli dan juga simpan pinjam. Koperasi jual beli nantinya dapat dijadikan salah satu media dan juga pembuka jalur distribusi bagi barang – barang yang dihasilkan masyarakat Tanjung Gundap, tidak hanya itu saja koperasi ini menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh nelayan seperti alatangkap bahkan mesin kapal yang dapat diperoleh dengan cara mencicil. Koperasi simpan pinjam adalah bentuk koperasi lain yang dapat dibentuk. Koperasi ini bertujuan untuk memberikan tambahan modal bagi nelayan jika mereka kekurangan uang untuk melaut, sekaligus untuk mendukung masyarakat Tanjung Gundap yang berwirausaha.

Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat

Jalan, alat transportasi, listrik, air bersih, MCK merupakan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dengan baik di Tanjung Gundap. Padahal di lain pihak sarana dan prasarana tadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupannya, dan keterbatasan tersebut menjadi salah satu faktor pemicu kemiskinan di Tanjung Gundap.

Pemenuhan akan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan memberikan secara langsung sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kemudian pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat. Cara yang kedua adalah dengan mendorong masyarakat untuk mengusahakan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut dengan dana yang mereka usahakan sendiri. Salah satunya adalah dengan mengelola tabungan masyarakat dimana masyarakat menyisihkan sejumlah uang setiap minggunya hingga mencapai jumlah tertentu.

Karena sifat sarana dan prasarana yang dibutuhkan cukup penting, sementara untuk menunggu tabungan masyarakat memenuhi jumlah yang diinginkan, maka pihak pemberi bantuan memberikan bantuan dana tambahan agar sarana dan prasarana tersebut cepat dapat terpenuhi. Diharapkan dengan pembuatan sarana dan prasarana yang dananya dibiayai sendiri, rasa memiliki masyarakat terhadap sarana dan prasarana tersebut akan bertambah.

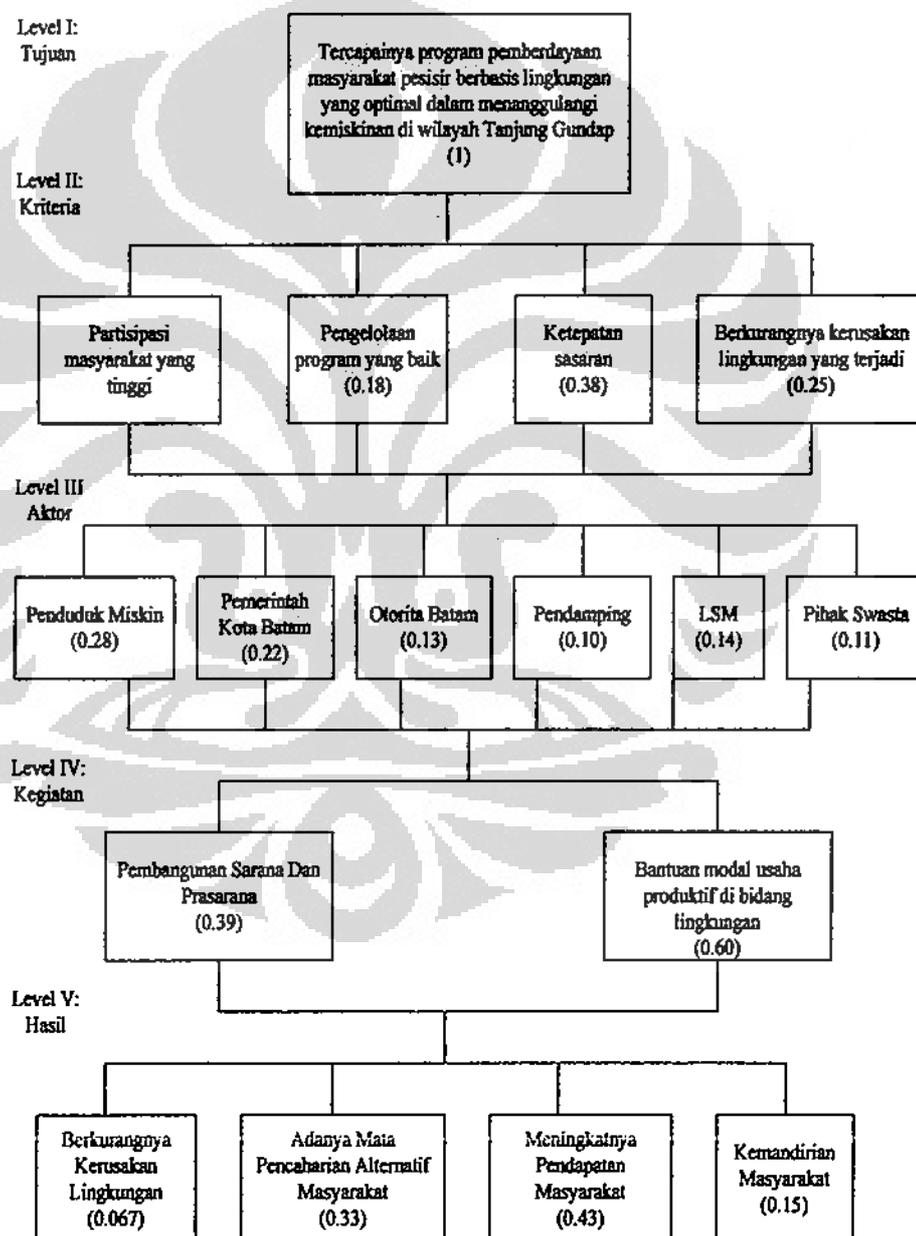
4. 3. Analisa Kuantitatif

Analisa Kuantitatif penelitian ini menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* dengan melihat hasil pengolahan kuesioner. Data diolah dengan menggunakan perangkat lunak *Expert Choice 2000*. Melalui pendekatan ini, akan diketahui penilaian dan pendapat para *expert* yang akan berperan dalam proses pemberdayaan, mengenai program pemberdayaan yang paling sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat di wilayah Tanjung Gundap.

4.3.1. Hasil dan Analisis Akhir Analisis Hirarki Proses

Hasil jawaban dari para responden, diolah dengan program *Expert Choice 2000*. Sintesa akhir dari setiap ahli dan total persepsi para ahli rata – rata ukur dapat dijelaskan pada Gambar 4.1 dan Lampiran 9.

Gambar 4.1
Hasil Perhitungan Persepsi Responden Dengan Analisa AHP



Hasil sintesa akhir terhadap hirarki *AHP*, menunjukkan nilai inkonsistensi yang masih 20%, padahal idealnya inkonsistensi ini dibawah 10%. Nilai inkonsistensi muncul karena adanya keterbatasan manusia dalam membandingkan pilihan yang satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini, nilai inkonsistensi yang tinggi, masih dapat dimaklumi, karena para ekspert tidak menjawab pertanyaan kuesioner pada waktu yang sama, karena kesibukan pekerjaan yang mereka hadapi. Hal ini sangat mempengaruhi perbandingan yang dilakukannya yang tercermin dalam nilai inkonsistensi. Meskipun demikian, hasil sintesa akhir perbandingan terhadap kriteria, aktor, kegiatan dan hasil masih dapat dimaklumi dan sesuai dengan yang diharapkan dari penelitian ini. Selain itu juga nilai inkonsistensi ini merupakan index yang menjadi acuan, untuk pemanfaatannya bisa disesuaikan. Berikut ini dijelaskan hasil dari sintesa akhir terhadap hirarki *AHP*:

A. Kriteria

Berdasarkan hasil akhir sintesa global hirarki dari rata – rata ukur, suatu kebijakan pemberdayaan berbasis lingkungan yang optimal dalam rangka pemberantasan kemiskinan masyarakat pesisir di wilayah Tanjung Gundap akan tercapai apabila kriteria yang diutamakan adalah kriteria ketepatan sasaran dengan bobot 38%. kriteria ini berkaitan dengan objek yang akan menerima program pemberdayaan.

Seperti yang telah dijelaskan pada analisa kualitatif diketahui bahwa masyarakat Tanjung Gundap, kurang bisa bekerja secara berkelompok karena masih kurangnya "*trust*" yang tumbuh diantara masyarakat. Kebanyakan bantuan yang pernah diberikan kepada mereka berbentuk bantuan untuk kelompok, baik berupa peralatan maupun modal. Akhirnya bantuan tersebut tidak berjalan dengan baik, dan akhirnya berhenti di tengah – tengah pelaksanaan sebelum mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu untuk program pemberdayaan yang akan direncanakan ini, harus benar – benar diperhatikan, apakah bantuan tersebut akan diberikan kepada perorangan ataukah kelompok, mengingat karakter masyarakat Tanjung Gundap yang seperti itu.

Kriteria selanjutnya yang harus diperhatikan adalah berkurangnya kerusakan lingkungan, dengan bobot sebesar 25%. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kerusakan lingkungan merupakan salah satu masalah utama yang terjadi di Tanjung Gundap. Oleh karena itu program pemberdayaan yang dibuat harus memperhatikan aspek ini. Jangan sampai program tersebut tidak menyentuh salah satu permasalahan utama yang terjadi di wilayah ini selain kemiskinan.

Pengelolaan program merupakan aspek lain yang harus diperhatikan menurut para ekspert, dengan bobot sebesar 18%. Hal ini akan berkaitan dengan tahapan – tahapan dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap program. Melihat keterbatasan – keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat Tanjung Gundap, pengelolaan program ini harus benar – benar dilakukan dengan baik, dimana sebelumnya masyarakat harus diberikan penyuluhan agar benar – benar memahami dengan baik maksud dan tujuan dari program yang diberikan. Meskipun demikian, langkah pertama yang harus dilakukan adalah ketepatan sasaran, agar proses pengelolaan program pemberdayaan ini akan berjalan dengan baik.

Kriteria terakhir yang harus diperhatikan adalah partisipasi masyarakat. kriteria ini memiliki bobot sebesar 17%. Pada umumnya dalam sebuah program pemberdayaan partisipasi masyarakat merupakan aspek pertama yang harus diperhatikan, dan menjadi salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan yang dibuat. Akan tetapi untuk kasus Di Tanjung Gundap, partisipasi masyarakat ini baru akan terjadi apabila bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran dan benar – benar dipahami oleh masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat harus tetap dilibatkan dalam proses perencanaan program, untuk memancing partisipasi mereka pada saat pelaksanaan program. Selain itu juga hal ini akan meningkatkan rasa memiliki mereka terhadap program yang dibuat.

B. Aktor

Aktor merupakan pihak – pihak yang akan berpengaruh mulai dari perancangan hingga evaluasi dari program pemberdayaan yang dibuat.

Mereka juga akan mempengaruhi setiap kriteria tujuan yang akan dicapai. Pihak – pihak yang menjadi aktor dalam program pemberdayaan ini antara lain, penduduk miskin atau kelompok sasaran yang menjadi objek dari program pemberdayaan, kemudian pihak Pemerintah Kota Batam, Otorita Batam, Pendamping, LSM dan pihak swasta yaitu PT. MEB dan DEB.

Berdasarkan sintesa global dari seluruh persepsi ekspert pelaku yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis lingkungan di Tanjung Gundap yang optimal adalah penduduk miskin atau kelompok sasaran dengan bobot sebesar 28%. Penduduk miskin dalam program ini tidak hanya berperan sebagai objek tetapi juga subjek dari program yang dijalankan. Dengan kedua peran ini, partisipasi masyarakat dalam program akan semakin besar, selain itu juga hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi – potensi sumber daya alam dan manusia yang ada, karena pada dasarnya yang memahami dengan pasti potensi tersebut adalah masyarakat. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai catatan penting berkaitan dengan kriteria ketepatan sasaran. Kriteria tersebut harus benar – benar diperhatikan karena peranan masyarakat sangat besar.

Pelaku lain yang berperan adalah Pemerintah Kota Batam, dengan bobot sebesar 22%. Selama ini pihak yang paling sering memberikan bantuan ke Tanjung Gundap adalah Pemerintah. Sayangnya bantuan yang diberikan tidak berjalan dengan baik, salah satu penyebabnya adalah ketidaktepatan sasaran dan kurangnya penyuluhan dan bimbingan yang diberikan. Oleh karena itu, meskipun program ini menjadikan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek, dan direncanakan akan dibiayai oleh pihak swasta, pihak pemerintah tetap memiliki peranan yang besar. Khususnya dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan dan juga untuk mengetahui karakteristik dari masyarakat. Selain itu juga, dengan keterlibatan pihak pemerintah, diharapkan program pemberdayaan yang dibuat sejalan dengan program pemberdayaan yang telah dibuat atau dilaksanakan oleh pemerintah, hal ini akan meminimalisir terjadinya tumpang tindih bentuk kebijakan dan program yang diberikan.

Aktor berikutnya yang berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat pesisir adalah pihak LSM atau masyarakat umum yang akan bertindak sebagai pengawas, dengan bobot sebesar 14%. Dalam kasus di wilayah Tanjung Gundap, LSM yang akan banyak berpengaruh adalah yang bergerak di bidang lingkungan, karena hal inilah yang menjadi salah satu permasalahan utama. Selain itu juga, para pendeta dan ibu – ibu PKK dari Kota Batam yang sering datang untuk memberikan penyuluhan dan terkadang mendengarkan permasalahan yang dimiliki oleh warga, dapat dimasukkan ke kelompok ini. Kedua pihak ini akan mengawasi proses program pemberdayaan yang dijalankan, apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Selain itu juga, pandangan pihak LSM yang biasanya cenderung kritis dan menekan, dapat menjadi bahan masukan bagi *stakeholder* lain untuk melakukan proses pemberdayaan secara optimal.

Pihak selanjutnya yang berpengaruh adalah pihak Otorita Batam dengan bobot 13%. Menurut keterangan masyarakat dan juga dari *expert* yang berasal dari pemerintahan, Otorita Batam sampai saat ini hanya berfungsi sebagai pihak yang mengurus investasi dan penggunaan lahan, dan cenderung tidak ingin mengurus permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Batam. Bahkan terkadang terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan yang diambil oleh Otorita dengan Pemerintah. Akan tetapi ketika hal tersebut menimbulkan masalah, pihak yang pertama kali disalahkan oleh masyarakat adalah Pemerintah, dan mau tidak mau perintah yang harus turun tangan. Untuk program pemberdayaan (lihat fungsi otorita batam)

Pihak Swasta merupakan pihak lain yang berpengaruh dengan bobot sebesar 11%. Pihak swasta dalam hal ini diwakili oleh PT. Mitra Energi Batam (MEB) dan PT. Dalle Energi Batam (DEB), yang merupakan anak perusahaan dari PT. Medco Power Indonesia (MPI). Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah Tanjung Gundap rencananya akan menjadi bagian dari program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari kedua perusahaan tersebut sehingga kegiatan pemberdayaan ini

sepenuhnya akan dibiayai oleh pihak PT. MEB dan PT. DEB. Selain itu juga dalam perancangan program pemberdayaan pandangan dari pihak swasta sangat dibutuhkan agar bentuk dan pelaksanaan program tersebut sejalan dengan visi dan misi dari kedua perusahaan. Terlebih lagi, menurut keterangan dari pihak PT.MEB dan PT.DEB, ketergantungan masyarakat terhadap kedua perusahaan ini cukup tinggi, hal ini terlihat dari banyaknya proposal kegiatan masyarakat Tanjung Gundap yang diberikan kepada kedua perusahaan. Pihak PT.MEB dan PT.DEB merasa bentuk bantuan tersebut tidak sejalan dengan visi dan misi perusahaan, selain itu juga tidak ada aspek memberdayakan masyarakat.

Otorita Batam merupakan prioritas lain dalam program pemberdayaan ini dengan bobot 13%. Pihak pemerintah Kota Batam dan masyarakat merasa peran pihak Otorita Batam masih sangat kurang dalam mengurus masalah – masalah sosial yang terjadi di Batam. bahkan pihak pemerintah merasa, semua dampak sosial dari pembangunan yang diurus oleh Otorita Batam, diserahkan kepada pemerintah. Padahal peran Otorita dalam program pemberdayaan cukup besar, terlebih lagi jika menyangkut pengelolaan dan pengembangan wilayah.

Pihak lain yang cukup besar prioritasnya adalah pendamping atau fasilitator dengan bobot 10%. Keterbatasan pengetahuan dan pendidikan masyarakat Tanjung Gundap, dan kurangnya program bimbingan dan penyuluhan merupakan salah satu penghambat dalam memahami program yang dibuat dan berujung kepada tidak optimalnya pelaksanaan program tersebut. Oleh Karena itu, dibutuhkan peran dari fasilitator yang akan mendampingi dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai program yang diberikan. Fasilitator ini bisa berasal dari pihak pemerintah, swasta maupun LSM dan masyarakat umum.

C. Kegiatan

Terdapat dua alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir yang optimal, yaitu pembangunan sarana dan prasarana dan pemberian bantuan

modal usaha produktif. Dari kedua alternatif tersebut, pemberian modal usaha produktif memiliki bobot yang paling besar, yaitu 60%. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disebutkan dalam analisa kualitatif, dimana masyarakat Tanjung Gundap memiliki kecenderungan untuk memilih bantuan berupa modal ketimbang sarana ataupun prasarana.

Dengan adanya bantuan modal ini, diharapkan masyarakat Tanjung Gundap dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Meskipun demikian, agar tidak melenceng dari tujuan lainnya peruntukan modal ini dibatasi pada usaha - usaha yang juga dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Kegiatan pengawasan dan evaluasi harus dilakukan dengan baik jika alternatif ini dilaksanakan agar bantuan modal yang diterima benar - benar digunakan sebagaimana mustinya. Jika hal ini dilakukan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat.

Pembangunan sarana dan prasarana merupakan alternatif lain yang berpengaruh, yaitu sebesar 39%. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jika dikelola dengan baik, manfaat dari bantuan ini akan dirasakan dalam jangka panjang. Sarana yang benar - benar dibutuhkan oleh masyarakat Tanjung Gundap adalah jalan beraspal, dan listrik. Kedua sarana tersebut akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dan juga jalur pemasaran hasil tangkapan dan hal - hal lain yang dihasilkan oleh masyarakat.

D. Hasil yang Diharapkan

Dari berbagai alternatif hasil yang diharapkan, naiknya pendapatan masyarakat menjadi bobot prioritas dengan bobot sebesar 43%. Hal ini sesuai dengan tujuan utama program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan yaitu mengentaskan kemiskinan, dimana salah satu indikator berkurangnya kemiskinan adalah peningkatan pendapatan. Diharapkan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir di Tanjung Gundap, kondisi perekonomian mereka menjadi lebih baik.

Kemudian, yang menjadi prioritas kedua adalah adanya mata pencaharian alternatif masyarakat, dengan bobot 33%. Hal ini sangat berkaitan dengan prioritas yang pertama, dimana jika masyarakat pesisir di Tanjung Gundap memiliki mata pencaharian alternatif maka pendapatan yang mereka terima akan bertambah. Selama ini masyarakat di Tanjung Gundap hanya mengandalkan sektor perikanan sebagai mata pencaharian utamanya. Usaha dapur arang yang biasa mereka jadikan sebagai pekerjaan sampingan dilarang oleh Pemerintah Kota Batam pada tahun 2007, yang membuat mereka kehilangan mata pencahariannya. Hal ini juga berkaitan dengan prioritas bentuk bantuan yang akan diberikan, yaitu pemberian modal usaha produktif. Pemberian modal usaha produktif ini akan memancing masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Prioritas ketiga menurut pendapat para *expert* adalah kemandirian dengan bobot 15%. Kemandirian masyarakat merupakan tujuan utama dari program pemberdayaan yang dibuat. Dengan adanya kemandirian ini, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan dan menggunakan potensi juga modal sosial yang ada di wilayahnya untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Selain itu juga hal ini dapat mengurangi ketergantungan mereka dengan pihak luar.

Prioritas terakhir adalah berkurangnya kerusakan lingkungan yang menjadi salah satu permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Tanjung Gundap. Bobot dari prioritas ini adalah sebesar 6%. Pada dasarnya untuk masalah ini dibutuhkan kerjasama yang baik dari setiap *stakeholder* yang terlibat dalam proses pemberdayaan dengan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran. Hasil yang benar – benar optimal baru akan tercapai dalam jangka panjang, karena tidak mudah untuk memperbaiki dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Akan tetapi untuk jangka pendek diharapkan dengan usaha pemberdayaan berbasis lingkungan yang dijalankan, masyarakat mampu mengurangi dampak kerusakan lingkungan terutama yang mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

4.3.2. Analisis AHP Perlevel Menurut Responden

Analisis global per elemen dilihat menurut persepsi para *expert*, dapat dilihat dari Tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Tabel Analisis Global Per Elemen (Kriteria)

Prioritas	Dinsos	Bappeda	PMP-UKM	Lurah	Kesra	Swasta	KP2K	Rata - Rata
Goal Terhadap								
Level 2: Kriteria								
Partisipasi	0.135	0.443	0.312	0.146	0.084	0.099	0.033	0.17885714
Pengelolaan	0.165	0.088	0.094	0.035	0.031	0.43	0.433	0.18228571
Sasaran	0.667	0.034	0.54	0.683	0.235	0.43	0.093	0.3831429
Lingkungan Baik	0.034	0.435	0.054	0.135	0.65	0.04	0.442	0.25571429

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa dari tujuh *expert* yang menjadi responden, dua orang yaitu pihak Dinas Sosial dan kepala lurah, memilih ketepatan sasaran sebagai prioritas utama untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat yang optimal. Bobot dari pilihan kedua *expert* tersebut diatas 60%, yang menunjukkan urgensi dari prioritas ini. Terlebih lagi kedua *expert* tersebut bisa dikatakan sebagai pihak yang sering berhubungan langsung dengan masyarakat pesisir, khususnya di wilayah Tanjung Gundap, dan mengenal betul karakteristik masyarakat dan kondisi wilayah Tanjung Gundap. Pihak swasta yang akan membiayai program pemberdayaan ini juga memilih ketepatan sasaran sebagai prioritas utamanya, meskipun dengan bobot dibawah kedua ekspert sebelumnya, yaitu 43%. Sebagai pihak yang mengeluarkan dana, sangatlah wajar jika pihak swasta menganggap ketepatan sasaran sebagai prioritas utama, karena hal ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Jika program pemberdayaan ini diberikan kepada pihak – pihak yang salah dan pada akhirnya tidak mencapai tujuan maka dana yang dikeluarkan akan sia – sia.

Kelima ekspert yang lain memiliki pandangan yang berbeda – beda, pihak Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Dinas PMP-UKM menganggap aspek

lingkungan dengan bobot sebesar 25%, dimana menurut mereka aspek lingkungan harus dimasukkan dalam program pemberdayaan karena ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat di Tanjung Gundap. Sedangkan pihak Bappeda merasa partisipasi masyarakat merupakan prioritas utama dengan bobot sebesar 44%. Hal ini berdasarkan pengalaman pihak Bappeda dalam menjalankan program pemberdayaan dimana partisipasi masyarakat masih dirasa kurang. Oleh Karena itu untuk program ini pihak Bappeda menekankan adanya partisipasi dari masyarakat.

Pengelolaan program yang baik merupakan alternatif yang dipilih oleh pihak swasta dengan bobot 43% dan pihak KP2K dengan bobot yang sama. Bagi pihak swasta, pengelolaan program sangatlah penting bagi mereka, karena menyangkut dana yang sudah mereka keluarkan. Mereka sudah mengeluarkan dana yang besar, akan menjadi percuma jika program ini tidak dikelola dengan baik dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Lagipula hal ini akan menunjukkan kredibilitas mereka sebagai perusahaan. Jika program pemberdayaan ini berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya, maka kredibilitas perusahaan dimata perusahaan lain akan semakin baik.

Tabel 4. 3.

Tabel Analisis Global Per Elemen (Aktor)

Prioritas	Dinsos	Bappeda	PMP-UKM	Lurah	Kesra	Swasta	KP2K	Rata - Rata
Goal Terhadap								
Level 2: Aktor								
Penduduk Miskin	0.07	0.32	0.298	0.306	0.19	0.524	0.26	0.2811429
Pemerintah	0.127	0.21	0.326	0.21	0.258	0.126	0.295	0.22171429
Otorita	0.078	0.019	0.2	0.289	0.213	0.034	0.139	0.13885714
Pendamping	0.038	0.269	0.04	0.089	0.068	0.096	0.124	0.10342857
LSM	0.381	0.079	0.089	0.086	0.166	0.11	0.074	0.14071429
Swasta	0.298	0.103	0.048	0.03	0.105	0.11	0.108	0.11457143

Berdasarkan tabel 4. 3. Di atas terlihat bahwa menurut para responden, ada dua pihak yang harus diprioritaskan dalam program pemberdayaan yang akan

dibuat yaitu pihak penduduk miskin atau kelompok sasaran dan juga pihak pemerintah. *Expert* yang pernah dan sedang berhubungan langsung dengan penduduk di Tanjung Gundap memilih penduduk atau kelompok sasaran sebagai prioritas utama dengan bobot diatas 30%, bahkan pihak swasta memberikan bobot sebesar 52%. Mereka menganggap masyarakat disini tidak hanya bertindak sebagai penerima bantuan (objek), tetapi juga sebagai pelaksana (subjek). Partisipasi aktif dari masyarakat Tanjung Gundap sangat dibutuhkan.

Pihak – pihak yang berasal dari Pemerintah Kota Batam (Dinas PMP-UKM, Dinas KP2K dan Kesejahteraan Rakyat) menganggap pihak pemerintah yang harus menjadi prioritas dalam program pemberdayaan ini. Mereka memberikan bobot diatas 20%. Dinas – dinas ini merupakan pihak – pihak yang selalu turun tangan dalam program pemberdayaan, dimana mereka bertindak sebagai pelaku pemberdayaan. Sedangkan *expert* yang berasal dari Dinas Sosial menganggap LSM harus mendapatkan prioritas. Karena menurutnya kebanyakan program pemberdayaan yang dijalankan di Kota Batam saat ini, dalam pelaksanaannya tidak disertai bimbingan dan pelatihan bagi masyarakat sebagai objek, akibatnya pemahaman masyarakat sangatlah kurang. Peranan LSM dalam hal ini tidak hanya sebagai pihak yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tetapi juga sebagai pengawas terhadap pelaksanaan program, mereka melihat ketimpangan – ketimpangan apa yang harus diperbaiki.

Tabel 4. 4

Tabel Analisis Global Per Elemen (Kegiatan)

Prioritas	Dinsos	Bappeda	PMP-UKM	Lurah	Kesra	Swasta	KP2K	Rata - Rata
Goal Terhadap								
Level 2: Kegiatan								
Sarana	0.4	0.132	0.478	0.462	0.746	0.372	0.161	0.393
Modal	0.6	0.868	0.522	0.538	0.254	0.628	0.839	0.607

Tabel 4. 4 di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh *expert* yang menjadi responden memilih alternatif yang harus diprioritaskan adalah pemberian modal

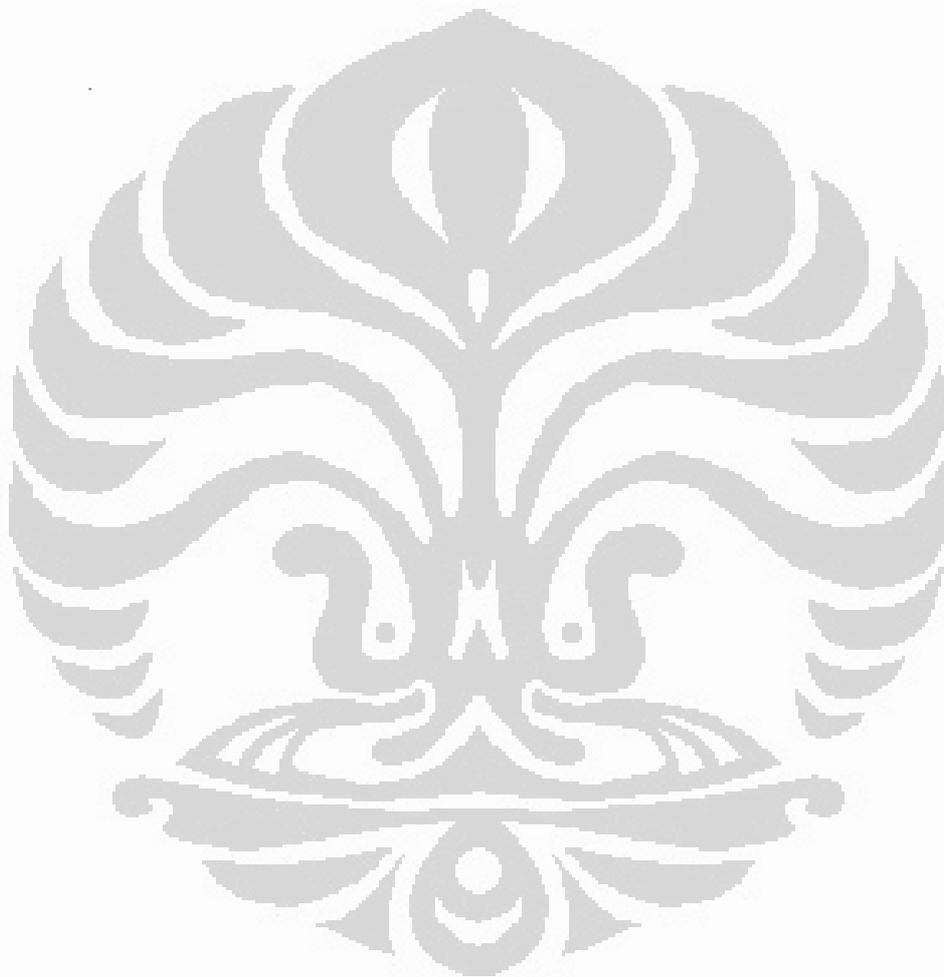
usaha produktif dengan bobot diatas 60%, bahkan pihak Dinas KP2K dan Bappeda memberikan bobot diatas 80%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian modal usaha produktif dianggap sebagai bentuk bantuan yang tepat dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir di Tanjung Gundap. Hanya *expert* dari Dinas Sosial yang menganggap pemberian sarana sebagai prioritas bentuk kegiatan dengan bobot 74%.

Tabel 4. 5
Tabel Analisis Global Per Elemen (Hasil)

Prioritas	Dinsos	Bappeda	PMP-UKM	Lurah	Kesra	Swasta	KP2K	Rata - Rata
Goal Terhadap								
Level 2: Hasil								
Krskn Lkngn Krg	0.059	0.053	0.096	0.11	0.038	0.041	0.077	0.06771429
Mata Pencaharian	0.412	0.419	0.302	0.423	0.436	0.147	0.228	0.33814286
Pendapatan Naik	0.463	0.47	0.287	0.402	0.433	0.427	0.595	0.4395714
Kemandirian	0.067	0.059	0.315	0.065	0.093	0.385	0.1	0.15485714

Berdasarkan tabel 4. 5. di atas terlihat bahwa hasil yang diharapkan oleh sebagian besar *expert* dari program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dibuat adalah naiknya pendapatan masyarakat. Bobot yang diberikan rata – rata diatas 40%. Pihak – pihak ini menganggap dengan naiknya pendapatan masyarakat maka mereka akan terlepas dari masalah kemiskinan dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan Kepala lurah dan Dinas Kesejahteraan Rakyat menganggap adanya mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir di Tanjung Gundap sebagai hasil yang diharapkan dari adanya program pemberdayaan, terlebih lagi dengan melihat dua alternatif kegiatan yang ditawarkan yang berpotensi membuat masyarakat memperoleh mata pencaharian alternatif. Sedangkan pihak dari Dinas PMP-UKM mengaharapkan adanya kemandirian dari masyarakat sebagai hasil dari program pemberdayaan yang dilakukan, dengan bobot sebesar 31%. Kemandirian merupakan salah satu tujuan

akhir dari program pemberdayaan masyarakat, karena jika masyarakat menjadi mandiri ketergantungannya dengan pihak – pihak lain akan berkurang dan berusaha untuk mengembangkan potensi dan modal sosial yang dimiliki.



BAB 5

SKENARIO ACTION PLAN

Pada Bab 4 telah diidentifikasi beberapa prioritas masalah utama. Kemudian atas dasar tersebut dapat ditentukan beberapa prioritas masalah yang harus diatasi, antara lain:

- Masalah rendahnya modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan sifat dan pola pikir yang telah membudaya.
- Masalah kerusakan lingkungan yang terjadi, baik yang diakibatkan oleh pencemaran maupun berkurangnya hutan bakau.
- Masalah tidak adanya mata pencaharian alternatif yang dimiliki oleh masyarakat.
- Masalah masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat

Hal – hal diatas harus segera ditangani agar kondisi kehidupan masyarakat Tanjung Gundap tidak bertambah buruk. Selain itu juga semakin cepat masalah – masalah tersebut ditangani, maka semakin cepat proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dan hal ini secara langsung akan mempengaruhi kemandirian masyarakat dalam usahanya untuk terlepas dari masalah kemiskinan.

Dengan melihat analisa terhadap prioritas masalah dan alternatif solusi yang telah disampaikan pada Bab 4, maka disusun suatu skenario *action plan* yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut secara komprehensif. Untuk mengembangkan skenario *action plan* tersebut maka harus dipertimbangkan beberapa hal berikut ini, yaitu:

1. Keterbatasan – keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat Tanjung Gundap sebagai individu, yang tercermin dalam sifat, pola pikir dan kebiasaan yang telah membudaya. Mereka memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Selain itu juga mereka sulit untuk bekerja secara berkelompok, diatur oleh seorang pemimpin dan cenderung malas. Untuk kaum wanitanya cenderung tidak bisa mengelola waktu sehari – harinya dengan baik. Selain

itu juga ego masyarakat Tanjung Gundap cukup tinggi, untuk masalah bantuan mereka menginginkan kepentingan dirinya/kelompoknyalah yang diperhatikan. Kemudian pola pikir masyarakat Tanjung Gundap dalam melihat bantuan yang akan diberikan masih cenderung *money minded*. Program pemberdayaan yang dibuat harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* yang ada, khususnya dari masyarakat sendiri.

2. Faktor sumber daya alam yang banyak tersedia di wilayah Tanjung Gundap dan adanya keinginan untuk merubah nasib masyarakat yang datang dari pihak pemerintah, swasta, dan beberapa orang anggota masyarakat Tanjung Gundap. Sumber daya dan keinginan ini dapat menjadi modal dalam pelaksanaan *action plan* program pemberdayaan masyarakat di Tanjung Gundap.
2. Masih terbatasnya fasilitas jalan, air bersih dan listrik
3. Strategi yang harus dilakukan pertama kali adalah strategi yang bertujuan langsung untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan alam di Tanjung Gundap, yang menjadi modal utama masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Dengan adanya kemandirian masyarakat, diharapkan masyarakat Tanjung Gundap dapat terus mempertahankan kesejahteraannya dan terlepas dari masalah kemiskinan atau tidak terjerumus lebih jauh lagi.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, setelah dibuatnya *action plan* maka pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan *action plan* harus melakukan hal – hal berikut ini:

- Koordinasi antara *stakeholders* yang berperan dalam pelaksanaan *action plan* dan sosialisasi *action plan* kepada masyarakat dan pihak – pihak lain yang akan memegang peranan dalam pelaksanaan *action plan*.
- Membuat sebuah tim yang berisikan perwakilan dari setiap *stakeholders* termasuk masyarakat yang terlibat. Tim ini tidak hanya sebagai pelaksana tetapi juga sebagai pemantau jalannya program pemberdayaan.

Diharapkan dengan adanya tim ini, masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap program pemberdayaan yang dibuat.

- Mengenalkan dan menjelaskan skenario *action plan* yang dibuat kepada masyarakat dan meminta masukan kepada mereka agar skenario tersebut menjadi *action plan* yang sesuai dengan keinginan masyarakat. hal ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
- Membuat pelatihan dan bimbingan kepada para *stakeholders* yang berperan dalam proses pemberdayaan agar mereka benar – benar siap ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat.

5.1. Bentuk Kegiatan Skenario *Action Plan*

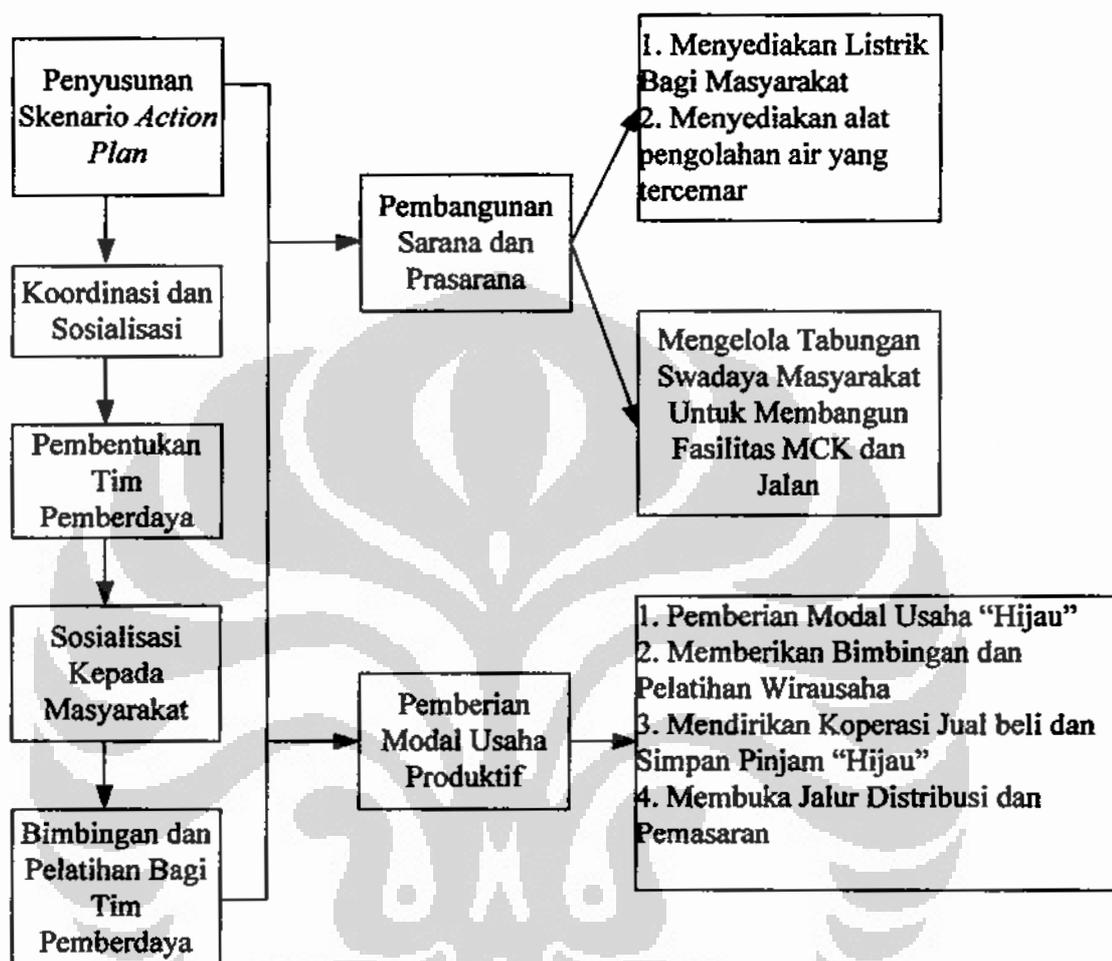
Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dan kuantitatif terhadap permasalahan yang terjadi di Tanjung Gundap, terdapat tiga hal yang menjadi fokus utama rencana *action plan* yang akan dibuat, antara lain: mata pencaharian alternatif masyarakat, pelestarian lingkungan dan tersedianya sarana dan prasarana.

Dari ketiga fokus utama tadi, dapat dibuat dua buah sub-program yaitu:

- Pembuatan sarana dan prasarana (pengolahan limbah dan sampah, air bersih, MCK, listrik, jalan umum, dll)
- Pemberian modal usaha produktif di bidang lingkungan

Kedua sub-program tersebut tercakup dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan dan terdiri dari kegiatan – kegiatan yang dapat mengintervensi masyarakat. Selain itu juga dalam setiap sub-program yang dibuat mencakup kegiatan yang bertujuan untuk memicu dan meningkatkan modal sosial masyarakat, khususnya yang dapat memicu mereka untuk saling percaya satu sama lain dan bekerja secara berkelompok. Hal tersebut dapat ditunjukkan dalam gambar 5.1 di bawah ini:

Tabel 5. 1
Skema Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan



A. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Terdapat dua jenis program pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan. Program pertama adalah bantuan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat. Sedangkan yang kedua menuntut masyarakat untuk mengusahakan dana dengan cara menabung. Bentuk subprogram yang akan dilaksanakan dipaparkan dibawah ini:

- **Menyediakan Listrik Bagi Masyarakat**

Listrik merupakan salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tanjung Gundap. Ketidaktersediaan listrik membuat masyarakat Tanjung Gundap tidak bisa memaksimalkan kegiatan sehari – harinya, terutama kegiatan belajar dan mengajar bagi anak – anak.

Sedangkan bagi nelayan tidak adanya listrik membuat mereka tidak dapat memiliki pendingin untuk menyimpan ikan sebelum ikan disalurkan ke tempat lain.

Selain alasan – alasan diatas, listrik dipilih sebagai bantuan fasilitas yang diberikan secara langsung karena, wilayah Tanjung Gudap letaknya dekat dengan Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang dimiliki oleh pihak PT. MPI.. Selain itu juga hal ini akan mendukung program – program pemberdayaan lain yang akan dibahas dibawah ini, salah satunya untuk menggerakkan alat – alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan. Penggunaan listrik juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan genset oleh masyarakat yang dapat meminimalisir penggunaan bahan bakar minyak yang kini ketersediaannya sudah langka dan juga lebih menguntungkan dari segi pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan program ini, masyarakat akan dilibatkan dalam merumuskan sistem pembagian listrik. Untuk tahap awal, penyaluran listrik baru bisa dilakukan secara bergilir dan dibutuhkan musyawarah warga untuk menentukan pembagian listrik. Dalam musyawarah warga ini masyarakat didampingi oleh tim pendamping, Kepala Lurah dan perwakilan pihak swasta. Pihak – pihak ini diharapkan dapat memberikan masukan – masukan kepada masyarakat mengenai sistem pembagian listrik yang adil dan baik. Hal ini dilakukan agar pembagian listrik ini dilakukan secara adil dan menghindari konflik diantara masyarakat. Selain itu juga, harus dibahas mengenai sistem pengelolaan dan pembayaran listrik. Dalam hal ini dibutuhkan adanya Koperasi yang dikelola oleh masyarakat dengan bimbingan dari pihak swasta sebagai pemberi bantuan dan juga dinas PMP-UKM yang biasa mengurus masalah Koperasi.

Stakeholders yang dapat berperan dalam kegiatan ini antara lain, pihak swasta sebagai pemberi dana dan juga pihak yang dirasa dapat menyediakan listrik, Kepala Lurah yang bertanggung jawab dengan wilayah Tanjung Gudap, PLN, dan pihak lain seperti Dinas PMP-UKM.

- **Menyediakan Alat Pengolahan Air yang Tercemar**

Tidak adanya sarana air bersih menjadi salah satu masalah bagi masyarakat Tanjung Gundap. Untuk memperoleh air bersih mereka hanya mengandalkan sebuah sumur dengan kapasitas terbatas. Jika sumur tersebut kering mereka harus mencari ke tempat lain yang jaraknya cukup jauh dari pemukiman masyarakat. Air laut dan Sungai tidak dapat mereka gunakan karena sudah tercemar oleh limbah pabrik galangan kapal dan rumah tangga.

Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan alat pengolahan air yang ditempatkan di dekat pemukiman masyarakat. Air laut dan sungai dialirkan ke alat pengolahan limbah, kemudian air yang sudah diolah ditampung dalam bak penampung. Air hasil pengolahan kemudian disalurkan ke pemukiman masyarakat melalui pipa – pipa.

Pengelolaan alat ini diserahkan kepada masyarakat khususnya kaum wanita. Dimana mereka akan terbagi dalam kelompok – kelompok kecil, yang akan bertugas bergantian setiap harinya. Sebelumnya masyarakat diberi penjelasan mengenai penggunaan alat ini. *Stakeholders* yang berperan dalam program ini antara lain, pihak swasta sebagai penyedia alat, kepala lurah, Dinas PMP-UKM, Bappedalda. Diharapkan dengan tersedianya air bersih, kesehatan masyarakat dapat menjadi lebih terjamin.

- **Pengelolaan Tabungan Swadaya Masyarakat Untuk Pembangunan MCK dan Jalan**

Rasa memiliki yang diperoleh masyarakat akan berbeda jika sarana dan prasarana yang tersedia berasal dari usaha mereka sendiri. Untuk memicu hal tersebut maka dibuat program Tabungan Swadaya Masyarakat, yang mengharuskan masyarakat (dalam hal ini dihitung Kepala Keluarga), menyisihkan Rp. 50.000,00/bulan meskipun demikian jumlah ini bisa disesuaikan dengan pendapatan dari kepala keluarga. Kepala keluarga dengan pendapatan lebih besar diharapkan menyisihkan dalam jumlah yang lebih besar, dan sebaliknya Kepala keluarga dengan pendapatan lebih rendah bisa menyisihkan uang dengan jumlah yang lebih sedikit.

Jika ada masyarakat yang tidak mampu membayar iuran, ia dapat meminta dispensasi kepada Kepala Lurah, akan tetapi dispensasi ini akan dibatasi jumlahnya. Program ini secara tidak langsung mengajarkan masyarakat untuk mulai menabung, karena selama ini masyarakat Tanjung Gundap cenderung menghabiskan pendapatan yang diperolehnya.

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, masyarakat Tanjung Gundap harus diberi bimbingan terlebih dahulu mengenai sistematika pelaksanaan program ini. Agar mereka memahami dengan baik maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Terlebih lagi program ini menyangkut isu yang cukup sensitif di masyarakat yaitu uang.

Pelaksanaan program ini akan lebih mudah jika wilayah Tanjung Gundap memiliki Koperasi Simpan Pinjam yang dikelola oleh warga sendiri. Sayangnya wilayah Tanjung Gundap belum memiliki Koperasi. Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan untuk mendirikan koperasi, dimana masyarakat menajadi pengurusnya. *Stakeholders* yang berperan dalam program ini selain pihak swasta, kepala lurah, Dinas PMP-UKM, Bank Pembangunan Daerah dapat diminta partisipasinya, terutama dalam mengenalkan cara menabung dan maksud dari tabungan kepada masyarakat sekaligus memberi pelatihan kepada pengurus Koperasi. Dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah yang dapat diminta partisipasinya adalah Bank Riau.

Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Sementara kebutuhan masyarakat akan jalan dan MCK cukup mendesak. Dalam hal ini, dalam jangka waktu satu tahun, pihak swasta akan melihat jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat. Kemudian pihak swasta akan menambah kekurangan dana yang dibutuhkan.

Meskipun kedua sarana ini sudah terpenuhi, tabungan warga harus tetap berjalan. Uang ini akan digunakan untuk dana perawatan dan perbaikan, bahkan untuk membangun sarana lain. Masyarakat sejak awal harus ditekankan mengenai sistem dari tabungan ini

B. Pemberian Modal Usaha Produktif

• **Pemberian Modal Usaha Hijau**

Pekerjaan alternatif sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tanjung Gundap saat ini. Salah satu pekerjaan alternatif yang mungkin dilakukan oleh masyarakat adalah dengan berwirausaha. Meskipun sudah terdegradasi, sebenarnya masih ada peluang bagi masyarakat Tanjung Gundap untuk mengolah hal – hal tersebut. Usaha ini sekaligus dapat menjaga kelestarian lingkungan yang ada.

Modal usaha hijau adalah, modal berupa sejumlah uang yang diberikan kepada masyarakat untuk membiayai usahanya. Dalam hal ini usaha yang dibiayai adalah yang berkaitan dengan pemanfaatan sekaligus pelestarian lingkungan.

Contoh Usaha – usaha yang dapat dibiayai oleh Modal Usaha Hijau antara lain:

1. Pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Selama ini sampah rumah tangga dibuang oleh masyarakat di bawah kolong rumahnya. Sebelum pelaksanaan program ini, harus dibuat terlebih dahulu bak penampungan sampah, dimana sampah rumah tangga organik dan non organik mulai dipisahkan. Sampah organik ini kemudian diolah dan dijadikan pupuk cair organik.
2. Usaha dapur arang, membuat arang sudah menjadi keterampilan turun menurun masyarakat Tanjung Gundap, dan menjadi pekerjaan alternatif mereka. Usaha ini terpaksa dihentikan untuk menjaga kelestarian hutan bakau yang menjadi bahan baku utama arang, meskipun masyarakat berdalih mereka hanya menggunakan batang yang sudah tua. Dengan modal usaha hijau ini, para pengusaha dapur arang dituntut untuk melakukan penanaman kembali batang bakau yang telah ditebang.
3. Mengelola perkebunan organik. Tanjung Gundap memiliki wilayah perkebunan yang cukup luas, dengan didahului oleh pelatihan untuk bercocok tanam, masyarakat Tanjung Gundap dapat menggarap lahan perkebunan ini dengan menanam sayur – sayuran organik. Pupuk yang

digunakan bisa berasal dari pupuk organik yang dibuat sendiri oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan program ini, *stakeholders* yang berpartisipasi antara lain, pihak swasta, Kepala Lurah, dan juga dinas KP3K dan Bappedalda yang diharapkan dapat memberikan pelatihan untuk bercocok tanam dan juga mengolah sampah.

- **Memberikan Bimbingan dan Pelatihan Wirausaha**

Masih berkaitan dengan pemberian Modal Usaha Hijau, bimbingan dan pelatihan wirausaha sangat dibutuhkan untuk mendukung program tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan petunjuk kepada masyarakat, usaha – usaha apa saja yang mungkin mereka lakukan. Selain itu juga, dalam pelatihan ini akan diajarkan bagaimana cara mengelola sebuah usaha dengan benar, baik dalam mengelola tenaga kerja, modal, proses produksi dan distribusi produk yang dihasilkan. Dalam pelatihan ini, masyarakat akan dibagi kedalam kelompok – kelompok kecil agar mereka terlatih untuk bekerja sama dan saling menghargai kepentingan setiap kelompok.

Selain pihak swasta dan Kepala Lurah, Dinas PMP – UKM, Dinas KP2K, dan dinas- dinas terkait lainnya menjadi pihak yang berpartisipasi dalam program ini. Dinas – dinas ini dibutuhkan untuk memberikan pelatihan mengenai usaha – usaha tadi. Peranan pendamping, LSM, dan pendeta/ ibu – ibu PKK yang sering berkunjung ke masyarakat bekas Suku Laut sangat dibutuhkan agar masyarakat lebih memahami isi pelatihan yang diberikan.

- **Mendirikan Koperasi Simpan Pinjam dan Jual Beli Hijau**

Keberadaan Koperasi cukup dibutuhkan dalam program pemberdayaan ini, terutama untuk memudahkan masyarakat ketika kekurangan modal dan ingin mendistribusikan hasil usahanya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali para nelayan yang membutuhkan alat tangkap. Adanya koperasi juga dapat melatih masyarakat untuk memberikan kepercayaannya kepada para pengurus. Agar kepercayaan masyarakat

tidak luntur, diharapkan para pengurus juga dapat bersikap transparan dalam mengelola koperasi ini.

Stakeholders yang berperan dalam program ini tidak hanya pihak swasta dan Kepala Lurah tetapi juga dinas PMP-UKM yang dapat memberikan pembinaan bagi pengurus koperasi.

- **Membuka Jalur Distribusi dan Pemasaran**

Usaha yang dilakukan oleh masyarakat akan sia – sia jika tidak ada pihak yang membuka jalur distribusi dan pemasaran dari produk – produk yang dihasilkan. Wilayah Tanjung Gundap yang terpencil dan terbatasnya sarana transportasi akan menyulitkan distribusi dan pemasaran. Barang – barang yang dihasilkan hanya akan berputar disekitar pemukiman masyarakat Tanjung Gundap. Oleh karena itu pihak swasta hendaknya membuka jalur distribusi dan pemasaran yang lebih luas, salah satunya adalah dengan melakukan penjualan melalui internet, mengikutsertakan masyarakat dalam pameran dan mengadakan kerjasama dengan pihak – pihak diluar Tanjung Gundap, tidak terkecuali pemerintah Kota Batam. Peran Koperasi juga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kerjasama dengan koperasi di wilayah lain dapat menjadi cara untuk memperluas wilayah distribusi dan pemasaran.

5.2. Tahapan Pelaksanaan Program

Tahapan – tahapan pelaksanaan program pemberdayaan ini terdiri dari tahap persiapan, tahap jangka pendek, tahap jangka menengah dan tahap jangka panjang. Untuk tahap persiapan waktu yang dibutuhkan adalah dua bulan, sednagkan tahapan – tahapan yang lain tidak memiliki batasan waktu yang pasti, karena hal ini menyangkut kesiapan dari masyarakat dan pihak pemberdaya. Kesiapan ini akan terlihat dari proses *monitoring* yang dilakukan sepanjang pelaksanaan program dan proses evaluasi yang dilakukan setiap minggu dan ketika tahapan berakhir.

- **Tahap Persiapan (2 Bulan)**

Tahap persiapan program ini meliputi koordinasi antar *stakeholders*, sosialisasi program terhadap *stakeholders* untuk meningkatkan pemahaman mereka, membentuk tim pelaksana program (pemberdaya). Setelah terbentuk tim pelaksana dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui apakah skenario *action plan* yang dibuat sudah sesuai dengan mereka atau belum, apakah ada yang harus dirubah atau tidak. Ketika pendapat masyarakat ini telah dikumpulkan, kemudian dilakukan perancangan ulang yang dilanjutkan dengan pelatihan bagi tim pemberdaya agar mereka tidak kaget saat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Waktu tahap pelaksanaan ini adalah dua bulan, karena sebelum meredesain skenario *action plan* yang telah dibuat diharapkan dengan rentang waktu yang lebih lama, pendapat masyarakat yang dibutuhkan semakin banyak terkumpul. Selain itu juga dibentuk agar program ini benar – benar sesuai dan matang dalam perencanaannya.

Dalam tahap persiapan ini *stakeholders* yang berperan dalam mengkoordinasi tim pemberdaya adalah pihak swasta dan pemerintah kota. Dimana mereka bekerja sama untuk mencari orang – orang yang tepat untuk menjadi fasilitator dan pendamping bagi masyarakat. Diharapkan orang – orang tersebut sudah berpengalaman dalam program pendampingan sekaligus memahami karakteristik masyarakat Melayu khususnya Tanjung Gundap. Anggota tim pemberdaya ini bisa saja berasal dari anggota masyarakat Tanjung Gundap, khususnya orang yang sudah dianggap oleh masyarakat sebagai tetua atau yang benar – benar dipercaya oleh masyarakat.

Keberhasilan dari tahapan ini dapat terwujud jika para *stakeholders* dapat memahami dengan baik maksud dan tujuan program. Begitu juga dengan para pemberdaya dimana mereka dapat masuk ke masyarakat dan berusaha untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya. Khusus bagi masyarakat Tanjung Gundap yang berasal dari Suku Laut, peran pendeta dan ibu – ibu PKK dapat membantu pelaksanaan tahapan ini, karena masyarakat cenderung terbuka terhadap pihak – pihak tersebut.

Sedangkan bagi masyarakat yang berasal dari Melayu, peran kepala Lurah harus diperhatikan sebagai pihak yang paling dipercaya dan didengar oleh masyarakat.

Jangka waktu yang diberikan adalah dua bulan. Tahapan persiapan ini tidak menggunakan waktu yang lama karena tidak menyangkut langsung kepada kesiapan masyarakat, melainkan kepada tenaga pemberdaya yang sudah dipilih dan juga para *stakeholders*.

- **Tahap Jangka Pendek**

Program awal yang harus segera dilakukan dalam jangka pendek ini antara lain:

1. Mengelola Tabungan Swadaya Masyarakat
2. Memberikan Bimbingan dan Pelatihan Wirausaha
3. Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam

Kedua program ini merupakan program – program dasar yang harus terlebih dahulu dilakukan agar program – program lain yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar.

Tahapan yang dilakukan antara lain:

- Memastikan peralatan yang digunakan untuk memberi pelatihan wirausaha kepada masyarakat telah terpenuhi dengan baik. Begitu juga dengan lokasi tempat pelaksanaan pelatihan dan kesiapan pemberi materi
- Membagi masyarakat kedalam kelompok – kelompok kecil, dalam hal ini kaum wanita dipisahkan dari kaum pria, karena penggunaan waktu mereka yang berbeda.
- Mulai memberikan pelatihan mengenai wirausaha kepada masyarakat. pelatihan ini dilakukan dua kali dalam seminggu, baik bagi kelompok pria maupun perempuan. Jadwal antara kelompok pria dan wanita dilakukan secara bergantian. Dalam materi akan disisipkan contoh dan praktek langsung. Bahkan jika memungkinkan akan dilakukan studi banding ke daerah lain di Kota Batam yang memiliki usaha sejenis. Selain itu juga masyarakat akan diberikan contoh kasus yang harus mereka selesaikan secara berkelompok.

- Khusus bagi para pengurus koperasi simpan pinjam, mereka harus mengikuti pelatihan mengenai pengelolaan koperasi.
- Mulai memberikan penyuluhan kepada warga secara keseluruhan mengenai tabungan swadaya.
- Mulai mengumpulkan dana dari masyarakat yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam.
- Mulai mengadakan musyawarah warga mengenai sistem pembagian listrik
Dalam tahapan ini, untuk mendukung kesuksesan program yang dijalankan, keaktifan dari tim pemberdaya sangat dibutuhkan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam program yang dijalankan. Peran dari pihak – pihak yang dipercaya oleh masyarakat juga tidak dapat dilepaskan.

Tahapan ini diharapkan dapat dilaksanakan selama enam sampai dua belas bulan sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Akan tetapi harus dilihat lagi kesiapan dari masyarakat dan pihak – pihak lain yang terkait. Jika hasil evaluasi menunjukkan hasil yang baik, dimana masyarakat sudah memahami materi pelatihan dan bimbingan yang diberikan kemudian mampu mempraktekannya dan mulai mampu untuk menyisihkan uang yang dimilikinya kedalam tabungan, maka tahapan selanjutnya sudah bisa dilakukan.

- **Tahapan Jangka Menengah (Bulan Ke 6)**

Dalam tahapan jangka menengah, program yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Memberikan Modal Usaha Hijau
2. Menyediakan Listrik Bagi Masyarakat
3. Menyediakan Alat Pengolahan Air

Tahapan yang dilakukan antara lain:

- Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mengalirkan listrik ke perumahan masyarakat
- Mencari lokasi yang terbaik untuk tempat alat pengolahan air

- Membagi masyarakat perempuan kedalam kelompok – kelompok kerja untuk mengelola alat pengolahan air secara bergantian
- Mulai memberikan modal kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok, dengan syarat usaha yang mereka lakukan harus berkaitan dengan pengolahan sekaligus pelestarian sumber daya alam
- Mencarikan pasar bagi produk – produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Untuk tahap awal barang – barang ini mulai dipasarkan di wilayah Kota Batam akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dipasarkan di wilayah lain.

Untuk mendukung keberhasilan tahapan ini, *stakeholders* yang paling berperan adalah pihak swasta sebagai penyedia dan juga pihak pemerintah, sebagai pihak yang harus tahu mengenai perkembangan wilayahnya. Selain itu juga diharapkan sistem pemberian bantuan yang diberikan ini dapat sejalan dengan sistem yang telah dilakukan pemerintah bahkan dapat lebih sistematis. Tim pemberdaya juga harus berperan aktif dalam tahapan ini untuk mengenalkan dan mengajarkan masyarakat mengenai bantuan yang diberikan. Sebagai contoh mengajarkan cara menggunakan alat pengolahan air, apa maksud dari modal usaha hijau dan kegiatan apa saja yang dapat dibiayai oleh modal tersebut.

Tahapan ini akan memakan waktu yang cukup lama karena pada awal pelaksanaan program masyarakat masih mencoba – coba mempraktekkan materi yang diperoleh dari program bimbingan dan pelatihan. Akan banyak kendala yang dihadapi oleh karena itu proses monitoring harus terus berjalan dalam tahapan ini. Begitu juga dengan tahapan evaluasi harus dilakukan secara berkala. Tahapan ini akan berakhir apabila masyarakat sudah mulai mengelola usahanya secara mandiri dan porsi pendampingan yang diberikan sedikit demi sedikit berkurang.

- **Tahap Jangka Panjang**

Tahap jangka panjang dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan ini salah satunya adalah membuka jalur distribusi dan pemasaran yang lebih luas. Hal ini dilakukan agar produk – produk yang

dihasilkan oleh masyarakat Tanjung Gundap memiliki pasar diluar wilayah Tanjung Gundap dan Kota Batam. Selain itu juga program pemberdayaan yang dilakukan mulai dikembangkan kearah yang lebih berkelanjutan.

Kemungkinan adanya tahapan jangka panjang dapat dilihat dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada jangka menengah. Dari kedua hal tadi bisa dilihat apakah program – program jangka panjang mungkin untuk dijalankan. kesiapan masyarakat dan sumber daya lain akan menjadi salah satu pertimbangan. Misalnya dalam memenuhi kuantitas permintaan yang lebih banyak. Jika hal ini mungkin untuk dilakukan maka disusun strategi – strategi pengembangan program ini.

Dengan melihat keinginan para *stakeholders* dan juga beberapa orang masyarakat yang menginginkan kondisi masyarakat Tanjung Gundap menjadi lebih baik, tahapan jangka panjang mungkin untuk dilakukan. Beberapa orang masyarakat tersebut bisa menjadi pihak yang mendorong masyarakat lainnya untuk berubah dan mencapai tahapan ini, atau bahkan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya.

Selain itu juga rasa memiliki dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam tahapan ini, dan menjadi salah satu jaminan untuk melaksanakan tahapan ini. Rasa memiliki masyarakat dapat ditumbuhkan dengan secara perlahan membiarkan mereka untuk mengusahakan program yang mereka jalankan. Begitu juga dengan penyelesaian masalah yang terjadi. Masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam penyelesaian masalah, bahkan pihak pendamping (tim pemberdaya) sebisa mungkin menggali kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan konflik hingga pada akhirnya masyarakat menjadi terbiasa.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini antara lain:

- Mengikutsertakan produk – produk yang dihasilkan masyarakat Tanjung Gundap kedalam pameran – pameran yang dilaksanakan di dalam maupun diluar Kota Batam
- Mengadakan kerjasama (kemitraan) dengan daerah lain atau organisasi – organisasi local maupun internasional untuk mengembangkan usaha yang

telah dilakukan oleh masyarakat kedalam skala yang lebih besar. Diharapkan usaha – usaha ini dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Tahapan ini merupakan tahapan yang akan terus berlangsung karena menyangkut keberlanjutan program pemberdayaan dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. dalam tahapan ini tim pendamping secara perlahan mulai mengurangi porsi pendampingannya berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dan membiarkan masyarakat mengelola usahanya secara mandiri dan sampai jangka waktu tertentu tim pendamping tidak akan melakukan pendampingan lagi dan usaha ini benar – benar dijalankan oleh masyarakat. Jika hal tersebut sudah tercapai maka masyarakat sudah bisa disebut sebagai masyarakat mandiri yang merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari program pemberdayaan yang dilakukan.

5.3. Pengelolaan Program

Masyarakat Tanjung Gundap cenderung sulit untuk percaya kepada orang lain dan bekerja secara berkelompok. Dalam menghadapi masalah ini, sejak awal pengelolaan program diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistem yang menuntut masyarakat untuk berkelompok dan melatih mereka untuk bisa percaya kepada orang lain. Salah satunya adalah dengan membuat kelompok kerja dalam pelatihan dan pembinaan yang diberikan. Dengan membagi kedalam kelompok – kelompok kerja masyarakat akan dilatih secara perlahan untuk bekerja secara berkelompok dan juga menstimulus rasa percaya diantara mereka. Dalam pelaksanaan hal ini, masyarakat tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek dari bantuan yang diberikan. Sebagai contoh adalah mereka harus mengusahakan modal usaha hijau yang mereka peroleh agar memperoleh hasil yang menguntungkan bahkan mengembangkan usaha yang mereka buat tersebut. Dalam hal ini tim pemberdaya dan *stakeholders* seperti pihak swasta dan pemerintah masih turun tangan sebagai pendamping. Akan tetapi dalam jangka menengah dan panjang masyarakat harus bisa lepas dari program pendampingan dan dituntut untuk mandiri. Akan tetapi hal ini tergantung dari hasil evaluasi yang dilakukan. Apabila hasilnya baik dan memungkinkan, masyarakat secara perlahan

harus bisa lepas dari tim pemberdaya dan *stakeholders* lain. Mereka diharapkan dapat mengelola sendiri program pemberdayaan yang diberikan bahkan mengembangkan program tersebut agar menjadi lebih baik. Tidak tertutup kemungkinan program pemberdayaan yang dibuat dapat diselaraskan dengan program – program yang dibuat oleh pemerintah kota Batam maupun pemerintah pusat. Salah satu cara untuk menyelaraskan program ini adalah dengan mengadakan kerjasama dengan pihak pemerintah dalam merumuskan action plan. Pada akhirnya pihak *stakeholders* hanya sebagai pengawas yang memonitor dan mengevaluasi kegiatan yang berjalan.

5.4. Tindak Lanjut Program

Sama seperti program – program yang lain, program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan yang dilakukan di Tanjung Gundap harus melalui tahap monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dilakukan sepanjang program dijalankan, untuk mengetahui kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaan sehingga dapat dicarikan solusinya dengan cepat. Sedangkan evaluasi dilakukan pada waktu – waktu tertentu untuk melihat pencapaian yang telah diperoleh.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara bersama – sama antara masyarakat dengan para *stakeholders*. Hal ini dilakukan agar diketahui dengan pasti hambatan yang diperoleh masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pelaksanaan program. Selain itu juga hal ini dapat menstimulus partisipasi masyarakat. Pendapat – pendapat dan ide – ide dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam *redesign action plan*, agar *action plan* yang akan dilaksanakan benar – benar sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu juga, hal ini akan memudahkan masyarakat jika menemui hambatan, karena mereka sudah mengetahui tindakan apa yang harus diambil untuk menyelesaikan hambatan tersebut.

Kegiatan *monitoring* dilakukan dengan cara mengamati dengan langsung perkembangan yang telah diraih oleh masyarakat baik yang terlihat secara fisik maupun tidak. Untuk melihat perkembangan modal sosial masyarakat dapat dilakukan diskusi langsung dengan beberapa orang masyarakat yang terlibat

sekaligus untuk mengetahui hambatan – hambatan yang terjadi. Sehingga dapat dicarikan jalan keluarnya secara bersama dan lebih cepat.

Pelaksanaan evaluasi hampir sama dengan *monitoring*, dimana kegiatan ini dilakukan secara langsung. Diskusi yang dilakukan melibatkan seluruh *stakeholders* yang ada, sehingga diantara pihak – pihak ini dapat melakukan *brainstorming* mengenai permasalahan yang dihadapi dan bagaimana menyelesaikannya. Dalam kegiatan evaluasi, data – data kuantitatif dapat digunakan sebagai perbandingan apakah indikator – indikator yang diharapkan sudah tercapai atau belum.

Sama seperti proses perencanaan program yang menggunakan dua metode, kualitatif dan kuantitatif, proses *monitoring* dan evaluasi program pemberdayaan ini juga dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Dari metode kualitatif akan diperoleh pendapat, ide, pandangan masyarakat terhadap masalah yang terjadi dari masyarakat mengenai pelaksanaan program. Sedangkan dari metode kuantitatif berdasarkan indikator – indikator yang dinyatakan dalam angka akan diketahui pencapaian program apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aluko. M.A.O. (2004). Sustainable Development, Environmental Degradation and The Entrenchment of Poverty in The Niger Delta of Nigeria. 14 Maret 2009. <<http://www.krepublishers.com/02-Journals/JHE/JHE-15-0-000-000-2004-Web/JE-15-1-001-084-2004-Abst-PDF/JHE-15-1-063-068-2004-Aluko.pdf>>
- Auty, Richard M. (2003). Natural Resources, Development Models and Sustainable Development. *Discussion Paper Environmental Economics Programe*. International Institute for Environment and Development (IIED). 24 Juli 2009. <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=424082>
- Asian Development Bank (ADB). (2006). *Appendix I Poverty Definition Measurement and Analysis Monitoring ADB's Poverty Reduction Impact*. Poverty and Development Indicators Statistics Glossary. ADB Economics and Research Department. 11 Mei 2009. <www.adb.org/statistics/poverty.glossary.asp>
- Ayuni, Widya. (2006). *Analisis Persepsi Terhadap Pengelolaan Kawasan Pesisir Jakarta Utara (Kasus Hutan Angke Kapuk)*. Tesis MPKP. Depok
- Barros.,Fabio Granja., Augusto F. Mendonca., Jorge M. Nogueira. (2002). Poverty And Environmental Degradation: The Kuznets Environmental Curve for The Brazilian Case. *Texto Para Discussao No. 67*. Brazilia 20 de Dezembro de 2002. Universidade de Brasilia. 21 Maret 2009. 13.15. <<http://www.unb.br/face/eco/cpe/TD/267Dez02JNogueira.pdf>>
- Basri, Yuswar Zainul. (2007). *Bunga Rampai Pembangunan Ekonomi Pesisir*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti
- Care, Women's Empowerment. 31 Maret 2009. <http://www.care.org/newsroom/publications/whitepapers/woman_and_empowerment.pdf>
- Campbell, J., E. Whittingham., P. Townsley. Responding to Coastal Poverty: Should We be Doing Things Differently or Doing Different Things?. 19 Juni 2009. <http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/CABI_Publications/CA_CABI_Series_Zones/Hoanh_1845931076-Chapter21.pdf>

- Cullen, L.C. (2007). *Marine Resource Dependence, Resource Use Patterns and Identification of Economic Performance Criteria Within A Small Island Community: Kaledupa, Indonesia. Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy.* Department of Biological Sciences. University of Essex
- Departemen Kelautan dan Perikanan. (2006). *Buku Panduan Pengambilan Data Dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA) Volume 2.* Jakarta: Dirjen KP2K Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun
- Fauzi, Akhmad. (2004). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzi, Akhmad., Suzy Anna. (2002). Penilaian Depresiasi Sumberdaya Perikanan Sebagai Bahan Pertimbangan Penentuan Kebijakan Pembangunan Perikanan. *Jurnal Pesisir dan Lautan. Volume 4, No. 2, 2002.*
- Fu, Qianhong. (2004). Trust, Social Capital and Organization Effectiveness. Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University. 12 Juni 2009. 19:20. <<http://www.ipg.vt.edu/papers/qfumajorpaper.pdf>>
- Gupta., Kausik. (2008). *Sustainable Development and Poverty Issues.* The 1st WG Meeting. Manila, Phillipines, 31 July 2008.
- Himti,Ibrahim. (2008, April 25). *Wilayah Laut Indonesia.* 3 april 2001. <<http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/wawasan-nusantara/wilayah-laut-indonesia>>
- Hossain, M. Shahadat, M. Shamsuddoha. (2008). Improving Coastal Resource Management for Socio-economic Development of Rural Communities in Cox's Bazar: A Participatory Appraisal. *The Chittagong University Journal of Social Sciences.* Vol. XX, No. X (p. 1-20)
- Khoirunurrofik. (2009). *Analytical Hierarchy Process.* Paparan Pertemuan Pertama Kuliah Metode Pengambilan Keputusan MPKP FEUI
- Kumar., Dilip. (2005). *Community Empowerment for Fisheries Co-Management.* APFIC Regional Workshop on "Mainstreaming" Fisheries Co-Management in Asia Pacific. Siem Reap, Cambodia, 9 – 12 August 2005.

"Laut Yang Ditaburi Seribu Pulau". Kompas, 5 September 2008.
<<http://sitohanguntuktapanuli.wordpress.com/2008/09/06/betulkah-indonesia-negara-kepulauan/>>

Lewandowski, Joseph D. (2006). *Explaining Social Poverty: Human Development and Social Capital*. Institute of Political Science, Faculty of Arts Charles University Czech Republic. 21 Juni 2009.
<http://www.capabilityapproach.com/pubs/6_4_Lewandowski.pdf>

Martinsson, Maria Selvajah. (2008). Motherhood Survival Strategies and Empowering Experiences. 14 April 2009. 00:55
<<https://dspace.hh.se/dspace/bitstream/2082/1510/1/Duppsats.pdf>>

Nasreen, Mahbuba., Khondokar Mokaddem Hossain., Debasish Kumar Kundu. (2006). *The Interrelationship Between Poverty, Environment and Sustainable Development in Bangladesh: An Overview*

Nikijuluw, Victor P.H. (2001). *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Secara Terpadu*. Proyek pesisir, Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor (IPB). Hotel Permata, Bogor 29 Oktober 2001. 30 April 2009 10:37. <http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/1B%20populasi%20masyarakat%20pesisir.pdf>

Nunan, Fiona., Ursula Grant, Godvrey Bahiigwa, Telly Muramira, Pushkar Bajracharya, Diana Pritchard, Mariano Jose Vergas. (2002). Poverty and Environment: Measuring The Links, A Study Of Poverty-Environment Indicators With Case Studies from Nepal Nicaragua and Uganda. *Environment Policy Department Issue Paper No. 2. February 2002*. 21 Maret 2009 12:49.
<http://www.unpei.org/PDF/PEMonitoring/ug-Pov-Env-Measuring-Links-study-PE-Indicators.pdf>

OECD. (2001). *Poverty - Environment, Gender Linkages*. Off Print Of The DAC Journal 2001, Volume 2, No. 4. 29 Maret 2009.
<<http://www.oecd.org/dataoecd/47/46/1960506.pdf>>

Oduwaye, Dr Leke., Mrs Taibat Olaitan Lawanson. Poverty and Environmental Degradation In The Lagos Metropolis.

Ortiz, Isabel. *Poverty Reduction*.
<http://www2.gsb.columbia.edu/ipd/j_poverty.html>

"Poverty – Definition of Poverty" . 11 Mei 2009 21:55.
<<http://family.jrank.org/pages/1306/Poverty-Definition-Poverty.html>>

Sachs, Jeffrey. Reducing Poverty and Environmental Sustainability Millennium Development Goals: Why Is So Little Progress Being Made?. Global Forum on Oceans, Coast and Islands. 31 Juli 2009. 21:20.
<<http://globaloceans.org/globalconferences/2006/pdf/JeffreyDSachs.pdf>>

Satiman. (2002). *Analisis Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di DKI Jakarta. Tinjauan Kasus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara*. Tesis MPKP. Depok.

Satria, Tubagus Adi (2009). *Kajian Kemiskinan di Tingkat Keluarga Pada Masyarakat di Sekitar Kawasan PLTP Sarulla Tapamuli Utara (Suatu Studi Kasus Pada Beberapa Desa di Daerah Pangaloan*. Tesis MPKP Depok

Sors, Julie Catherine. (2001). Public Participation In Local Agenda 21: A Review of Traditional and Innovative Tools. Nota Di Lavoro 17. 2001. Fondazione Eni Enrico Mattei. Januari 2001. 31 Juli 2009. 21:05.
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=275134>

Suadnya I.W., Ross H, Chamala. *Empowering or Overpowering? Engaging Community for Sustainable Coastal Development in Lombok Indonesia. School of Natural Rural Systems Management. University of Queensland, Brisbane Australia and University of Mataram Indonesia*. 4 April 2009. 13:06.
<<http://www.engagingcommunities2005.org/abstracts/Auadnya-I-Wayan-final.pdf>>

Sulistyowati, Didit B. (2009). *Partisipatory Rural Appraisal*. Paparan Kuliah Pemberdayaan Berbasis Masyarakat, 11 Maret 2009.

Taupiqurahman. (2005). *Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Pembangunan Daerah Di Hulu Sungai Selatan*. Tesis MPKP. Depok.

"The Underlying Causes of Enviromental Degradation". 6 Mei 2009 22:18.
<<http://indiabudget.nic.in/es98-99/chap1104.pdf>>

Todaro, Michael P., Stephen C. Smith. (2003). *Economic Development*, (8th ed). Essex. Pearson: Addison Wesley

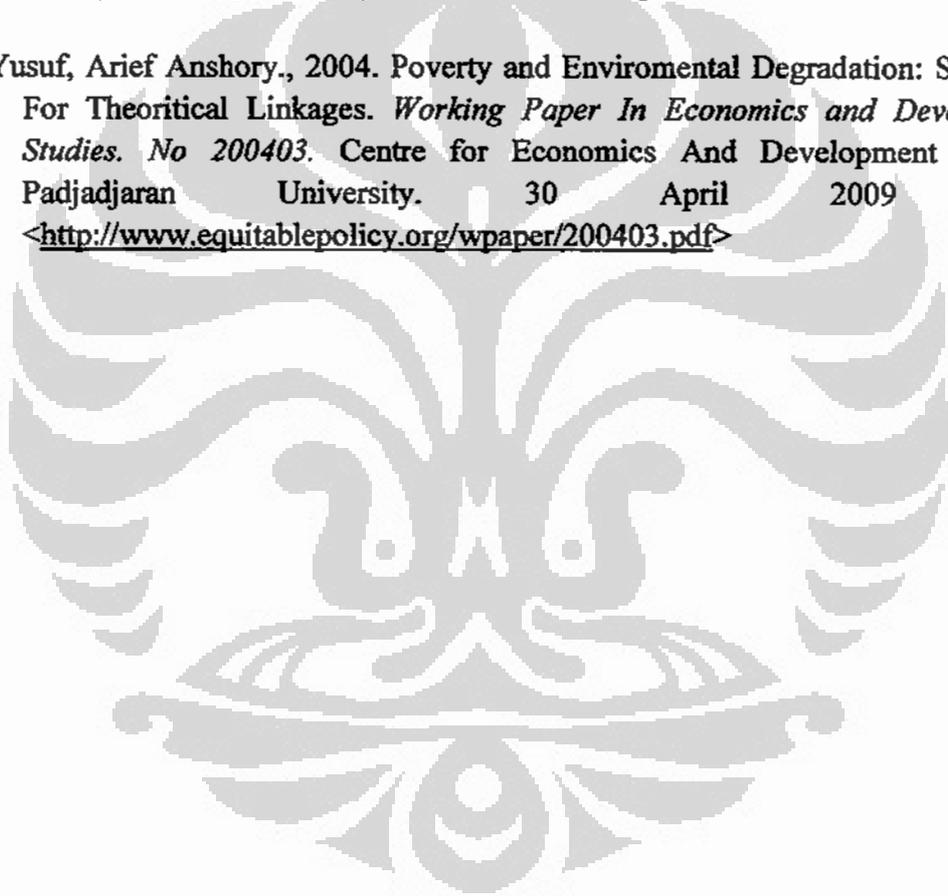
Travel Maps Batam. Sinarbaya Mandiracan CV.

Winpenny, J. T. (1991). *Values for The Environment A Guide to Economics Appraisal*. London. HMSO

Yulaswati, Vivi. (2009). *Konteks Organisasi Dalam Pengembangan Masyarakat*. Paparan Sesi Pertama Kuliah Perencanaan Berbasis Masyarakat MPKP FEUI

Yuniarsih, Ita. (2005). Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah: Tinjauan Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah P2MPD Di Kecamatan Seputih Mataram – Kabupaten Lampung Tengah. Tesis MPKP. Depok.

Yusuf, Arief Anshory., 2004. Poverty and Enviromental Degradation: Searching For Theoretical Linkages. *Working Paper In Economics and Development Studies. No 200403*. Centre for Economics And Development Studies, Padjadjaran University. 30 April 2009 1:48.
<<http://www.equitablepolicy.org/wpaper/200403.pdf>>



LAMPIRAN 1
KUESIONER AHP

Nama Responden/ Expert :

Nama Instansi dan Jabatan :

Nomor Telepon :

Berkaitan dengan tujuan utama tercapainya kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis lingkungan yang optimal dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah Tanjung Gundap, maka kriteria apa yang paling penting diantara dua pilihan indikator dibawah ini yang harus di prioritaskan?

- A. Partisipasi masyarakat yang tinggi
- B. Pengelolaan Program yang baik

Pilihan A	Pilihan B																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> </tr> </table>	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

- A. Partisipasi masyarakat yang tinggi
- C. Ketepatan sasaran penerima

Pilihan A	Pilihan C																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> </tr> </table>	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

- A. Partisipasi masyarakat yang tinggi
- D. Berkurangnya kerusakan lingkungan

Pilihan A	Pilihan D																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> </tr> </table>	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Lanjutan

- B. Pengelolaan Program yang baik
- C. Ketepatan sasaran penerima

Pilihan B									Pilihan C								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

- B. Pengelolaan Program yang baik
- D. Berkurangnya kerusakan lingkungan

Pilihan B									Pilihan D								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

- C. Ketepatan sasaran penerima
- D. Berkurangnya kerusakan lingkungan

Pilihan C									Pilihan D								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Untuk mencapai tujuan berdasarkan kriteria partisipasi masyarakat yang tinggi, maka apa yang lebih penting diantara dua aktor atau pelaku kebijakan yang harus diutamakan

- A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran
- B. Pemerintah Kota

Pilihan A									Pilihan B								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Lanjutan

A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran

C. Otorita Batam

Pilihan A															Pilihan C			
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran

D. Pendamping

Pilihan A															Pilihan D			
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran

E. Masyarakat/ LSM

Pilihan A															Pilihan E			
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran

F. Pihak swasta

Pilihan A															Pilihan F			
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

B. Pemerintah Kota

C. Otorita Batam

Pilihan B															Pilihan C			
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Lanjutan

B. Pemerintah Kota

D. Pendamping

Pilihan

B

Pilihan

D

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B. Pemerintah Kota

E. Masyarakat/LSM

Pilihan

B

Pilihan

E

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B. Pemerintah Kota

E. Pihak Swasta

Pilihan

B

Pilihan

F

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C. Otorita

D. Pendamping

Pilihan

C

Pilihan

D

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C. Otorita

E. Masyarakat/LSM

Pilihan

C

Pilihan

E

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lanjutan

- C. Otorita
- F. Pihak Swasta

Pilihan C															Pilihan F	
															F	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- D. Pendamping
- E. Masyarakat/LSM

Pilihan D															Pilihan E	
															E	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- D. Pendamping
- F. Pihak Swasta

Pilihan D															Pilihan F	
															F	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- E. Masyarakat/LSM
- F. Pihak Swasta

Pilihan E															Pilihan F	
															F	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Lanjutan

Untuk mencapai tujuan berdasarkan kriteria pengelolaan program yang baik, maka apa yang lebih penting antara dua aktor atau pelaku kebijakan yang harus diutamakan

- A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran
- B. Pemerintah Kota

Pilihan A														Pilihan B													
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9											

- A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran
- C. Otorita Batam

Pilihan A														Pilihan C													
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9											

- A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran
- D. Pendamping

Pilihan A														Pilihan D													
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9											

- A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran
- E. Masyarakat/ LSM

Pilihan A														Pilihan E													
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9											

Lanjutan

A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran

F. Pihak swasta

Pilihan A									Pilihan F								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

B. Pemerintah Kota

C. Otorita Batam

Pilihan B									Pilihan C								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

B. Pemerintah Kota

D. Pendamping

Pilihan B									Pilihan D								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

B. Pemerintah Kota

E. Masyarakat/LSM

Pilihan B									Pilihan E								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

B. Pemerintah Kota

E. Pihak Swasta

Pilihan B									Pilihan F								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Lanjutan

C. Otorita

D. Pendamping

Pilihan

C

Pilihan

D

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C. Otorita

E. Masyarakat/LSM

Pilihan

C

Pilihan

E

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C. Otorita

F. Pihak Swasta

Pilihan

C

Pilihan

F

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

D. Pendamping

E. Masyarakat/LSM

Pilihan

D

Pilihan

E

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

D. Pendamping

F. Pihak Swasta

Pilihan

D

Pilihan

F

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lanjutan

E. Masyarakat/ LSM

F. Pihak Swasta

Pilihan E														Pilihan F				
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Untuk mencapai tujuan berdasarkan kriteria ketepatan sasaran penerima, maka apa yang lebih penting antara dua aktor atau pelaku kebijakan yang harus diutamakan

A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran

B. Pemerintah Kota

Pilihan A														Pilihan B				
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran

C. Otorita Batam

Pilihan A														Pilihan C				
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran

D. Pendamping

Pilihan A														Pilihan D				
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Lanjutan

A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran

E. Masyarakat/ LSM

Pilihan A															Pilihan E			
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran

F. Pihak swasta

Pilihan A															Pilihan F			
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

B. Pemerintah Kota

C. Otorita Batam

Pilihan B															Pilihan C			
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

B. Pemerintah Kota

D. Pendamping

Pilihan B															Pilihan D			
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

B. Pemerintah Kota

E. Masyarakat/LSM

Pilihan B															Pilihan E			
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Lanjutan

B. Pemerintah Kota

E. Pihak Swasta

Pilihan B														Pilihan F		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

C. Otorita

D. Pendamping

Pilihan C														Pilihan D		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

C. Otorita

E. Masyarakat/LSM

Pilihan C														Pilihan E		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

C. Otorita

F. Pihak Swasta

Pilihan C														Pilihan F		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

D. Pendamping

E. Masyarakat/LSM

Pilihan D														Pilihan E		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

D. Pendamping

F. Pihak Swasta

Pilihan D									Pilihan F								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

E. Masyarakat/ LSM

F. Pihak Swasta

Pilihan E									Pilihan F								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Untuk mencapai tujuan berdasarkan kriteria berkurangnya kerusakan lingkungan, maka apa yang lebih penting antara dua aktor atau pelaku kebijakan yang harus diutamakan

A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran

B. Pemerintah Kota

Pilihan A									Pilihan B								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

A. Penduduk miskin/ Kelompok sasaran

C. Otorita Batam

Pilihan A									Pilihan C								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Lanjutan

A.Penduduk miskin/ Kelompok sasaran

D.Pendamping

Pilihan A														Pilihan D		
A															D	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

A.Penduduk miskin/ Kelompok sasaran

E.Masyarakat/ LSM

Pilihan A														Pilihan E		
A															E	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

A.Penduduk miskin/ Kelompok sasaran

F.Pihak swasta

Pilihan A														Pilihan F		
A															F	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

B.Pemerintah Kota

C.Otorita Batam

Pilihan B														Pilihan C		
B															C	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

B.Pemerintah Kota

D.Pendamping

Pilihan B														Pilihan D		
B															D	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Lanjutan

B. Pemerintah Kota

E. Masyarakat/LSM

Pilihan B														Pilihan E		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

B. Pemerintah Kota

F. Pihak Swasta

Pilihan B														Pilihan F		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

C. Otorita

D. Pendamping

Pilihan C														Pilihan D		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

C. Otorita

E. Masyarakat/LSM

Pilihan C														Pilihan E		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

C. Otorita

F. Pihak Swasta

Pilihan C														Pilihan F		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

D.Pendamping

E.Masyarakat/LSM

Pilihan D														Pilihan E		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

D. Pendamping

F. Pihak Swasta

Pilihan D														Pilihan F		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Masyarakat/ LSM

F. Pihak Swasta

Pilihan E														Pilihan F		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Untuk mencapai tujuan kebijakan dengan pelaku adalah penduduk miskin yang diberdayakan, maka apa yang lebih penting dari 2 pilihan kegiatan yang dilaksanakan

- A. Pembangunan saran dan Prasarana (Pengolahan limbah, Pengolahan sampah, Air Bersih, MCK, dll)
- B. Bantuan modal usaha ekonomi produktif di bidang lingkungan

Pilihan A														Pilihan B		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Lanjutan

Untuk mencapai tujuan kebijakan dengan pelaku adalah Pemerintah Kota maka apa yang lebih penting dari 2 pilihan kegiatan yang dilaksanakan

- A. Pembangunan saran dan Prasarana (Pengolahan limbah, Pengolahan sampah, Air Bersih, MCK, dll)
- B. Bantuan modal usaha ekonomi produktif di bidang lingkungan

Pilihan A										Pilihan B									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

Untuk mencapai tujuan kebijakan dengan pelaku adalah Otorita Batam maka apa yang lebih penting dari 2 pilihan kegiatan yang dilaksanakan

- A. Pembangunan saran dan Prasarana (Pengolahan limbah, Pengolahan sampah, Air Bersih, MCK, dll)
- B. Bantuan modal usaha ekonomi produktif di bidang lingkungan

Pilihan A										Pilihan B									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

Untuk mencapai tujuan kebijakan dengan pelaku adalah pendamping, maka apa yang lebih penting dari 2 pilihan kegiatan yang dilaksanakan

- A. Pembangunan saran dan Prasarana (Pengolahan limbah, Pengolahan sampah, Air Bersih, MCK, dll)
- B. Bantuan modal usaha ekonomi produktif di bidang lingkungan

Pilihan A										Pilihan B									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

Lanjutan

Untuk mencapai tujuan kebijakan dengan pelaku adalah masyarakat/LSM maka apa yang lebih penting dari 2 pilihan kegiatan yang dilaksanakan

- A. Pembangunan sarana dan Prasarana (Pengolahan limbah, Pengolahan sampah, Air Bersih, MCK, dll)
- B. Bantuan modal usaha ekonomi produktif di bidang lingkungan

Pilihan A														Pilihan B		
A														B		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Untuk mencapai tujuan kebijakan dengan pelaku adalah pihak swasta, maka apa yang lebih penting dari 2 pilihan kegiatan yang dilaksanakan

- A. Pembangunan sarana dan Prasarana (Pengolahan limbah, Pengolahan sampah, Air Bersih, MCK, dll)
- B. Bantuan modal usaha ekonomi produktif di bidang lingkungan

Pilihan A														Pilihan B		
A														B		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Untuk mencapai tujuan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maka apa yang lebih penting dari dua pilihan hasil yang diharapkan

- A. Berkurangnya kerusakan lingkungan
- B. Adanya mata pencaharian alternatif masyarakat

Pilihan A														Pilihan B		
A														B		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- A. Berkurangnya kerusakan lingkungan
- C. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Pilihan A														Pilihan C		
A														C		
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Lanjutan

- A. Berkurangnya kerusakan lingkungan
- D. Kemandirian masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif

Pilihan A														Pilihan D													
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9											

- B. Adanya mata pencaharian alternatif masyarakat
- C. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Pilihan B														Pilihan C													
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9											

- B. Adanya mata pencaharian alternatif masyarakat
- D. Kemandirian masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif

Pilihan B														Pilihan D													
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9											

- C. Meningkatnya pendapatan masyarakat
- D. Kemandirian masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif

Pilihan C														Pilihan D													
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9											

Lanjutan

Untuk mencapai tujuan dengan kegiatan pemberian modal usaha produktif maka apa yang lebih penting dari dua pilihan hasil yang diharapkan

A. Berkurangnya kerusakan lingkungan

B. Adanya mata pencaharian alternatif masyarakat

Pilihan A															Pilihan B	
A															B	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

A. Berkurangnya kerusakan lingkungan

C. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Pilihan A															Pilihan C	
A															C	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

A. Berkurangnya kerusakan lingkungan

D. Kemandirian masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif

Pilihan A															Pilihan D	
A															D	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

B. Adanya mata pencaharian alternatif masyarakat

C. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Pilihan B															Pilihan C	
B															C	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

B. Adanya mata pencaharian alternatif masyarakat

D. Kemandirian masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif

Lanjutan

Pilihan

B

Pilihan

D

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C.Meningkatnya pendapatan masyarakat

D.Kemandirian masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif

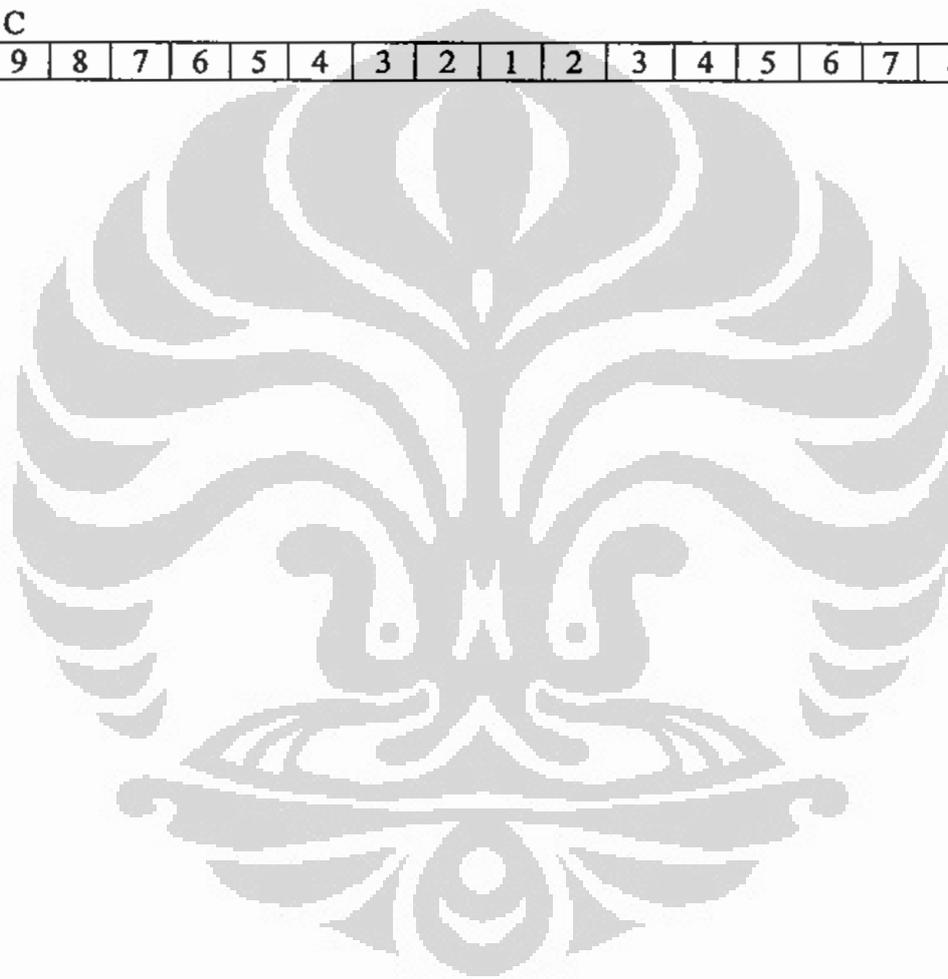
Pilihan

C

Pilihan

D

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



LAMPIRAN 2
KUESIONER
SURVEY KEMISKINAN KELUARGA DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN

Bapak/ Ibu yang terhormat

Kuesioner ini berisikan pertanyaan – pertanyaan, mengenai kondisi masyarakat, kemiskinan dan kerusakan lingkungan di wilayah Tanjung Gundap. Kuesioner ini nantinya akan menjadi salah satu bahan analisis, untuk Tesis yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan, Studi Kasus: Wilayah Tanjung Gundap. Diharapkan hasil penelitian dan Tesis ini dapat berguna bagi pembangunan masyarakat di wilayah Tanjung Gundap. Oleh karena Bapak/Ibu itu dimohon untuk mengisi kuesioner ini sebaik mungkin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Chairina Hanum

I. PENGENALAN TEMPAT			
1	Nomor Urut Responden		7 Penghasilan KRT Sebulan
2	Nama Responden		8 Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART)
3	Nama Kepala Rumah Tangga(KRT)		9 Banyaknya anak usia 0 - 4 tahun
4	Alamat Rumah Tangga		10 Banyaknya ART yang meninggal 1th terakhir
5	Suku Bangsa KRT		11 Banyaknya ART yang lahir 1th terakhir
6	Pekerjaan KRT		12 Pendidikan Terakhir KRT

II. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA									
No	Nama ART	Hubungan dengan KRT 1. Istri 2. Anak 3. Ortu 4. Lain - lain	Jenis Kelamin 1. Lk 2. Pr	Umur (Tahun)	Status Perkawinan 1. Menikah 2. Belum Menikah 3. Duda Cerai 4. Janda Cerai 5. Janda Meninggal 6. Duda Meninggal	Pendidikan		Pekerjaan	
						Partisipasi Sekolah	STTB Tertinggi Yang Dimiliki	Lapangan Usaha Seminggu Terakhir	Kegiatan Utama Seminggu Terakhir
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

III. KETERANGAN RUMAH					
1	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati 1. Milik Sendiri 2. Kontrak ortu/saudara 3. Sewa 4. Bebas Sewa	5. Dinas 6. Rumah milik 7. Lainnya	8	Penggunaan fasilitas air minum 1. Sendiri 2. Bersama	3. Umum 4. Tidak ada
			9	Bagaimana kualitas fisik air minum? 1. Keruh 2. Berwarna	3. Berasa 4. Berbau
□	Jenis atap terluas 1. Beton 2. Genteng 3. Seng	4. Asbes 5. Lainnya	10a	Penggunaan fasilitas tempat buang air besar 1. Sendiri 2. Bersama	3. Umum 4. Tidak ada
			10b	Jenis Kloset 1. Leher angsa 2. Cemplung 3. Plengsengan	4. Duduk 5. Tidak pakai
3	Jenis dinding terluas 1. Tembok 2. Kayu	3. Bambu 4. Lainnya	11	Sumber penerangan 1. Listrik/PLN 2. Listrik Non PLN 3. Generator/Genset	4. Lainnya
4	Jenis lantai terluas 1. Tanah 2. Semen 3. Kayu Jelek	4. Kayu Bagus 5. Marmer 6. Lainnya	12	Bila sumber penerangan listrik PLN berapa daya yang terpasang? 1. 450 Watt 2. 900 Watt 3. 1.300 Watt	4. 2.200 Watt 5. > 2.200 Watt 6. Tanpa meteran
5	Luas Lantai: m ²		13	Bahan bakar untuk memasak 1. Gas 2. Kayu Bakar	3. Minyak Tanah
6a	Sumber Air Minum 1. Air dalam Kemasan 2. Leding Terlindung 3. Pompa 4. Sumur Terlindung 5. Sumur Tidak Terlindung	6. Mata air terlindung 7. Mata air tidak terlindung 8. Air sungai 9. Air Hujan 10. Lainnya	14	Jika menggunakan gas, berapa berat gas yang dipakai 1. 3 Kg 2. 12 Kg	3. 45 Kg
6b	Jika R. 6a = 3 s.d 7 (pompa/sumur/mata air) jarak ke penampungan kotoran/tinja terdekat: 1. ≤ 10 m 2. > 10 m	3. Tidak tahu			
7	Cara memperoleh air minum 1. Berlangganan 2. Membeli eceran	3. Tidak Membeli			

V KETERANGAN RESPONDEN PENERIMA KKB			
1	Apakah rumah tangga responden memperoleh kartu kompensasi BBM atau BLT?	1. Ya	2. Tidak
2	Uang SLT/BLT yang diterima digunakan untuk?		
	a. Bayar utang	1. Ya	2. Tidak
	b. Beli beras/ makanan	1. Ya	2. Tidak
	c. Beli minyak tanah	1. Ya	2. Tidak
	d. Beli bensin	1. Ya	2. Tidak
	e. Biaya pendidikan	1. Ya	2. Tidak
	f. Biaya kesehatan	1. Ya	2. Tidak
	g. Tambahan modal usaha	1. Ya	2. Tidak
	h. Lainnya	sebutkan	

VI. BANTUAN LAINNYA			
A. Bidang Pendidikan			
1	Apakah ada ART yang menerima dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS)	1. Ya	2. Tidak
2	Apakah ada ART yang menerima dana pendidikan dari Program Keluarga Harapan	1. Ya	2. Tidak
B. Bidang Kesehatan			
3	Apakah ada ART yang menerima dana kesehatan dari Program Keluarga Harapan	1. Ya	2. Tidak
4	Apakah ada ART yang memiliki kartu Askes Miskin (Askeskin)	1. Ya	2. Tidak
5	Apakah kepala rumah tangga pernah meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa/turah untuk keperluan rawat inap selama 12 bulan terakhir?	1. Ya	2. Tidak
6	Apakah ada ART yang memiliki kartu sehat	1. Ya	2. Tidak

VII. PENCEMARAN LINGKUNGAN			
1	Pencemaran lingkungan hidup setahun terakhir		
	Jenis Pencemaran	1. Ada 2. Tidak	Sumber Pencemaran 1. Rumah Tangga 2. Pabrik 3. Kapal asing 4. Lainnya
	1. Air 2. Tanah 3. Udara 4. Suara/bising		Upaya Pengaduan 1. Ada 2. Tidak ada
2	Apakah ada dampak negatif dari adanya PGN		1. Ya 2. Tidak
3	Apakah ada dampak negatif dari berdirinya perumahan disekitar Tanjung Gundap		1. Ya 2. Tidak
4	Dampak Pencemaran yang paling terasa a. Kesehatan b. Perekonomian c. Penurunan kualitas lingkungan		
5	Jarak rumah dengan sumber pencemaran:		m
6	Bagaimana upaya Pemko/Otorita dalam penanganan pencemaran/perusakan Lingkungan 1. Membiarkannya saja 2. Memberi Peringatan 3. Memberi sanksi 4. Menghentikan Aktivitas		5. Merealokasi Aktivitas 6. Membawa kasus ke Pengadilan 7. Lain - lain
7	Bagaimana upaya pelaku dalam penanganan pencemaran/perusakan Lingkungan 1. Membiarkannya saja 2. Mengubah cara berproduksi 3. Membuat IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)		4. Reboisasi 5. Merealokasi Aktivitas
8	Bagaimana upaya pelaku dalam pencegahan pencemaran perusakan lingkungan 1. Tidak melakukan tindakan apapun 2. Membuat IPAL		3. Reboisasi 4. Lainnya
9	Bagaimana upaya masyarakat Tj. Gundap dalam penanganan pencemaran/perusakan 1. Membiarkannya saja 2. Membuat tempat pengolahan limbah		3. Reboisasi 4. Lainnya

VIII. Pengelolaan Lingkungan Oleh masyarakat	
1 Tempat buang sampah sebagian besar Keluarga 1. Tempat sampah kemudian diangkut 2. Dalam lubang/dibakar	3. Sungai 4. Lainnya
2 Apakah tersedia tempat pembuangan sampah diluar rumah? 1. Ya 2. Tidak	
3 Jika ya, apa jenis tempat pengumpulan/ penampungan 1. Tempat sampah tertutup 2. Tempat sampah terbuka	6 Dimana tempat penampungan air limbah dari kamar mandi/ tempat cuci 1. Penampungan tertutup di pekarangan 2. Penampungan terbuka di pekarangan c. Penampungan diluar pekarangan 4. Tanpa penampungan 5. Langsung got/sungai/laut
4 Apakah tersedia tempat penampungan sampah basah organik di dalam rumah? 1. Ya 2. Tidak	7 Bagaimana saluran pembuangan air limbah dari kamar mandi/dapur/ tempat cuci 1. Saluran terbuka 2. Saluran tertutup 3. Tanpa saluran
5 Bila Ya, apa jenis tempat pengumpulan/ penampungan sampah rumah tangga tersebut 1. Tempat sampah tertutup 2. Tempat sampah terbuka	

IX. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
1 Apakah program pemberdayaan masyarakat yang ada saat ini dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat 1. Ya 2. Tidak	
2 Apakah anda sudah merasa puas dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada saat ini 1. Ya 2. Tidak	
3 Program pemberdayaan apa yang paling diharapkan oleh masyarakat 1. Pelatihan keterampilan bagi perempuan 2. Pemberian modal kerja 3. Adanya sistem pengolahan limbah/ sampah yang dikelola oleh masyarakat 4. Membuat atau memperbaiki fasilitas umum yang rusak 5. Lainnya, sebutkan	
4 Apakah program pemberdayaan masyarakat yang mengharuskan anda untuk bekerja secara kelompok dirasa cocok bagi anda? 1. Ya 2. Tidak	

Catatan:

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA UMUM

Pedoman Wawancara Umum

- 1. Administrasi Wilayah**
- 2. Struktur Pemerintahan**
- 3. Sejarah Perkembangan Desa**
- 4. Kondisi Geografis wilayah**
 - a. potensi SDA,
 - b. Kondisi Sarana dan Prasarana (jalan, pendidikan, kesehatan, pasar, pelabuhan, permukiman, kantor Pemerintah dll.)
 - c. Tipikal permukiman masyarakat
 - d. Aksesibilitas masyarakat ke pasar
 - e. Aksesibilitas masyarakat ke kota
 - f. Hambatan geografis yang dihadapi masyarakat
- 6. Kondisi Demografis**
 - a. Masyarakat (kesukuan, nilai-nilai budaya, tradisi yang dominan)
 - b. Hubungan antar suku-suku bangsa yang ada
 - c. Migran yang ada
 - d. Hubungan suku bangsa setempat dengan kaum pendatang
 - e. Cara masyarakat dalam menangani konflik yang terjadi baik dalam satu suku maupun antar suku
 - f. Pendidikan secara kuantitas maupun kualitas (jumlah murid yang bersekolah, rata-rata pendidikan masyarakat, kualitas para guru, kualitas pengajaran di sekolah, persepsi masyarakat mengenai pendidikan, dll)
 - g. Kesehatan (persepsi masyarakat mengenai kesehatan, pengobatan tradisonal/modern, penyakit yang sering diderita oleh masyarakat, jenis-jenis pelayanan)
 - h. Peran wanita dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi serta dalam suku dan keluarga, pola penggunaan waktu, dll.
- 7. Hambatan/masalah yang berkembang dalam hal kondisi demografis (ditanyakan bersamaan dengan pertanyaan terkait kondisi demografis (poin 6)**

Lanjutan

8. Kondisi Sarana dan Prasarana. Penjelasan mengenai sarana dan prasarana yang ada, sudah memadai atau belum, bila sudah apakah penggunaannya sudah optimal. Pada saat pembuatan sarana dan prasarana, seberapa jauh keterlibatan masyarakat, sesuai atau tidak dengan kebutuhan masyarakat. Seberapa besar sense of belonging yang dimiliki masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana yang ada (ikut memelihara, ikut menjaga kebersihan, dll)
9. Hambatan/masalah yang berkembang dalam hal kondisi sarana prasarana (ditanyakan bersamaan dengan pertanyaan terkait kondisi demografis (poin 6)
10. Mata pencaharian Masyarakat
11. Kendala dalam memperoleh mata pencaharian. Migrasi terjadi atau tidak. Alasan dan Tujuan migrasi.
12. Peran Kelembagaan di Masyarakat. Lembaga manakah yang paling berpengaruh? Pengaruh dalam hal apa?
13. Keberadaan PGN, kendala dan harapan.
14. Apakah ada dampak negative yang dirasakan oleh masyarakat Tanjung Gundap dengan keberadaan PGN?
15. Keberadaan perumahan, kendala dan harapan.
16. Apa dampak dari adanya pencemaran yang terjadi di perairan Tanjung Gundap terhadap kehidupan masyarakat Tanjung Gundap, baik di bidang perekonomian maupun di bidang lain.
17. Harapan masyarakat ke depan. Bila buruk, masih bisakah berubah?

Pedoman Wawancara Khusus sesuai Peran *Stakeholders*.

- **Dinamika yang berkembang di masyarakat terkait peran *stakeholders***
- **Seberapa besar peran *stakeholders*?**
- **Sejauh mana Peran *Stakeholders* sesuai dengan kepentingannya.**
- **Seberapa besar sense of belonging yang dimiliki *stakeholders* terhadap Sarana dan Prasarana yang ada**
- **Dampak modernisasi terhadap peran *stakeholders*, lingkungan masyarakat di sekelilingnya**
- **Relasi antara *stakeholders* dan masyarakat**
- **migrasi di mata narasumber.**
- **Peran Kelembagaan di Masyarakat. Lembaga manakah yang paling berpengaruh? Pengaruh dalam hal apa?**
- **Peran kelembagaan *stakeholders* seberapa berpengaruh dimasyarakat?**
- **Kemauan *stakeholders* untuk berubah/ mengubah masyarakat?**
- **Kondisi Kesejahteraan Penduduk saat ini di mata *stakeholders* terkait**
 - Pendidikan secara kuantitas maupun kualitas
 - Kesehatan.
 - Ekonomi, mata pencaharian.
 - Perempuan
 - Kultur
- **Hambatan/masalah yang berkembang dalam pemenuhan kesejahteraan penduduk.**
- **Keberadaan PGN, kendala dan harapan.**
- **Harapan *stakeholders* ke depan. Bila buruk, masih bisakah berubah?**

LAMPIRAN 4 HASIL AHP

11/22/2009 4:10:14 PM

Page 1 of 1

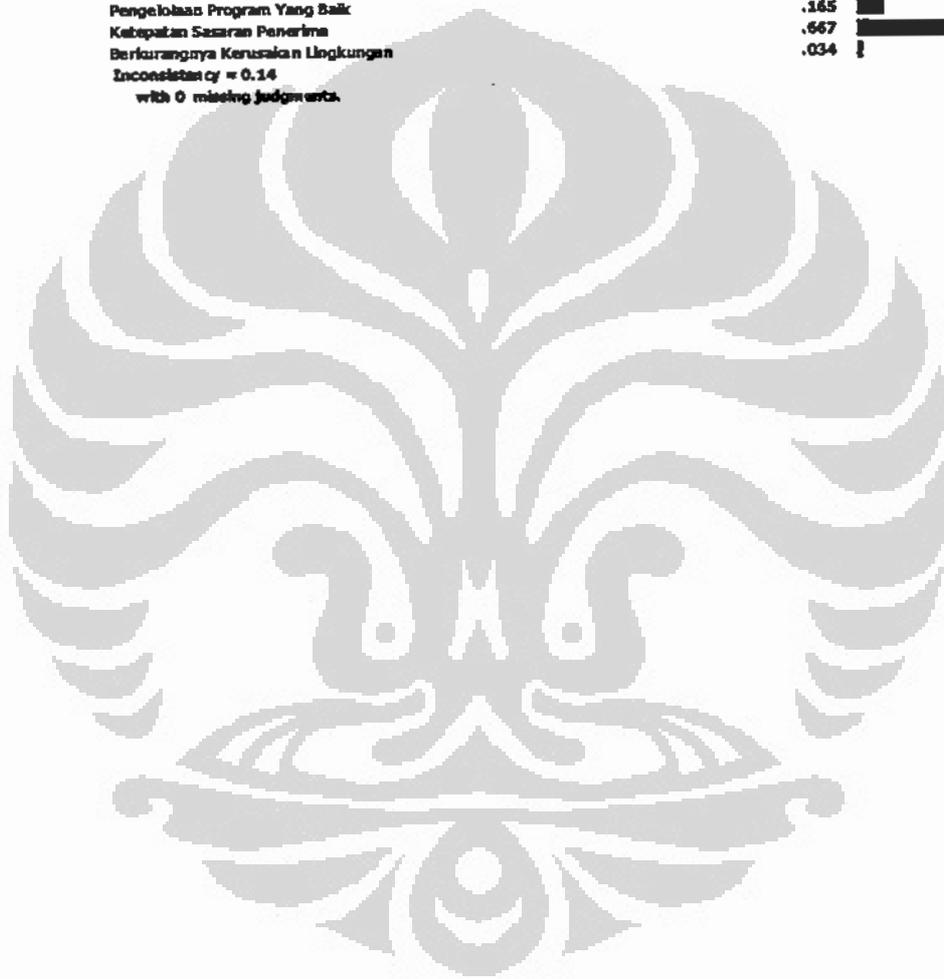
Model Name: tesisocobacoba

Priorities with respect to:
Goal: Tercapainya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan

Facilitator

Partisipasi Masyarakat Yang Tinggi
Pengelolaan Program Yang Baik
Kebijakan Sasaran Penerima
Berkurangnya Kerusakan Lingkungan
Inconsistency = 0.14
with 0 missing judgments.

.135	■
.165	■
.667	■
.034	■



chairina hanum

Model Name: tesiscobacoba

Priorities with respect to:

P2

Goak Tercapainya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pantai Berbasis Lingkungan

Partisipasi Masyarakat Yang Tinggi
Pengelolaan Program Yang Baik
Ketepatan Sasaran Penerima
Berlangsungnya Kerusakan Lingkungan
Inconsistency = 0.17
with 0 missing judgments.



chairina hanum

Model Name: tesiscobacoba

Priorities with respect to:

P3

Goal: Tercapainya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan

Partisipasi Masyarakat Yang Tinggi
Pengelolaan Program Yang Baik
Kebijakan Sasaran Penerima
Berlaurangnya Kerusakan Lingkungan
Inconsistency = 0.28
with 0 missing judgments.

.312	██████████
.094	██
.540	██████████
.054	█



chairina hanum

Model Name: tesiscobacoba

Priorities with respect to:

P4

Goal: Tercapainya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan

Partisipasi Masyarakat Yang Tinggi
Pengelolaan Program Yang Baik
Kebijakan Sasaran Penerima
Berlangsungnya Kerjasama Lingkungan
Inconsistency = 0.19
with 0 missing judgments.



chairina hanum

Model Name: tesiscobacoba

Priorities with respect to:

PS

Goal: Tercapainya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan

Partisipasi Masyarakat Yang Tinggi
Pengelolaan Program Yang Baik
Kecepatan Seseorang Penerima
Berlangsungnya Kerusakan Lingkungan
Inconsistency = 0.48
with 0 misaleg judgments.



chairina hanum

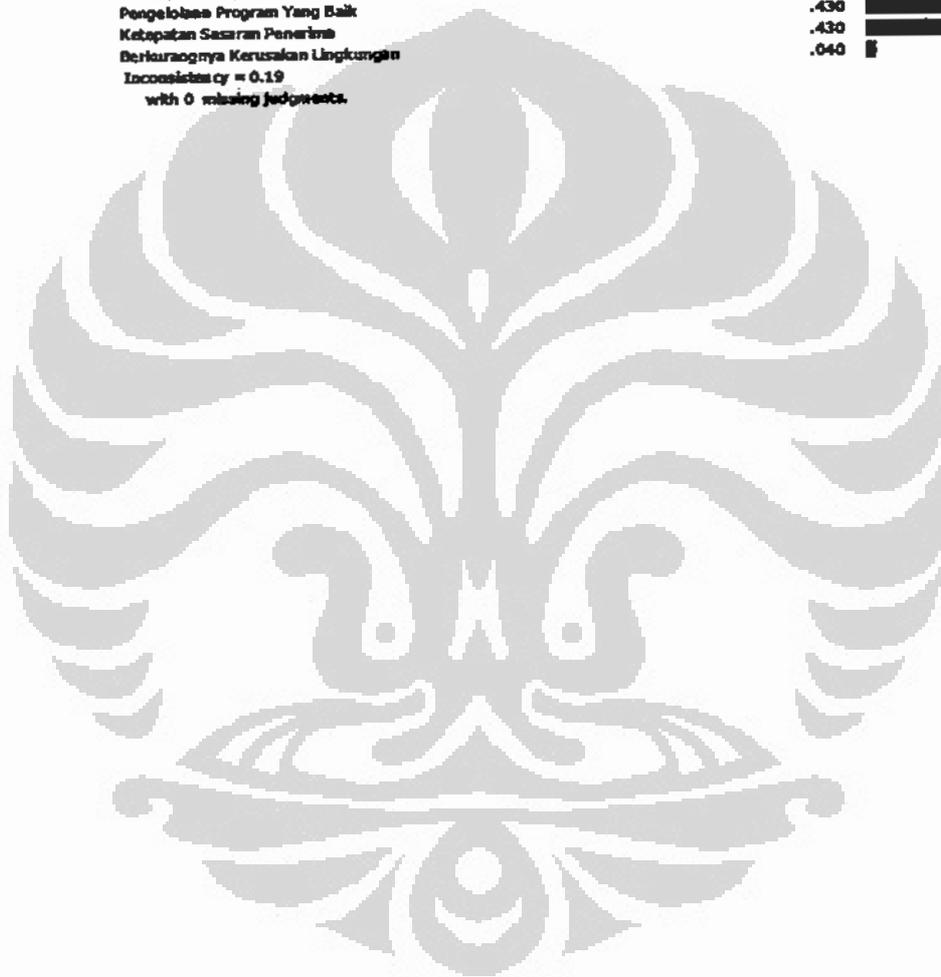
Model Name: tesiscobacoba

Priorities with respect to:
Goal: Tercapainya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan

P6

Partisipasi Masyarakat Yang Tinggi	.099	■
Pengelolaan Program Yang Baik	.430	■
Ketepatan Sasaran Penerima	.430	■
Berlaurangnya Kerusakan Lingkungan	.040	■

Inconsistency = 0.19
with 0 missing judgments.



chairina hanum

Model Name: tesiscobacoba

Priorities with respect to:

P7

Goal: Tercapainya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan

Partisipasi Masyarakat Yang Tinggi
Pengelolaan Program Yang Baik
Ketepatan Sasaran Penerima
Berkurangnya Kerosakan Lingkungan
Inconsistency = 0.21
with 0 missing judgments.



chairna hanum

Model Name: tesiscobacoba4

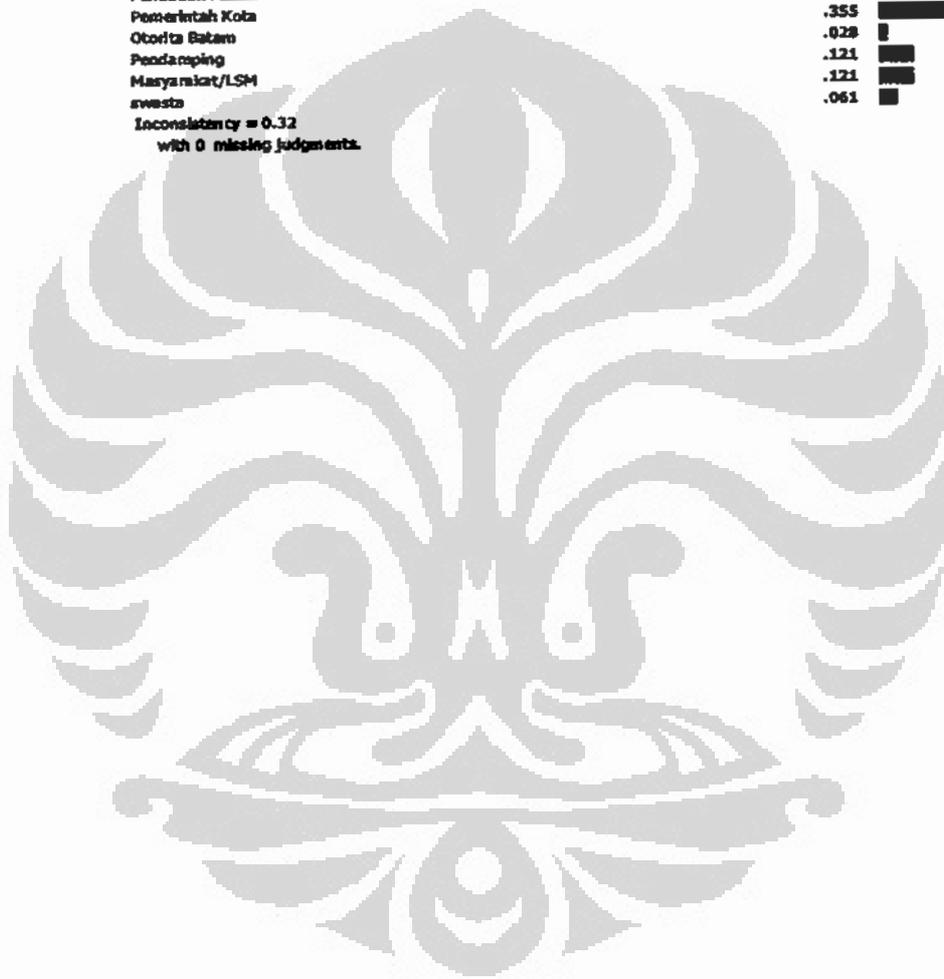
Priorities with respect to:

Goal: Tercapainya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pedalar Berbasis Lingkungan

Facilitator

Penduduk Miskin	.313	██████████
Pemerintah Kota	.355	██████████
Otorita Batam	.028	█
Pendamping	.121	████
Masyarakat/LSM	.121	████
investor	.061	█

Inconsistency = 0.32
with 0 missing judgments.

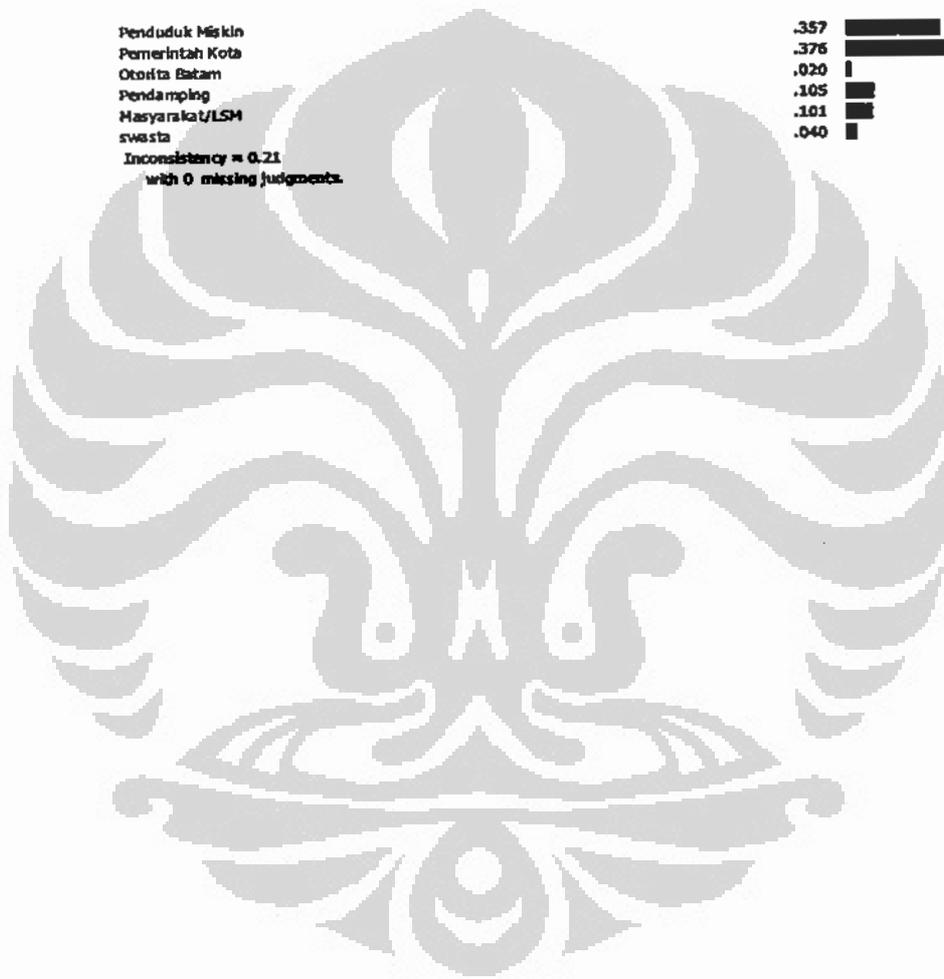


chairina hanum

Model Name: tesiscobacoba4

Priorities with respect to:
Goal: Tercapainya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pedalar Berbasis Lingkungan

P2



chairina hanum

Model Name: tesiscobacoba4

Priorities with respect to:
Goal: Tercapainya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan

P4

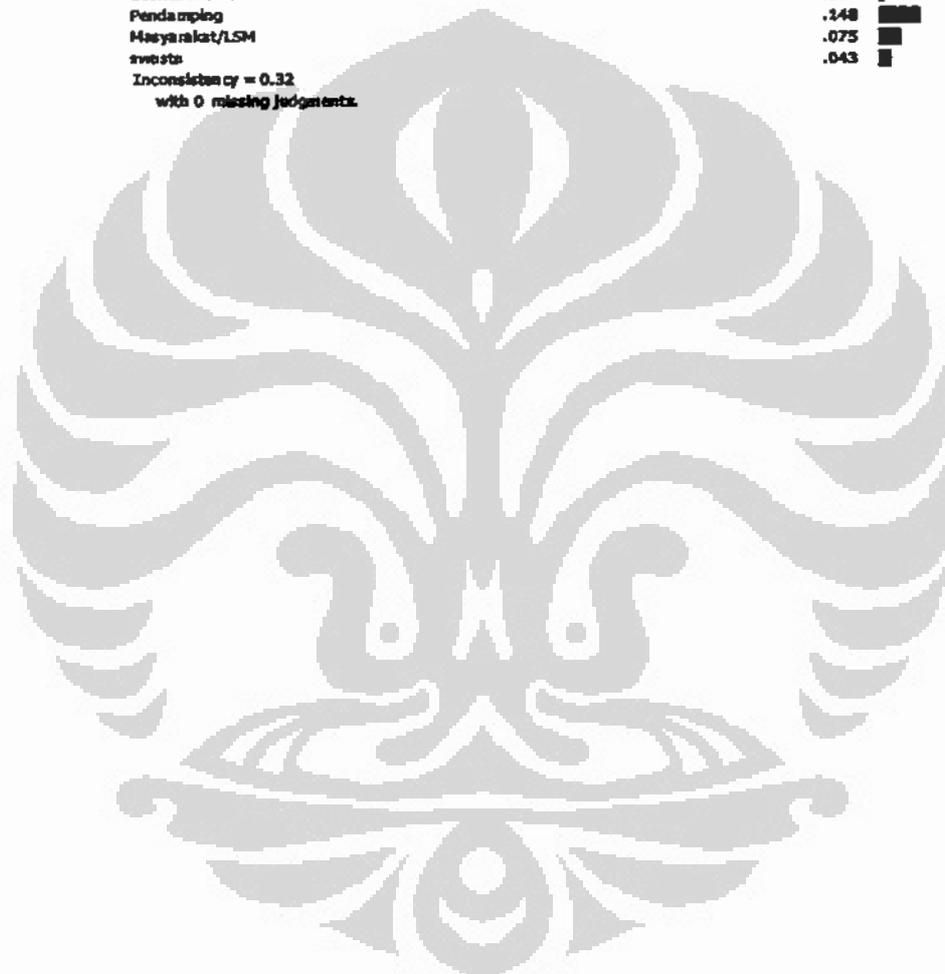


chairina hanum

Model Name: tesiscobacoba4

Priorities with respect to:
Goal: Tercapainya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan

PS



chairina hanum

Model Name: tesiscobacoba4

Priorities with respect to:
Goal: Tercapainya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pantai Berbasis Lingkungan

P6

Penduduk Miskin	.488	██████████
Pemerintah Kota	.259	██████
Otorita Batam	.026	
Pondasi ping	.129	██
Masyarakat/LSM	.073	█
swasta	.025	

Inconsistency = 0.28
with 0 missing judgments.

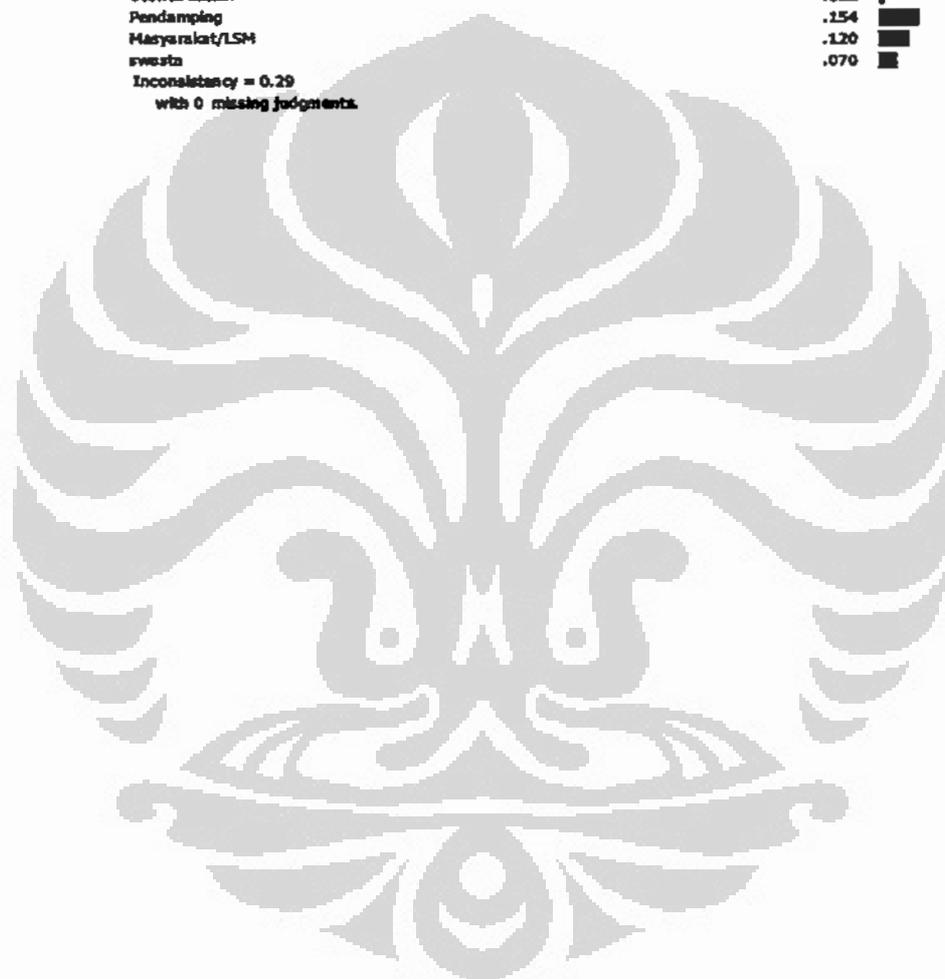


chairina hanum

Model Name: tesisacobacoba4

Priorities with respect to:
 Goal: Tercapainya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasis Lingkungan

P7



chairina hanum

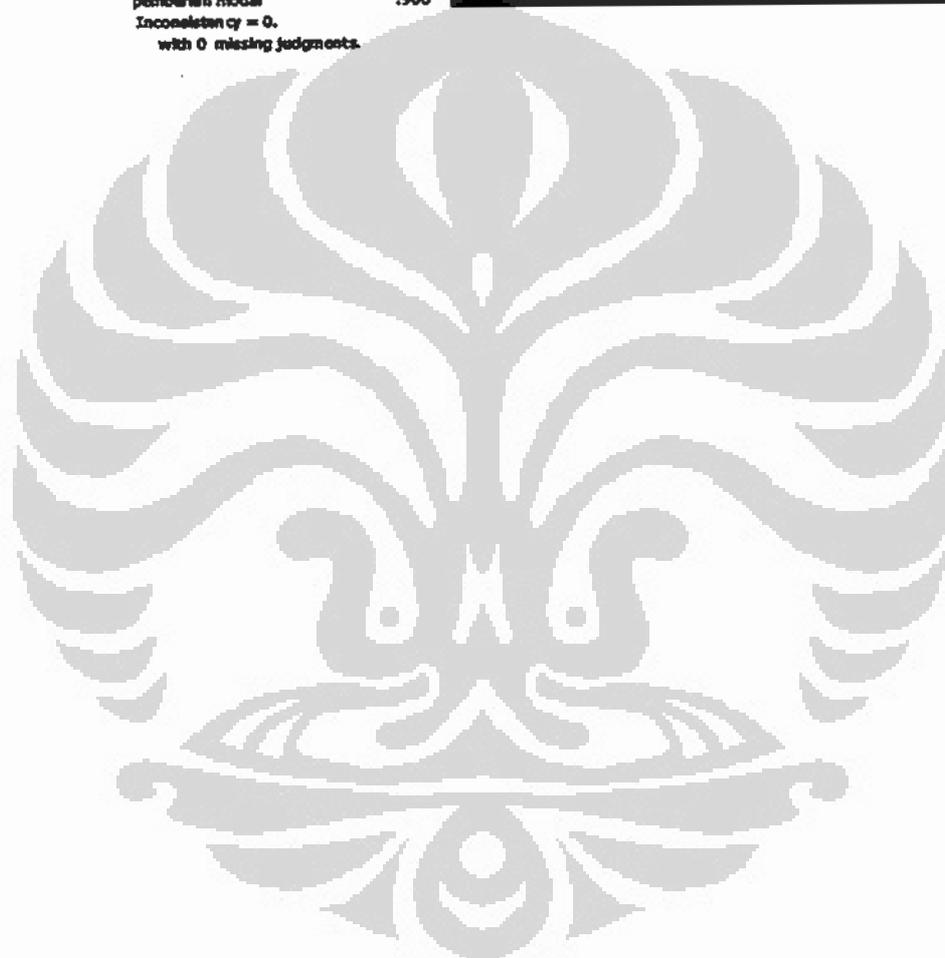
Model Name: tesisnyoba8

Priorities with respect to:
Goal: tercapainya kebijakan

P2

pembangunan sarana	.100	██████████
pemberian modal	.900	██████████

Incompletion = 0.
with 0 missing judgments.



chairina hanum

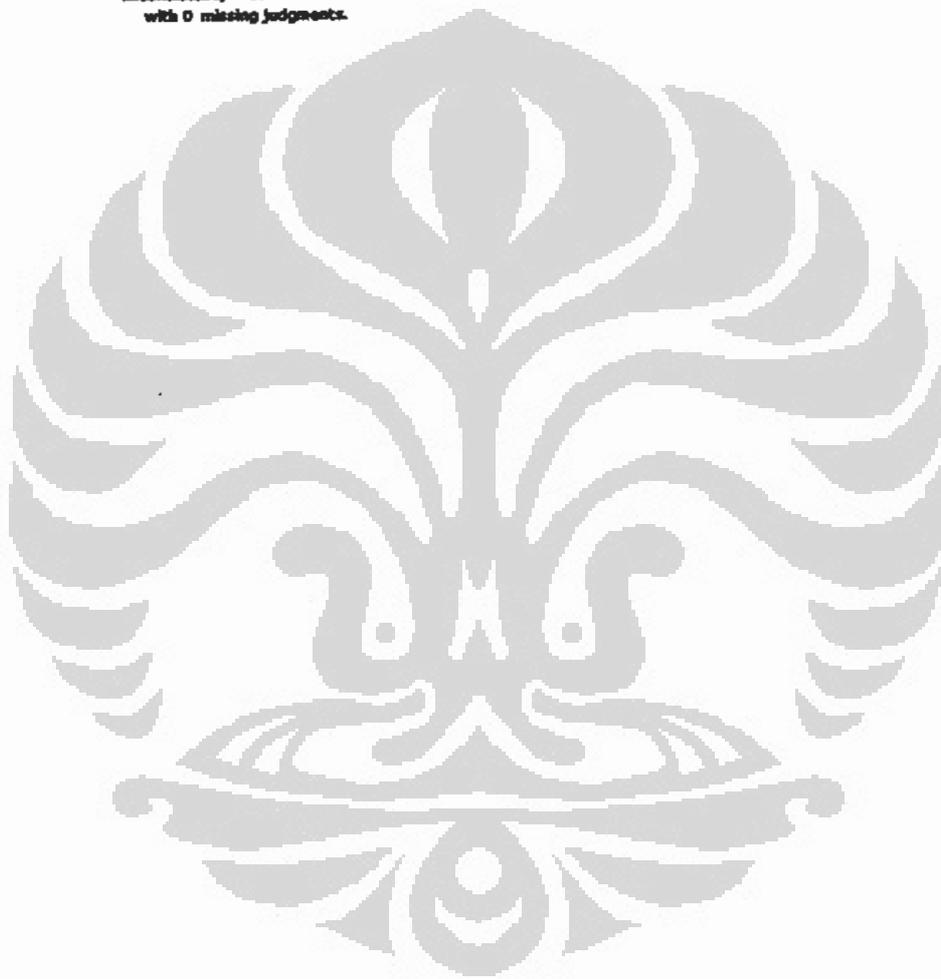
Model Name: tesisnyoba8

Priorities with respect to:
Goal: tercapainya kebijakan

P3

pembangunan sarana
pembelian modal
Inconsistency = 0.
with 0 missing judgments.

.167
.833



chairina hanum

Model Name: tesisnyoba8

Priorities with respect to:
Goal: tercapainya kebijakan

14

pembangunan sarana .111
pemberian modal .889
Inconsistency = 0.
with 0 missing judgments.



chairina hanum

Model Name: tesisnyoba8

Priorities with respect to:
Goal: tercapainya kebijakan

PS

pembangunan sarana .889

pemberian modal .111

Inconsistency = 0,
with 0 missing judgments.



chairina hanum

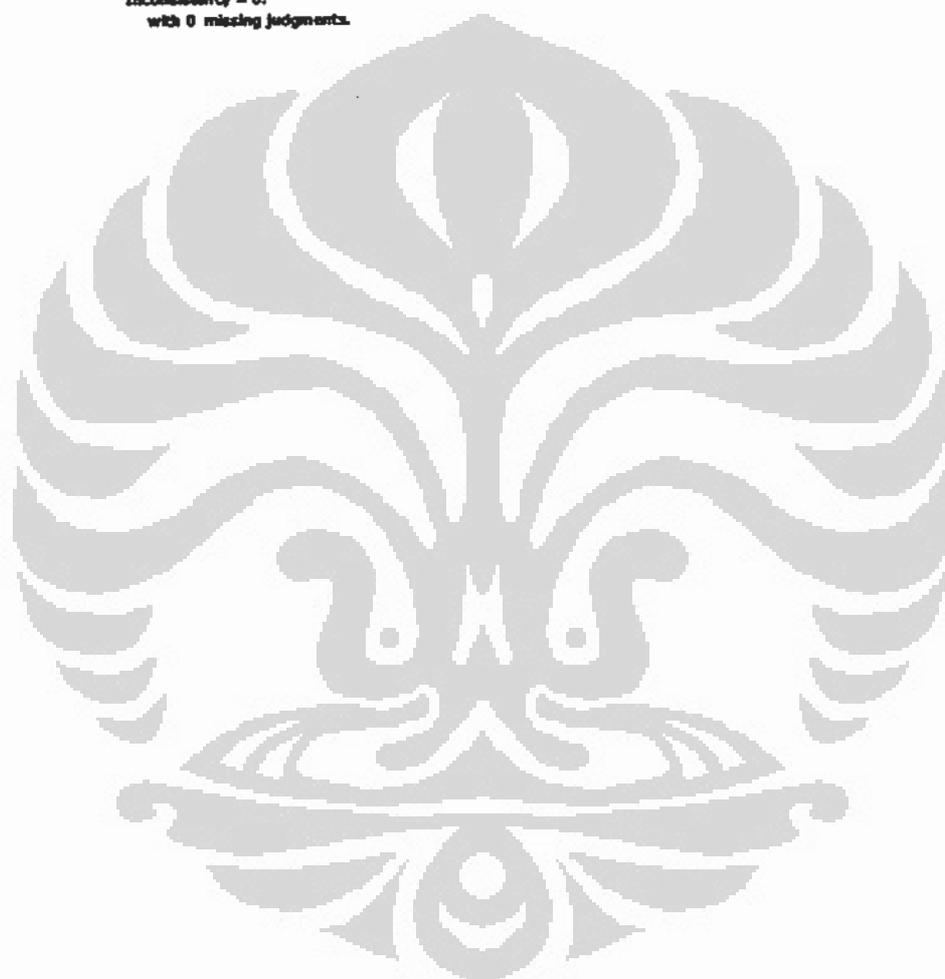
Model Name: tesisnyoba8

Priorities with respect to:
Goal: tercapainya kebijakan

P6

pembangunan sarana
pembertaan modal
Inconsistency = 0,
with 0 missing judgments.

.889
.111



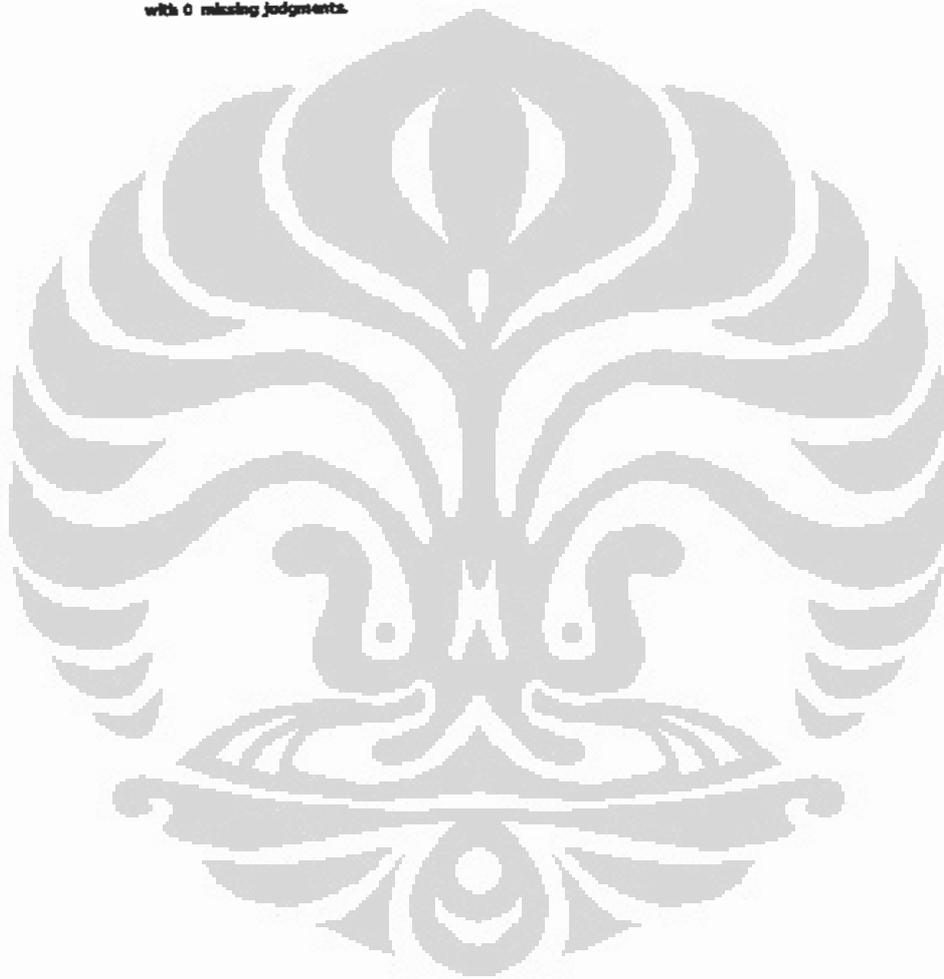
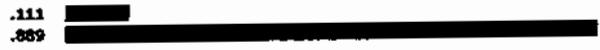
chairina hanum

Model Name: tesisnyoba8

Priorities with respect to:
Goal: tercapainya kebijakan

P7

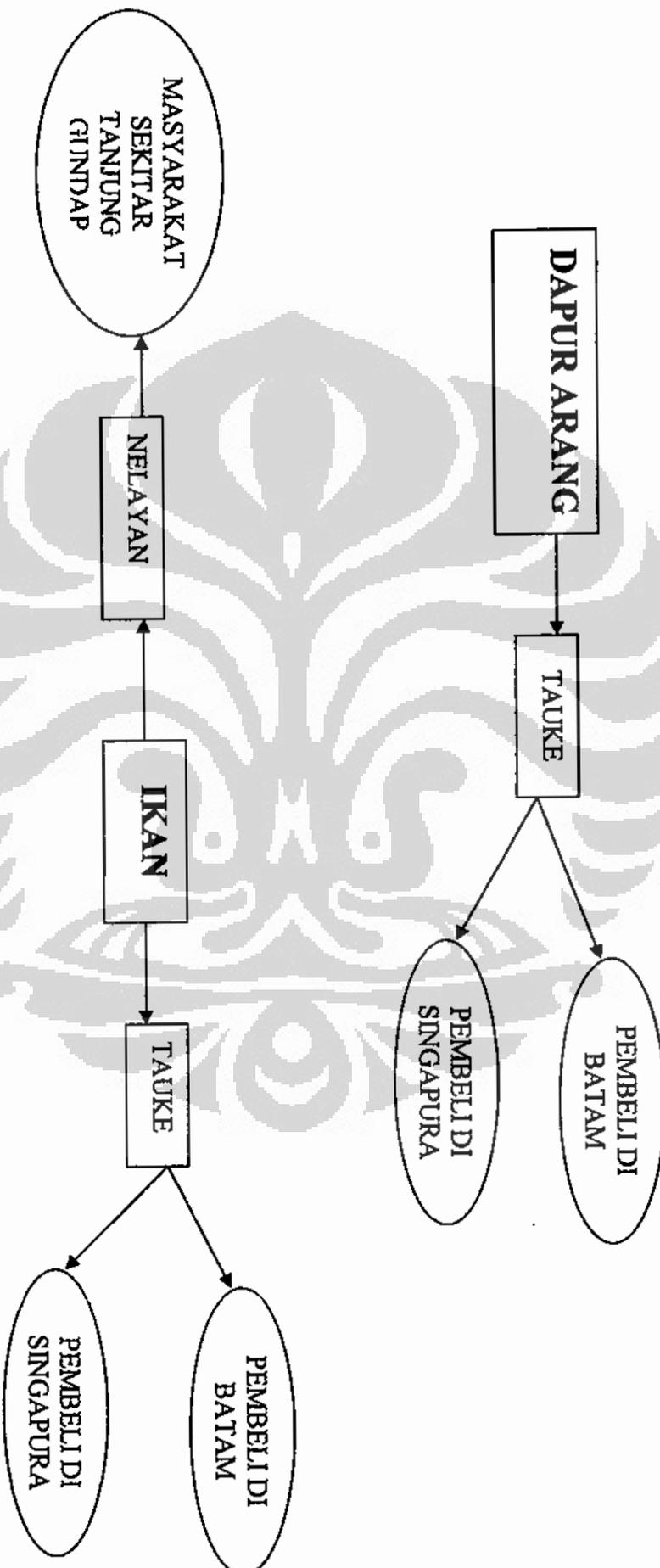
pembangunan sarana .111
pembelian modal .889
Inconsistency = 0.
with 0 missing judgments.



chairina hanum

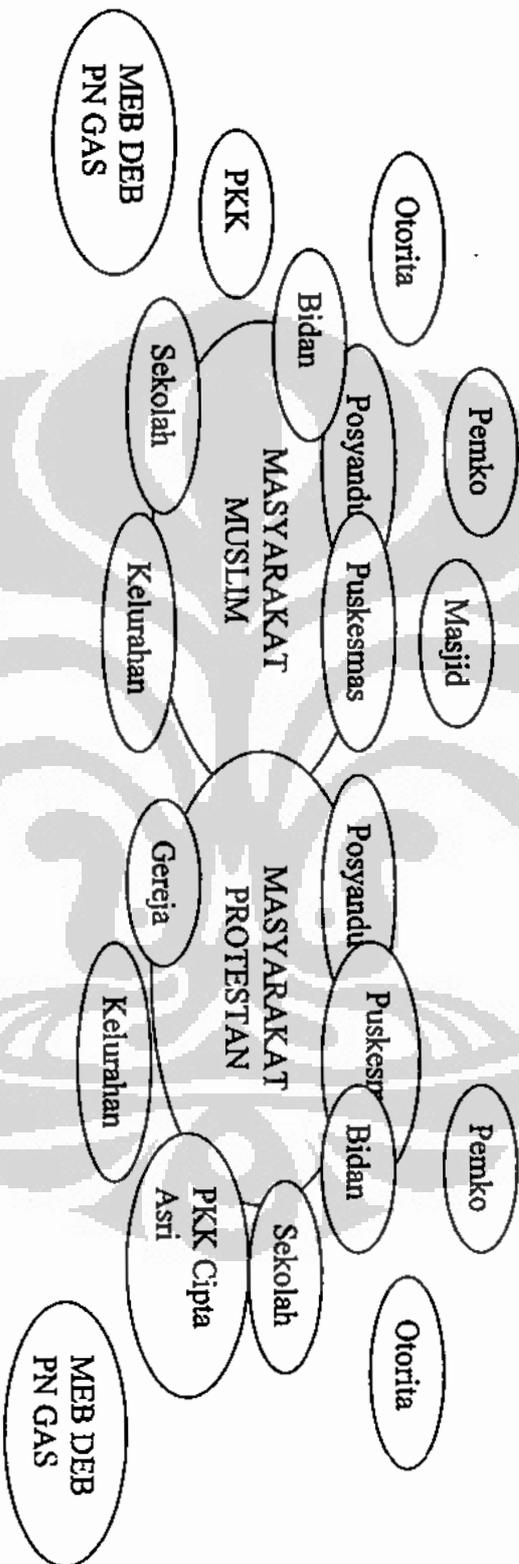
LAMPIRAN 5

Diagram Alur Masyarakat Tanjung Gundap

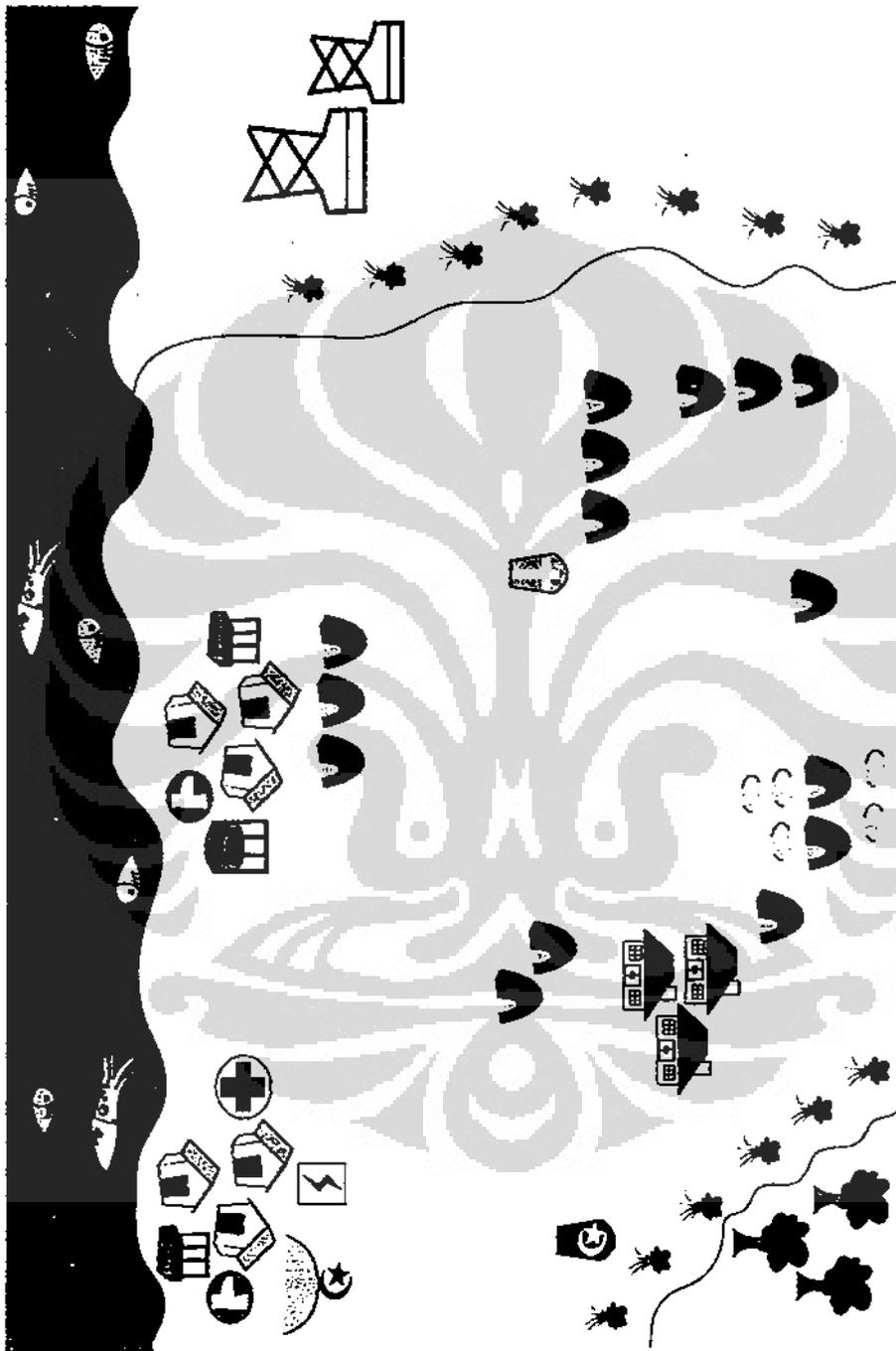


LAMPIRAN 6

Diagram Yenn Kelmbagaan Masyarakat Di Tanjung Gundap



LAMPIRAN 8
PETA WILAYAH TANJUNG GUNDAP



LAMPIRAN 9

Tabel Bobot Prioritas Hasil Analisis AHP

Bobot Prioritas Lokal dan Global per Responden/ Experts Serta Rata - Rata Ukur								
Properti Sintesis Per Elemen dari Setiap Responden/Ekspert								
Prioritas	Dinsos	Bappeda	PMP-UKM	Lurah	Kesra	Swasta	KP2K	Rata - Rata Ukur
Goal Terhadap	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal
Partisipasi	0.135	0.443	0.312	0.146	0.084	0.099	0.033	0.17886
Pengelolaan	0.165	0.088	0.094	0.035	0.031	0.43	0.433	0.18229
Sasaran	0.667	0.034	0.54	0.683	0.235	0.43	0.093	0.38314
Lingkungan Baik	0.034	0.435	0.054	0.135	0.65	0.04	0.442	0.25571
Inconsistency	0.12	0.17	0.28	0.19	0.48	0.19	0.21	0.23429
PARTISIPASI	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal
Penduduk Miskin	0.118	0.247	0.184	0.022	0.293	0.248	0.102	0.17343
Pemerintah	0.384	0.112	0.54	0.353	0.276	0.233	0.274	0.31029
Otorita	0.019	0.015	0.109	0.385	0.079	0.037	0.132	0.11086
Pendamping	0.055	0.53	0.027	0.024	0.027	0.065	0.036	0.10914
LSM	0.063	0.065	0.071	0.146	0.298	0.234	0.013	0.12714
Swasta	0.361	0.031	0.069	0.071	0.027	0.183	0.449	0.17014
Inconsistency	0.21	0.47	0.12	0.2	0.1	0.08	0.25	0.20429
PENGELOLAAN	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal
Penduduk Miskin	0.021	0.095	0.029	0.015	0.384	0.563	0.826	0.27614
Pemerintah	0.065	0.543	0.026	0.463	0.384	0.103	0.463	0.29243
Otorita	0.367	0.019	0.507	0.228	0.088	0.029	0.277	0.21643
Pendamping	0.055	0.185	0.092	0.05	0.026	0.099	0.118	0.08929
LSM	0.116	0.139	0.237	0.194	0.094	0.098	0.013	0.12729
Swasta	0.377	0.019	0.109	0.051	0.025	0.108	0.104	0.11329
Inconsistency	0.22	0.26	0.16	0.17	0.13	0.07	0.58	0.22714
SASARAN	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal
Penduduk Miskin	0.078	0.457	0.389	0.393	0.184	0.564	0.501	0.36657
Pemerintah	0.079	0.236	0.262	0.112	0.474	0.102	0.199	0.20914
Otorita	0.022	0.019	0.218	0.319	0.028	0.027	0.052	0.09786
Pendamping	0.022	0.202	0.036	0.111	0.13	0.102	0.028	0.09014
LSM	0.528	0.067	0.069	0.044	0.155	0.102	0.023	0.14114
Swasta	0.271	0.019	0.026	0.02	0.029	0.102	0.197	0.09486
Inconsistency	0.24	0.25	0.19	0.22	0.16	0.07	0.22	0.19286
LKNGN BAIK	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal
Penduduk Miskin	0.195	0.429	0.509	0.245	0.17	0.347	0.451	0.335143
Pemerintah	0.358	0.24	0.251	0.418	0.171	0.356	0.153	0.27814286
Otorita	0.023	0.023	0.018	0.046	0.304	0.14	0.023	0.08242857
Pendamping	0.2	0.026	0.063	0.058	0.053	0.084	0.157	0.09157143

Lanjutan

Bobot Prioritas Lokal dan Global per Responden/ Experts Serta Rata - Rata Ukur								
Properti Sintesis Per Elemen dari Setiap Responden/Ekspert								
Prioritas	Dinsos	Bappeda	PMP-UKM	Lurah	Kesra	Swasta	KP2K	Rata - Rata
Goal Terhadap	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Ukur
LSM	0.053	0.083	0.127	0.202	0.156	0.026	0.149	0.11371429
Swasta	0.171	0.199	0.033	0.031	0.146	0.047	0.067	0.09914286
Inconsistency	0.25	0.22	0.38	0.17	0.16	0.26	0.21	0.23571429
PNDDK MISKIN	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal
Sarana	0.889	0.1	0.143	0.889	0.111	0.111	0.111	0.33628571
Modal	0.111	0.9	0.857	0.111	0.889	0.889	0.899	0.665143
Inconsistency	0	0	0	0	0	0	0	0
PEMERINTAH	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal
Sarana	0.125	0.1	0.857	0.5061	0.875	0.5	0.1	0.43758571
Modal	0.875	0.9	0.143	0.5	0.125	0.506	0.9	0.564143
Inconsistency	0	0	0	0	0	0	0	0
OTORITA	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal
Sarana	0.889	0.1	0.167	0.889	0.143	0.5	0.1	0.39828571
Modal	0.111	0.9	0.833	0.111	0.857	0.506	0.9	0.602571
Inconsistency	0	0	0	0	0	0	0	0
PENDAMPING	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal
Sarana	0.125	0.1	0.833	0.875	0.875	0.5	0.1	0.48685714
Modal	0.875	0.9	0.167	0.125	0.125	0.506	0.9	0.514
Inconsistency	0	0	0	0	0	0	0	0
LSM	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal
Sarana	0.125	0.1	0.833	0.889	0.875	0.5	0.111	0.49042857
Modal	0.875	0.9	0.167	0.111	0.125	0.506	0.889	0.510429
Inconsistency	0	0	0	0	0	0	0	0
SWASTA	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal
Sarana	0	0.9	0.857	0.875	0.889	0.5	0.189	0.601429
Modal	0	0.1	0.143	0.125	0.111	0.506	0.111	0.15657143
Inconsistency	0	0	0	0	0	0	0	0
SARANA	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal
Krskn Lkngn Krg	0.054	0.029	0.556	0.035	0.666	0.039	0.026	0.20071429
Mata Pencaharian	0.01	0.13	0.109	0.435	0.147	0.113	0.074	0.14542857
Pendapatan Naik	0.757	0.711	0.055	0.432	0.039	0.424	0.235	0.379
Kemandirian	0.179	0.13	0.281	0.098	0.147	0.424	0.665	0.27485714
Inconsistency	0.26	0.25	0.14	0.2	0.19	0.19	0.44	0.23857143
MODAL	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal
Krskn Lkngn Krg	0.059	0.055	0.043	0.062	0.063	0.06	0.083	0.06071429
Mata Pencaharian	0.441	0.439	0.324	0.441	0.447	0.435	0.247	0.39628571
Pendapatan Naik	0.4441	0.453	0.314	0.441	0.432	0.45	0.683	0.459586

Lanjutan

Bobot Prioritas Lokal dan Global per Responden/ Experts Serta Rata - Rata Ukur								
Properti Sintesis Per Elemen dari Setiap Responden/Ekspert								
Prioritas	Dinsos	Bappeda	PMP-UKM	Lurah	Kesra	Swasta	KP2K	Rata - Rata Ukur
Goal Terhadap	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Ukur
Kemandirian	0.059	0.054	0.319	0.056	0.058	0.055	0.033	0.09057143
Inconsistency	0.0017	0.000161	0.00063	0.00007	0.00067	0.00067	0.42	0.06055443
Overall Inconsistency	0.2	0.27	0.22	0.2	0.29	0.12	0.3	0.22857143
Level 2: Kriteria								
Partisipasi	0.135	0.443	0.312	0.146	0.084	0.099	0.033	0.17885714
Pengelolaan	0.165	0.088	0.094	0.035	0.031	0.43	0.433	0.18228571
Sasaran	0.667	0.034	0.54	0.683	0.235	0.43	0.093	0.383143
Lingkungan Baik	0.034	0.435	0.054	0.135	0.65	0.04	0.442	0.25571429
Goal Terhadap	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Ukur
Level 3: Aktor								
Penduduk Miskin	0.07	0.32	0.298	0.306	0.19	0.524	0.26	0.281143
Pemerintah	0.127	0.21	0.326	0.21	0.258	0.126	0.295	0.22171429
Otorita	0.078	0.019	0.2	0.289	0.213	0.034	0.139	0.13885714
Pendamping	0.038	0.269	0.04	0.089	0.068	0.096	0.124	0.10342857
LSM	0.381	0.079	0.089	0.086	0.166	0.11	0.074	0.14071429
Swasta	0.298	0.103	0.048	0.03	0.105	0.11	0.108	0.11457143
Level 4: Kegiatan								
Sarana	0.4	0.132	0.478	0.462	0.746	0.372	0.161	0.393
Modal	0.6	0.868	0.522	0.538	0.254	0.628	0.839	0.607
Level 5: Hasil								
Krskn Lkngn Krg	0.059	0.053	0.096	0.11	0.038	0.041	0.077	0.06771429
Mata Pencaharian	0.412	0.419	0.302	0.423	0.436	0.147	0.228	0.33814286
Pendapatan Naik	0.463	0.47	0.287	0.402	0.433	0.427	0.595	0.439571
Kemandirian	0.067	0.059	0.315	0.065	0.093	0.385	0.1	0.15485714
Partisipasi	0.135	0.443	0.312	0.146	0.084	0.099	0.033	0.17885714
Pengelolaan	0.165	0.088	0.094	0.035	0.031	0.43	0.433	0.18228571
Sasaran	0.667	0.034	0.54	0.683	0.235	0.43	0.093	0.383143
Lingkungan Baik	0.034	0.435	0.054	0.135	0.65	0.04	0.442	0.25571429

Keterangan Elemen dan Notasi Tabel:

Partisipasi : Partisipasi dari masyarakat

Pengelolaan : Pengelolaan Program yang Baik

Sasaran : Ketepatan sasaran penerima program

Lkngn Yang Baik	: Berkurangnya kerusakan lingkungan
Pnddk Miskin	: Penduduk Miskin atau Kelompok Sasaran
Pemerintah	: Pemerintah Kota Batam
Otorita	: Otorita Batam
Pendamping	: Konsultan Pendamping dan Fasilitator
LSM	: Masyarakat umum dan LSM yang ikut memantau Dan Mengawasi Pelaksanaan Program
Swasta	: PT. MEB dan DEB Batam
Sarana	: Bantuan berupa sarana yang mendukung Masyarakat Di Tanjung Gundap
Modal	: Bantuan Modal Usaha Produktif
Krskn Lkgn Krg	: Berkurangnya Kerusakan Lingkungan di Wilayah Tanjung Gundap
Mata Pencaharian	: Adanya mata pencaharian alternatif bagi Masyarakat Tanjung Gundap
Pendapatan Naik	: Naiknya Pendapatan Masyarakat
Kemandirian	: Kemandirian masyarakat pesisir dalam kegiatan Ekonomi produktif desa

Keterangan Para *Expert*:

1. *Expert A*: Pemerintah yaitu Saniman, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam
2. *Expert B*: Pemerintah yaitu Desman Wardi, Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kelautan BAPPEDA Kota Batam
3. *Expert C*: Pemerintah yaitu Dedy Suryadi, Dinas PMP-KUKM Kota Batam
4. *Expert D*: Wakil Masyarakat yaitu, Drs. Tukijan, Kepala Lurah Kelurahan Tembesi
5. *Expert E*: Pemerintah yaitu, M.Shair, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Batam
6. *Expert F*: Swasta yaitu, Wahidin, HSE Koordinator PT. MEB/DEB Batam